



2025

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

TIM PENYUSUN

PENGARAH:

Ahmad Aris

PENYUSUN:

1. Saynuddin
2. Gusrizal
3. Mochammad Rizki Rohmatullah
4. Rizki Amalia Putri
5. Hibatulloh Mahdi

KONTRIBUTOR:

1. Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KATA PENGANTAR



Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya perbaikan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 berdasarkan hasil reviu Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 ini memperhatikan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025, yang mencakup 7 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Laporan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), serta pelaksanaan anggaran periode tahun 2025. Selain itu, Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, dan alat pemacu peningkatan kinerja Direktorat P3K. Kinerja Direktorat P3K diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Selamat dan syukur tidak lupa kami sampaikan atas kinerja yang telah diraih Direktorat P3K di Tahun 2025 dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,52% (Kategori "**Istimewa**", range nilai 110% – 120%). Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap individu yang telah menjadi bagian dari keberhasilan ini. Prestasi ini mencerminkan kerjasama dan kolaborasi yang harmonis di lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Semangat kolaborasi ini akan terus ditingkatkan di masa mendatang guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan individu, sehingga dapat mendukung kinerja Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB V Pelaporan Kinerja, Pasal 22 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim yang merupakan laporan kinerja setiap triwulan dan laporan kinerja tahunan yang merupakan laporan kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Pasal 23 poin (b) menyebutkan bahwa laporan kinerja interim ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada atasan langsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak triwulan berakhir.

Secara umum capaian kinerja IKU dan IKM telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU maupun IKM mengalami sedikit kendala baik administrasi maupun teknis. Namun demikian, Direktorat P3K tetap berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi tersebut serta berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melaksanakan program pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, mendayagunakan pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan kualitas dukungan manajemen internal serta melaksanakan program atau kegiatan terkait lainnya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat P3K pada periode selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Direktorat P3K secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance*, dan *clean government*.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan di periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 18 Februari 2026

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



D. Ahneng Aris, S.P., M.Si.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

PULAU SAMALONA
Sumber: Explore.makassar.go.id

(EXECUTIVE SUMMARY)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025



Pengarah
Ahmad Aris

Penyusun
Saynuddin
Gusrizal
Mochammad Rizki. R
Rizki Amalia Putri
Hibatulloh Mahdi

Kontributor

- Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Desain & Layout
Rizki Amalia Putri



www.pulaukecil.id



[@direktorat.p3k](https://www.instagram.com/direktorat.p3k)



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Ringkasan Eksekutif

Menyajikan ringkasan pertanggungjawaban Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

Pengukuran kinerja tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani 31 Desember 2025, dengan **7 Sasaran Kegiatan** yang mencakup **15 Indikator Kinerja**—yaitu **9 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)**.

Capaian kinerja diukur melalui perbandingan target (rencana) dan realisasi pada setiap Sasaran Kegiatan, dengan pencatatan melalui aplikasi Balanced Scorecard (BSC) Kementerian Kelautan dan Perikanan di www.kinerjaku.kkp.go.id. **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,52% (Kategori “Istimewa”, range nilai 110% - 120%)**. Direktorat P3K **menempatkan perolehan NKO tertinggi nomor 3** di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan tahun 2025.



7

Sasaran Kegiatan



15

Indikator Kinerja



112,52% NKO

IKU

IKM

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	nilai 110 - 120	Istimewa
	nilai 90 - <110	Baik
	nilai 70 - <90	Cukup
	nilai 50 - <70	Kurang
	nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaku (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Capaian 2025	% Capaian Kinerjaku 2025
1	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	93,09	120
2	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	63,2	114,91
		3	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	2	120
3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	74,06	120
		5	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	6	120
4	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	4	120
		7	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	47	100
5	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	2	100
6	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	164	107,89
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	87	120
		11	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	3	100
		12	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	83,36	104,2
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	94,3	117,88
		14	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	100	100
		15	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	98,4	120

Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Tahun 2025 berdasarkan balanced scorecard (BSC) dari Kementerian Kelautan Perikanan
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Direktorat P3K Tahun 2025



Anggaran Direktorat P3K, 2025

Awalnya bernomenklatur Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp61.117.553.000 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 24 Januari 2025. Lalu, revisi jumlah pagu anggaran berdasarkan **PK 31 Desember 2025** menjadi sebesar **Rp54.321.352.000** seiring perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K). **Pagu efektif menjadi Rp43.745.913.000**

Anggaran dan Realisasi berdasarkan Pagu Efektif



Sumberdaya Manusia (SDM) Direktorat P3K, 2025

Kepegawaian Direktorat P3K dengan total 74 pegawai (49 laki-laki, 25 perempuan). Komposisi pegawai mencakup:

- PNS: 44 orang
- PPPK: 10 orang
- PPPK paruh waktu: 7 orang
- PJLP: 13 orang

JABATAN	
PELP Ahli Utama	1
PELP Ahli Madya	8
PELP Ahli Muda	3
PELP Ahli Pertama	4
APJK Ahli Madya	4
APJK Ahli Muda	5
APJK Ahli Pertama	5
Surveyor Ahli Muda	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	1
Arsiparis Ahli Pertama	1
Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Pengadministrasi Perkantoran	2
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	8
Penata Layanan Operasional	7
Operator Layanan Operasional	4
Pengelola Umum Operasional	3

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Rincian Anggaran Kegiatan berdasarkan Pagu Efektif, 2025

Kode	Nama Kegiatan	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran Berdasarkan Pagu Efektif (Rp)
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	23.140.397.000	20.321.232.686	87,82	41.586.302.496
FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	929.302.000	903.363.182	97,21	25.938.818
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.475.567.000	17.242.800.121	98,67	232.766.879
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL	2.200.647.000	2.194.097.719	99,7	6.549.281
Total		43.745.913.000	40.661.493.708	92,95	3.084.419.292

Tantangan yang Dihadapi

- **Efisiensi anggaran:** Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
- **Perubahan nomenklatur:** Dari Direktorat P4K menjadi Direktorat P3K (Permen KP Nomor 2/2025, Pasal 80).
- **Penataan pegawai:** Kepmen KP Nomor 96/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 (ralat pemindahan PNS lingkup Ditjen PK).
- **Revisi PK:** Terdapat 2 kali perubahan revisi Perjanjian Kinerja pada tahun 2025. Revisi pertama ditandatangani pada 30 Juni 2025, dan revisi kedua ditandatangani pada 31 Desember 2025.
- **Renstra** Ditjen Pengelolaan Kelautan 2025-2029 belum ditetapkan.

Langkah-Langkah Strategis Hadapi Tantangan



Penguatan pembahasan strategis

Direktorat P3K menyelenggarakan pembahasan bersama dan intensif mengenai isu strategis, termasuk anggaran dan arah rencana strategis 2025-2029, dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan program dan dukungan kebijakan.

Program Laut Sehat Bebas Sampah (Sebasah)

Langkah konkret untuk mengelola sampah laut dari hulu ke hilir secara terpadu.



Pemantauan kegiatan prioritas

Direktorat P3K melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung tujuan dan sasaran Kementerian, untuk memastikan program kunci tetap berjalan dan berkontribusi terhadap capaian indikator kinerja.

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN)

Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur
Upaya konkret pemerintah mewujudkan swasembada garam di tahun 2027.



Penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan

Koordinasi aktif dengan para pemangku kepentingan lain untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja. Melalui komunikasi dan sinergi lintas unit dan lembaga.

Kawasan Mangrove Nasional

Program rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove untuk mengatasi kerusakan, melindungi pesisir, menyimpan karbon biru, serta mendukung ekonomi biru dan pariwisata ekologis.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja pada periode tahun 2025 mengacu kepada Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025 dengan 7 Sasaran Kegiatan mencakup 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* (BSC) dari Kementerian Kelautan Perikanan beralamat di <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Periode tahun 2025 (IKU dan IKM) adalah **112.52% (Kategori "Istimewa")**. Rentang (*range*) nilai untuk kategori "Istimewa" adalah 110% - 120% sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Tahun 2025 Berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Capaian 2025	% Capaian Kinerja 2025
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	93,09	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	63,20	114,91
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	2	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	74,06	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	6	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	4	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun	47	47	100

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Capaian 2025	% Capaian Kinerja 2025
			prasarana dan sarananya (Lokasi)			
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	2	100
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	164	107,89
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	87	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerja KKP)
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	3	100
		12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	83.36	104,20
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	94.30	117,88
		14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	100	100
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	98.40	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Knerjaku KKP)

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Pelaksanaan kegiatan Direktorat P3K pada tahun 2025 didukung berbagai sumberdaya, antara lain:

A. Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 54.321.352.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Direktorat P3K Sampai Dengan 31 Desember 2025

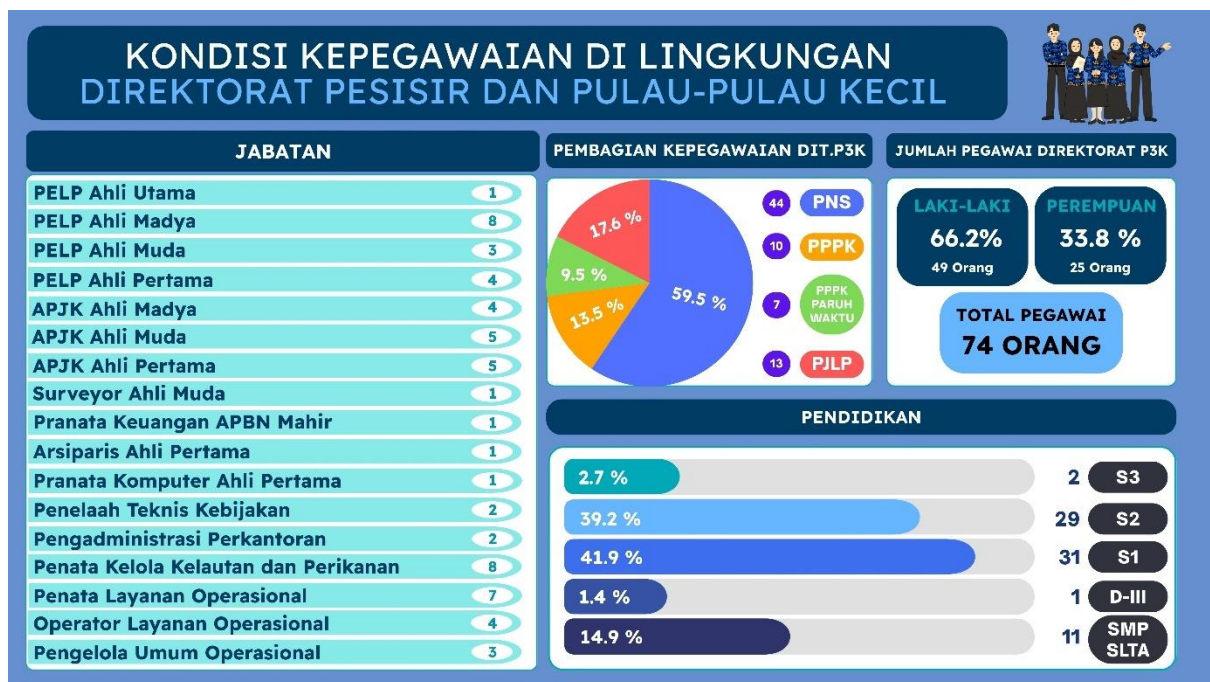
No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1	FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	23.140.397.000	-	23.140.397.000	20.321.232.686	87,82	2.819.164.314
2	FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000	1.856.528.000	929.302.000	903.363.182	97,21	25.938.818
3	HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26.133.883.000	8.658.316.000	17.475.567.000	17.242.800.121	98,67	232.766.879
4	WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL	2.261.242.000	60.595.000	2.200.647.000	2.194.097.719	99,70	6.549.281
Total			54.321.352.000	10.514.844.000	43.745.913.000	40.661.493.708	92,95	3.084.419.292

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pagu anggaran sebesar Rp 54.321.352.000, pagu efektif sebesar Rp 43.745.913.000, dan realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar Rp 40.661.493.708 atau 92,95% dari pagu efektif, dengan sisa anggaran sebesar Rp 3.084.419.292.

B. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Direktorat P3K adalah sumber daya manusia (SDM) atau pegawai. Pada tahun 2025, jumlah pegawai Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tercatat sebanyak 74 orang. Kondisi kepegawaian Direktorat P3K tahun 2025 sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Tahun 2025

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

C. Kesimpulan

Pelaksanaan berbagai kegiatan lingkup Direktorat P3K sampai dengan tahun 2025 berjalan lambat karena menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Beberapa tantangan yang dihadapi Direktorat P3K dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sampai dengan tahun 2025, antara lain:

1. Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemblokiran atau pemotongan anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU, sehingga berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
2. Perubahan nomenklatur dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 96/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dampak dari adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini adalah dilakukannya penataan kembali pegawai negeri sipil di unit kerja lingkup Ditjen PK.
4. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 dan Revisi PK Direktorat P3K yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025. Revisi PK ini membutuhkan waktu untuk mengharmonisasikan nomenklatur Indikator Kinerja baik IKU maupun IKM dan target di internal Direktorat P3K, maupun harmonisasi antara Direktorat P3K dengan Tim Kerja Program Pengelolaan Kelautan.
5. Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah belum ditetapkan sampai dengan tahun 2025.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Direktorat P3K dalam mengatasi tantangan tersebut, antara lain:

1. Melakukan pembahasan secara bersama secara intensif, berkaitan dengan berbagai isu strategis termasuk anggaran, maupun rencana strategis unit kerja eselon I tahun 2025-2029 dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Tim Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Tim Setjen KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), universitas atau perguruan tinggi, dan pihak lainnya.
2. Memantau kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP.
3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja.....	2
1.4. Isu Strategis Tahun 2025–2029.....	3
1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.....	6
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional.....	12
2.2. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029	18
2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan	20
2.4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan kelautan tahun 2025 Tahun 2025.....	23
2.5. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil Tahun 2025.....	23
2.6. Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil Tahun 2025.....	24
2.7. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai Umpan	25
2.8. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton).....	34
IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Nilai)	55
IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	66
IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	85
IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	96
IKU 06. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)	106
IKU 07. Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)	122
IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas).....	134
IKU 09. Perizinan pemanfaatan pulau–pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	146
IKM 10. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)	165
IKM 11. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Dokumen)	179
IKM 12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Indeks)	182

IKM 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%).....	188
IKM 14. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%).....	192
IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	195
3.2. Perkembangan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) Sampai Dengan Tahun 2025	201
3.3. Perkembangan <i>Ocean For Prosperity</i> (LAUTRA) Sampai Dengan Tahun	207
3.4. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Dukungan Penyiapan Lahan Garam Tahun 2025.....	211
3.5. Realisasi Anggaran Direktorat P3K per/ Tanggal 31 Desember 2025.....	217
3.6. Penghargaan	261
BAB IV. PENUTUP	264
4.1. Kesimpulan	264
4.2. Rekomendasi	266
4.3. Tindak Lanjut.....	267
LAMPIRAN	270
DAFTAR PUSTAKA	298

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Pada Tahun 2025 Berdasarkan Balanced Scorecard (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan	iv
Tabel 2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Direktorat P3K Sampai Dengan 31 Desember 2025.....	vi
Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia	5
Tabel 4. Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2025	9
Tabel 5. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka	13
Tabel 6. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025-2045.....	16
Tabel 7. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045.....	16
Tabel 8. Proyek Strategis Nasional 2025-2029 Terkait KKP	18
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025	25
Tabel 10. Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025.....	26
Tabel 11. Status Indeks Capaian IKU atau IKM	29
Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025	32
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” Tahun 2025.....	36
Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” Tahun 2025 dengan Target dalam Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029	40
Tabel 15. Bentuk Dukungan Para Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Sampah Laut.....	48
Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)” sampai dengan 31 Desember 2025	54
Tabel 17. realisasi anggaran berkaitan dengan <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA (kode anggaran REA.004).....	55
Tabel 18. Matrix Indikator Capaian Nilai Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	57
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Tahun 2025.....	57
Tabel 20. Perhitungan capaian “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) pada tahun 2025)”	58
Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Tahun 2025 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029	60
Tabel 22. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 31 Desember 2025	65
Tabel 23. Realisasi anggaran kegiatan pendukung capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai tanggal 31 Desember 2025	66
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Tahun 2025	70

Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Tahun 2025 dengan Target dalam Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029	72
Tabel 26. Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025–2029 maupun SDG’s	73
Tabel 27. Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai tahun 2025	76
Tabel 28. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan 31 Desember 2025	83
Tabel 29. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan) berkaitan dengan karbon biru sampai dengan 31 Desember 2025	84
Tabel 30. Kategori Penilaian	86
Tabel 31. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Tahun 2025	86
Tabel 32. Penghitungan capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai) tahun 2025)”	87
Tabel 33. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Pada Tahun 2025 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029	91
Tabel 34. Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan 31 Desember 2025	93
Tabel 35. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan 31 Desember 2025	96
Tabel 36. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” tahun 2025	97
Tabel 37. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Pada Tahun 2025 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029	98
Tabel 38. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” Sampai dengan Akhir 31 Desember 2025	105
Tabel 39. Realisasi anggaran berkaitan dengan rehabilitasi ekosistem karbon biru pada tahun 2025	105
Tabel 40. Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang sudah terbit	107
Tabel 41. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” tahun 2025	111
Tabel 42. Perbandingan capaian kinerja IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” tahun 2025	112
Tabel 43. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai dengan 31 Desember 2025	121
Tabel 44. Target dan Realisasi “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Tahun 2025	123
Tabel 45. Kelompok penerima bantuan sarana usaha ekonomi produktif T.A. 2025	123

Tabel 46.	Perbandingan target dan capaian tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK tahun 2025–2029 khususnya pada tahun 2025	126
Tabel 47.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)” Sampai Dengan 31 Desember 2025	134
Tabel 48.	Target dan Realisasi IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Tahun 2025	138
Tabel 49.	Perbandingan antara target dan capaian Direktorat P3K pada tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025–2029	139
Tabel 50.	Barang bantuan sarana ekonomi produktif yang diserahterimakan antara lain dan dengan jumlah dan nilai	144
Tabel 51.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Sampai Dengan 31 Desember 2025	146
Tabel 52.	Target dan Realisasi IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Tahun 2025	148
Tabel 53.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (dokumen)	158
Tabel 54.	Realisasi Anggaran Kegiatan yang Mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Sampai Dengan 31 Desember 2025	165
Tabel 55.	Kategori Nilai PM SAKIP	166
Tabel 56.	Target dan Capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” tahun 2025	167
Tabel 57.	Hasil Penilaian AKIP pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	167
Tabel 58.	Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP Direktorat P3K Tahun 2025 dengan Nilai PM SAKIP Direktorat P4K Tahun 2024 dan 2023	168
Tabel 59.	Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra dengan Capaian Kinerja Tahun 2025	169
Tabel 60.	Capaian Nilai PM SAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025	169
Tabel 61.	Realisasi Anggaran IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Desember 2025	179
Tabel 62.	Target dan Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” tahun 2025.	180
Tabel 63.	Target dan capaian IKM Nomor 11 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) pada tahun 2025	181
Tabel 64.	Realisasi Anggaran IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 31 Desember 2025	182
Tabel 65.	Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode tahun 2025	184
Tabel 66.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	185
Tabel 67.	Realisasi Anggaran IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 31 Desember 2025 ..	187
Tabel 68.	Target dan Capaian IKM 13 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Tahun 2025.	188

Tabel 69. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	190
Tabel 70. Realisasi Anggaran IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Desember 2025	191
Tabel 71. Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” tahun 2025	192
Tabel 72. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	194
Tabel 73. Realisasi Anggaran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Desember 2025	195
Tabel 74. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan.....	196
Tabel 75.Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Nilai)” Periode tahun 2025.....	196
Tabel 76. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Nilai)	198
Tabel 77. Realisasi Anggaran IKM “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 31 Desember 2025	200
Tabel 78. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (Blue Carbon) Pada Tahun 2025.....	201
Tabel 79. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan LAUTRA Pada Tahun 2025	207
Tabel 80. Pagu anggaran Efektif, Realisasi Anggaran, Persentase (%) Realisasi Anggaran, dan Sisa Anggaran Direktorat P3K sampai dengan 31 Desember 2025	217
Tabel 81. Monitoring Kontrak Dit. Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil s.d Desember 2025.....	218
Tabel 82. DAFTAR SPM/SP2D DIT. P3K Periode Desember 2025	232
Tabel 83. Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada tahun 2025.....	264
Tabel 84. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2024 dan Tindak Lanjut di Triwulan I tahun 2025.....	267
Tabel 85. Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan I Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan II tahun 2025	267
Tabel 86. Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan II Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan III tahun 2025	268
Tabel 87. Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan III Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan IV tahun 2025.....	268

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Tahun 2025	vi
Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	6
Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II	8
Gambar 4 Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2025	9
Gambar 5. Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	10
Gambar 6. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029	12
Gambar 7. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029	17
Gambar 8. Pendekatan Pembangunan ekonomi biru	21
Gambar 9. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.....	21
Gambar 10. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K dari Pengukuran IKU dan IKM Tahun 2025	32
Gambar 11. Foto kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali	37
Gambar 12. Penyaluran Bantuan Sarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih	38
Gambar 13. Pengadaan bantuan sarana Pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih kepada kelompok Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) Trawangan.....	38
Gambar 14. Foto Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pulau Gili Trawangan Pada Tanggal 15 Desember 2025	39
Gambar 15. <i>Visi Persampahan 2045 dan Target RPJMN 2025-2029</i>	44
Gambar 16. Peta Jalan Persampahan Hingga tahun 2045	44
Gambar 17. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	49
Gambar 18. Kumpulan Kegiatan Pendukung Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)	54
Gambar 19. Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun.....	62
Gambar 20. Memorandum Rapat Tingkat Menteri Pelaporan Hasil Masukan Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian ERK	62
Gambar 21. Kumpulan Kegiatan Pendukung IKU Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) dan “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan) (Kumulatif)”	65
Gambar 22. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil	67
Gambar 23. Dampak Perubahan Iklim	68
Gambar 24. Kegiatan Pendukung Capaian Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025.....	71
Gambar 25. Kumpulan Kegiatan pendukung Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan).....	83

Gambar 26. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	102
Gambar 27. Tahapan Proses Pensertifikasian PPK/T	107
Gambar 28. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T	107
Gambar 29. Contoh Sertipikat yang telah terbit.....	110
Gambar 30. Kumpulan Kegiatan pendukung Pemanfaatannya Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)	121
Gambar 31. Kepdirjen PKRL Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.....	128
Gambar 32. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Ekonomi Produktif TA 2025 secara daring	129
Gambar 33. Verifikasi calon kelompok penerima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Sanggau.	129
Gambar 34 <i>Verifikasi calon kelompok penerima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Tarakan</i>	130
Gambar 35. Verifikasi calon kelompok penerima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kota Sorong.....	130
Gambar 36. <i>Verifikasi calon kelompok penerima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Kepulauan Sula</i>	131
Gambar 37. Serah Terima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Kebumen, Pati 1 dan Pati 2, Jawa Tengah.	132
Gambar 38. Serah Terima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Maluku Tengah, Lampung Timur, Cianjur, dan Tanggamus	132
Gambar 39. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Ekonomi Produktif TA 2024 di Kabupaten Garut, Tabanan, dan Cilacap.	133
Gambar 40. Penyusunan Indeks Pulau-Pulau Kecil tahun 2025	133
Gambar 41. Pemeriksaan Pemeliharaan Pulau Lusi, Kabupaten Sidoarjo.	133
Gambar 42. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	135
Gambar 43. Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA.....	136
Gambar 44. Fasilitasi Penguatan MHA	137
Gambar 45. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Buton Selatan, Prop. Sulawesi Tenggara	138
Gambar 46. Rencana pelaksanaan Simposium Nasional	142
Gambar 47. Rapat Pembahasan Draft Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Potensi SDKP Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ohoi Ohoirenan,	142
Gambar 48. Pembahasan Modul Inventarisasi potensi SDKP dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada Tanggal 28 Oktober 2025.....	143
Gambar 49. bantuan sarana ekonomi produktif yang diserahterimakan.....	144
Gambar 50. Metadata Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di Perairan Laut pada tanggal 22 Desember 2025	145
Gambar 51. Pembahasan Inventarisasi Data dan Informasi dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada tanggal 23 Desember 2025	145

Gambar 52. Perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	157
Gambar 53. Kumpulan Kegiatan Pendukung Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)	165
Gambar 54. Siklus Pengelolaan Kinerja	166
Gambar 55. Dashboard Layar Pini	171
Gambar 56. Tampilan Fitur Layanan Layar Pini	172
Gambar 57. Peluncuran E-Posti QRIStimewa	173
Gambar 58. Tampilan Jogja Smart Service (JSS)	174
Gambar 59. Tampilan Jogja Digdaya	174
Gambar 60. Platform Jogja Dataku	175
Gambar 61. Platform Jogja Belajar	175
Gambar 62 Penghitungan capaian IKM	183
Gambar 63. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	185
Gambar 64. Tabel Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester II Tahun 2025	186
Gambar 65. Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025	189
Gambar 66. Rekapitulasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025	191
Gambar 67. Nota Dinas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun 2025	193
Gambar 68. Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025.	197
Gambar 69. Intervensi Direktorat P3K dalam Fasilitasi Lahan Garam Program KSIGN	216
Gambar 70. Rekapitulasi PNBP Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Tahun 2025	231
Gambar 71. Rekapitulasi Penerimaan Bukan Pajak Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	232
Gambar 72. Daftar SPM/SP2D Dit. P3K Periode September 2025	260
Gambar 73. Kepemilikan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	261
Gambar 74. NKO Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025	262

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan	Halaman Pertama
1.	ABPL	Aksi Bersih Pantai dan Laut	34
2.	BA	Berita Acara	10
3.	BAST	Berita Acara Serah Terima	36
4.	BMN	Barang Milik Negara	30
5.	Ditjen PK	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	2
6.	Ditjen PRL	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	48
7.	DPB	Desa Pesisir Bersih	34
8.	HAT	Hak Atas Tanah	26
9.	IKM	Indikator Kinerja Manajerial	24
10.	IKU	Indikator Kinerja Utama	24
11.	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6
12.	KKPD	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	21
13.	K-SIGN	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional	113
14.	KUB	Kelompok Usaha Bersama	36
15.	LAUTRA	Laut untuk kesejahteraan	60
16.	NKO	Nilai Kinerja Organisasi	30
17.	P3K	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2
18.	P4K	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23
19.	PK	Perjanjian Kinerja	23
20.	PM SAKIP	Penilaian Mandiri SAKIP	24
21.	PPKT	Pulau-Pulau Kecil Terluar	1
22.	PSN	Proyek strategis nasional	17
23.	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2
24.	Sebasah	Laut Sehat Bebas Sampah	47
25.	SIPSN	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional	33
26.	SPI	Sekolah Pantai Indonesia	5
27.	UPT	Unit Pelaksana Teknis	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 24 Januari 2025	270
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 30 Juni 2025	272
Lampiran 3. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 31 Desember 2025	273
Lampiran 4. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025	274
Lampiran 5. Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	275
Lampiran 6. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Tahun 2025	277
Lampiran 7. Peta Jabatan Pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	289
Lampiran 8. Penghargaan Yang Diterima Direktorat P3K Sampai Dengan 2025	290
Lampiran 9. <i>Platform Digital</i> atau Aplikasi Pendukung Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	293



BAB I. PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki 17.504 pulau, dimana sampai tahun 2023 telah dibakukan dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 17.024 pulau, sedangkan 350 pulau lagi telah dibakukan namanya dan akan dilaporkan ke PBB pada tahun 2024, sehingga jumlah pulau yang telah dibakukan pada *Gazeter* Republik Indonesia adalah sebanyak 17.374 pulau. Dari jumlah 17.374 pulau tersebut sebanyak 14.807 adalah pulau kecil dengan status sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan sebanyak 5.955 pulau.
- b. Sebagian Area Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan sebanyak 2.073 pulau.
- c. Area Penggunaan Lain sebanyak 6.779 pulau.

Pulau-pulau kecil Indonesia memiliki tipologi, topografi, dan luasan yang beragam. Sekitar 1.766 pulau (10,59%) merupakan pulau berpenduduk dan 14.905 pulau (89,41%) tidak berpenduduk. Mayoritas pulau Indonesia termasuk pulau sangat kecil (*tiny island*) dengan luas di bawah 100 km² yang sangat rentan mengalami kerusakan, baik akibat aktivitas manusia maupun dampak perubahan iklim sehingga memiliki risiko tinggi dalam pemanfaatannya.

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia sebanyak 111 PPKT berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Keppres ini berfungsi untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan negara, mengamankan perbatasan negara dan mencegah potensi masalah seperti penjualan pulau kepada pihak asing, serta mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Selain sumber daya alam non hayati tak terbarui, energi dan jasa lingkungan, wilayah pesisir memiliki sumberdaya dapat diperbaharui (*renewable resources*), yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia, seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove, karang, lamun, penyu dan biota lainnya.

Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, karena memiliki sumberdaya hayati, dan jasa lingkungan yang tinggi. Pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik secara horizontal (antar sektor) maupun keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor).

Isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: abrasi wilayah pesisir, deforestasi mangrove, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, pencemaran wilayah pesisir dan laut, ketertinggalan perekonomian terutama di pulau-pulau terluar; perubahan iklim yang berakibat pada penurunan populasi ikan, punahnya beberapa spesies perikanan, serta isu bencana di wilayah pesisir seperti potensi banjir pesisir (*rob*), gelombang pasang, tsunami, dan lain-lain.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara bertahap melakukan upaya pengelolaan terhadap:

1. Pulau-Pulau Kecil Terluar;
2. Restorasi kawasan pesisir;

3. Pengembangan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
4. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal.

Untuk mewujudkan pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, maka diwajibkan menetapkan target kinerja, melakukan pengukuran kinerja, dan menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan salah satu upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Direktorat P3K kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat, atas pencapaian kinerja Direktorat P3K pada tahun 2025.
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat P3K.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat P3K.
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Direktorat P3K.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN RB (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021 mengatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Dasar hukum pendukung penyusunan Laporan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan di Sekitarnya;

1.4. Isu Strategis Tahun 2025–2029

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat P3K dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T), antara lain:

1. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut, sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Sampah laut di kawasan pesisir
Penanganan sampah laut di kawasan pesisir serta pencemaran di laut menjadi tantangan yang harus ditangani melalui pengelolaan limbah yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil
Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum sepenuhnya diberikan peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Pemberdayaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal dapat dilakukan dengan mengintegrasikan peran mereka dalam penyusunan serta implementasi kebijakan kelautan guna memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan kearifan lokal.
4. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar.
Hal ini mengakibatkan optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
5. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar
Hingga saat ini, pengelolaan PPKT masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: belum terinventarisasi data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha, yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
6. Degradasi lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil
Tantangan tersebut harus diatasi melalui rehabilitasi ekosistem. Strategi utama penanganan adalah melakukan rehabilitasi kawasan yang rusak untuk mengembalikan keseimbangan ekologis dan mendukung keberlanjutan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Peningkatan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi fokus untuk menghadapi risiko bencana, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan, serta menjaga keberlanjutan hidup masyarakat pesisir, mengingat wilayah tersebut rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
8. Pemulihan ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi prioritas utama guna menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan sumber daya alam.

9. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
10. Tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
 - a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - b. perizinan pemanfaatan pulau;
 - c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - e. isu jual-beli pulau.
11. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu hal penting dalam upaya pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah menentukan strategi dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi organisasi. Salah satu metode analisis dalam penentuan strategi adalah analisis SWOT yakni dengan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman/tantangan (*threats*). Kekuatan dan kelemahan berasal dari internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari luar organisasi atau hal-hal yang terjadi di luar organisasi yang memengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan analisis SWOT, maka organisasi dapat memetakan permasalahan yang dihadapi dan potensi strategis yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tabel di bawah ini merupakan analisis SWOT pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil.

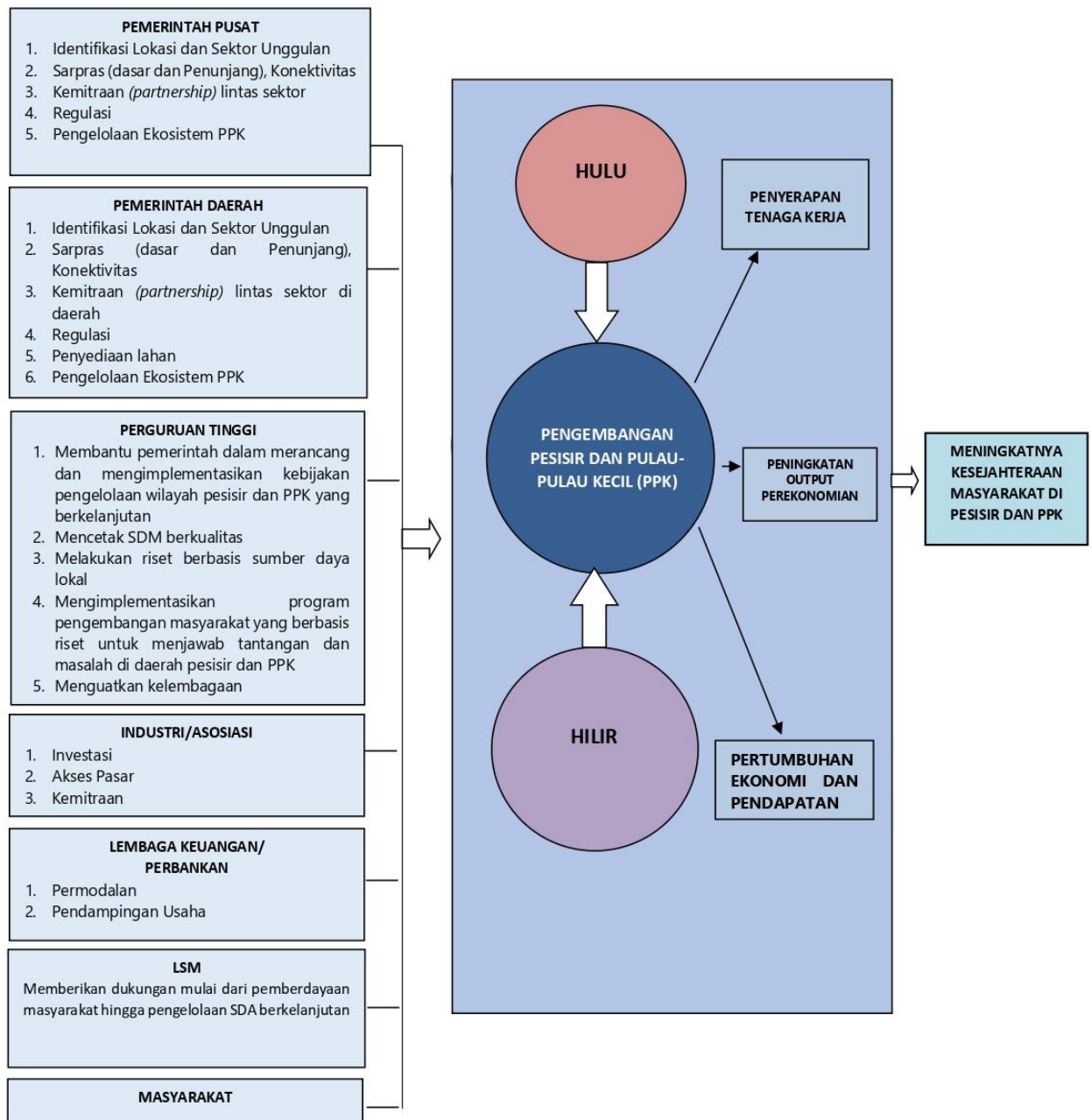
SWOT MATRIK
PENGEMBANGAN PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Eksternal <i>Opportunities (O)</i>	Internal	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
		<u>Strategi (S-O)</u>	<u>Strategi (W-O)</u>
		Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk merebut peluang (<i>opportunities</i>) Strategi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) berbasis wilayah dan ekonomi lokal	Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan merujuk regulasi dan kebijakan, serta dukungan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah
	<i>Threats (T)</i>	<u>Strategi (S-T)</u>	<u>Strategi (W-T)</u>
		Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk mengatasi ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan melakukan sosialisasi program dan kegiatan, dan berbasis masyarakat	Strategi yang meminimalkan kelemahan (<i>weaknesses</i>) untuk menghindari ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan menyediakan sarana dan prasarana (infrastruktur) berbasis masyarakat dan bimtek/pelatihan berbasis masyarakat

Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

INTERNAL EKSTERNAL	<u>STRENGTHS (S)</u>	<u>WEAKNESSES (W)</u>
	1. Sumberdaya alam yang melimpah dan bernilai ekonomis tinggi. 2. Daya tarik yang tinggi (misalnya: panorama alam yang indah, dan lain-lain). 3. Kunjungan wisatawan domestik dan asing relatif tinggi. 4. Kemudahan aktivitas yang dapat dilakukan di pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK), misalnya: budidaya laut, wisata bahari, dan lain-lain.	1. Rentan terhadap bencana alam dan risiko. 2. Aksesibilitas yang relatif sulit. 3. Sarana dan prasarana (infrastruktur) yang kurang. 4. Masih rendahnya pengawasan sumberdaya alam.
<u>OPPORTUNITIES (O)</u>	<u>S-O STRATEGY</u>	<u>W-O STRATEGY</u>
1. Terdapat minat yang tinggi dari calon investor bermodal kuat dan memiliki karakter pengambil risiko (<i>risk taker</i>) untuk melakukan investasi. 2. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK). 3. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK.	1. Pengembangan sektor unggulan. 2. Kepastian hukum dan berusaha. 3. Sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK kepada para calon investor. 4. Pengelolaan aset laut dan pesisir mencakup perikanan, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain dalam rangka mendukung kebijakan <i>Blue Economy</i>.	1. Dukungan Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan <i>platform</i> terkait lainnya untuk memberikan masukan kepada para calon investor. 2. Penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur). 3. Kemudahan aksesibilitas. 4. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di pusat dan daerah. 5. Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan pengurangan risiko dan mitigasi bencana (misalnya: Sekolah Pantai Indonesia (SPI), penyadartahuan masyarakat akan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), dan lain-lain).
<u>THREATS (T)</u>	<u>S-T STRATEGY</u>	<u>W-T STRATEGY</u>
1. Perubahan iklim (<i>climate change</i>), pemanasan global (<i>global warming</i>), sampah laut. 2. Isu tentang penjualan PPK, sampah plastik di laut, pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan PPK, tenggelamnya PPK, sengketa PPK antar daerah, dan penguasaan wilayah PPK secara tidak sah oleh negara lain, dan lain-lain. 3. Anggapan kehadiran investor akan mengubah kearifan lokal (<i>local wisdom</i>).	1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan ekonomi (seperti: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, dan lain-lain) untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi. 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi bencana laut, pengendalian perubahan iklim, ketahanan bencana, pencemaran laut, dan restorasi ekosistem (misalnya Kementerian LH/BPLH, BMKG, Perguruan Tinggi/Universitas, LSM, dan lain-lain). 4. Sosialisasi program dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat setempat.	1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani Informasi Geospasial Tematik (IGT) (seperti: Kemendagri, Bakosurtanal, BIG, dll). 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani penyediaan sarana dan prasarana umum (seperti: Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dll). 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (seperti: Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/BEK). 4. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan PPK.

Sinergi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan pada gambar alur di bawah ini.



Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada BAB III Susunan Organisasi, Pasal 7 mengenai susunan organisasi KKP terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

6. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
10. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
12. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga.
13. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terbagi menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, yaitu: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Peraliran.
- c. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Peraliran dan Dasar Laut.
- e. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.
- f. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Sedangkan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- b. Direktorat Konservasi Ekosistem.
- c. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
- d. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Direktorat Jasa Bahari.
- f. Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Pasal 96 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

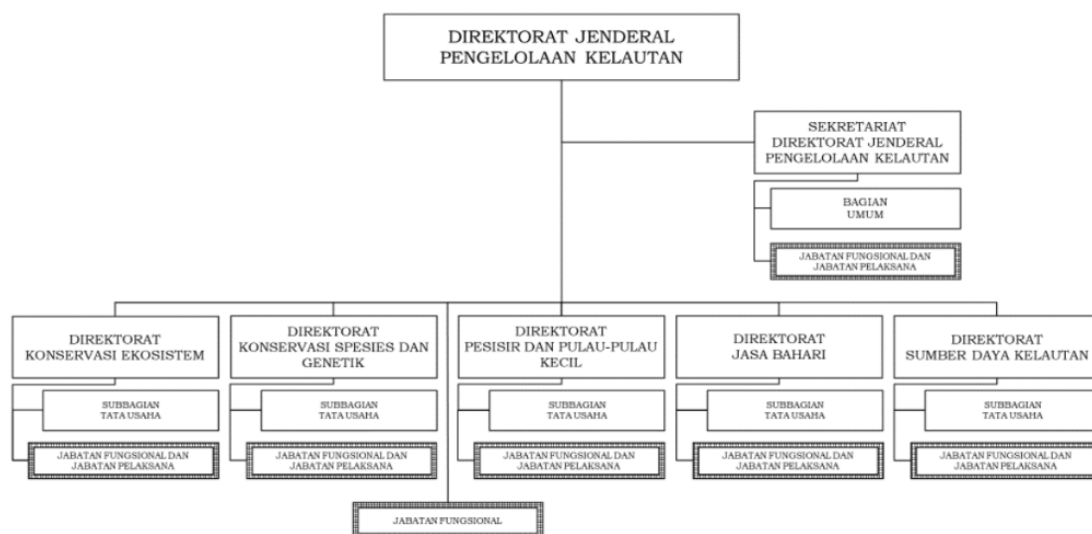
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum

- adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Susunan organisasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 98 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2025 sebagaimana digambarkan di bawah ini.



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



Gambar 4 Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2025
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Jumlah pegawai Direktorat P3K yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat P3K pada tahun 2025 sebanyak 74 orang terdiri dari 49 orang laki-laki dan 25 orang Wanita. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 44 orang (59,5%), Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 13 orang (17,6%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak 7 orang (9,5%), dan PPPK penuh waktu sebanyak 10 orang (13,5%). Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 6**.

Susunan Tim Kerja lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah terbentuk. Merujuk kepada Surat Nomor B.124/DJPK.4/TU.210/IV/2025 Tanggal 14 April 2025 Hal Penyampaian Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tanggal 9 April 2025 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, telah disampaikan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 14 April 2025. Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2025

No.	Nama Tim Kerja	Jumlah Pegawai dalam Tim Kerja	Ketua Tim Kerja
1.	Tim Kerja Pengelolaan Lahan	14 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 13 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Reni Indrawati, S.T., M.M.
2.	Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	15 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 14 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Partini, S.Pi., M.Si.
3.	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	19 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 18 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.
4.	Tim Kerja Restorasi	14 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 13 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Hery Gunawan Daulay, S.P., M.M.
5.	Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	13 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 12 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.

6.	Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	14 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 13 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Tely Dasaluti, S.Si., M.P.
7.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	18 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 17 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Saynuddin, S.Pi.

Sumber: Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 Tanggal 14 April 2025

Keterangan:

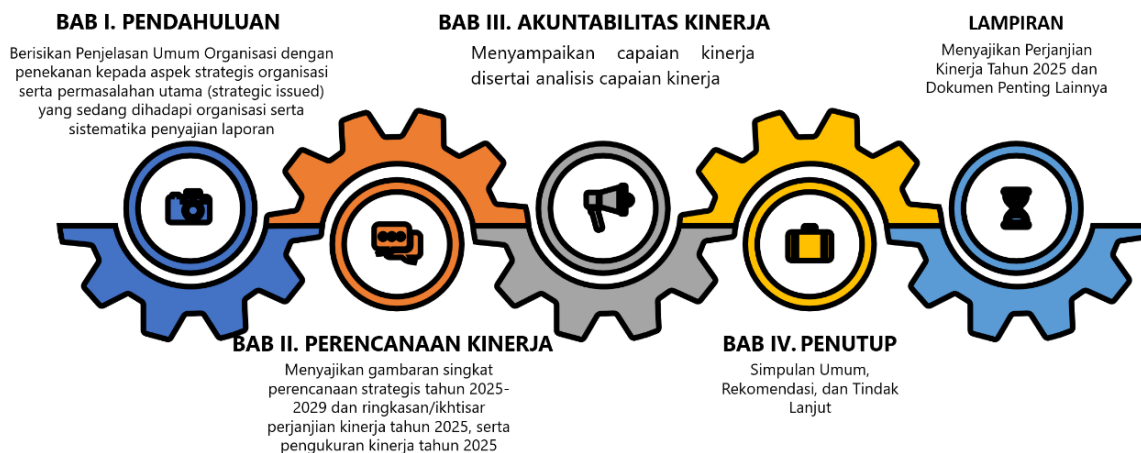
- Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 14 Mei 2025, ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/MEN-SJ/KP.430/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025 dan Berita Acara (BA) Pengambilan Sumpah PNS Nomor 99/BAB/P-PENGAWAS/VII/2025 Tanggal 28 Agustus 2025, Saynuddin dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat P3K sehingga nomenklatur Tim Kerja Dukungan Manajerial berganti nama menjadi Subbagian Tata Usaha.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 disusun berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014



Gambar 5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014



**Penanaman Mangrove dalam Rangka
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN)
Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur**

23 Desember 2025

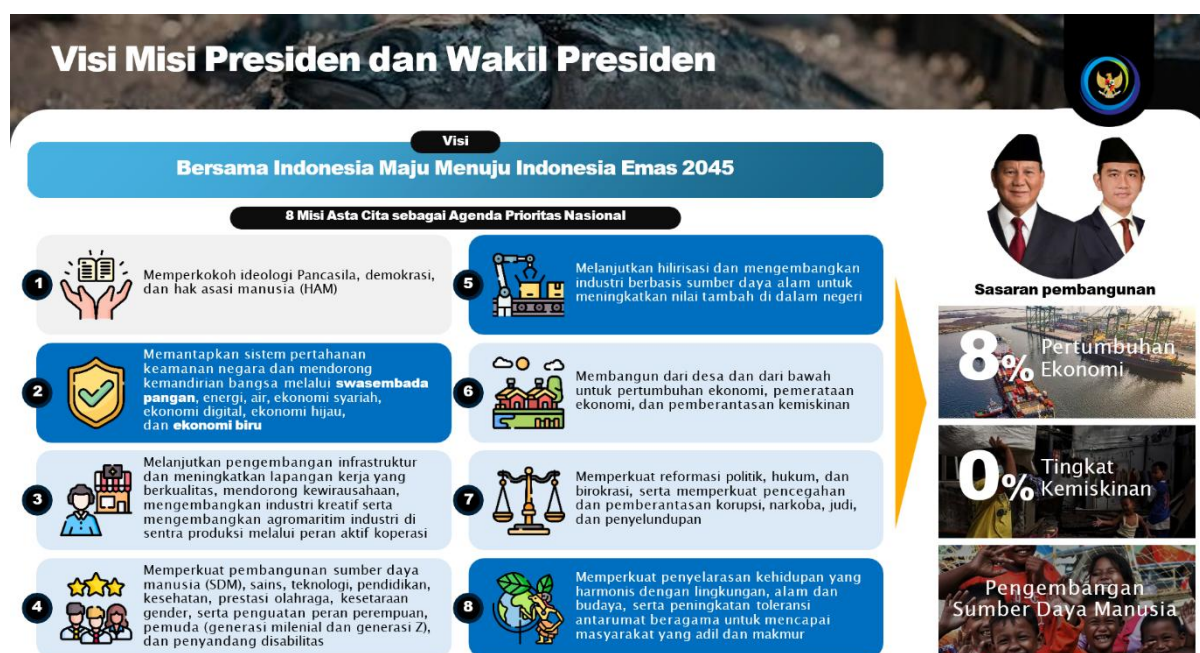
BAB II. PERENCANAAN KINERJA

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: “Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat”.



Gambar 6. Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029

Visi tersebut diwujudkan dengan 8 misi Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Delapan (8) misi yang disebut dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 5. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
1.	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	a. <i>Stunting</i> adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik. b. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. c. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Selain bantuan gizi, kepada ibu hamil juga perlu dilakukan edukasi <i>parenting</i>. d. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Sumber makanan diutamakan dari produk lokal sehingga program ini juga akan berdampak besar pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengembangkan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan program.
2.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten	a. Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar <i>World Health Organization</i> (WHO) harus segera dibenahi. b. Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga. c. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru. d. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.
3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	a. Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. b. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. c. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen minimal 4 juta ha dan bila itu fokus pada tanaman padi, maka produksi padi akan bertambah minimal sebesar 20 juta ton (asumsi produktivitas lahan 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).
4.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di	a. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
	setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	pendukungnya, akan dibangun sekolah sekolah unggulan di setiap kabupaten. b. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (<i>non-boarding school</i>) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. c. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	a. Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. b. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia (untuk perlindungan kesehatan lansia), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. c. Selain itu akan ditambahkan program Kredit Usaha Tani Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up, kredit untuk para generasi millenial dan generasi Z akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. d. Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
6.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh, tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi.
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	a. Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa dan kelurahan yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk menjamin pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan MBR, serta menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. b. Ditargetkan untuk dapat merenovasi atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa per tahun (dua juta rumah). Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (<i>landed house</i>), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	a. Pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian dibiayai dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Selain itu, pemberian insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat. b. Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

Sumber: <https://prabowosubianto.com/8-program-hasil-terbaik-cepat-prabowo-gibran/>

Sedangkan tujuh belas (17) program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029 sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
3. Pemberantasan kemiskinan.
4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
6. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
7. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
8. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
9. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
11. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
12. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
13. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
14. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
15. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatrend global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025–2045 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Utama RPJPN Tahun 2025–2045

Sasaran Visi	Penjelasan
Sasaran Visi 1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju: 1. Pendapatan per kapita Indonesia menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000–30.300. 2. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen. 3. Kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen.
Sasaran Visi 2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang: 1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5–0,8 persen. 2. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,29–0,32. 3. Ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen.
Sasaran Visi 3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat: 1. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. 2. <i>Global Power Index</i> masuk ke dalam 15 besar dunia.
Sasaran Visi 4	Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat: Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan kesehatan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan esehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (<i>Human Capital Index</i>) menjadi 0,73.
Sasaran Visi 5	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>: Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5% serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Delapan (8) Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045

Agenda	Penjelasan
Agenda 1	Mewujudkan Transformasi Sosial: Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan Masyarakat yang lebih Sejahtera, adil, dan kohesif.
Agenda 2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi: Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Agenda 3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola: Membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Agenda 4	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan.
Agenda 5	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, Masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumberdaya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
Agenda 6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan: Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pembangunan melalui pengembangan kebijakan Pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
Agenda 7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan:

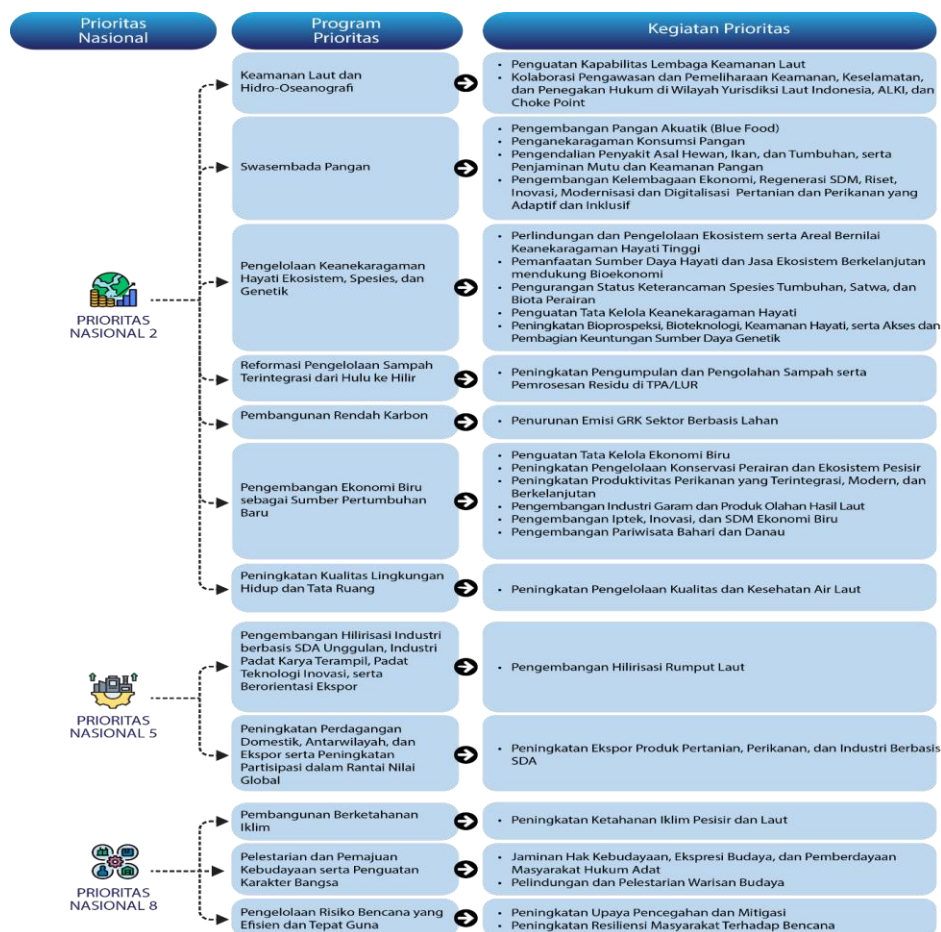
Agenda	Penjelasan
	Menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Agenda 8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan: Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan Pembangunan yang inovatif.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN Tahun 2025–2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 pada Pasal 2 ayat (1), RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJPN.

Di dalam RPJMN dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029.

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 7. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025–2029

Selain itu, KKP juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan prioritas dalam RPJMN Tahun 2025–2029 pada Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-3, 4, 6, dan 7 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN tahun 2025–2029 khususnya program prioritas Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

KKP merupakan salah satu kementerian/lembaga yang melaksanakan PSN, yaitu 1) pembangunan pelabuhan perikanan nusantara pengambengan di Bali, 2) revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura dengan fokus area Jawa Barat yang bekerja sama dengan swasta, serta 3) pembangunan pelabuhan Ambon terpadu di Maluku yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Proyek Strategis Nasional 2025–2029 Terkait KKP

No	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Pelaksana
1	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Bali	KKP dan swasta
2	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	KKP dan swasta
3	Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	KKP dan Kementerian Perhubungan

Sumber: RPJMN 2025–2029

2.2. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Di dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029 dijelaskan mengenai Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029 dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta, a) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan.

Visi KKP tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, maka KKP memiliki peran strategis dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. **KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan**

fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang mendukung Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang mendukung Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang mendukung Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang mendukung Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025–2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029; dan
 - b. Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;
 - b. Volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
 - c. Volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029;
 - d. Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0–1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
 - e. Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
 - f. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029; dan
 - g. Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 (empat) lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 (lima puluh tiga) lembaga pada tahun 2029.
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
 - b. Konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
 - c. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.

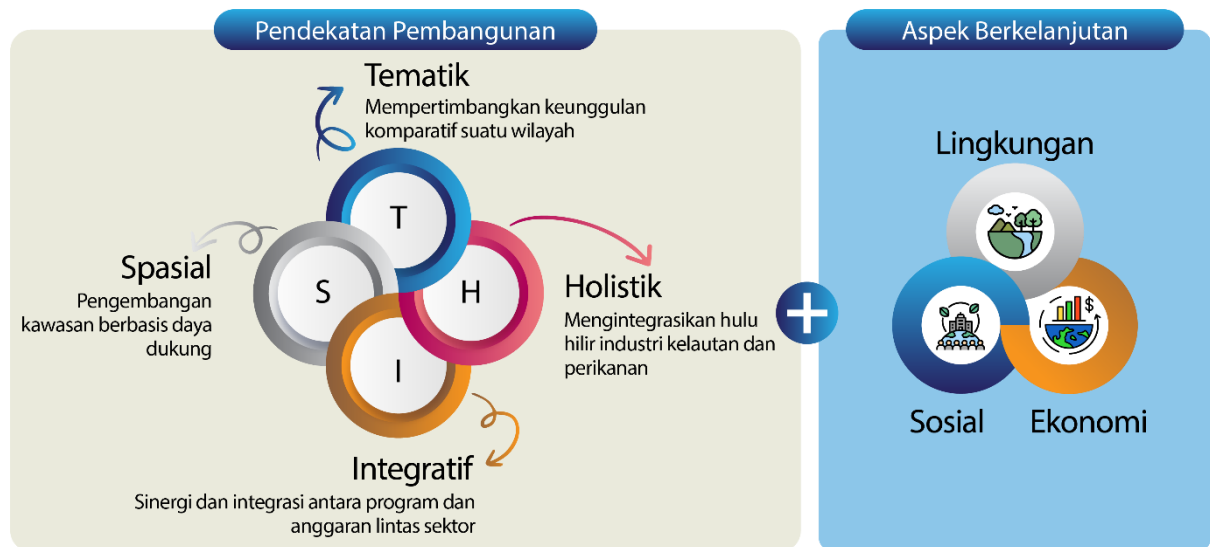
4. SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja: Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.
5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator kinerja: Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya, ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan. Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama sebagai berikut:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional
Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor.
2. Ekologi Sebagai Panglima
Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan.
3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)
Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis. Sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.
4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi
Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan yaitu:
 - a. Tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
 - b. Holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
 - c. integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan
 - d. Spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antar wilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

Empat pendekatan ekonomi biru memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi, yang diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.



Gambar 8. Pendekatan Pembangunan ekonomi biru

Berdasarkan pendekatan dan kerangka pikir ekonomi biru, maka ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.



Gambar 9. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029

Dalam melaksanakan kebijakan nasional, kebijakan KKP, serta kegiatan strategis nasional yang menjadi mandat RPJMN kepada KKP untuk periode 2025–2029, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi ini mencakup kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha kelautan dan perikanan, organisasi masyarakat sipil, filantropi, akademisi, dan peneliti. Beberapa arah kebijakan KKP yang membutuhkan dukungan lintas sektor antara lain:

1. Kebijakan memperluas kawasan konservasi laut, memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan ekosistem pesisir yang terhubung, seperti mangrove;
 - b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait integrasi tata ruang laut dan darat untuk memberikan kepastian hukum melalui RTRW;

- c. Kementerian Dalam Negeri terkait memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat penetapan Peraturan Daerah mengenai RZWP3K dan RTRW yang telah mengalokasikan ruang untuk konservasi;
 - d. Perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian ilmiah dan inovasi teknologi;
 - e. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD) terkait kerja sama pengawasan laut untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait perencanaan dan pembiayaan; dan
 - g. Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan sektor swasta terkait dukungan pengusulan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), mengintegrasikan rencana zonasi kawasan konservasi ke dalam RTRW, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pendanaan inovatif dan berkelanjutan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. kebijakan PIT berbasis kuota, memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Perhubungan terkait pengaturan pelabuhan dan logistik;
 - b. Kementerian Keuangan terkait insentif fiskal dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Kementerian PPN/Bappenas terkait integrasi dalam perencanaan nasional;
 - d. Pemerintah Daerah terkait penyiapan dan penerbitan Peraturan Daerah yang selaras dengan kebijakan PIT dan pencegahan konflik sosial nelayan;
 - e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait kajian stok sumber daya ikan, rekomendasi ilmiah mengenai Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebagai dasar penetapan kuota;
 - f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) terkait pengawasan dan penegakan hukum yang kuat di laut; dan
 - g. Sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut terlibat terkait integrasi hulu-hilir, pemantauan pelaksanaan, dan peningkatan kapasitas nelayan.
 3. Kebijakan pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait izin lingkungan pengelolaan limbah dan perlindungan ekosistem penting seperti mangrove;
 - b. Kementerian ATR/BPN terkait dukungan terhadap zonasi dan tata ruang yang tepat untuk kegiatan budi daya;
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penyediaan infrastruktur dasar dan energi;
 - d. Perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga lainnya terkait penelitian dan kemajuan teknologi budidaya;
 - e. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait penguatan rantai nilai dan kelembagaan pembudidaya;
 - f. Badan Gizi Nasional terkait pemanfaatan komoditas perikanan budidaya sebagai sumber protein berkelanjutan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - g. Pemerintah Daerah terkait fasilitasi perizinan dan pendampingan teknis; dan
 - h. LSM, komunitas lokal, sektor swasta, dan filantropi terkait edukasi, kemitraan komersial, dan pembiayaan bagi pembudidaya skala kecil.
 4. Kebijakan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan dukungan dari:
 - a. Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang wilayah pesisir;
 - b. Kementerian Dalam Negeri terkait untuk penguatan regulasi daerah;
 - c. Kementerian Pariwisata terkait pengembangan potensi pariwisata bahari;
 - d. TNI AL, Bakamla, dan Ditpolairud terkait operasi patroli bersama untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;

- e. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait penyediaan dukungan kebijakan nasional dan anggaran;
 - f. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan penelitian terkait pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
 - g. Keterlibatan masyarakat lokal, organisasi adat, LSM, serta dukungan sektor swasta dan filantropi terkait pemulihan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan berbasis komunitas.
5. Kebijakan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan memerlukan dukungan dari:
- a. Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah dan sistem daur ulang sampah;
 - b. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait penguatan regulasi dan pengelolaan sampah di wilayah pesisir;
 - c. Swasta dan industri daur ulang terkait pengumpulan dan pengolahan sampah serta mewujudkan implementasi ekonomi sirkuler bagi nelayan;
 - d. LSM dan komunitas lokal terkait edukasi dan pemberdayaan;
 - e. Perguruan tinggi, BRIN, serta lembaga penelitian lainnya terkait inovasi pengolahan sampah dan pemantauan dampak lingkungan;
 - f. Kementerian PPN/Bappenas terkait pengintegrasian penanggulangan sampah plastik dalam rencana pembangunan nasional; dan
 - g. Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengintegrasian program pengelolaan sampah dengan pembangunan infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Seluruh kebijakan yang dikembangkan harus bersifat holistik, terintegrasi, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Tahun 2025–2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, serta berbagai komitmen global Indonesia seperti persetujuan *World Trade Organization* (WTO), *UNCLOS* 1982, dan ketentuan dalam *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO).

2.4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan kelautan tahun 2025 Tahun 2025

Sasaran Program Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
2. Meningkatnya pengelolaan biota perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks *CITES* (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*);
3. Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
4. Meningkatnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali;
5. Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Meningkatnya produktivitas lahan garam;
7. Meningkatnya kualitas produksi garam;
8. Meningkatnya investasi pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan;
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

2.5. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Tujuh (7) Sasaran Kegiatan Direktorat P3K yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi.
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan.
5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

2.6. Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Sejak Januari 2025 hingga akhir tahun 2025, telah dilakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K tahun 2025 yang disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perubahan PK berdasarkan revisi anggaran, pada BAB III Susunan Organisasi Pasal 7 mengenai susunan organisasi KKP, perubahan nomenklatur dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, pergantian Direktur, serta revisi nomenklatur Sasaran Kegiatan Nomor 05 yaitu:

1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 dimana Pihak Pertama Penanda tangan PK (Direktur P4K) adalah Bapak Muhammad Yusuf. PK ini meliputi 5 Sasaran Kegiatan (SK), 16 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).
2. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 dimana Pihak Pertama Penanda tangan PK (Direktur P3K) adalah Bapak Ahmad Aris. PK ini meliputi 7 Sasaran Kegiatan (SK), 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Revisi PK ini sebagai akibat dari perubahan nomenklatur dari Direktorat P4K menjadi Direktorat P3K dan penggantian Direktur dari Bapak Muhammad Yusuf kepada Bapak Ahmad Aris.
3. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025 dimana Pihak Pertama Penanda tangan PK (Direktur P3K) adalah Bapak Ahmad Aris. PK ini meliputi 7 Sasaran Kegiatan (SK), 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Revisi PK ini sebagai akibat dari perubahan nomenklatur Sasaran Kegiatan Nomor 5 dan perubahan besaran anggaran Direktorat P3K tahun 2025.

Pada Laporan Kinerja (LKj) Direktorat P3K tahun 2025, merujuk kepada Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025. Jumlah indikator kinerja Direktorat P3K berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 15 indikator kinerja (9 IKU dan 6 IKM) dalam 7 Sasaran Kegiatan (SK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi. PK Direktorat P3K Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80
		14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

2.7. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai Umpan Balik (*Feedback*) Perencanaan dan Penetapan Kinerja Direktorat P3K Tahun

Penentuan target indikator kinerja Direktorat P3K tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Direktorat P4K tahun 2024, kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, serta matrik *cascading* dari unit kerja level O (KKP) maupun level I (Ditjen PK) pada tahun 2025 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

Sasaran Kegiatan Tahun 2025		Indikator Kinerja Tahun 2025		Target Tahun 2025	Keterangan
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	Nomenklatur Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkaitan dengan penanggulangan sampah laut pada tahun 2024 adalah “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” dengan satuan ukur adalah kawasan.
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, IKU ini belum muncul. Perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana dan perubahan iklim (MBAPI) pada tahun 2024 adalah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan) dengan satuan ukur adalah Kawasan.
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, IKU ini belum muncul. Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi pada tahun 2024 adalah “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)” dengan satuan ukur adalah Kawasan.
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya pada tahun 2024 adalah Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT)

Sasaran Kegiatan Tahun 2025		Indikator Kinerja Tahun 2025		Target Tahun 2025	Keterangan
					dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau) dengan satuan ukur adalah pulau.
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	IKU ini berkaitan dengan bantuan sarana ekonomi produktif pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2024, IKU ini berkaitan dengan Pembangunan dermaga apung.
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat serta masyarakat tradisional dan masyarakat lokal pada tahun 2024 adalah: a. Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas). b. Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	IKU ini baru muncul pada tahun 2025.
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	70	Nomenklatur Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024. Beberapa catatan IKM ini pada tahun 2025, antara lain: a. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 81, sedangkan capaiannya sebesar 86,60. b. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 70.
		11.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	3	Beberapa catatan IKM ini, antara lain; a. Nomenklatur IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024, namun target IKM pada tahun 2025 sebanyak 3 dokumen. Sedangkan target pada tahun 2024 sebanyak 4 dokumen.

Sasaran Kegiatan Tahun 2025		Indikator Kinerja Tahun 2025		Target Tahun 2025	Keterangan
					b. Target dan capaian IKM ini pada tahun 2024 sebanyak 4 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80	Nomenklatur IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024. Beberapa catatan IKM ini pada tahun 2025, antara lain: a. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 88, sedangkan capaiannya sebesar 88,06. b. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80.
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80	Beberapa catatan IKM ini, antara lain; a. Nomenklatur IKM ini pada tahun 2024 yaitu "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" dengan target sebesar 80 sedangkan capaian sebesar 93,10. b. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80.
		14.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	Beberapa catatan IKM ini, antara lain; a. Nomenklatur dan target IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur dan target IKM pada tahun 2024. b. Target dan capaian IKM ini pada tahun 2024 sebanyak 100 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
		15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80	Beberapa catatan IKM ini, antara lain; a. Nomenklatur IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024. b. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 75 sedangkan capaian sebesar 96,74. c. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80.

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024

2.8. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulan, semester, dan tahun) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukan ke dalam sistem aplikasi kinerjaku berbasis informasi teknologi beralamat <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU atau IKM. Metode tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian IKU atau IKM. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU atau IKM sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%.
Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP ([kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) ditetapkan sebesar 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi tersebut dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-36/AG/2012 Tanggal 5 April 2012 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran juga menyebutkan bahwa angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Capaian minimum adalah 0%.
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU atau IKM untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.
4. Status indeks capaian IKU sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Status Indeks Capaian IKU atau IKM

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	nilai 110 – 120	Istimewa
	nilai 90 – <110	Baik
	nilai 70 – <90	Cukup
	nilai 50 – <70	Kurang
	nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaku (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.)



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

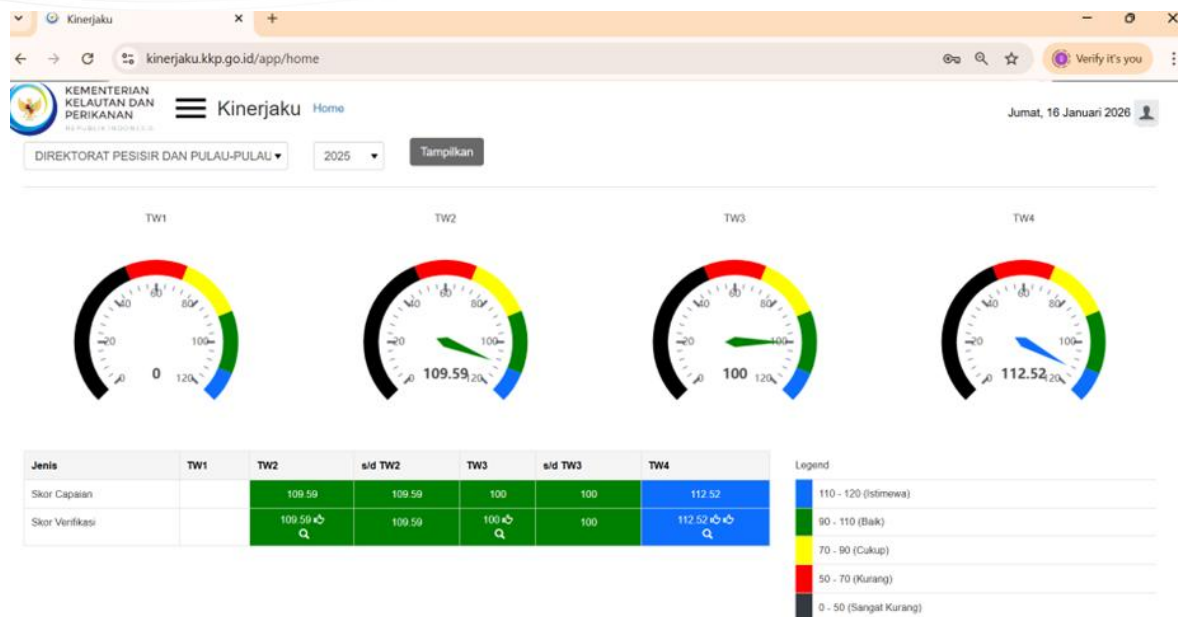
3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi atau capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Jumlah indikator kinerja Direktorat P3K yang merujuk kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 32 Desember 2025 sebanyak 15 indikator kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K tahun 2025 dari hasil pengukuran IKU dan IKM adalah **"112,52%" (Kategori "Istimewa")**. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, rentang (*range*) nilai kategori "Istimewa" adalah 110% - 120%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P3K pada tahun 2025 didukung sumberdaya antara lain:

- a. Pada saat nomenklatur Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) dimana jumlah pagu anggaran awal berdasarkan PK Direktorat P4K tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Terjadi perubahan nomenklatur dari Direktorat P4K menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K). Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025 disebutkan jumlah pagu anggaran Direktorat P3K sebesar Rp 54.321.352.000. Namun demikian, berdasarkan data dan informasi dari Tim Keuangan Direktorat P3K, pagu efektif yang dikelola sebesar Rp 43.745.913.000 (Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- b. Jumlah pegawai Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) pada tahun 2025 sebanyak 74 orang, yang terdiri atas 49 orang (66,22%) laki-laki dan 25 orang (33,78%) perempuan. Berdasarkan status kepegawaian, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 44 orang (59,5%), Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 13 orang (17,6%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak 7 orang (9,5%), dan PPPK penuh waktu sebanyak 10 orang (13,5%), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 6**.
- c. Peralatan dan mesin yang dimiliki kantor yang dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- d. Langkah-langkah lain yang digunakan untuk menghasilkan output atau mengelola sumber daya lain (manusia, uang, material).
- e. Sumber daya lainnya.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari hasil pengukuran IKU dan IKM Direktorat P3K tahun 2025 sebesar **112,52% (kategori "Istimewa", skala nilai 110% - 120%)** berdasarkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id>), disajikan pada gambar di bawah ini. Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P3K tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 10. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K dari Pengukuran IKU dan IKM Tahun 2025

Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Capaian 2025	% Capaian Kinerja 2025
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	93.09	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	63,20	114,91
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	2	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	74,06	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	6	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Capaian 2025	% Capaian Kinerja 2025
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	4	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerja KKP)
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)	47	47	100
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	2	100
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	164	107,89
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	87	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerja KKP)
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	3	100
		12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	83.36	104,20
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	94.30	117,88
		14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	100	100
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	98.40	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerja KKP)

IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 “Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target 18 ton pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan. Sebab faktanya, ketersebaran sampah di muka bumi ini tidak hanya ditemukan pada lahan tanah saja, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Merujuk pada *the National Geographic*, sampah laut atau *marine debris* adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Sampah tersebut berakhir di perairan melalui berbagai cara, baik itu pembuangan sampah sembarangan secara sengaja atau terbawa oleh arus air dan faktor cuaca (seperti angin dan badai).

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *marine debris* adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya.

Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak. Studi *United Nations Environment Programme (UNEP)* pada tahun 2021 menyebutkan, 80% sampah laut berasal dari daratan. Sampah itu terbawa aliran sungai, saluran air, hingga aktivitas pesisir. Sisanya datang dari aktivitas di laut, seperti perkapalan, perikanan, dan wisata bahari. Sampah laut di Indonesia didominasi oleh bahan sintesis seperti kantong plastik, pembungkus makanan, alas kaki, tali dan jaring ikan, polistirena, kaleng, botol plastik dan botol kaca, polietilen, plastik dan kaca.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan timbunan sampah nasional pada 2025 mencapai 50,06 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 40 persen tidak terkelola, dan sebagian besar berakhir di laut. Diperkirakan 16,02 juta ton sampah masuk ke perairan Indonesia. Kemudian sampah laut sendiri dari aktivitas laut itu kurang lebih 20% atau 4 juta ton. Jadi ada kurang lebih 20 juta ton sampah laut yang harus ditangani per tahun.

Pencemaran lingkungan akibat sampah menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah pencemaran air laut yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan laut, dimana ini dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Selain itu, tumpukan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menghambat pertumbuhan biota yang berfungsi sebagai penyedia oksigen dan habitat biota laut. Jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Tidak hanya lingkungan, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga terdampak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan. Bagi nelayan, sampah laut berarti berkurangnya hasil tangkapan. Penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa keberadaan

sampah plastik dapat menurunkan hasil tangkap hingga 30% karena ikan menjauh dari habitat tradisional. Selain itu, 30–40% alat tangkap nelayan rusak akibat tersangkut sampah di laut. Kerugian ekonomi dari sampah laut di Indonesia ditaksir mencapai miliaran dolar per tahun.

Permasalahan sampah tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah karena kurangnya edukasi dan fasilitas pengelolaan yang memadai. Walaupun beberapa program pembersihan pantai telah dilakukan, akan tetapi, hasilnya belum signifikan karena sampah terus berdatangan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, termasuk edukasi lingkungan, penguatan regulasi, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Salah satu dasar hukum yang mendukung IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” adalah **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan**.

Kegiatan pendukung IKU 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)”, antara lain:

1. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)

Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi ekonomi biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Desa Pesisir Bersih (DPB)

Desa Pesisir Bersih (DPB) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan Sarana dan Prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pendukung IKU 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” dalam rangka menjaga kebersihan laut dari sampah dalam rangka mewujudkan laut sehat bebas sampah (Laut SEBASAH).

KKP memandang sampah laut sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan ekonomi biru. Untuk menjawab persoalan ini, **KKP meluncurkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH)** sebagai orkestrasi nasional pengurangan sampah laut. Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula Penghitungan Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” dihitung dari **jumlah volume sampah yang terkumpul dari Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan jumlah volume sampah yang terkelola dari kegiatan Desa Pesisir Bersih (DPB)**. Target dan realisasi IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 01 (SK-01) Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil								
Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target	Capaian	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian Tahun 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Tahun 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	18	93,09	517,17 atau 120 berdasarkan Kinerja KKP	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan IKU dan satuan IKU	18	517,17	1.244	7,48%

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Keterangan: Pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)”. Terdapat perbedaan IKU dan satuan IKU pada tahun 2024 dibandingkan IKU tahun 2025

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Target IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada tahun 2025 sebanyak 18 ton, sedangkan capaian pada tahun 2025 sebesar 93,09 ton sehingga capaian kinerja sebesar 517,17% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Capaian pada tahun 2025 lebih besar daripada target tahun 2025. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Capaian IKU ini diperoleh dari:

1. Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16– 20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.
 - Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.

(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra)



Gambar 11. Foto kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali

2. Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, life jacket 20 unit, serokan 100 unit, trash bag 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 15,72 Ton pada tahun 2025. Serah terima Bantuan Pemerintah (BP) tersebut dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. BA 05/DJPK.1/PL.600/V/2025 Tanggal 30 Mei 2025.



Lanjutan...



Gambar 12. Penyaluran Bantuan Sarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih

3. Pengadaan bantuan sarana Pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (Berupa 2 unit incinerator, 20 unit gerobak roda tiga, 2 unit mesin press sampah, 2 unit mesin pencacah kayu, 1 unit mesin pencacah botol, dan 1 unit mesin press hidrolik) kepada kelompok Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) Trawangan yang berlokasi di Pulau Gili Trawangan, Kelompok Meno Lestari di Pulau Gili Meno, serta Kelompok Gili Care di Pulau Gili Air.



Mesin Insenerator Type D-1500 di Gili Trawangan



Mesin Pencacah Kayu, Mesin Pencacah Botol dan Mesin Press di Gili Meno dan Gilli Air

Gambar 13. Pengadaan bantuan sarana Pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih kepada kelompok Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) Trawangan

4. Telah dilakukan Aksi Bersih Pantai Laut di Lombok Utara NTB, tanggal 13-16 Desember. Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (APBL) dilaksanakan oleh Tim dari Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) di Pulau Gili Trawangan pada tanggal 15 Desember 2025. Total peserta yang terlibat dalam kegiatan ini mencapai ± 450 orang, total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai ± 287 kilogram atau setara dengan 0,287 ton, yang didominasi oleh sampah anorganik dari aktivitas pariwisata dan rumah tangga. Kegiatan ini diikuti oleh 400 peserta dengan jumlah peserta perempuan sebanyak 99 orang dan laki-laki sebanyak 301.



Gambar 14. Foto Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pulau Gili Trawangan Pada Tanggal 15 Desember 2025

Jadi, capaian di atas (jumlah sampah terkumpul seberat 93,09 ton) telah melebihi target IKU Nomor 01 pada tahun 2025 sebesar 18 ton.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Terdapat perbedaan IKU dan satuan IKU pada tahun 2025 dengan 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang bersih, penanganan sampah, dan penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada tahun 2024 menggunakan nomenklatur IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)”.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Telah dilakukan kegiatan pendukung IKU ini yang memberikan kontribusi capaian berupa jumlah sampah yang terkumpul sebesar 93,09 ton pada tahun 2025 sehingga capaian IKU 01 pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan target tahun 2025 pada target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 yaitu 18 ton.

Pada butir (*point*) 4 ini menyajikan perbandingan antara target dan capaian IKU 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” berdasarkan Perjanjian

Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 dengan target Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029 khususnya pada tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” Tahun 2025 dengan Target dalam Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	296	564	891	1.244	18	93,09	517,17	7,48

Sumber: Direktorat P3K Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029 khususnya pada tahun 2025. Capaian pada tahun 2025 sebesar 93,09 ton atau sebesar 517,17% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 Selanjutnya perbandingan capaian 2025 terhadap target akhir renstra 2025–2029 (khususnya tahun 2029) sebesar 7,48 %.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Pada bahasan ini berupaya melakukan *benchmarking* dengan instansi lain. Secara umum, *benchmarking* merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Metode *benchmarking* dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari media sosial khususnya melalui internet, bahan paparan, dan bahan dari sumber lainnya. Beberapa instansi yang bisa dijadikan *benchmarking*, antara lain:

1. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Dalam mendukung Rencana Strategis Nasional pengelolaan sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperhatikan berbagai regulasi dalam rangka memperkuat implementasi, antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 (Perpres 109/2025)
Menetapkan penanganan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan melalui teknologi ramah lingkungan, mengurangi residu ke TPA dengan kolaborasi lintas kementerian dan investasi hijau. Kebijakan ini, diluncurkan pada 14 Oktober 2025 melalui artikel resmi KLH/BPLH Nomor SR.268/HUMAS/KLH-BPLH/10/2025, menjadikan sampah sebagai sumber energi listrik, biogas, biofuel, dan produk turunan lainnya, menjawab kedaruratan pencemaran, kerusakan lingkungan, serta ancaman kesehatan masyarakat.¹ Perpres Nomor 109 Tahun 2025

¹ <https://kemenlh.go.id/news/detail/presiden-tetapkan-perpres-1092025-langkah-nyata-atasi-sampah-perkotaan>

memperkuat kebijakan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 35 Tahun 2018, dengan fokus arah pengelolaan sampah nasional. Pertama, jika regulasi terdahulu fokus pada percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 lokasi prioritas, kini Perpres 109/2025 memperluas sasaran ke seluruh daerah yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan. Kedua, peraturan ini menegaskan peran Danantara dalam pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), meliputi dukungan investasi serta pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL (BUPP PSEL).

Ketiga, Perpres Nomor 109 Tahun 2025 memberikan terobosan percepatan perizinan dan mekanisme pendanaan untuk efisiensi proyek berkelanjutan. Keempat, pemerintah jamin kepastian investasi lewat tarif listrik tetap USD 0,20 per kWh selama 30 tahun serta kewajiban PT PLN beli listrik olahan sampah, menarik investor dan integrasikan PSEL ke transisi energi bersih nasional. Kelima, pemerintah daerah wajib siapkan lahan dan pastikan pasokan serta pengangkutan sampah ke PSEL secara berkelanjutan. Regulasi ini wujud komitmen pengelolaan sampah perkotaan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas kementerian, investasi hijau, dan partisipasi daerah, menuju Indonesia bersih, sehat, serta berkelanjutan untuk mendukung Net Zero Emission 2060.

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas)
Perpres 97 Tahun 2017 adalah kebijakan nasional untuk mengarahkan seluruh Indonesia dalam mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sampai tahun 2025, termasuk target pengurangan 30% dan penanganan 70% volume sampah pada 2025 melalui program nasional, koordinasi lintas kementerian, dan insentif daur ulang. Kebijakan ini menjadi *road map* strategis untuk sinkronisasi upaya pusat-daerah, dengan indikator capaian seperti peningkatan fasilitas pengolahan. Peraturan ini guna menghadapi proyeksi timbulan sampah 80.000 ton/hari pada 2025, mendukung SDGs 11 dan 12 serta transisi ke zero waste.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menyediakan data timbulan sampah, komposisi, serta fasilitas seperti TPA, TPS 3R, dan Bank Sampah untuk monitoring capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah (IKPS). Pengelolaan sampah efektif dan berkelanjutan sangat bergantung pada data lengkap serta akurat, seperti disampaikan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa, Eduward Hutapea, dalam *Workshop* Pemutakhiran Data SIPSN di Kota Batu, Malang, pada 27–28 Agustus 2025.² *Workshop* ini bertujuan memperkuat sistem pendataan berbasis bukti, meningkatkan kualitas data SIPSN, serta memastikan kebijakan tepat sasaran melalui kolaborasi semua pihak, pendampingan pusat, dan pemanfaatan data untuk ekonomi sirkular.
- SK Menteri LHK Nomor 2569 Tahun 2025 menetapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai kewajiban, mengubah sisa makanan dan daun menjadi pupuk, energi, serta pakan ternak, ditetapkan 14 Oktober 2025 oleh Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq. Regulasi ini menekankan pemilahan organik-anorganik untuk ketahanan pangan dan energi, mengonversi sampah organik (>50% timbulan nasional) menjadi sumber daya produktif.³
Dilansir artikel resmi tanggal 15 September 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Deputy Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun menggelar rapat lanjutan dengan pembahasan mencakup kewajiban pemilahan dari sumber, teknologi ramah lingkungan seperti pengomposan, biokonversi, biodigester, serta pemanfaatan hasil sebagai pupuk, pakan ternak, energi terbarukan, dan produk bernilai tambah.⁴

Kebijakan yang mendukung pengelolaan persampahan, serta menjadi fondasi regulasi KLH/BPLH, antara lain:

² <https://kemenlh.go.id/news/detail/pengelolaan-sampah-yang-efektif-bergantung-pada-data-yang-akurat>

³ https://www.instagram.com/p/DQtpzoKkOgk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

⁴ <https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-matangkan-aturan-pengelolaan-sampah-organik-perkuat-ketahanan-pangan-dan-energi>

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur secara komprehensif pengelolaan sampah domestik, mencakup pengurangan (pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang) dan penanganan (pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir), serta wewenang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menetapkan norma, standar, target pengurangan bertahap, dan larangan impor sampah. Kebijakan ini menjadi fondasi hukum nasional untuk sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan swasta guna mencegah pencemaran lingkungan, sehingga mengatasi timbulan sampah harian 68.000 ton di Indonesia, serta memastikan penegakan tanggung jawab hierarkis dan sanksi pidana bagi pelanggar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, melaksanakan UU 18/2008 secara teknis, mengatur pengelolaan sampah rumah tangga (RS) dan sejenisnya melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*), penanganan akhir di TPA/TPST, wajib pemilahan di sumber, dan peran produsen dalam EPR (Extended Producer Responsibility). Kebijakan ini menyediakan pedoman operasional untuk daerah dalam membangun infrastruktur seperti TPS 3R dan bank sampah, menargetkan pengurangan volume sampah ke TPA hingga 30%. Kebijakan ini juga mendesak karena 70% sampah Indonesia bersifat organik yang bisa dikonversi jadi energi, mencegah overload TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 (Pengelolaan Sampah Spesifik), mengatur pengelolaan sampah spesifik seperti popok bayi, pembalut, kondom, dan limbah medis non-B3, termasuk pengumpulan terpisah, pengolahan khusus, dan larangan dicampur dengan sampah lain untuk mencegah kontaminasi. Kebijakan ini melengkapi regulasi umum dengan fokus pada sampah sulit didaur ulang (sekitar 10–15% timbulan), memastikan penanganan aman oleh pihak berwenang. Kebijakan ini menjadi krusial untuk kesehatan publik dan sanitasi di tengah urbanisasi cepat, mengurangi risiko penyakit dan polusi sekunder dari sampah higienis.
- Permen LHK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana, mengatur penanganan sampah bencana (organik dan anorganik padat dari bencana alam, non-alam, atau sosial) melalui tahapan pemilahan, pengangkutan, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan pemrosesan akhir, dilakukan setelah evakuasi korban dan status darurat bencana. Koordinasi dipimpin Menteri (skala nasional), gubernur (provinsi), atau bupati/wali kota (kabupaten/kota), dengan pengangkutan terpisah menggunakan alat sesuai kondisi. Kebijakan ini memberikan pedoman operasional terintegrasi melaksanakan PP No. 27/2020 untuk pengelolaan sampah spesifik pasca-bencana. Kebijakan ini diperlukan mengingat frekuensi bencana tinggi di Indonesia, mencegah kontaminasi sekunder, cemaran air tanah, dan risiko kesehatan masyarakat.⁵
- Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah, mengatur pendirian, pengelolaan, dan operasional bank sampah sebagai fasilitas pengumpul sampah terpilah dari masyarakat untuk didaur ulang, termasuk standar teknis, akuntansi, dan insentif ekonomi bagi pelaku. Fokus pada pengurangan timbulan sampah rumah tangga melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan integrasi dengan TPS 3R. Kebijakan ini guna mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi sirkular melalui bank sampah sebagai unit usaha mikro berbasis komunitas. Urgensi kebijakan ini karena 70% sampah Indonesia organik dan plastik yang bisa didaur ulang, mengurangi beban TPA *overload* dan ciptakan nilai ekonomi dari sampah.
- Permen LHK Nomor 9 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan beracun, yang mencakup identifikasi, pemilahan terpisah, pengumpulan khusus, pengolahan aman, dan pembuangan akhir oleh pihak berwenang. Meliputi koordinasi pusat-daerah untuk pencegahan kontaminasi lingkungan dari sampah elektronik, baterai, atau limbah industri rumah tangga. Hal ini menjadi penting untuk melindungi kesehatan publik dan ekosistem dari toksin B3 yang menyumbang 10–15% timbulan, dan mencegah polusi tanah dan air di tengah urbanisasi.

⁵ <http://ppebalinusra.menlhk.go.id/sosialisasi-permen-lhk-no1-2024-dan-no-9-2024/>

- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meluncurkan inisiatif strategis berupa penyusunan kebijakan pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk organik dan pembenah tanah, hal ini karena sekurangnya 343 TPA masih menggunakan sistem *open dumping*, sementara data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat timbulan sampah sepanjang 2024 mencapai 27,74 juta ton atau sekitar 76 ribu ton per hari. Dari jumlah tersebut, sampah makanan sisa menjadi penyumbang terbesar, hampir 40 persen, yang akhirnya menumpuk di TPA.

Kebijakan ini menargetkan pengelolaan sampah organik hingga 100 persen pada 2029 sesuai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain menjadi solusi terhadap persoalan lingkungan, kebijakan ini juga diharapkan mendukung swasembada pangan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, menjaga kesuburan tanah, serta memperkuat ketahanan energi dan pemulihan lahan kritis.⁶

Tindakan dan program Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang dapat dijadikan *benchmarking* mencakup:

1. Rakornas Pengelolaan Sampah 2025 dengan tema "Menuju Kelola Sampah 100%" di Jakarta *International Convention Center*, dihadiri >1.000 peserta termasuk 38 gubernur dan 514 bupati/wali kota untuk konsolidasi nasional. Forum ini reformasi sistem pengelolaan sampah sirkular melalui *business matching* industri (semen RDF, daur ulang plastik), pameran teknologi, dan komitmen kepala daerah susun peta jalan sampah. Benchmark: Tingkat daur ulang plastik nasional 22% (Jawa 31%), target pengelolaan 51% pada 2025, eliminasi 343 TPA *open dumping*.⁷
2. Penilaian Adipura Baru yang tidak hanya nilai estetika kota, tapi kapasitas kelembagaan, pemilahan dari sumber, dan larangan TPA *open dumping*, kota pelanggar otomatis gugur. Diperkenalkan Rakornas 2025, instrumen ini memperbaiki tata kelola daerah dan monitoring IKPS via SIPSN. Peringatan bagi >343 TPA *open dumping* aktif, untuk mendorong transisi zero waste city bertahap.⁸
3. Penutupan TPA *Open Dumping* sebagai prioritas program 100 hari kerja, termasuk pembangunan TPA dan TPST baru untuk menggantikan sistem *dumping* ilegal yang mencemari air tanah dan udara.
4. Program strategis 2025 mencakup penanganan sampah di 12 kota sasaran Perpres 35/2018, dengan fokus penyelesaian TPA Bantargebang Jakarta (55 juta ton sampah tertimbun) melalui teknologi ramah lingkungan.

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mendukung penguatan implementasi penanganan sampah melalui paparan presentasi Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman tanggal 27 Agustus 2025 berjudul Strategi dan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah dalam RPJMN 2025-2029, diuraikan Visi persampahan 2045 yaitu pengelolaan persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan dengan memenuhi asas tanggung jawab, manfaat, keadilan, kesadaran, kebencanaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Visi dan target ini menjadi kompas nasional transformasi pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular berkelanjutan, sejalan Rencana Strategis KLH/BPLH dan Perpres 109/2025.

⁶ <https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-matangkan-aturan-pengelolaan-sampah-organik-perkuat-ketahanan-pangan-dan-energi>

⁷ <https://www.kemenlh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arrah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025>

⁸ <https://www.kemenlh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arrah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025>

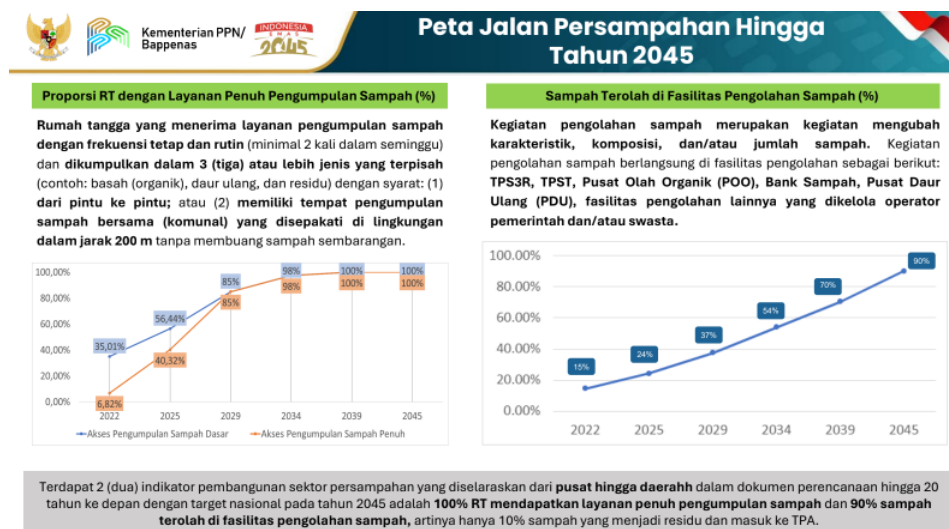
- Target Pengelolaan Sampah 2045 mencakup 100% rumah tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah, serta 90% sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah terdiri dari 35% sampah terdaur ulang, 55% pengolahan sampah (*material & energy recovery*), dan hanya 10% sampah residu tersisa di LUR (Lahan Penimbunan Residu).



Gambar 15. Visi Persampahan 2045 dan Target RPJMN 2025-2029

Sumber: Bahan Paparan Strategi dan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah dalam RPJMN 2025-2029, 27 Agustus 2025

- Peta Jalan Persampahan hingga tahun 2045 menyelaraskan 2 indikator pembangunan sektor persampahan dari pusat hingga daerah dalam dokumen perencanaan 20 tahun ke depan, dengan target nasional 2045: 100% Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah dan 90% sampah terolah di fasilitas pengolahan (hanya 10% residu ke TPA).
 - Indikator pertama: Rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi rutin (minimal 2x/minggu), terpisah ≥ 3 jenis (basah/organik, daur ulang, residu), syarat pintu-ke-pintu atau TPS komunal <200m tanpa buang sembarangan.
 - Indikator kedua: Kegiatan pengolahan sampah di fasilitas seperti TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), atau fasilitas lain oleh pemerintah/swasta. Peta jalan ini mendukung visi RPJMN 2025-2029 transformasi ekonomi sirkular.



Gambar 16. Peta Jalan Persampahan Hingga tahun 2045

Sumber: Bahan Paparan Strategi dan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah dalam RPJMN 2025–2029, 27 Agustus 2025

- Pengelolaan sampah ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) didukung penguatan kebijakan, tata kelola, kinerja kelembagaan/keuangan daerah, serta komitmen kepala daerah melalui Rencana Induk Pengelolaan Sampah, komprehensif finansial, pemisahan operator-regulator, penyesuaian retribusi, dan standar tipping fee. Reformasi hulu dengan mengubah perilaku penghasil sampah via literasi (pemicuan, pemilahan, pengurangan) yang terintegrasi pengumpulan-pengangkutan terpilah serta pengolahan teknologi tepat guna lokal. Pada tingkat hilir, perlu meningkatkan pengumpulan, pengolahan, pemrosesan residu TPA, aset pengadaan/transfer pusat-daerah, serta sarana penanganan sampah perairan integrasi land-based cegah polusi laut.

Tindakan dan program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang dapat dijadikan *benchmarking* mencakup:

- Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025–2029) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025–2045) yang mengamanatkan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi hulu-hilir sebagai prioritas transformasi.
- Kolaborasi Teknologi: Kerja sama Danone pasang *recycle vending machine (RFM)* tukar botol plastik dapat hadiah. Layanan RFM itu tersedia di kantor-kantor Kementerian PPN.
- Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Jerman melalui *GIZ* menghibahkan mesin pirolisis untuk pengolahan sampah di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan geopark tersebut mendapatkan mesin pirolisis yang bisa mengubah 10 kilogram plastik menjadi lima liter bahan bakar jenis solar.⁹
- Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen melaksanakan reformasi pengelolaan sampah melalui program *USAID Sustainable Municipal Solid Waste Management and Partnership* (SELARAS). *USAID* SELARAS dirancang untuk mengurangi sumber polusi plastik laut dari daratan dan metana, unsur utama GRK, dengan mendukung sistem pengelolaan sampah dan daur ulang yang berkelanjutan dan terintegrasi. 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan menegaskan komitmen daerah dalam memprioritaskan pengelolaan sampah melalui program pendampingan *USAID* SELARAS dengan menandatangani deklarasi komitmen untuk bersama-sama mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Indonesia.¹⁰
- Proyek kerja sama Indonesia-Jerman yang dimulai sejak 2020 ini didukung komite pengarah K/L, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memperkuat aspek nonteknis persampahan, mulai dari perencanaan, pendanaan, kelembagaan, hingga pengelolaan data. Program Pengurangan Emisi di Perkotaan melalui Peningkatan Pengelolaan Sampah, bagian Prakasa Iklim dan Teknologi Jerman (DKTI) dijalankan di Kota Cirebon, Malang, Bukittinggi, Jambi, dan Denpasar, serta Kabupaten Bogor. Beberapa hasil yang telah dihasilkan selama proyek berlangsung adalah enam laporan analisis rekomendasi kebijakan, tiga peraturan daerah tentang penyesuaian angka retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, Kota Bukittinggi, dan Kota Cirebon, pendampingan pemilahan sampah di lebih dari 558 kepala keluarga di 6 kabupaten/kota pilot, pembangunan Kalkulator Digital Perhitungan Biaya Retribusi Pengelolaan Sampah, serta penguatan interoperabilitas data persampahan lintas K/L.¹¹

⁹ <https://www.antaranews.com/berita/3939579/kementerian-ppn-sebut-pemanfaatan-teknologi-solusi-atasi-sampah>

¹⁰ <https://www.bappenas.go.id/id/berita/indonesia-as-dukung-reformasi-pengelolaan-sampah-nasional-tingkatkan-kesehatan-masyarakat-dan-keberlanjutan-lingkungan-Vf6Uo>

¹¹ <https://lcdi-indonesia.id/2024/02/01/bappenas-dan-pemerintah-jerman-rekomendasikan-reformasi-pengelolaan-sampah>

3. Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL)

TKN PSL adalah tim koordinasi lintas kementerian/lembaga yang mengelola pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) 2018–2025, fokus pada pencegahan, pengelolaan, dan penanggulangan sampah laut terutama plastik dari darat, pesisir, dan aktivitas laut.

Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 untuk mengoordinasikan upaya nasional mengurangi sampah laut hingga 70% pada tahun 2025. TKN PSL berkedudukan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan sekretariat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹² Terdapat Website yang memberikan informasi mengenai sampah laut melalui <https://sampahlaut.id/>

Penelitian LIPI pada periode 2018–2019 di 18 lokasi pesisir utama menghasilkan baseline data sampah laut nasional sebesar 0,27 – 0,59 juta ton per tahun yang menjadi acuan utama Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL). Data ini diperoleh melalui metode shoreline survey dan pemodelan backward trajectory untuk melacak sumber sampah dari daratan, sungai, muara, dan aktivitas laut. Angka tersebut mencerminkan kebocoran sampah yang dominan berasal dari daratan (land-based) terutama styrofoam dan plastik sekali pakai, dengan peningkatan signifikan saat musim hujan akibat luapan sampah dari selokan dan sungai. Baseline ini menjadi dasar target pengurangan 70% sampah laut pada 2025 sesuai Perpres 83/2018 dan digunakan TKN PSL untuk monitoring capaian program nasional.

Sampah yang dibuang sembarangan di tepian sungai atau laut, rawan masuk dan mencemari perairan. Sampah-sampah plastik itu antara lain bisa jadi mikroplastik yang membahayakan. Sebaran mikroplastik juga makin tak tertahan lagi di laut. Hal tersebut terjadi karena sampah plastik berukuran besar makin banyak masuk ke laut. Untuk mengendalikan mikroplastik, beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain harus bisa mengendalikan sampah plastik berukuran besar, dan mendorong peran aktif masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penanganan sampah plastik.

4. SDGs dan Komitmen Uni Eropa Mengatasi Sampah Laut

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan dasar pijakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan target mendesak terkait *SDGs* urusan ekosistem laut tersebut. Targetnya, pada 2020 ini, ada upaya mengatasi dampak merugikan tersebut guna tercipta laut yang sehat dan produktif; serta melakukan konservasi setidaknya 10% wilayah pesisir. **Sementara pada 2025, targetnya adalah mengurangi polutan laut termasuk sampah plastik.** Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.

Target *SDGs* 14.1 tidak menetapkan persentase pengurangan sampah laut yang spesifik secara global, melainkan hanya menyebutkan "mencegah dan secara signifikan mengurangi" semua jenis pencemaran laut. Indikator pengukurannya berupa kepadatan sampah plastik terapung dan indeks eutrofikasi pesisir (ICEP), tanpa target numerik tetap.

Komitmen mengatasi sampah laut di Uni Eropa menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian ekosistem laut melalui kebijakan lingkungan inovatif. Melalui **Rencana Aksi Nol Polusi 2021 atau 2021 Zero Pollution Action Plan**, UE berupaya meningkatkan kualitas lingkungan pesisir dan laut secara substansial, bukan hanya untuk wilayahnya sendiri tetapi juga demi negara tetangga. Pada 2030, target spesifik mencakup pengurangan 50% kehilangan nutrisi, pestisida kimia, serta antimikroba untuk ternak dan akuakultur; **50% sampah plastik di laut**; serta 30% pelepasan mikroplastik ke lingkungan, disertai komitmen mengurangi total produksi sampah dan 50% sampah kota yang tersisa.¹³

Single-Use Plastics Directive (SUPD) 2019/904 menjadi pilar utama penegakan hukum di UE, dengan **larangan resmi sejak Juli 2021 terhadap produk plastik sekali pakai seperti piring, peralatan makan, sedotan, tongkat balon, korek kuping, dan pengaduk minuman**—karena alternatif non-plastik sudah

¹² <https://sampahlaut.id/>

¹³ <https://sdgs.un.org/partnerships/improving-coastal-and-marine-environment-zero-pollution-action-plan>

tersedia dan sampah ini menyumbang 70–85% polusi pantai. **Negara anggota wajib mencapai target pengumpulan botol minuman plastik sebesar 77% pada 2025 dan 90% pada 2029.**¹⁴

Produsen plastik kini bertanggung jawab atas biaya pembersihan sampah serta pelabelan peringatan lingkungan pada kemasan, sementara botol baru harus mengandung 25% plastik daur ulang pada 2025, naik menjadi 30% pada 2030. Pada 2026, langkah-langkah ini semakin selaras dengan *Zero Pollution Action Plan*, mendorong pencapaian target pengurangan 50% sampah plastik laut pada 2030 untuk laut yang lebih sehat dan produktif.

5. Studi Literatur Relevan Mengenai Sampah Laut

Mengutip dari artikel dengan judul “Krisis Sampah Plastik dan Arah Kebijakan Lingkungan 2025 Dari Daratan hingga Lautan Nusantara”¹⁵, diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

1. Tahun 2025, produksi sampah plastik nasional mencapai **12,4 juta ton per tahun**, meningkat 14% dibandingkan tahun 2020. Walaupun Indonesia telah menetapkan target pengurangan sampah plastik hingga 70% pada 2025 melalui *National Plastic Action Partnership (NPAP)*, kenyataannya baru sekitar 40% yang berhasil direduksi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi produk sekali pakai, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya sistem pengelolaan limbah.
2. Citra satelit yang dirilis BRIN dan NASA pada Bulan Juni 2025 menunjukkan bahwa **Sungai Citarum, Bengawan Solo, dan Kapuas** menjadi tiga jalur utama aliran sampah plastik ke laut. Di sisi pesisir, Lembaga Ilmu Pengetahuan Kelautan Indonesia (LIPI) menemukan mikroplastik di 92% sampel ikan laut yang dijual di pasar tradisional Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
3. Studi Bappenas (2025) memperkirakan kerugian akibat pencemaran plastik di sektor perikanan dan pariwisata mencapai **Rp 12,1 triliun per tahun**.
4. Industri pariwisata di Bali dan Lombok sempat melaporkan penurunan 8% jumlah wisatawan karena pantai yang tercemar limbah plastik.
5. Secara kesehatan, mikroplastik yang masuk ke tubuh manusia melalui air dan makanan berpotensi menyebabkan gangguan endokrin dan sistem imun. Kemenkes memperingatkan bahwa kandungan mikroplastik pada air minum kemasan telah mencapai **0,9 partikel per liter**, melebihi ambang aman WHO.

Berdasarkan artikel berjudul “Mengapa target 70% pengurangan sampah plastik laut pada 2025 sulit tercapai”¹⁶ disebutkan bahwa untuk dapat mengurangi sampah plastik laut secara signifikan, perlu ada langkah konkret yang melibatkan semua pihak, antara lain:

1. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengurangan sampah plastik.
2. Pemerintah daerah harus didorong untuk mengadopsi kebijakan yang berhasil diterapkan di Jakarta dan Bali, seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai, dan menyesuaikannya dengan kondisi setempat.
3. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah sangat penting, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.
4. Mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk masyarakat, industri, pemerintah, dan akademisi. Kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang lebih efektif, seperti pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan riset tentang alternatif pengganti plastik.
5. Perubahan perilaku masyarakat juga tidak kalah penting dalam upaya ini. Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga komunitas, perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang lebih baik.
6. Evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan yang diterapkan harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.

¹⁴ <https://www.dw.com/id/parlemen-eropa-larang-plastik-sekali-pakai-mulai-2021/a-48099233>

¹⁵ <https://agridigi.fkp.unesa.ac.id/post/krisis-sampah-plastik-dan-arah-kebijakan-lingkungan-2025-dari-daratan-hingga-lautan-nusantara>

¹⁶ <https://theconversation.com/mengapa-target-70-pengurangan-sampah-plastik-laut-pada-2025-sulit-tercapai-261479>

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti pelajar dan mahasiswa, komunitas dan organisasi lingkungan, lembaga swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat. Bentuk dukungan para pihak pemangku kepentingan tersebut dalam penanganan sampah laut dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 15. Bentuk Dukungan Para Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Sampah Laut

No.	Pihak Pemangku Kepentingan	Bentuk Dukungan dalam Penanganan Sampah Laut
1.	Pemerintah Pusat (KKP dan K/L Lain)	a. KKP bekerjasama lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam upaya pembersihan sampah di laut. b. KKP memberikan bantuan sarana/prasarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (DPB).
2.	Pemerintah Daerah (Pemda)	Pemda turut membina masyarakat dan kelompok penggerak lingkungan, serta mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah terintegrasi.
3.	Pelajar dan mahasiswa	Pelajar dan mahasiswa terlibat dalam aksi bersih-bersih sampah laut dan sebagai inisiator kampanye kesadaran lingkungan.
4.	Komunitas dan Organisasi Lingkungan	Komunitas dan organisasi lingkungan berperan dalam pembersihan, pemilahan, dan daur ulang sampah plastik, serta memberikan pemahaman, mengedukasi, memberdayakan Masyarakat.
5.	Lembaga Swasta dan Perguruan Tinggi/Universitas	Lembaga swasta dan perguruan tinggi/universitas sebagai mitra strategis dalam program.
6.	Masyarakat Pesisir dan Nelayan	Masyarakat pesisir dan nelayan terlibat aktif dalam Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), Gerakan Nasional Cinta Laut (Gernas BCL), dan program Laut SEBASAH untuk membersihkan sampah dari laut.

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (2025)

Kendala yang dihadapi pada tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” sebagai berikut:

- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada tahun 2025 didukung oleh Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (kode QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran (kode QDD.001), Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir

Selain itu, IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada tahun 2025 didukung oleh Bantuan Kelompok Masyarakat (QEH), Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih (QEH.003), dan Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan (051), dan Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan (051.OA).

1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025.

2. Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Prov. Bali 16 – 20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton,
3. Rapat Pembahasan *Dashboard* Data dan Informasi Sampah Laut di GMB III Lantai 8, Ruang Rapat Selaru (21 Januari 2025).

4. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025).
5. *Workshop Consolidations and Coordination* Pengelolaan Sampah Laut di Kawasan Konservasi Perairan dan Pembiayaannya (23 Januari 2025).
6. Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Permen KP tentang Desa Pesisir Bersih (19 Februari 2025).
7. Pembahasan *Draft* Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih (21 Februari 2025).
8. Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut (27 Februari 2025).
9. Rapat rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih di Ruang.Rapat Terubuk Lantai 10 GMB 3 (14 April 2025).
10. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Hotel Mercure Jakarta Sabang (16 April 2025).
11. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Desa Pesisir Bersih di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lt.8, Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (25 April 2025).
12. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Sampah Laut Terpadu (SiSalut) (5 Mei 2025).
13. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Hotel Mercure Jakarta Sabang (8 Mei 2025).
14. Rapat Pembahasan Program LAUT SEBASAH (Laut Sehat Bebas Sampah) melalui Aplikasi Zoom (11 Juni 2025).
15. Rapat Perhitungan Capaian Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) Tahun 2024 di Novotel Bandung dan Aplikasi Zoom (20 Juni 2025).
16. *High Level Meeting* Koordinasi Pembahasan *Draft* Revisi Peraturan Presiden Terkait Pengelolaan Sampah di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta (26 Juni 2025).
17. Rapat Koordinasi Kegiatan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025).
18. Narasumber Program dan Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Indonesia di Pantai Karangsong, Kabupaten Indramayu (2 Juli 2025).
19. *Workshop on Mitigation and Strategic Policy for Combating Microplastic Pollution for Marine and Freshwater Fisheries in Southeast Asia Region* di Lotus Sky Ballroom Lantai 27, Grand Mercure Jakarta Kemayoran (2 Juli 2025).
20. Rapat Koordinasi Kegiatan di Kamal Muara di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB III (8 Juli 2025).
21. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara dan Deklarasi Laut SEBASAH di Ruang Rapat Tuna, GMB IV Lantai 15 dan aplikasi zoom (11 Juli 2025).
22. Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 di Hotel Aone Jakarta (15-16 Juli 2025).
23. Rapat Koordinasi Kerjasama Pameran UMKM dan Edukasi Pengelolaan Sampah di Kamal Muara Jakarta melalui aplikasi zoom (18 Juli 2025).
24. Rapat Persiapan Pameran UMKM dan Edukasi Pengelolaan Sampah di Kamal Muara, Jakarta di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Minabahari 3 Lantai 9 (23-24 Juli 2025).
25. Rapat Penyusunan Strategi Komunikasi dan Koordinasi Dokumentasi Liputan Kegiatan *Kick Off* Laut Sehat Bebas Sampah dan *Groundbreaking* Kawasan Mangrove Nasional di Ruang BHKLN, GMB I Lantai 5 (28 Juli 2025).
26. Audiensi dengan *Save The Children* Indonesia terkait program Laut SEBASAH (Sehat Bebas Sampah) melalui Aplikasi Zoom (30 Juli 2025).
27. Rapat Koordinasi Rencana Kolaborasi Publikasi Laut SEBASAH di Ruang Rapat Gedung Mina Bahari I Lantai 5 dan Aplikasi Zoom (31 Juli 2025).
28. Rapat Persiapan Pelaksanaan *Kick Off* Program Laut SEBASAH melalui Aplikasi Zoom (1 Agustus 2025).

29. Pelatihan Produk Olahan Sampah di SDN Kamal Muara 01, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (4 Agustus 2025).



Pelatihan Produk Olahan Sampah kepada Siswa/i SDN Kamal Muara 01, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara

30. Kick off Program Laut SEBASAH (6 Agustus 2025).



Kick off Program Laut Sebasah dan Grounbreaking Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara Jakarta Utara dihadiri oleh Ibu Wapres RI, Wamen KP, Wamen LH dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

31. Rapat Pembahasan *ToR (Terms of References) Technical Assistance* dan *Timeline* Program Laut SEBASAH di Ruang Rapat Terbuk Lt. 10, Gedung Mina Bahari 3 (15 Agustus 2025).
32. *Focus Group Discussion* Pembahasan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim (20 Agustus 2025).
33. Pembahasan *Draft* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Laut SEBASAH di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim (21 Agustus 2025).
34. Rapat Pembahasan Pelaksanaan *Policy Actions Program PBL Marine Debris* di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD (26 Agustus 2025).
35. Surat Nomor B.919/MEN-KP/VIII/2025 Tanggal 31 Agustus 2025 Hal Masukan Materi dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah.
36. Pembahasan terkait Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (8 September 2025).

37. Narasumber Pelatihan Penanggulangan Pencemaran di *The Stones* Legian Bali (8-9 September 2025).
38. Rapat Penyusunan *Draft* Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laut SEBASAH di Ruang Rapat Selaru, Gd. Mina Bahari 3 lantai 8 (15 September 2025).
39. *Kick-off Meeting Monitoring Mission 3 of Subprogram 2 Policy-Based Program (PBL) on Reducing Marine Debris* di Hotel Mandarin Oriental Jakarta (22 September 2025).
40. Diskusi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) dengan Topik "Persampahan" di *THE 101* Jakarta Sedayu Darmawangsa (26 September 2025).
41. Narasumber terkait ekonomi biru : Strategi Upaya Penanganan Pencemaran Sampah Laut dan Perubahan Iklim di Indonesia bertempat di Khas Palu Hotel (29 September 2025).
42. Rapat Koordinasi Pembahasan *Draft* Revisi Peraturan Presiden Terkait Pengelolaan Sampah di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan (30 September 2025).
43. Lokakarya Peencanaan *Strategis Abandoned, Lost, or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG)* di Hotel Rinra Makassar.
44. Masukan Materi Teknis Laut Sebasah dalam Ranperpres tentang Jakstranas Percepatan Pengelolaan Sampah dan Integrasi Muatan Teknis Laut Sebasah dalam Ranperpres Jakstranas Percepatan Pengelolaan Sampah di Hotel Mercure Sabang (7 Oktober 2025).
45. Rapat Sinergi Program Sebasah di Gili Matra melalui aplikasi zoom (20 Oktober 2025).
46. Rapat Pembahasan *Draft* Nota Kesepakatan Program Laut Sebasah di Kantor Gubernur NTB dan aplikasi zoom (22 Oktober 2025).
47. Narasumber FGD dengan Tajuk "Pemetaan Tren dan Kerjasama Multistakeholders dalam Tata Kelola Sampah Plastik Laut di Indo-Pasifik di Gedung the Habibie Center Lantai 3 (28 Oktober 2025).
48. *Plastic, Climate, Biodiversity Nexus Forum 2025* di Ballroom 3 Lantai 2 The Ritz Carlton Jakarta (28 Oktober 2025).
49. *International Workshop on "Indonesia-Taiwan Collaboration in Scaling Up Marine Plastic Debris Governance in the Indo-Pacific* di Mercure Jakarta Batavia (6 November 2025).
50. Audiensi dengan ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia) terkait rencana kunjungan kerjasama *The Sea Cleaner Swiss* Kapal Sampah Mobula 10 dengan KKP di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (6 November 2025).
51. Rencana Kerjasama Pengelolaan Sampah Laut (*Mr. Benoit de Torcy, Managing Director The (TSC) Swis* dan Rencana Kerjasama Pengelolaan Sampah Laut dengan ADUPI di Ruang Rapat Padaido Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (10 November 2025).
52. Rapat Pembahasan *Draft* Nota Kesepakatan untuk Mendukung Program Laut Sehat Bebas Sampah di Prime Park Hotel Lombok dan Aplikasi Zoom (19 November 2025).
53. *Launching AFD Technical Assistance to support National Action Plan on marine debris reduction in Indonesia: Improvement of the management of fishing gears to reduce marine pollution* di Bromo Room, Hotel Grand Hyatt Jakarta (19 November 2025).
54. Pertemuan Forum Pengelolaan *Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG)* (27 November 2025).
55. Focus Group Discussion Integrasi Pengelolaan Sampah Hulu ke Hilir Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) di *Mercure Convention Center Ancol* (4 Desember 2025).
56. FGD Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Data Geospasial di The Tribrata Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (5 Desember 2025).
57. Workshop & Diskusi – Dari Uji Coba ke Penerapan: Mendorong Sistem Guna Ulang Kemasan Makanan & Minuman untuk Pengurangan Sampah Plastik di Artotel Gelora Senayan (5 Desember 2025).
58. *High-Level Dinner Meeting PBL Reducing Marine Debris SP2* di The Acre, Menteng, Jakarta.
59. Aksi Bersih Pantai dan Laut Gili Trawangan di Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (15 Desember 2025).
60. Pembicara acara "*National Plastic Action Partnership Meeting: Key Reflections 2025 and Outlook for 2026*" di Ayana Mid Plaza Jakarta (16 Desember 2025).



Rakor Integrasi Muatan Teknis Ranperpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah dihadiri oleh Dirjen PK dan Staf Ahli Menteri LH



Pengolahan Sampah Eksisting di Gili Trawangan



Hasil Pengumpulan dan Penimbangan Sampah pada ABPL Pantai Gili Trawangan



Rapat Pembahasan Nota Kesepakatan Pelaksanaan



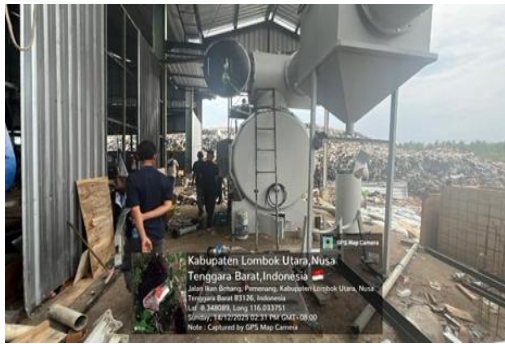
Program Laut Sebasah di Provinsi NTB



Rapat Pembahasan Rencana Aksi Implementasi Nota Kesepakatan KKP dengan Pemprov NTB



FGD Konsep, Regulasi, dan Strategi Program Laut Sebasah



Progres Pembangunan Sarana Pengelolaan Sampah (Insinerator) di Gili Trawangan



Progres Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah (Mesin Press Sampah Plastik, Mesin Cetak Batako, Mesin Pencacah Botol) di Gili Meno



Aksi Bersih Pantai dan Laut di Pantai Gili Trawangan yang diikuti oleh Siswa/i, Aparat Pemerintah dan Masyarakat setempat



Uji Coba Sarana Pengelolaan Sampah (Insinerator) di Gili Trawangan

Gambar 18. Kumpulan Kegiatan Pendukung Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)

9. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QDD.001.051. Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	141.680.000	94.205.000	92.241.175	0	92.241.175	97,92	1.963.825

QEH.003.051.OA. Desa Pesisir Bersih	701.870.000	344.319.000	312.505.800	22.892.398	335.398.198	97,41	8.920.802
Total	843.550.000	438.524.000	404.746.975	22.892.398	427.639.373	97,51	10.884.627

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Total pagu efektif sebesar Rp438.524.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp427.639.373, atau mencapai 97,51% dari anggaran yang tersedia, dan sisa anggaran Rp10.884.627.

Sedangkan realisasi anggaran berkaitan dengan *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA (kode anggaran REA.004) khususnya yang berkaitan dengan Laut Sebasah dijelaskan di bawah ini.

Tabel 17. realisasi anggaran berkaitan dengan *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA (kode anggaran REA.004)

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA..004.051.EH Penyusunan Nota Kesepahaman dengan Pemda NTB tentang Laut Sebasah	249.200.000	249.200.000	53.691.490	117.054.909	170.746.399	68,52	78.453.601
REA..004.051.EI Pengadaan Sarana Prasarana Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi di TWP Gili Matra	12.380.800.000	12.380.800.000	10.277.950.000	350.051.795	10.628.001.795	85,84	1.752.798.205
REA..004.051.EJ <i>Launching</i> Laut Sebasah Provinsi NTB	470.000.000	470.000.000	0	394.837.350	394.837.350	84,01	75.162.650

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan I tahun 2026 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pembersihan sampah plastik di laut melalui program Laut Sebasah (Laut Sehat Bebas Sampah).

IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 “Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target nilai 55 pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan isu penting karena wilayah ini rentan terhadap berbagai ancaman termasuk perubahan iklim dan bencana alam serta aktivitas manusia. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada kemampuan wilayah tersebut untuk menahan, beradaptasi, dan

pulih dari dampak negatif perubahan iklim, bencana alam, dan aktivitas manusia yang merusak. Ini melibatkan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beberapa hal yang berkaitan dengan IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”, antara lain:

1. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi: (a) Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi; (b) Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim; (c) Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai).
2. Wilayah pesisir yang meningkat nilai rehabilitasi lakukan dengan kegiatan:
 - a. Rehabilitasi ekosistem mangrove.
 - b. Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
 - c. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang.
 - d. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
 - e. Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.
3. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim melalui peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim.
 - b. Pengembangan Kawasan Karbon Biru untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
 - c. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim.
4. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Struktur atau Fisik melalui pembangunan struktur alami dan/atau buatan.
 - b. Non Struktur atau Non-Fisik melalui peningkatan kesadaran mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir.
5. Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota.

Teknik menghitung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sebagai berikut: Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.

Rumus Perhitungan:

$$NKW = (NRWP + NPPI + NMBP)/3$$

Dimana:

- NKW: Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir.
- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- NPPI: Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir.
- NMBP: Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir.

1. Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir (NRWP): dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir

Rumus Perhitungan:

$$NRWP = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Jumlah komponen pendukung}$$

NRWP dihitung berdasarkan lima komponen berikut:

- Rehabilitasi ekosistem mangrove.
- Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
- Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
- Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.

2. Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir (NPPI): dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan pengendalian perubahan iklim

Rumus perhitungan:

$$\text{NPPI} = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Jumlah komponen pendukung}$$

NPPI dihitung berdasarkan tiga komponen berikut:

- Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim.
- Kawasan Karbon Biru.
- Sekolah Pantai Indonesia.

3. Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir (NMBP) dihitung berdasarkan kuisioner terkait dengan kegiatan mitigasi bencana kawasan pesisir

Rumus Perhitungan:

$$\text{NMBP} = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Jumlah komponen pendukung}$$

NMBP dihitung berdasarkan dua komponen berikut:

- Struktur atau fisik.
- Non-struktur atau non-fisik.

Keterangan:

1. Belum ada pedoman atau juknis untuk penghitungan IKU ini pada tahun 2025.
2. Rumus penghitungan IKU ini disusun oleh tim Direktorat P3K dengan menggunakan *tool*/ pengolahan data (*MS Excel*) pada tahun 2025.

Capaian “Nilai Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” sebesar nilai 63,20 pada tahun 2025 masuk dalam kategori “**Sedang**” dengan warna “**Kuning**” dan rentang nilai 50–74 sebagaimana dijelaskan pada matrik atau tabel di bawah ini.

Tabel 18. Matrix Indikator Capaian Nilai Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kategori	Rentang Nilai	Warna
Sangat Rendah	0–24	Merah
Rendah	25–49	Jingga
Sedang	50–74	Kuning
Tinggi	75–100	Hijau

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02) Meningkatkan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target	Capaian	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	55	63,20	114,91	-	55	114,91	76	83,16

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Target IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 sebesar 55 sedangkan capaian sebesar 63,20, sehingga capaian kinerja IKU ini sebesar 114,91%. Perhitungan capaian “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 dijelaskan pada dua tabel di bawah ini.

Tabel 20. Perhitungan capaian “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) pada tahun 2025)”

Indikator	Definisi	Skala	Skor	Bobot	Total Skor	Nilai	2025
Pemahaman Peserta Tentang Sekolah Pantai Indonesia	Presentase jumlah peserta yang meningkat pemahaman terhadap materi SPL.	Baik: >60%.	3	0,4	1,2	1,2	1,2
		Cukup: 30–60%.	2		0,8		
		Kurang: <30%.	1		0,4		
Partisipasi Pemangku Kepentingan	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan Sekolah Pantai Indonesia	Baik: Ada keterlibatan Pemda dan K/L/Akademisi/NGO/S wasta/Jurnalis	3	0,3	0,9	0,9	0,9
		Cukup: Ada keterlibatan Pemerintah Daerah.	2		0,6		
		Kurang: Tidak ada keterlibatan pemangku kepentingan lain.	1		0,3		
Sekolah yang terlibat dalam SPI	Jumlah Sekolah yang terlibat dalam kegiatan SPI	Baik: >3	3	0,1	0,3		
		Cukup: 2 – 3	2		0,2		0,2
		Kurang: <2	1		0,1	0,1	
Peserta yang terlibat dalam SPI	Jumlah siswa yang terlibat dalam kegiatan SPI	Baik: >300	3	0,1	0,3		
		Cukup: 201 – 300	2		0,2		0,2
		Kurang: <200	1		0,1	0,1	
Kampanye SPI	Jumlah pelaksanaan kampanye SPI	Baik: > 5	3	0,1	0,3		
		Cukup: 2 – 5	2		0,2		0,2
		Kurang: < 2	1		0,1	0,1	
						2,4	2,7
				Nilai Indeks		48,00	54,00

Lanjutan...

No.	Indikator	Definisi	Skala	Skor	Bobot	Total Skor	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Pelibatan Pemangku Kepentingan	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam Penyusunan NSPK	Baik: Ada keterlibatan external KKP	3	0,3	0,9	0,9	0,9
			Cukup: Keterlibatan Internal KKP	2		0,6		
			Kurang: Tidak ada keterlibatan pemangku kepentingan lain.	1		0,3		
2	Legalitas NSPK	Hasil akhir keluaran Dokumen NSPK	Baik: Penetapan NSPK	3	0,5	1,5	1,5	1,5
			Cukup: Dokumen Akhir dalam proses penetapan	2		1		
			Kurang: Draft NSPK	1		0,5		
3	Diseminasi NSPK	Pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait muatan NSPK baik melalui tatapmuka langsung, penyampaian dokumen NSPK, maupun penyampaian informasi melalui sosial media	Baik: Telah dilakukan diseminasi eksternal	3	0,2	0,6	0,6	0,6
			Cukup: Telah dilakukan diseminasi lingkup internal	2		0,4		
			Kurang: Belum dilakukan diseminasi	1		0,2	0,2	
							3,2	3,00
				Nilai Indeks			106,67	100,00
			Sekolah Pantai Indonesia (SPI)			0,8	38,40	43,20
			NSPK			0,2	21,33	20
				Nilai Indeks Kumulatif			59,73	63,20

Sumber: Tim Kerja MBAPI, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Keterangan : a. Nilai 63,20 merupakan nilai kategori “sedang” (rentan nilai 50–70) berdasarkan perhitungan akhir “nilai ketahanan wilayah pesisir” pada tahun 2025.

b. Nilai 59.73 merupakan nilai kategori “sedang” (rentan nilai 50–70) berdasarkan perhitungan akhir “nilai ketahanan wilayah pesisir” pada tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Target IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 sebesar 55 sedangkan capaian sebesar 63,20, sehingga capaian kinerja IKU ini sebesar 114,91%. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, tidak ada IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”. Jadi, tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada 2025 dengan 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 sebesar 55 sedangkan capaian sebesar 63,20, sehingga capaian kinerja IKU ini sebesar 114,91%.

Pada butir (*point*) 4 ini menyajikan perbandingan antara target dan capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2025 dengan target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Tahun 2025 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit.P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	60	69	72	76	55	63,20	114,91	83,16

Sumber: Direktorat P3K Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan target pada Renstra Ditjen PK pada tahun 2025. Capaian pada tahun 2025 sebesar nilai 63,20 atau sebesar 114,91% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025, baik pada target Renstra tahun 2025 maupun target pada PK Direktorat P3K Tahun 2025 yaitu nilai 55. Selanjutnya perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir renstra tahun 2025-2029 (Khususnya pada tahun 2029) sebesar 83,16%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Target IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 sebesar 55 sedangkan capaian sebesar 63,20 sehingga capaian kinerja IKU ini sebesar 114,91%.

Di samping itu, standar nasional maupun unit kerja lain tidak memiliki IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”. Jadi, capaian kinerja IKU ini pada 2025 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di Kementerian.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target IKU ini antara lain: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan dalam rangka survey serta pengumpulan data dan informasi terkait yang dibutuhkan; dan (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah serta *stakeholders* terkait.

Kendala yang dihadapi adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT DJPK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT Teknis DJPK terdekat;
- b. Penjadwalan kegiatan yang tepat.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 didukung oleh:

- a. Kawasan mangrove yang direhabilitasi (Kode REA.001), Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OA).
- b. NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.001.051.OD).
- c. NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.001.051.OE).
- d. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (Kode QDD.002), Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kode 051).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) dan “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemantauan Kegiatan DJPKRL yang termasuk Pantauan KSP, Kebijakan Kelautan Indonesia, Bantuan Pemerintah, dan Program Kemiskinan Ekstrem pada B12 Tahun 2024
2. *Blue Planet Fund Country Plan and COAST Programme* Indonesia and *UK Ministerial Launch Event*
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Tanggul Laut di Teluk Jakarta
4. Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional) (11 April 2025)
5. Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 di Ruang Rapat Cakalang Lantai 1 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
6. Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun di Hotel Oria, Jakarta (23–24 April 2025)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

MEMORANDUM
NOMOR 179/DJPK.4/TU.140/IV/2025

Yth. : Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Dari : Ketua Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
Hal : Laporan Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 29 April 2025

Sehubungan dengan surat dari *Ocean Program Director* Konservasi Indonesia nomor 166/JKT-PROG-BP/04/2025 tanggal 10 April 2025, perihal Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun, bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Direktur hal-hal sebagai berikut:

1. Acara dilaksanakan secara *offline* di Hotel Oria Jakarta pada tanggal 23-24 April 2025. Acara dibuka oleh Bapak Firdaus Agung (Direktur Konservasi, Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP) dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pulau-pulau Kecil (Eko Wibisono dan Dhan Widiyanti), Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jasa Bahari, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, DKP Prov Riau, SUOP TWP Bintan, SUOP TWP Laut Sawu, DKP Jawa Tengah, BRIN, Rekam Nusantara, YKAN, *International Blue Carbon Institute* (IBCI), dan Konservasi Indonesia.
2. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait konsep karbon biru, proyek karbon, kebijakan, aturan dan tata kelola terkini, serta memperkenalkan dan melatih penggunaan *Seagrass Carbon Calculator* sebagai alat bantu penghitungan pengurangan emisi dan penyerapan karbon ekosistem padang lamun.
3. Beberapa poin yang dirangkum dalam acara tersebut, antara lain:
 - a. Acara menghadirkan narasumber terkait yang meliputi: (i) Iwan Wibisono (Konservasi Indonesia); (ii) Novi Susetyo Adi (KKP); (iii) Aan Johan Wahyudi

Gambar 19. Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun

7. Rapat Tingkat Menteri Pelaporan Hasil Masukan Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca di Ruang Rapat Utama, Graha Mandiri, Gd. Kemenko Bidang Pangan, Lantai 3 (25 April 2025)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

MEMORANDUM
NOMOR 178/DJPK.4/TU.140/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Pih. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Hal : Laporan Rapat Teknis dan Rapat Tingkat Menteri Percepatan Usulan Revisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021
Lampiran : -
Tanggal : 29 April 2025

Menindaklanjuti hasil pertemuan Percepatan Ekosistem Nilai Ekonomi Karbon yang diselenggarakan tanggal 16 April 2025 di Hotel Shangri-la Jakarta dan sehubungan dengan surat Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Nomor: UN.4/H.H.1/KUM.1.3/B/04/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Pertemuan Percepatan Ekosistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan surat Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral nomor: 21/UKP/UKP-PIKSM/04/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Undangan Rapat Tingkat Menteri, dengan hormat bersama ini kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada Jumat 25 April 2025 yang terbagi dalam 2 (dua) sesi, yaitu:
 - a. Rapat teknis pembahasan DIM dan persiapan Rapat Tingkat Menteri dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta. Rapat dipimpin Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon-KLH dan dihadiri perwakilan K/L pengampu sektor NDC dan K/L terkait lainnya; dan
 - b. Rapat Tingkat Menteri yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi. Rapat dihadiri pejabat Eselon 1 dari K/L pengampu sektor NDC dan K/L terkait lainnya.
2. Resume hasil rapat dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. **Rapat teknis pembahasan DIM dan persiapan Rapat Tingkat Menteri**
 - 1) Usulan revisi Perpres 98/2021 dari K/L pengampu sektor NDC telah dilakukan penelaahan oleh Tim KLH selaku Kementerian Pemrakarsa revisi

Gambar 20. Memorandum Rapat Tingkat Menteri Pelaporan Hasil Masukan Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian ERK

8. Rapat pembahasan pengusulan KBLI pengelolaan karbon biru sektor kelautan di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (30 April 2025)
9. Catatan Rapat Persiapan Partisipasi KKP pada *10th Our Ocean Conference (OOC-10)* dan *5th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting (AOMM-5)* (16 April 2025) *Zoom Meeting*

10. Percepatan Ekosistem Nilai Ekonomi Karbon di Ruang Sumatera Hotel Shangri-La Jakarta (16 April 2025)
11. Audiensi RS *CTI-CFF* dengan Dirjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Padaido lantai 11 GMB 3 (22 April 2025)
12. Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun di Hotel Oria, Jakarta (23-24 April 2025)
13. Rapat Tingkat Menteri Pelaporan Hasil Masukan Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca di Ruang Rapat Utama, Graha Mandiri, Gd. Kemenko Bidang Pangan, Lantai 3 (25 April 2025)
14. Rapat pembahasan pengusulan KBLI pengelolaan karbon biru sektor kelautan di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (30 April 2025)
15. Pembahasan LAUTRA dengan *World Bank* (7 Mei 2025)
16. Rapat Koordinasi Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) Ruang Rapat Utama kementerian Koordinator Bidang Pangan (7 Mei 2025)
17. *Advancing Ocean Based Actions for Climate Change* (8 Mei 2025) *Zoom Meeting*
18. Rapat Persiapan *UNOC-3* (16 Mei 2025) *Zoom Meeting*
19. Diskusi dalam rangka Penyusunan *Draft Roadmap Blue Carbon* di Ruang Rapat Kakap Putih Lantai 6, GMB IV (16 Mei 2025)
20. Pertemuan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (20 Mei 2025)
21. Diskusi Tentang Perencanaan Belitong sebagai *Carbon Free Island* melalui Aplikasi Zoom (22 Mei 2025)
22. *2nd TWG CCA CTI-CFF* (4 Juni 2025) *Zoom Meeting*
23. Pertemuan *Friends of Nationally Determined Contributions (NDC)* Pembahasan Komitmen dalam *Second NDC (SNDC)* Indonesia (11 Juni 2025)
24. Pembahasan Dokumen *TWG CCA* (18 Juni 2025)
25. *United Nation Climate Change Conference 2025 SBSTA 62 & SBI 62*, (15-20 Juni 2025)
26. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan Dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Perempuan di Hotel AONE (25-26 Juni 2025)
27. Sosialisasi Juknis Sistem Pengelolaan Pengaduan *Ocean for Prosperity Project* LAUTRA
28. *Workshop* Evaluasi Capaian Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim T.A. 2024
29. Pembahasan Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan (Aloft Hotel Jakarta, 16 Juli 2025)
30. Rapat Inisiasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan (Aloft Hotel, 18 Juli 2025)
31. Penyusunan Modul Pelatihan terkait Kepdirjen PKRL No. 45 Tahun 2024 dan Kepdirjen PKRL No. 70 Tahun 2024 (Aloft Hotel, 17 Juli 2025)
32. Penyusunan dan Reviu Dokumen Anggaran Pagu Indikatif Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan TA 2026
33. Pembahasan *Progress Oceans for Prosperity Project* – LAUTRA Komponen 2 (Platinum Hotel Bali, 18 Juli 2025)
34. Validasi Publik Penyusunan Peta Terumbu Karang dan Padang Lamun Indonesia (Aryaduta Hotel, 22 Juli 2025)
35. Sekolah Pantai Indonesia dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH)
36. *Focus Group Discussion (FGD)* Penyelarasan Gagasan Usulan Proyek *Green Climate Fund (GCF)* dengan Prioritas Nasional Indonesia Perubahan Iklim, 4 Agustus 2025
37. Temu Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan, Herper Kupang 27-28 Agustus 2025
38. *Kickoff Meeting* Persiapan Delegasi RI dan Paviliun Indonesia pada *COP30 UNFCCC* Belem, Brasil
39. Rapat *Steering Committee (SC)* *Global Green Growth Institute (GGGI)* Indonesia
40. Penyusunan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun, 14 Agustus 2025
41. *Workshop* Penguatan Jejaring Data Karbon Biru (harper Kupang, 26 Agustus 2025)
42. Forum Investasi Iklim – Pekan Iklim Bali 2025, Bali 28 Agustus 2025

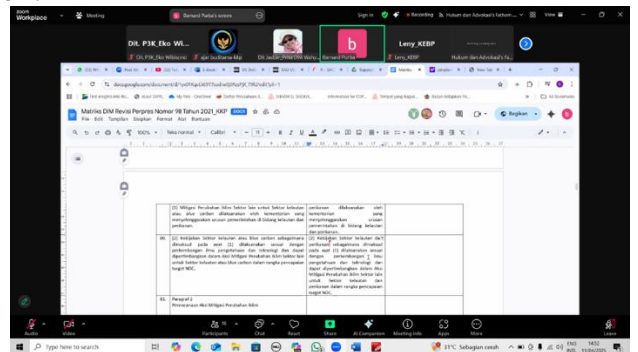
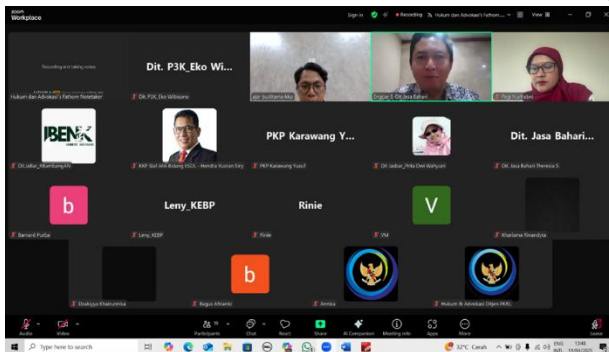
43. FGD Penyelarasan Gagasan Usulan Proyek *Green Climate Fund (GCF)* dengan Prioritas Nasional Indonesia Perubahan Iklim, 4 September 2025
44. Koordinasi Awal Inventarisasi Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Lamun Proyek Lautra di Provinsi Sulawesi Selatan (21–24 September 2025)
45. Rapat Antar Kementerian Pembahasan Revisi Perpres Nomor 98 tahun 2021 (St. Regis, 28 September 2025)
46. Koordinasi Awal Inventarisasi Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Lamun Proyek Lautra di Provinsi Sulawesi Tengah (4 Oktober 2025)
47. Rangkaian Kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan XXI Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia 2025 (8–9 Oktober 2025)
48. Koordinasi Awal Inventarisasi Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Lamun Proyek Lautra ke KKN dan KKD di Kepulauan Raja Ampat (14–18 Oktober 2025)
49. Rapat Penyusunan Peta Mangrove di Luar Kawasan Hutan (4 November 2025)
50. *Workshop* Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kelautan dan Perikanan mendukung Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 (5 November 2025)
51. Diskusi Analisis Variabel Iklim Kelautan untuk Peta Jalan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan (6 November 2025)
52. Rapat Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pelatihan Informasi Geospasial Abrasi dan Akresi (7 November 2025)
53. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan Rencana *Annual Work Plan (AWP)* 2026 (13–14 November 2025)
54. *The Regional Training Course on the Introduction of El Niño–Southern*
55. *Oscillation (ENSO) and Indian Ocean Dipole (IOD)* tanggal 10 –13 November 2025 dan *The Consultation Workshop on the Collaborative Study on Climate Variability Caused by the Indian Ocean Dipole* tanggal 14 November 2025 di *SEAFDEC Training Department*, Samut Parakan, Thailand (14 November 2025)
56. *1st APEC Ocean Resilience Conference* tanggal 20–21 November 2025 di Busan, Korea Selatan (22–24 November 2025)
57. *COP30 the United Nations Climate Change Conference (UNFCCC)*, 10–21 November 2025 di Belem, Brasil dan Kunjungan Kerja di Sao Paulo, Brasil (29 November 2025)
58. Pelaksanaan Kampanye dan Penyadartahuan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) (15 Desember 2025)
59. Penyempurnaan Kajian Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim (1 Desember 2025)
60. FGD Menerjemahkan Perpres 110/2025 ke dalam Aksi : Implikasi Strategis Bagi Sektor Kelautan dan Perikanan (4–5 Desember 2025)
61. *Workshop* Penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kelautan dan Perikanan mendukung Implimentasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 (8 Desember 2025) (11–12 Desember 2025)
62. *Pre–Senior Official Meeting (Pre–SOM) dan 20th Senior Official Meeting (SOM) Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI–CFF)* (7–12 Desember 2025)
63. Pelatihan Informasi Geospasial Tematik Abrasi dan Akresi (15–19 Desember 2025)
64. Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pelatihan Informasi Geospasial Abrasi dan Akresi (22–24 Desember 2025)
65. Pembahasan Peta Mangrove di Area Penggunaan Lain (29 Desember 2025)
66. Pembahasan Kajian Dampak Perubahan Iklim (30 Desember 2025)
67. Pembahasan Perkembangan Pengelolaan Karbon Biru LAUTRA (31 Desember 2025)



Diskusi antar Kementerian/Lembaga Tentang Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan



Mengikuti Kegiatan *Launching of Blue Planet Fund Indonesia Country Plan Coast Programe and Marine Environment Fellow.*



Rapat Pembahasan Matrix DIMRevisi Perpres Nomor 98 Tahun 2021

Gambar 21. Kumpulan Kegiatan Pendukung IKU Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) dan “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan) (Kumulatif)”

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan pendukung capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA.001.051.OA Rehabilitasi Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	398.770.000	263.147.000	246.761.793	11.866.398	258.628.191	98,28	4.518.809
QDD.002.051. Masyarakat Pesisir	567.385.000	134.491.000	86.249.429	46.569.500	132.818.929	98,76	1.672.071

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana							

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Tabel 23. Realisasi anggaran kegiatan pendukung capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sampai tanggal 31 Desember 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA..004.051.EA. Penyusunan NSPK Karbon Biru	570.000.000	570.000.000	341.415.499	219.075.000	560.490.499	98,33	9.509.501
REA..004.051.EB. Penilaian Karbon biru Lamun	200.000.000	200.000.000	98.466.060	78.500.000	176.966.060	88,48	23.033.940
REA..004.051.EC. Pengembangan Database dan sistem informasi	3.311.203.000	3.311.203.000	2.565.615.280	281.283.100	2.846.898.380	85,98	464.304.620
REA..004.051.ED. Peningkatan kapasitas pengelolaan ekosistem karbon biru	800.000.000	800.000.000	90.316.125	661.669.786	751.985.911	94,00	48.014.089
REA..004.051.EE. Kampanye karbon biru	2.289.194.000	2.289.194.000	1.711.362.612	549.720.000	2.261.082.612	98,77	28.111.388
Total	7.170.397.000	7.170.397.000	4.807.175.576	1.790.247.886	6.597.423.462	92,01	572.973.538

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Total pagu efektif sebesar Rp7.170.397.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp6.597.423.462, atau mencapai 92,01% dari anggaran yang tersedia, dan sisa anggaran Rp572.973.538.

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan I tahun 2026 yaitu melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 02 “Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil”. IKU ini memiliki target 1 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

- Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim.
- Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir.

- c. Penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim.

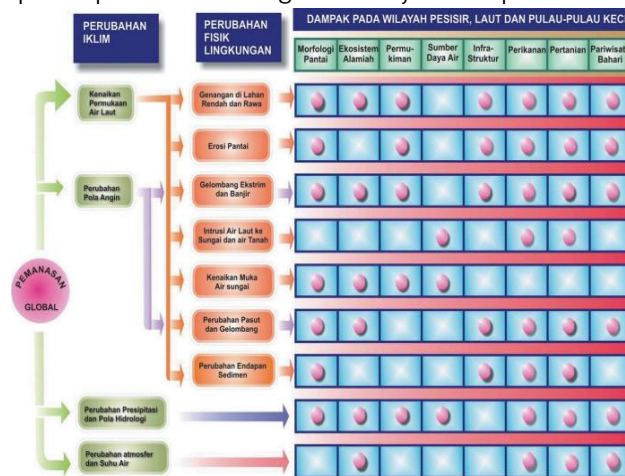
Dua alasan mengapa pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim, yaitu:

1. Kapasitas adaptasi masyarakat di pulau-pulau kecil relatif lebih lemah akibat keterbatasan sarana prasarana pendukung, tingkat pendidikan, serta jauh dari jangkauan layanan administrasi dan sosial. Dengan demikian, kerentanannya menjadi lebih tinggi.
2. Proyeksi kenaikan muka air laut akan meningkatkan erosi pulau-pulau kecil, kehilangan lahan produktif yang relatif terbatas, meningkatkan risiko badai, dan intrusi air laut yang akan mengganggu suplai air bersih di pulau.

Kedua fenomena tersebut mengakibatkan banyak sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sumber daya air tanah atau air tawar semakin berkurang. Begitu juga dengan sumber daya hayati di pulau-pulau kecil semakin terbatas. Keanekaragaman hayati di pulau-pulau kecil juga menyusut. Sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan pun ikut terancam. Permukiman penduduk, infrastruktur, dan transportasi terutama yang berada di dataran rendah juga bakal menerima risikonya. Hal serupa juga menimpa kondisi perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

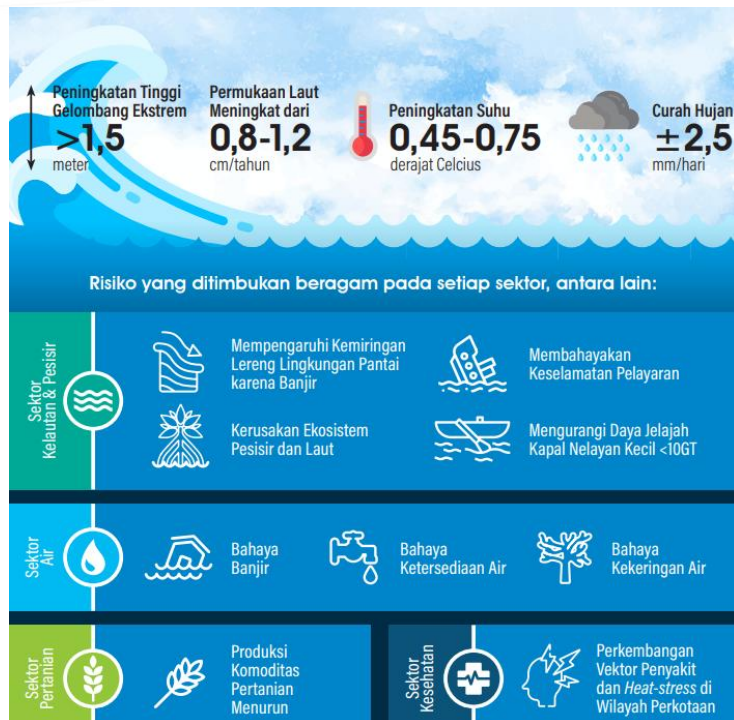
Perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai sehingga tentu saja akan mengimbas ke segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik lingkungan tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alami, permukiman, sumber daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, kesehatan, pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau-pulau kecil berdataran rendah.

Dalam buku berjudul “Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada cetakan ke-3 tahun 2013, Subandono Diposaptono, *et.al* menyebutkan dampak pemanasan global terhadap wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijelaskan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 22. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil
Sumber: Diposaptono, Subandono, *et.al.*, 2013, halaman 51

Salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai adalah kenaikan paras muka air laut (*sea level rise* atau *SLR*). Sebab, fenomena ini berdampak pada kegiatan sosial ekonomi. Besarnya kerugian ekonomi itu bervariasi tergantung kondisi geografi. Dalam Ringkasan Eksekutif “Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (*Climate Resilience Development Policy*) 2020-2045” yang disusun oleh Bappenas bekerjasama dengan *Low Carbon Development* Indonesia dan didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan isu ketahanan iklim serta mitra kerja seperti *ADB*, *JICA*, dan *USAID*, dampak perubahan iklim digambarkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 23. Dampak Perubahan Iklim

Di wilayah laut, perubahan kondisi iklim laut dapat memengaruhi ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Sementara itu, wilayah pesisir rentan terdampak abrasi, penggenangan oleh banjir *rob*, dan gelombang pasang yang diakibatkan oleh adanya peningkatan tinggi permukaan laut. Perubahan iklim laut berupa peningkatan tinggi gelombang juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran terutama kapal nelayan kecil, sehingga berdampak pada kecelakaan kapal dan berkurangnya produksi perikanan tangkap.

Kenaikan muka air laut berdampak pada dua hal terhadap pohon mangrove. Pertama, pohon mangrove yang kurang tahan terhadap air asin tadi terdesak ke arah darat, atau kedua, pohon mangrove itu mati lantaran tak menemukan habitat yang sesuai bagi pertumbuhannya.

Salah satu faktor penting dan terbukti efektif guna mendorong iklim perubahan yang lebih baik dan mengerem perubahan iklim adalah dengan melakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti pengurangan emisi (*Greenhouse Cases* atau *GHG*) atau gas rumah kaca dan peningkatan penyerapan CO_2 . Adaptasi melibatkan penyesuaian untuk meningkatkan kelangsungan hidup aktivitas sosial dan ekonomi dan untuk mengurangi kerawanan mereka terhadap perubahan iklim.

Berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain konservasi energi, eliminasi *chlorofluorocarbon* (*CFC*), menukar bahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi emisi metana dan nitrat oksida, penggunaan bahan bakar biomassa dan kompor masak, penggunaan teknologi energi yang dapat diperbarui, mencegah deforestasi dan kebakaran hutan, reboisasi, serta penanaman vegetasi.

Perubahan iklim adalah suatu keniscayaan yang saat ini telah, sedang, dan akan terjadi apabila manusia tidak melakukan berbagai upaya dalam rangka mengerem laju pemanasan global. Oleh karena itu, upaya adaptasi merupakan suatu keniscayaan dan merupakan prioritas yang mendesak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengingat kompleksitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka upaya mitigasi dan adaptasi harus dilakukan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Agar dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungannya, maka pengelolaan wilayah pesisir yang arif perlu terus dikembangkan. Dengan mengadaptasi (*IPCC*, 1990), pengelolaan wilayah pesisir (*coastal management*) bertujuan:

1. Menghindari pengembangan di daerah ekosistem yang rawan dan rentan.
2. Mengusahakan agar sistem perlindungan alami tetap berfungsi dengan baik.

3. Melindungi keselamatan manusia, harta benda, dan kegiatan ekonominya dari bahaya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, budaya, sejarah, estetika dan kebutuhan manusia terhadap rasa aman serta kesejahteraan.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengedukasi sumber daya manusia (SDM) berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim adalah Sekolah Pantai Indonesia (SPI). SPI diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMA sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu; dari, oleh, dan untuk siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu 4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi).

1. Amati adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.
2. Analisa adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.
3. Ajarkan adalah penyebarluasan hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
4. Aksi adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya mengurangi risiko bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Ini melibatkan berbagai tindakan untuk meminimalkan dampak negatif bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah pesisir. Ini melibatkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat agar dapat menghadapi bencana alam seperti banjir rob, tsunami, dan abrasi pantai dengan lebih baik.

Formula Penghitungan IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sebagai berikut: menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia dalam rangka penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim, dan/atau bentuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Target dan Capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02) Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target	Capaian	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	1	2	200 atau 120% berdasarkan Kinerjajaku	-	1	200%	15	13,33%

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Keterangan: pada tahun 2024 nomenklatur IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)”.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Target IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 sebanyak 1 kawasan sedangkan capaian sebanyak 2 kawasan sehingga capaian kinerja sebesar 200% atau capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan Aplikasi Kinerjajaku KKP. Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan:

- Edukasi pengolahan sampah dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam rangka mendukung Kegiatan Kick Off “Laut Sehat Bebas Sampah (LAUT SEBASAH)” pada tanggal 4 dan 6 Agustus 2025, diikuti 185 siswa dan 15 guru SDN 1 Kamal Muara dengan jumlah siswa dan guru; 150 laki-laki dan 50 perempuan, merupakan bagian dari *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara di Kamal Muara, Jakarta Utara.
- Kampanye SPI dalam rangkaian Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) tanggal 15 Desember 2025 di Gili Trawangan, NTB pada tanggal 15 Desember 2025, diikuti 150 siswa dari SDN 2 Gili Indah, SMPN 1 SATAP, SMK Pariwisata Gili Trawangan, dengan total jumlah siswa laki-laki 90 dan siswa perempuan 60.



Edukasi pengolahan sampah dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam rangka mendukung Kegiatan *Kick Off* “Laut Sehat Bebas Sampah (LAUT SEBASAH)”



Kampanye SPI dalam rangkaian Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH)

Gambar 24. Kegiatan Pendukung Capaian Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Target IKU Nomor O3 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 sebanyak 1 kawasan sedangkan capaian sebanyak 2 kawasan sehingga capaian kinerja sebesar 200% atau capaian kinerja maksimum sebesar 120% dalam Aplikasi Kinerjaku KKP.

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) di Kamal Muara Jakarta Utara pada tanggal 4 dan 6 Agustus 2025 dan Pelaksanaan Kampanye dan Penyadartahuan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Desember 2025.

Terdapat perbedaan nomenklatur IKU pada tahun 2025 dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU yang digunakan adalah “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)” dengan metode penghitungan IKU yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui kegiatan:

- Penanaman vegetasi pantai;
- Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
- Sekolah Pantai Indonesia (SPI); dan
- Peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim.
- Pengembangan karbon biru.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor O3 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 sebanyak 1 kawasan sedangkan capaian sebanyak 2 kawasan sehingga capaian kinerja sebesar 200% atau capaian kinerja maksimum sebesar 120% dalam Aplikasi Kinerjaku KKP.

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) di Kamal Muara Jakarta Utara pada tanggal 4 dan 6 Agustus 2025 dan Pelaksanaan Kampanye dan Penyadartahuan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Desember 2025.

Pada butir (*point*) 4 ini menyajikan perbandingan antara target dan capaian IKU Nomor O3 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2025 dengan target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor O3 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” Tahun 2025 dengan Target dalam Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4346- Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
3.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	10	12	13	15	1	2	200%	13.33

Sumber: Direktorat P3K Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU O3 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PK Tahun 2025–2029 khususnya pada tahun 2025. Capaian pada tahun 2025 sebesar 2 kawasan atau sebesar 200% atau 120% (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerja KKP) dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Selanjutnya perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir renstra tahun 2025–2029 (Khususnya pada tahun 2029) sebesar 13,33%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Target IKU Nomor O3 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 sebanyak 1 kawasan sedangkan capaian sebanyak 2 kawasan sehingga capaian kinerja sebesar 200% atau capaian kinerja maksimum sebesar 120% dalam Aplikasi Kinerja KKP.

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) di Kamal Muara Jakarta Utara pada tanggal 4 dan 6 Agustus 2025 dan Pelaksanaan Kampanye dan Penyadartahuan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Desember 2025.

IKU Nomor O3 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” dimiliki secara khusus oleh Direktorat P3K pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 ini sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kebijakan terkait dengan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025–2029 maupun dokumen lainnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN Tahun 2025–2029 maupun SDG's

Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025–2029 dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim bagi masyarakat pesisir. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan kegiatan, termasuk pengembangan vegetasi pantai, pembangunan infrastruktur pelindung pantai, dan peningkatan kesadaran masyarakat. 2. Upaya peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penyadartahuan masyarakat dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) yang berfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk generasi muda dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,”	RPJMN Tahun 2025–2029: 1. Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan. 2. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana. 3. Memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. 4. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. 5. Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, serta peningkatan kejadian iklim ekstrim. Di wilayah pesisir, dampak perubahan ini sangat nyata dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan pesisir (<i>coastal inundation</i>). Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil, menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	perubahan iklim ini. Rendahnya resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai. 6. Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Data dari Climate Central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir. 7. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. 8. Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (<i>triple planetary crisis</i>) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. 9. Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diterjemahkan sebagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim yang difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir (<i>ocean climate</i>), air, pertanian, serta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (c) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (d) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim. 10. Penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim melalui pelestarian lingkungan serta mitigasi dan adaptasi bencana. <i>Sustainable Development Goals (SDG's):</i> 1. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> adalah penanganan perubahan iklim yaitu mengambil tindakan sesegera

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	2. mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 2. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>SDG's</i> yaitu penanganan perubahan iklim, sebagaimana dilansir Kementerian PPN/Bappenas, memiliki lima target yaitu: - Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. - Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. - Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. - Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar <i>dollar AS</i> per tahun pada 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin. - Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal. Keterangan: <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. <i>SDG's</i> dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; dan (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah serta *stakeholders* lainnya.

Kendala yang dihadapi adalah adanya Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target,

antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT DJPK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT Teknis DJPK terdekat;
- Penjadwalan kegiatan yang tepat

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pelibatan Tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan pertemuan secara daring (*online*). Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT lingkup DJPK.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 didukung oleh:

- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kode QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (Kode QDD.002), Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kode 052.OA).
- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kode QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (Kode QDD.002), dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) (Kode 052.OA).
- Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Kode PFA.001), NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil yang disusun dokumennya (Kode 051), dan NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Kode 051.OD).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 27. Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai tahun 2025

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03	Kegiatan Pendukung
1.	Pengendalian Perubahan Iklim	- Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi <i>Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE)</i> Persatuan Emirat Arab ke Indonesia (9 Januari 2025) - Permohonan Audiensi Tim <i>Climate Finance</i> Canada KKP (22 Januari 2025) - Rapat Koordinasi Mengenai Informasi Dan Status Data Model Iklim di Indonesia (22 Januari 2025). <i>Panel Discussion and Research Report Launching Coping with Climate: How extreme weather is already impacting internal migrants</i> di Aryaduta Menteng Hotel Jakarta (30 Januari 2025). - Permohonan Kehadiran Bersama pada <i>the Climate Change Adaptation (CCA) Technical Working Group Online Meeting</i> (melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>) (31 Januari 2025). <i>Hands-On Training Program On Monitoring and Evaluation (M&E) of Climate Change Adaptation</i> (3–4 Februari 2025).

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03	Kegiatan Pendukung
		7. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Kerja Isu Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (13 Februari 2025). 8. Diskusi Perubahan Iklim dan NDC (Aplikasi Zoom) (19 Februari 2025). 9. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025). 10. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025). 11. Pertemuan Sosialisasi <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)</i> Ke-62 (10 Maret 2025). 12. Diskusi Penyelarasan Program / Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Mendukung Pemenuhan Hak Anak dalam Krisis Iklim Melalui Aksi Gerakan Iklim (AGI) di Hotel Oria Jakarta Pusat (16 April 2025). 13. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Perlindungan Alam dan Iklim Kerja Sama RI-Persatuan Emirat Arab (PEA) di Hotel Pullman MH Thamrin Jakarta (21-22 April 2025). 14. Pembahasan Masukan RanKepmen KP tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (21 April 2025). 15. <i>Kick-Off Program ZCRA</i> “Pembangunan Berketahanan Iklim di Pantura Jawa Tengah – Tantangan, Strategi, dan Peluang Pendanaan” di Ballroom Hotel Gumaya Kota Semarang (5 Mei 2025). 16. Pertemuan <i>Kick-off</i> Persiapan Delegasi RI pada Sesi Perundingan <i>The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> Tahun 2025 di Hotel Pullman Jakarta dan Aplikasi Zoom (7 Mei 2025). 17. <i>Consultative Kick-off Meeting Advancing Demonstration in mangrove-based Adaptation and stakeholder Participation to climate agenda (ADAPT)</i> di Ruang Pertemuan Seruni, Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta (2 Juni 2025). 18. <i>Invitation to Attend the Webinar “Climate Transition and Its Impacts in Asia”</i> (12 Juni 2025). 19. <i>Reception to celebrate Climateworks Centre's impact in accelerating climate action over the past five years in Indonesia</i> Wisma Habibie Ainun, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan (17 Juni 2025). 20. <i>Workshop</i> Evaluasi Capaian Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim TA 2024 di Le Meridien Jakarta (24 Juni 2025). 21. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (25 Juni 2025). 22. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (26 Juni 2025). 23. Kegiatan dengan tema “Strategi Implementasi Pelaksanaan <i>Workshop</i> Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim” di Cemara Hotel Jakarta (30 Juni 2025) 24. Kegiatan dengan tema “Strategi Implementasi Pelaksanaan <i>Workshop</i> Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim” di Cemara Hotel Jakarta (1 Juli 2025) 25. FGD “Peluang Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Risiko Bencana di Indonesia” di HARRIS Hotel & Convention Bekasi, Jawa Barat (8 Juli 2025)

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03	Kegiatan Pendukung
		26. Pembahasan Bersama terhadap Modul Konvergensi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) di AONE Meeting/Abeto Restoran (9 Juli 2025) 27. Sosialisasi Hasil Pertemuan <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Bureau</i> Ke-69 di Ruang Rimbawan 3C, Gedung Manggala Wanabakti dan aplikasi zoom (15 Juli 2025) 28. Narasumber dalam Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Nasional Kegiatan Tahun 2023-2024 di Hotel Le Meriden Jakarta (15 Juli 2025) 29. <i>Workshop</i> Diseminasi Hasil Akhir Rekomendasi untuk Pengembangan Strategi Implementasi Sektor RAN GPI 2024-2030 terkait Pencegahan KBG dan Penguatan Ketahanan Perempuan Terhadap Perubahan Iklim di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta dan aplikasi zoom (15 Juli 2025) 30. Pembahasan Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Aloft Hotel Jakarta (16 Juli 2025) 31. Rapat Inisiasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Aloft Hotel Jakarta (18, 31 Juli 2025) 32. Lokakarya Awal Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Wakatobi melalui Aplikasi Zoom (11 Agustus 2025) 33. Pelatihan Proyeksi Iklim Nasional di Hotel Aston, Bintaro (19-20 Agustus 2025) 34. Workshop Peningkatan Kapasitas Adaptasi Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Desa Pesisir di Sulawesi Tenggara di Hotel Galaxy Inn Baubau (20-22 Agustus 2025) 35. Narasumber, Moderator dan Fasilitator terkait Kerentanan terhadap Perubahan Iklim Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Daratan pada FGD ke-2 yang akan fokus pada tema kajian risiko dan dampak perubahan iklim sebagai dasar penyusunan strategi adaptasi perubahan iklim di Hotel Borobudur, Jakarta (25 Agustus 2025) 36. Temu Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Hotel Harper Kupang (27-28 Agustus 2025) 37. Konsultasi <i>Climate Change Adaptation Working Group</i> Untuk Penyusunan Dokumen <i>NPOA CTI-CFF</i> Indonesia di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (17 September 2025). 38. Narasumber terkait Implementasi Integrasi Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem Pesisir untuk Adaptasi Perubahan Iklim pada FGD Penyusunan Baseline dan Implementasi Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim: Jakarta Kota Global yang Berketahanan pada aktivitas Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Provinsi DKI Jakarta Gedung JB. Tower, Jakarta Pusat (22 September 2025). 39. Narasumber terkait ekonomi biru : Strategi Upaya Penanganan Pencemaran Sampah Laut dan Perubahan Iklim di Indonesia bertempat di Khas Palu Hotel (29 September 2025). 40. Partisipasi Konsultasi Pemangku Kepentingan dan Pengembangan Portofolio Adaptasi Perubahan Iklim di NNSIDE by Melia Yogyakarta (8-10 Oktober 2025). 41. Narasumber Pembahasan Penandaan Tematik dan Capaian Indikator Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) di Tribrata Hotel & Convention Center Dharmawangsa Jakarta (16 Oktober 2025). 42. FGD Hasil <i>Advisory Opinion ICJ on Obligations of States in respect of Climate Change</i> di Hotel Mustika Yogyakarta (21 Oktober 2025).

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03	Kegiatan Pendukung
		43. Rapat Koordinasi Teknis Kelompok Kerja Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Terkait Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, NTT (22 Oktober 2025). 44. Rapat Konsultasi Publik <i>Indonesia's Second Nationally Determined Contribution (SNDC)</i> sebagai Tindaklanjut <i>Paris Agreement</i> serta Komitmen Indonesia dalam Pengendalian Perubahan Iklim di The Four Seasons Jakarta (22 Oktober 2025). 45. Seminar Nasional Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) di Hotel Double Tree by Hilton Jakarta Pusat (24 Oktober 2025). 46. Rapat Perkembangan Tender Paket Pekerjaan <i>The Assessment of Blue Carbon as a Nature-Based Solution for Climate Change Mitigation</i> di Aryaduta Hotel Menteng (27 Oktober 2025). 47. Plastic, Climate, Biodiversity Nexus Forum 2025 di Ballroom 3 Lantai 2 the Ritz Carlton Jakarta (28 Oktober 2025). 48. Pembahasan Implementasi Kepmen KP No. 52/2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor KP di Luminor Hotel Padjadjaran Bogor (28 Oktober 2025). 49. Lokakarya Nasional Pembaruan Kajian Pembangunan Berketahanan Iklim di Crowne Plaza Bandung (3 November 2025). 50. Permohonan Penanggap Lokakarya Nasional Pembaruan Kajian Pembangunan Berketahanan Iklim di Crowne Plaza Bandung (3 November 2025). 51. Lokakarya Nasional Tahun 2025: "Evaluasi Capaian Indikator Lingkup Lingkungan Hidup dalam RPJMN 2020-2024 (Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim serta Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati)" di Hotel Crowne Plaza Kota Bandung (4-6 November 2025). 52. Pembahasan Project Building Climate Resilience of Small-Scale Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia (ASEAN) Countries melalui Aplikasi Zoom (4 November 2025). 53. Workshop Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kelautan dan Perikanan mendukung Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 di Ashley Hotel, Tanah Abang, Jakarta (5 November 2025). 54. Sesi Pengantar Lokakarya Kebijakan Nasional Eksplorasi Masa Depan Kenaikan Muka Air Laut dan Pembangunan Infrastruktur Adaptif melalui Aplikasi Zoom (5 November 2025). 55. Diskusi Analisis Variabel Iklim Kelautan untuk Peta Jalan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan di Aryaduta Hotel Menteng (6 November 2025). 56. Lokakarya Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut dan Pembangunan Infrastruktur Adaptif di Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta (10-12 November 2025). 57. Workshop on Nature and Climate Partnership Project di Park Hyatt Jakarta (21 November 2025). 58. Rapat Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pelatihan Informasi Geospasial Abrasi dan Akresi di Luminor Hotel Padjadjaran Bogor (2-3 Desember 2025). 59. Memperkuat Aksi Iklim Nasional: Peluncuran Inovasi, dan Penguatan Solusi Berketahanan Iklim di Ruang Rapat DH 1-4 Kementerian PPN/Bappenas (2 Desember 2025). 60. Lokakarya Diseminasi Hasil Laboratorium Pembangunan Berketahanan Iklim di Kabupaten Wakatobi di THE TRIBRATA, Hotel & Convention Center, Darmawangsa, Jakarta (3 Desember 2025). 61. Rapat Penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Simulasi Pelatihan Informasi Geospasial Abrasi dan Akresi di Fraser Residence, Kota Jakarta Pusat (8 Desember 2025).

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03	Kegiatan Pendukung
		62. Partisipasi Workshop Penguatan Tata Kelola Aksi Iklim Berorientasi Dampak di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta Pusat (Ruangan Burgundy 9, Lantai 2) (10 Desember 2025). 63. Workshop Penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kelautan dan Perikanan mendukung Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 di Fraser Residence, Kota Jakarta Pusat (11-12 Desember 2025). 64. Pelatihan Informasi Geospasial Tematik Abrasi dan Akresi di Hotel Ombak Sunset, Kabupaten Lombok Utara, NTB (16-19 Desember 2025). 65. Konsultasi Stakeholder dalam Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim di Hotel Tribrata Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (18 Desember 2025). 66. Rapat Penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Simulasi Pelatihan Informasi Geospasial Abrasi dan Akresi di Swiss-Bellin Bogor (23-24 Desember 2025). 67. Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (23 Desember 2025). 68. Pembahasan Kajian Dampak Perubahan Iklim di Aston TB Simatupang (30 Desember 2025).
2.	Mitigasi Bencana	1. Diskusi Terfokus (FGD) Sinergi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Desa Kementerian/Lembaga di Mercure Hotel Cikini dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2025) 2. Pertemuan Pembahasan Submisi "<i>Mitigation Work Programme dan Just Transition</i>" (14 Februari 2025) 3. Pemberitahuan Pelatihan OPRC IMO dan Permohonan Narasumber Pelatihan Penanggulangan Pencemaran di Bandung (21 April 2025) 4. Rapat Diskusi Pemantapan Substansi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Kajian Risiko Bencana di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat (23 Mei 2025) 5. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (11 Juni 2025) 6. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (12 Juni 2025) 7. FGD Data dan Informasi Program Solusi Terpadu untuk Pengelolaan Risiko Bencana dan Perlindungan Sosial (ISASP) di Double Tree by Hilton Jakarta (22 Juli 2025) 8. Narasumber Focus Group Discussion Pembangunan Parameter Manual dan Indikator untuk Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) melalui Aplikasi Zoom (23 Juli 2025) 9. Focus Group Discussion Pembangunan Parameter Manual dan Indikator untuk Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) melalui Aplikasi Zoom (23 Juli 2025) 10. Sekolah Pantai Indonesia dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) di Kamal Muara Jakarta Utara (4 dan 6 Agustus 2025) 11. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menko PMK dan Keputusan Menko PMK tentang Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) di Hotel Gran Meliá Jakarta (20 Agustus 2025). 12. Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo melalui aplikasi zoom (27 Oktober 2025). 13. Sosialisasi dan Advokasi Rencana Penanggulangan Bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo 2025-2029 di

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03	Kegiatan Pendukung
3.	Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:	Bintang Flores Hotel, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan Aplikasi Zoom (13 November 2025). 14. Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri tentang Pengelolaan Habitat Pesisir dan Pengendalian Pencemaran dari Daratan di Kawasan Laut Cina Selatan di Savero Hotel Depok (14 November 2025). 15. Focus Group Discussion Rancangan Peraturan Presiden tentang Bencana Geologi Auditorium Badan Geologi, Kementerian ESDM, Lantai 2 Bandung dan Aplikasi Zoom (5 Desember 2025). 1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Pencemaran, Penanggulangan, dan Rehabilitasi Tumpahan Minyak di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 1 Agustus 2025. 2. Modul Pelatihan Informasi Geospasial Tematik Abrasi dan Akresi (modul tersebut masuk ke emilea berkoordinasi dengan Puslat KKP). 3. Finalisasi kajian Kepmen Peta Adaptasi Perubahan Iklim (direncanakan menjadi Kepmen pada periode triwulan 1 2026).

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025



Audiensi RS CTI-CFF dengan Dirjen Pengelolaan Kelautan di RR Padaido lantai 11 GMB 3



Penyusunan Modul Pelatihan Kepdirjen PKRL No.45 Tahun 2025 & Kepdirjen PKRL No.70 Tahun 2024



Edukasi pengolahan sampah dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam rangka mendukung Kegiatan *Kick Off* "Laut Sehat Bebas Sampah (LAUT SEBAHAH)

Lanjutan...



Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun di Hotel Oria



Kondisi Lamun di Desa Bone Baru, Kabupaten Banggai Laut

Lanjutan...

Senin, 15 Desember 2025



Sambutan Direktur P3K dalam Pembukaan Kampanye dan Penyadartahuan Sekolah Pantai Indonesia di SMK Pariwisata Gili Trawangan



Registrasi Peserta



Sesi Pembelajaran dan Diskusi Interaktif

Gambar 25. Kumpulan Kegiatan pendukung Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)

9. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
QDD.002.052.O A. Sekolah Pantai Indonesia.	418.445.000	70.240.000	61.743.490	5.933.199	67.676.689	96,35	2.563.311
QDD.002.051.O A. Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	567.385.000	11.797.000	10.206.625	0	10.206.625	86,52	1.590.375
PFA.001.051.OD. NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000	0	0	0	0	0	0
PFA.001.051.OE. NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.000.000	0	0	0	0	0	0

Realisasi keuangan Kegiatan IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim (kawasan) yang **berkaitan dengan karbon biru** sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp6.597.423.462.

Tabel 29. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan) berkaitan dengan karbon biru sampai dengan 31 Desember 2025

	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA..004.051.EA. Penyusunan NSPK Karbon Biru	570.000.000	570.000.000	341.415.499	219.075.000	560.490.499	98,33	9.509.501
REA..004.051.EB. Penilaian Karbon biru Lamun	200.000.000	200.000.000	98.466.060	78.500.000	176.966.060	88,48	23.033.940
REA..004.051.EC. Pengembangan Database dan sistem informasi	3.311.203.000	3.311.203.000	2.565.615.280	281.283.100	2.846.898.380	85,98	464.304.620
REA..004.051.ED. Peningkatan kapasitas pengelolaan ekosistem karbon biru	800.000.000	800.000.000	90.316.125	661.669.786	751.985.911	94,00	48.014.089
REA..004.051.EE. Kampanye karbon biru	2.289.194.000	2.289.194.000	1.711.362.612	549.720.000	2.261.082.612	98,77	28.111.388
Total	7.170.397.000	7.170.397.000	4.807.175.576	1.790.247.886	6.597.423.462	92,01	572.973.538

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Total pagu efektif sebesar Rp7.170.397.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp6.597.423.462, atau mencapai 92,01% dari anggaran yang tersedia, dan sisa anggaran Rp572.973.538.

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target nilai 55 pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan. Beberapa hal atau definisi yang berkaitan dengan IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)”, antara lain:

1. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi.
2. Kegiatan pendukung sehubungan dengan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi, antara lain:
 - a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
 - b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove
3. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
4. Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

Teknik menghitung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebagai berikut:

Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan rehabilitasi dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat nilai rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

Rumus Perhitungan:

$$NRWP = (b_1 \times nRM) + (b_2 \times nPR)$$

Dimana:

- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- nRM: Nilai Rehabilitasi Mangrove.
- nPR: Nilai Penguatan Regulasi.
- b_1, b_2 : Bobot kontribusi kegiatan, dengan $b_1 + b_2 = 1$.

Kriteria bobot kontribusi:

- $b_1 = 70\%$
 - ✓ Kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada kondisi kawasan
- $b_2 = 30\%$
 - ✓ Regulasi kegiatan yang belum berdampak langsung kondisi kawasan

Keterangan:

1. Belum ada pedoman atau juknis untuk penghitungan IKU ini pada tahun 2025
2. Rumus Penghitungan IKU ini disusun oleh tim Direktorat P3K dengan menggunakan Tools Pengolahan data (MS Excle) pada tahun 2025

Kategori Nilai sebagai berikut:

Tabel 30. Kategori Penilaian

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Rendah	0–24
Rendah	25–49
Sedang	50–74
Tinggi	75–100

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 31. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target	Capaian	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	55	74,06	134,65	-	55	134,65	76	97,45

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

IKU ini muncul pada tahun 2025. Target IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebesar 55 pada tahun 2025 sedangkan capaian sebesar 74,06 sehingga capaian kinerja sebesar 134,65% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP.

Penghitungan capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebesar 74,06 pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 32. Penghitungan capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai) tahun 2025)”

No.	Indikator	Definisi	Skala	Skor	Bobot	Total Skor	Alor	Rote Daudolu	Rote Serubeba	Maluku Tenggara	Raja Ampat	Jakarta Utara	Jumlah Rata-Rata
1	Luas Area Mangrove yang Direhabilitasi	Luas Area Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (ha) dari target Luas Penanaman Per Tahun	Sangat Baik: $\geq 80\%$ dari target rehabilitasi tercapai.	4	0,25	1							
			Baik: 60–79%.	3		0,75			0,75				
			Cukup: 40–59%.	2		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	
			Kurang: $< 40\%$.	1		0,25							
						2,5							
2	Tingkat Keberhasilan Penanaman Mangrove	Persentase keberhasilan tanaman mangrove yang hidup dari total bibit yang ditanam.	Sangat Baik: $\geq 60\%$.	4	0,25	1				1			
			Baik: 41–60%.	3		0,75	0,75	0,75				0,75	
			Cukup: 21–40%.	2		0,5			0,5		0,5		
			Kurang: $< 20\%$.	1		0,25							
						2,5							
3	Partisipasi Kelompok Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rehabilitasi	Tingkat keterlibatan anggota kelompok bidang kelautan dan perikanan pada kegiatan rehabilitasi mangrove.	Sangat Baik : Seluruh Anggota Kelompok dan terdapat masyarakat diluar kelompok terlibat.	4	0,25	1	1			1	1	1	
			Baik: $> 70\%$ Anggota Kelompok Terlibat	3		0,75		0,75	0,75				
			Cukup: 50–69% Anggota	2		0,5							

			Kelompok Terlibat										
			Kurang: <50% Anggota Kelompok Terlibat	1		0,25							
						2,5							
4	Peningkatan Pengetahuan Kelompok Masyarakat tentang Ekosistem Mangrove	Kelompok masyarakat mengetahui dan memahami terkait fungsi ekosistem mangrove untuk pesisir	Sangat Baik: Masyarakat sangat paham fungsi ekosistem mangrove	4	0,25	1							
			Baik: Masyarakat paham fungsi ekosistem mangrove	3		0,75	0,75			0,75			
			Cukup: Masyarakat cukup paham fungsi ekosistem mangrove	2		0,5		0,5	0,5			0,5	
			Kurang: Masyarakat tidak paham fungsi ekosistem mangrove	1		0,25					0,25		
						2,5	3	2,5	2,5	3,25	2,25	2,75	
				Nilai Indeks			75	62,5	62,5	81,25	56,25	68,75	67,70833333

Lanjutan...

No.	Indikator	Definisi	Skala	Skor	Bobot	Total Skor	Alor	Rote Daudolu	Rote Serubeba	Maluku Tenggara	Raja Ampat	Jakarta Utara	Jumlah Rata-Rata
1	Legalitas NSPK	Hasil akhir keluaran NSPK	Baik: Penetapan NSPK	3	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
			Cukup: Dokumen Akhir dalam proses penetapan	2		1							
			Kurang: Draft NSPK	1		0,5							
2	Pelibatan Pemangku Kepentingan	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam Penyusunan NSPK	Baik: Ada keterlibatan external KKP	3	0,3	0,9							
			Cukup: Keterlibatan Internal KKP	2		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
			Kurang: Tidak ada keterlibatan pemangku kepentingan lain.	1		0,3							
3	Diseminasi NSPK	Pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait muatan NSPK baik melalui tatap muka langsung, penyampaian	Baik: Telah dilakukan diseminasi eksternal	3	0,2	0,6	0,6	0,6		0,6	0,6	0,6	
			Cukup: Telah dilakukan diseminasi lingkup internal	2		0,4			0,4				

		dokumen NSPK, maupun penyampaian informasi melalui sosial media	Kurang: Belum dilakukan diseminasi	1		0,2							
							2,7	2,7	2,5	2,7	2,7	2,7	
				Nilai Indeks			90,00	90,00	83,33	90,00	90,00	90,00	88,89
				Rehab Mangrove 0,7			52,50	43,75	43,75	56,88	39,38	48,13	47,40
				NSPK 0,3			27,00	27,00	25,00	27,00	27,00	27,00	26,67
				Nilai Indeks kumulatif			79,50	70,75	68,75	83,88	66,38	75,13	74,06
				Rehab Mangrove 0,7			52,50	43,75	43,75	56,88	39,38	48,13	47,40
				NSPK 0,3			27,00	27,00	25,00	27,00	27,00	27,00	26,67
				Nilai Indeks kumulatif			79,50	70,75	68,75	83,88	66,38	75,13	74,06

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Keterangan: Perhitungan ini berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian di hitung nilai kawasan pesisir dan pulau- pulau kecil yang di rehabilitasi oleh tim Direktorat P3K dengan menggunakan *tool* pengolahan data *MS Excel* tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Target IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebesar 55 pada tahun 2025 sedangkan capaian sebesar 74,06 sehingga capaian kinerja sebesar 134,65% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP. IKU ini muncul pada tahun 2025. Tidak ada IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2024. Jadi, tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 dengan tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

IKU ini muncul pada tahun 2025. Target IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 adalah nilai 55 sedangkan capaian sebesar 74,06 sehingga capaian kinerja sebesar 134,65% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Pada butir (*point*) 4 ini menyajikan perbandingan antara target dan capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2025 dengan target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Pada Tahun 2025 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	60	68	73	76	55	74,06	134,65	97.45

Sumber: Direktorat P3K Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan target pada Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2025. Capaian pada tahun 2025 adalah nilai 74,06 atau sebesar 134,65% dari target yang ditetapkan atau memperoleh capaian kinerja maksimum 120% berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP pada tahun 2025. Selanjutnya perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir renstra tahun 2025-2029 (Khususnya pada tahun 2029) sebesar 97.45%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Target IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebesar 55 pada tahun 2025 sedangkan capaian sebesar 74,06 sehingga capaian kinerja sebesar 134,65% dari target yang ditetapkan atau memperoleh capaian kinerja maksimum berdasarkan aplikasi kinerja KKP pada tahun 2025. IKU ini muncul pada tahun 2025. Tidak ditemukan standar nasional, dan tidak ada unit kerja lain yang memiliki IKU “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025.

Jadi, capaian kinerja IKU ini pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun unit kerja lain yang setara di kementerian.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebagai berikut:

- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 didukung oleh:

- Kawasan mangrove yang direhabilitasi (Kode REA.001), Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OA).
- Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya (Kode PFA.001.051.OA).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 34. Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan 31 Desember 2025

No.	Kegiatan Pendukung	Kegiatan Pendukung
1.	Rehabilitasi Wilayah Pesisir	1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025) 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025. 3. FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong – DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025) 4. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025). 5. Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025) 6. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025) 7. Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025) 8. Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025) 9. Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025) 10. Rapat Kolaborasi Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Lantai 20, Tower Fastron, Grha Pertamina (11 April 2025) 11. <i>Invitation to Speak at the Mangrove Breakthrough Workshop</i> di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin Hotel, Central Jakarta (16-17 April 2025) 12. Rapat Rencana Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung di R.R. Lounge Kantor Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (21 April 2025) 13. Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pelaksanaan <i>Project Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)</i> di R.R. Utama Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (22 April 2025) 14. Rapat Rencana Pengajuan Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Permasalahan Surabaya <i>Waterfront Land</i> dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago Lt. 2, GMB IV dan Aplikasi Zoom (24 April 2025) 15. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4C</i> di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri lantai 3 (24 April 2025) 16. Survey awal koordinasi Rencana pengembangan Ekosistem Mangrove di Muara Kamal (25 April 2025) 17. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Cakalang Lt.1, GMB III dan Aplikasi Zoom (28 April 2025) 18. Pertemuan tentang rehabilitasi pesisir dan mangrove di RR Lantai 6 GMB 1 (28 April 2025) 19. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (5 Mei 2025) 20. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4CR</i> di Ruang Rapat Lantai 2 sebelah Selatan, Gedung Ex-Kemenko Marves (5 Mei 2025) 21. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (6 Mei 2025)

No.	Kegiatan Pendukung	Kegiatan Pendukung
		22. Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR (6 Mei 2025) 23. Narasumber dengan tema "Program Rehabilitasi Mangrove dan Usulan Lokasi untuk CSR/TJSL Mangrove" terkait Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR di Hotel Mercure Jakarta Sabang (6 Mei 2025) 24. Peninjauan lapangan pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove 2024 dan Diskusi tindak lanjut pelaksanaan KKPRL pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak (14 Mei 2025) 25. Rapat Rencana Tindak Lanjut Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (20 Mei 2025) 26. Pembahasan hasil survey dan analisa batimetri lokasi pengembangan eduwisata mangrove Kamal Muara di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago GMB IV Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025) 27. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Saung Mushola (Blok C1), Tanah/Lahan Kamal Muara, RW 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Juni 2025) 28. Rapat Koordinasi Kegiatan <i>Groundbreaking</i> Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025) 29. Rapat Rencana Kegiatan Peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (3 Juli 2025) 30. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui aplikasi zoom (22-23 Juli 2025) 31. Pembahasan Tindak Lanjut Kolaborasi Penanaman Mangrove Nasional di Morodemak dan Muara Kamal di Ruang VIP Kantin Sehat, GMB II, KKP (30 Juli 2025) 32. Rencana Kerjasama Pengelolaan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 33. Narasumber terkait paparan dengan tema "Target dan Capaian Rehabilitasi Mangrove" di Shangri-La Jakarta, Kota BNI, Kota Jakarta Pusat (29 Juli 2025) 34. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui Aplikasi Zoom (5 Agustus 2025) 35. Serah terima Sertipikat Lahan Kamal Muara, Jakarta Utara Kamal Muara (5 Agustus 2025). 36. Kegiatan <i>Kick Off</i> "Laut Sehat Bebas Sampah" dan <i>Groundbreaking</i> Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara (6 Agustus 2025) 37. Narasumber pada acara Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia terkait Penguatan Ekosistem Karbon Biru untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan Pullman Hotel Jakarta (7 Agustus 2025) 38. Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD (7 Agustus 2025) 39. Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Kota Pontianak (8 Agustus 2025) 40. Diskusi kegiatan restorasi dan konservasi mangrove serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di 11 Provinsi wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi melalui dana hibah maupun investasi

No.	Kegiatan Pendukung	Kegiatan Pendukung
		karbon mangrove di Ruang Rapat Terubuk Lt. 10, Gedung Mina Bahari (11 Agustus 2025) 41. Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025) 42. Narasumber pada kegiatan "<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta" di Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025) 43. Konsolidasi Isu Mangrove dalam Konteks <i>Enabling Blue Carbon</i> di Hotel JS Luwansa, Jakarta (15 Agustus 2025) 44. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di GOR Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Agustus 2025) 45. Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Kawasan Hutan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Mangrove di Anathera Resort Kuta, Bali (9 September 2025). 46. Tindak Lanjut Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Rehabilitasi Mangrove di Morodemak melalui Aplikasi Zoom (9 September 2025). 47. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (16 September 2025). 48. Rapat Pembahasan mekanisme koordinasi dan integrasi data Peta Mangrove Nasional di Ruang Rapat Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT Badan Informasi Geospasial - Gedung I Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (18 September 2025). 49. <i>Kick-off Meeting Monitoring Mission 3 of Subprogram 2 Policy-Based Program (PBL) on Reducing Marine Debris</i> di Hotel Mandarin Oriental Jakarta (22 September 2025). 50. <i>Kick Off</i> Program Rehabilitasi Mangrove PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group Tahun 2025 di Desa Totoran, Indramayu, Jawa Barat (23 September 2025). 51. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (29 September 2025). 52. Proses penyiapan bantuan sarana prasarana rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi : Raja Ampat, Pulau Kei, Rote Ndao, dan Alor (Oktober 2025). 53. Telah dilakukan survey lokasi penanaman mangrove (Raja Ampat, Biak, Pulau Kei, Rote Ndao, dan Alor) (Oktober 2025). 54. Telah dilakukan survey calon lokasi rehabilitasi lamun (Pulau Kapoposang Kab. Pangkep) (Oktober 2025). 55. Sosialisasi dan Praktik Lapang Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Swiss Bell Airport, Kota Tangerang, Banten (19 November 2025). 56. Narasumber terkait Konsep Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara di Pusat Informasi Suaka Marta Satwa Muara Angke (19 November 2025). 57. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Peta Mangrove Nasional Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (21 November 2025). 58. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove di Hotel Manhattan Hotel Jakarta dan Aplikasi Zoom (28 November 2025). 59. Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengembangan Pusat Restorasi dan Edukasi Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Ecowisata Silo Baru di Kabupaten Asahan Sumatera Utara Desa Silo Baru, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara (10-11 Desember 2025).

No.	Kegiatan Pendukung	Kegiatan Pendukung
		60. Pembahasan Peta Mangrove di Area Penggunaan Lain di Aston TB Simatupang (29 Desember 2025)
2.	Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Perkembangan kegiatan pendukung, antara lain: 1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Pencemaran, Penanggulangan, dan Rehabilitasi Tumpahan Minyak Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 1 Agustus 2025. 2. Modul Pelatihan Informasi Geospasial Tematik Abrasi dan Akresi (modul tersebut masuk ke emilea berkoordinasi dengan Puslat KKP). 3. Finalisasi kajian Kepmen Peta Adaptasi Perubahan Iklim (direncanakan menjadi Kepmen pada periode triwulan 1 2026).

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA..001.051.OA Rehabilitasi Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	398.770.000	263.147.000	246.761.793	11.866.398	258.628.191	98,28	4.518.809
PFA.001.051.OA. Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	121.640.000	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	100	0
Total	520.410.000	274.847.000	258.461.793	11.866.398	270.328.191	98,43	4.518.809

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Desember 2025)

Total pagu efektif sebesar Rp274.847.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp270.328.191, atau mencapai 98,43% dari anggaran yang tersedia, dan sisa anggaran Rp4.518.809.

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan I tahun 2026 antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target 1 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi adalah kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;

b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

Formula Penghitungan IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” sebagai berikut: menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove. Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” periode tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	1	6	600 atau 120 berdasarkan Kinerjajaku	-	1	600	14	42,86

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Keterangan: Pada tahun 2024 menggunakan nomenklatur IKU “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)”.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Target IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada tahun 2025 sebanyak 1 kawasan sedangkan capaian sebanyak 6 kawasan seluas 36 hektar (Ha) sehingga capaian kinerja sebesar 600% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerjajaku KKP. Capaian IKU ini pada tahun 2025 sebagai berikut:

- A. Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote, Provinsi NTT (luas 6 Ha). Penyerahan bantuan pemerintah tersebut berdasarkan BAST Nomor BA.136/DJPK.1/PL.450/XII/2025, tanggal 23 Desember 2025.
- B. Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote, Provinsi NTT (luas 18 Ha). (BAST sedang dalam proses penyelesaian)
- C. Pulau Sika, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi NTT (luas 2,5 Ha). Penyerahan bantuan pemerintah tersebut berdasarkan BAST Nomor BA.138/DJPK.1/PL.450/XII/2025. Tanggal 23 Desember 2025.
- D. Desa Mutus, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya (luas 3,5 Ha). Penyerahan bantuan pemerintah tersebut berdasarkan BAST Nomor BA.135/DJPK.1/PL.450/XII/2025. Tanggal 23 Desember 2025.

- E. Desa Ngilngof, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku (luas 5 Ha). Penyerahan bantuan pemerintah tersebut berdasarkan BAST Nomor BA.137/DJPK.1/PL.450/XII/2025. Tanggal 23 Desember 2025.
- F. Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (luas 1 Ha).

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Terdapat perbedaan nomenklatur IKU pada tahun 2025 dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU yang digunakan adalah “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha”. Target IKU “Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha” pada tahun 2024 sebanyak 10 kawasan sedangkan capaian sebanyak 13 kawasan dengan luas 224,78 hektar (ha).

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Pada butir (*point*) 4 ini menyajikan perbandingan antara target dan capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” berdasarkan PK Direktorat P3K Tahun 2025 dengan target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 37. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Pada Tahun 2025 dengan Target Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4346-Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	14	14	14	14	1	6	600%	42.86

Sumber: Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029 dan Direktorat P3K Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Pada Tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan target pada Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2025. Capaian pada tahun 2025 sebanyak 6 kawasan seluas 36 hektar (Ha) sehingga capaian kinerja sebesar 600% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Selanjutnya perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir renstra tahun 2025-2029 (Khususnya pada tahun 2029) sebesar 42.86%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Pada bahasan ini berupaya melakukan *benchmarking* dengan instansi lain. Secara umum, *benchmarking* merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Metode *benchmarking* dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari media sosial khususnya melalui internet, bahan paparan, dan bahan dari sumber lainnya. Beberapa instansi yang bisa dijadikan *benchmarking*, antara lain:

1. Kementerian Kehutanan

Dikutip dari sumber <https://www.kehutan.go.id/news/mangrove-festival-2025-indonesia-perkuat-konsolidasi-nasional-rehabilitasi-ekosistem-mangrove>, diperoleh informasi antara lain:

- a. Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, lebih dari 3,4 juta hektar mangrove terbentang dari Aceh hingga Papua, atau sekitar 23% dari total luasan mangrove dunia.¹⁷
- b. Indonesia menginisiasi proyek rehabilitasi mangrove yang terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *World Bank* menginisiasi proyek *Mangroves for Coastal Resilience* atau *M4CR*. *M4CR* merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk mengatasi degradasi ekosistem mangrove di Indonesia melalui rehabilitasi skala besar yang berfokus pada pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan lingkungan, yang memiliki target rehabilitasi mangrove sebesar 41.000 hektar dengan penanaman lebih dari 80 juta batang. Pelaksanaan rehabilitasi mangrove *M4CR* berlangsung di 4 provinsi prioritas yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan target luasan 41.000 hektar hingga tahun 2027. *M4CR* menjadi bagian dari kontribusi Indonesia terhadap aksi iklim global dan upaya restorasi ekosistem pesisir secara menyeluruh.
- c. *Mangrofest 2025* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya ekosistem mangrove. Selain itu, kegiatan ini juga menampilkan inovasi, kearifan lokal, dan *best practices* rehabilitasi mangrove dari berbagai daerah, serta menumbuhkan komitmen lintas sektor dan lintas generasi untuk menjaga hutan mangrove sebagai penyangga masa depan pesisir Indonesia.

Selain itu, Program yang telah dijalankan antara lain:

- a. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengakselerasi program Rehabilitasi Mangrove Indonesia (RHL Mangrove) sebagai upaya pemulihan ekosistem pesisir yang penting dalam upaya menghadapi krisis iklim, abrasi pantai, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.¹⁸
- b. Strategi Penguatan Perencanaan dan Kelembagaan RHL Mangrove dilakukan Kemenhut melalui Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kemenhut menggunakan prinsip 3M, yaitu dengan Memulihkan, Meningkatkan, dan Mempertahankan. Prinsip 3M ini sesuai dengan PP 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjaga fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan, termasuk juga untuk ekosistem hutan mangrove.
- c. Kemenhut mendorong keterlibatan publik secara luas melalui pendekatan *Public Engagement*, serta membuka peluang dukungan dari program bantuan multilateral, dan CSR swasta.
- d. Target RHL Mangrove Indonesia berdasarkan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU-RHL), total ekosistem mangrove yang menjadi fokus rehabilitasi adalah: 79,56% berada di kawasan hutan negara oleh Kemenhut, dan 20,44% berada di luar kawasan (APL) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
- e. Untuk mensinergikan dan mempercepat RHL mangrove, Kemenhut menargetkan integrasi program rehabilitasi dalam rencana pembangunan daerah dan nasional, serta mendorong terbangunnya unit manajemen mangrove yang berfungsi permanen, hal ini agar terjadi kesepahaman antar pemangku wilayah, dan juga terbentuknya pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
- f. Capaian RHL Mangrove Indonesia sendiri telah berjalan sejak tahun 2020, berbagai program strategis telah berjalan, seperti: Program PEN, PRM, dan M4CR yang memulihkan ribuan hektare mangrove di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

¹⁷<https://www.kehutan.go.id/news/mangrove-festival-2025-indonesia-perkuat-konsolidasi-nasional-rehabilitasi-ekosistem-mangrove>

¹⁸ <https://www.kehutan.go.id/news/article-6>

- g. Salah satu faktor penting yang mendukung RHL Mangrove adalah partisipasi aktif masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH).
- h. Pengembangan persemaian mangrove berskala besar juga dilakukan, beberapa diantaranya adalah Persemaian Mangrove Pulau Cemara di Brebes Jawa Tengah dan BPDASHL Unda Anyar Bali (Persemaian Mangrove G20).
- i. Capaian RHL mangrove kini menghadapi tantangan signifikan akibat keterbatasan anggaran APBN, terbatasnya periode program hibah/loan, serta keterbatasan pada kapasitas pemeliharaan di lokasi terpencil. Untuk itu pendekatan kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada penanaman, melainkan diperluas menjadi investasi jangka panjang yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk dunia usaha, lembaga donor, dan masyarakat. Kebijakan ini menjadi paket yang terus dikerjakan Kemenhut mencakup Terobosan Pendanaan, Kolaborasi, dan Regulasi Adaptif melalui Peta arahan Kebijakan Investasi dan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove.
- j. Capaian RHL Mangrove Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti : Lokasi tanam belum sepenuhnya “clean and clear”; Gelombang tinggi, banjir rob; Hama tritip, serta tumpukan sampah laut yang menghambat pertumbuhan tanaman; Minimnya pemeliharaan akibat akses terbatas di area terpencil; Belum optimalnya regulasi dan strategi pasca rehabilitasi (P2); dan Lemahnya koordinasi antarpihak dan belum terbentuknya jaringan kelembagaan yang kuat.
- k. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kemenhut mengatasi tantangan rehabilitasi mangrove ini, antara lain: mendorong keterlibatan publik secara luas melalui pendekatan Public Engagement, membuka peluang dukungan dari program bantuan multilateral, dan CSR swasta, serta Kemenhut berkomitmen menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang rendah emisi, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui strategi yang adaptif dan kolaboratif, Indonesia bergerak menuju ekosistem pesisir yang sehat dan tangguh, serta mendukung pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Berdasarkan literatur terkait, diperoleh informasi antara lain:

1. Dalam momentum peringatan Hari Mangrove Sedunia 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen nasional untuk merehabilitasi 769.824 hektare ekosistem mangrove melalui dua langkah strategis: pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, serta kegiatan penanaman mangrove di Mempawah Mangrove Park, Kalimantan Barat. Forum ini menandai babak penting pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi tonggak hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove secara nasional.¹⁹
2. Mengacu kepada Peta Mangrove Nasional (PMN) 2024, Indonesia memiliki tutupan mangrove seluas 3,44 juta hektar, terbesar di dunia dan mencakup sekitar 20% total ekosistem mangrove global. Namun, dalam empat dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan lebih dari satu juta hektare mangrove akibat alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak terkendali, dan abrasi. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah terdampak, dengan degradasi lebih dari 17 ribu hektare, termasuk kehilangan 300 hektare daratan di Kabupaten Mempawah.
3. KLH/BPLH melaksanakan penanaman mangrove seluas 8,1 hektar di Mempawah Mangrove Park, sebagai bagian dari program rehabilitasi 61,8 hektar di wilayah tersebut. Ini menjadi bagian dari target nasional rehabilitasi 600 ribu hektar hingga 2029.
4. Mangrove melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang besar, menyerap karbon biru untuk mengurangi dampak krisis iklim, menyediakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati, serta menjadi sumber pangan dan ekonomi bagi masyarakat pesisir.

¹⁹<https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-769-ribu-hektare-mangrove-menteri-lh-konsolidasikan-aksi-nasional-melalui-rakornas-dan-penanaman-di-mempawah>

5. Komitmen lintas sektor diperkuat dengan dukungan masyarakat pesisir, komunitas penggiat lingkungan, pemerintah daerah, TNI/Polri hingga KLH/BPLH.
6. Mangrove yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp 250 juta per hektar per tahun.
7. KLH/BPLH menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) sebagai kompas nasional. RPPEM mencakup strategi kebijakan, pengendalian, pemanfaatan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan *scenario planning* menuju 2045. Target dalam skenario transformasional adalah peningkatan tutupan mangrove sehat menjadi 3,9 juta hektare, pengurangan emisi hingga 43 juta ton CO₂, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 25%.
8. Pendanaan rehabilitasi akan digerakkan melalui kombinasi APBN, investasi sektor swasta, skema *blue carbon credit*, perdagangan karbon *Paris Agreement Article 6.2*, dana iklim internasional, dan CSR berbasis pesisir. Teknologi dan pendanaan penting, tetapi kunci keberhasilan tetap berada di tangan komunitas lokal.
9. Perlu memperkuat kelembagaan desa, mengembangkan ekonomi lokal, dan memastikan masyarakat pesisir mendapat manfaat langsung dari ekosistem yang lestari.
10. Pentingnya pendekatan *pentahelix* yang melibatkan semua pihak secara partisipatif dari perencanaan hingga pemantauan. “Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove akan berjalan maksimal jika dilakukan dengan pengelolaan partisipatif. Semua pihak harus terlibat aktif, dari perencanaan hingga pemantauan, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” sebagai berikut:

- a. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- b. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

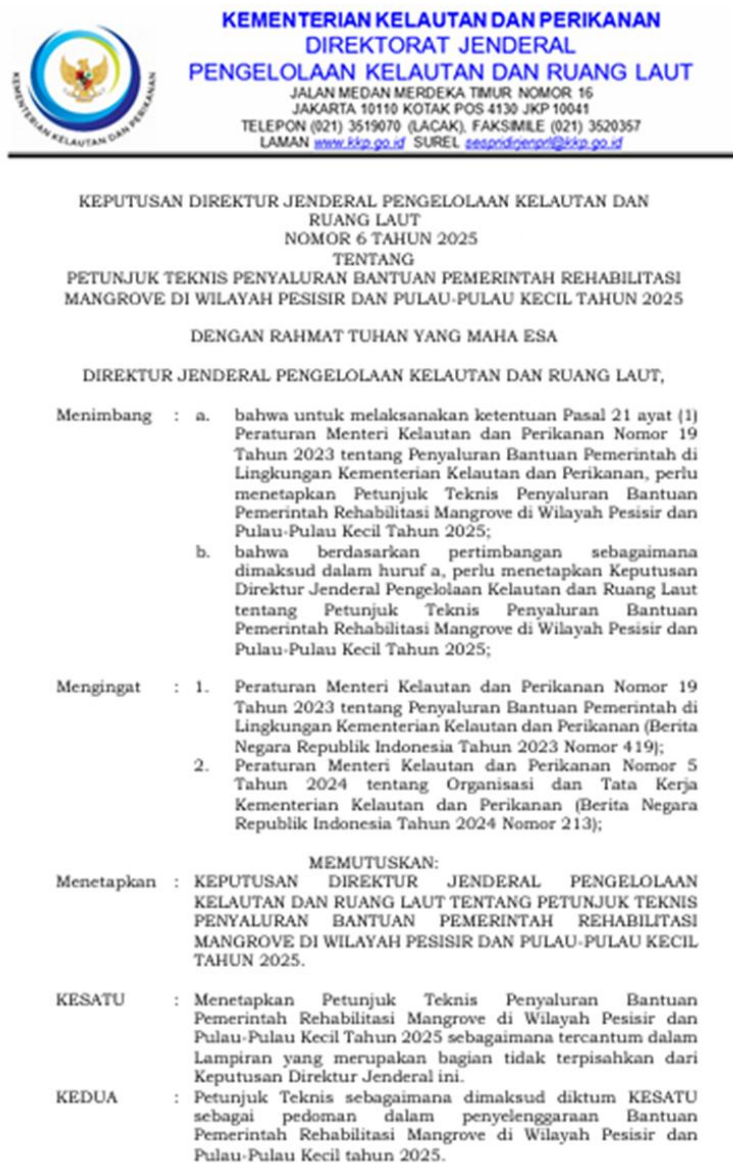
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada tahun 2025 didukung oleh Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (Kode REA), Kawasan mangrove yang direhabilitasi (Kode REA.001), dan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OA) serta Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025.



Gambar 26. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025).
3. *Focus Group Discussion (FGD)* Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong – DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025).
4. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025).
5. Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025).
6. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025).
7. Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025).

8. Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025).
9. Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025).
10. Rapat Kolaborasi Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Lantai 20, Tower Fastron, Grha Pertamina (11 April 2025).
11. *Invitation to Speak at the Mangrove Breakthrough Workshop* di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin Hotel, Central Jakarta (16-17 April 2025).
12. Rapat Rencana Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung di Ruang Rapat Lounge Kantor Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (21 April 2025).
13. Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pelaksanaan *Project Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)* di R.R. Utama Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (22 April 2025).
14. Rapat Rencana Pengajuan Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Permasalahan Surabaya *Waterfront Land* dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago Lt. 2, GMB IV dan Aplikasi Zoom (24 April 2025).
15. Pertemuan *Steering Committee Program M4C* di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri lantai 3 (24 April 2025).
16. Survey awal koordinasi Rencana pengembangan Ekosistem Mangrove di Muara Kamal (25 April 2025).
17. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Cakalang Lt.1, GMB III dan Aplikasi Zoom (28 April 2025).
18. Pertemuan tentang rehabilitasi pesisir dan mangrove di RR Lantai 6 GMB 1 (28 April 2025).
19. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (5 Mei 2025).
20. Pertemuan *Steering Committee Program M4CR* di Ruang Rapat Lantai 2 sebelah Selatan, Gedung Ex-Kemenko Marves (5 Mei 2025).
21. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (6 Mei 2025).
22. Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR (6 Mei 2025).
23. Narasumber dengan tema "Program Rehabilitasi Mangrove dan Usulan Lokasi untuk CSR/TJSL Mangrove" terkait Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR di Hotel Mercure Jakarta Sabang (6 Mei 2025).
24. Peninjauan lapangan pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove 2024 dan Diskusi tindak lanjut pelaksanaan KKPRL pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak (14 Mei 2025).
25. Rapat Rencana Tindak Lanjut Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (20 Mei 2025).
26. Pembahasan hasil survey dan analisa batimetri lokasi pengembangan eduwisata mangrove Kamal Muara di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago GMB IV Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025).
27. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Saung Mushola (Blok C1), Tanah/Lahan Kamal Muara, RW 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Juni 2025).
28. Rapat Koordinasi Kegiatan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025).
29. Rapat Rencana Kegiatan Peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (3 Juli 2025).
30. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui aplikasi zoom (22-23 Juli 2025).
31. Pembahasan Tindak Lanjut Kolaborasi Penanaman Mangrove Nasional di Morodemak dan Muara Kamal di Ruang VIP Kantin Sehat, GMB II, KKP (30 Juli 2025).

32. Rencana Kerjasama Pengelolaan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3
33. Narasumber terkait paparan dengan tema "Target dan Capaian Rehabilitasi Mangrove" di Shangri-La Jakarta, Kota BNI, Kota Jakarta Pusat (29 Juli 2025)
34. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional melalui Aplikasi Zoom (5 Agustus 2025)
35. Serah terima Sertipikat Lahan Kamal Muara, Jakarta Utara Kamal Muara (5 Agustus 2025).
36. Kegiatan *Kick Off* "Laut Sehat Bebas Sampah" dan Groundbreaking Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara (6 Agustus 2025)
37. Narasumber pada acara Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia terkait Penguatan Ekosistem Karbon Biru untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan Pullman Hotel Jakarta (7 Agustus 2025)
38. Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD (7 Agustus 2025)
39. Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Kota Pontianak (8 Agustus 2025)
40. Diskusi kegiatan restorasi dan konservasi mangrove serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di 11 Provinsi wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi melalui dana hibah maupun investasi karbon mangrove di Ruang Rapat Terubuk Lt. 10, Gedung Mina Bahari (11 Agustus 2025)
41. Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025)
42. Narasumber pada kegiatan "*Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Dokumen Strategi Pengendalian Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta" di Oria Hotel Ballroom Lt. 2 Jakarta (12 Agustus 2025)
43. Konsolidasi Isu Mangrove dalam Konteks *Enabling Blue Carbon* di Hotel JS Luwansa, Jakarta (15 Agustus 2025)
44. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di GOR Kamal Muara, Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Agustus 2025)
45. Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Kawasan Hutan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Mangrove di Anathera Resort Kuta, Bali (9 September 2025).
46. Tindak Lanjut Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Rehabilitasi Mangrove di Morodemak melalui Aplikasi Zoom (9 September 2025).
47. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (16 September 2025).
48. Rapat Pembahasan mekanisme koordinasi dan integrasi data Peta Mangrove Nasional di Ruang Rapat Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IGT Badan Informasi Geospasial - Gedung I Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (18 September 2025).
49. *Kick-off Meeting Monitoring Mission 3 of Subprogram 2 Policy-Based Program (PBL) on Reducing Marine Debris* di Hotel Mandarin Oriental Jakarta (22 September 2025).
50. *Kick Off* Program Rehabilitasi Mangrove PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group Tahun 2025 di Desa Totoran, Indramayu, Jawa Barat (23 September 2025).
51. Rapat Penyelenggaraan Data Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Vicon Pusdatin, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 (29 September 2025). Proses penyiapan bantuan sarana prasarana rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi : Raja Ampat, Pulau Kei, Rote Ndao, dan Alor (Oktober 2025).
52. Telah dilakukan survey lokasi penanaman mangrove (Raja Ampat, Biak, Pulau Kei, Rote Ndao, dan Alor) (Oktober 2025).
53. Telah dilakukan survey calon lokasi rehabilitasi lamun (Pulau Kapoposang Kab. Pangkep) (Oktober 2025).
54. Sosialisasi dan Praktik Lapang Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Ruang Rapat Swiss Bell Airport, Kota Tangerang, Banten (19 November 2025).
55. Narasumber terkait Konsep Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara di Pusat Informasi Suaka Marta Satwa Muara Angke (19 November 2025).

56. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Peta Mangrove Nasional Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (21 November 2025).
57. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove di Hotel Manhattan Hotel Jakarta dan Aplikasi Zoom (28 November 2025).
58. Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengembangan Pusat Restorasi dan Edukasi Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Ecowisata Silo Baru di Kabupaten Asahan Sumatera Utara Desa Silo Baru, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara (10-11 Desember 2025).
59. Pembahasan Peta Mangrove di Area Penggunaan Lain di Aston TB Simatupang (29 Desember 2025).

9. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran kegiatan pendukung IKU 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” sampai tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)” Sampai dengan Akhir 31 Desember 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
REA.001.051.OA. Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	398.770.000	263.147.000	246.761.793	11.866.398	258.628.191	98,28	4.518.809

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Desember 2025)

Total pagu efektif sebesar Rp263.147.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp258.628.191, atau mencapai 98,28% dari anggaran yang tersedia, dan sisa anggaran Rp4.518.809. Sedangkan **realisasi anggaran berkaitan dengan rehabilitasi ekosistem karbon biru** pada tahun 2025 dijelaskan di bawah ini.

Tabel 39. realisasi anggaran berkaitan dengan rehabilitasi ekosistem karbon biru pada tahun 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA..004.051.EG Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru	2.483.600.000	2.483.600.000	1.788.910.420	391.061.260	2.179.971.680	87,77	303.628.320

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Desember 2025)

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan I tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil,

IKU 06. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 04 “Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan”. Target IKU ini sebanyak 3 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat Hak Atas Tanah atau penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, penyusunan prospektus pengembangan gugus pulau dan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau,

Teknik menghitung IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNPB) atau Sertipikat HAT; dan/atau
2. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus); dan/atau
3. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau).

A. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan PPK/T berupa hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sertipikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk: 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertipikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA);
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya;
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk;
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura);
6. PPK/T yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi; dan
7. PPK/T dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya

4. Menentukan PPK/T prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 27. Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T
Sumber: Tim Kerja Pengelolaan Lahan, Direktorat P3K

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada Triwulan II Tahun 2025 telah terbit sebanyak total 81 bidang tanah (sertipikat) di 70 pulau kecil, dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 68 bidang di 58 pulau PPKT dan 13 bidang di 12 pulau non PPKT. Data Sertipikat Hak Atas Tanah di PPK/T dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 28. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T

Daftar sertifikat hak pakai di pulau-pulau kecil dan terluar yang sudah terbit atas nama pemerintah RI cq Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 40. Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang sudah terbit

PPKT						
No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas Tanah (M ²)
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	290.000
2	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	2.645
3	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	800
4	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Kota Batam	Kepulauan Riau	11.703
5	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	7.700
6	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	1.195
7	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palmatok	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	10.510

8	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	14.270
9	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	41.200
10	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	12.143
11	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	400
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	9.243
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	1.918
13	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Kepulauan Riau	1.304
14	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	4.355
15	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Kepulauan Riau	8.964
16	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	9.919
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	3.786
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	50.300
17	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara	99.000
18	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	36.820
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	1.923
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	4.000
19	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Aceh	1.000
20	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Aceh	11.530
21	Pulau Salaut Besar	Langi	Alafan	Simeulue	Aceh	1.422.000
22	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	14.110
23	Pulau Rupert	Tanjung Punak	Rupert Utara	Bengkalis	Riau	17.060
24	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Riau	2.630
25	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Riau	8.924
26	Pulau Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	3.037.000
27	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Lampung	40.000
28	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	3.750
29	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	2.197
30	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Kalimantan Utara	12.000
31	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Kalimantan Timur	6.976
32	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemear	Tolitoli	Sulawesi Tengah	1.124
33	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Sulawesi Tengah	8.290
34	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	29.760
35	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	83.200
36	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	97.400
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	1.768
37	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	6.897
38	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	4.784
39	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	123

40	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	660
41	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	3.700
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	6.300
	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	6.422
42	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	99.500
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	NTT	15.690
43	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	NTT	612.300
44	Pulau Batek	Netemnanu Utara	Amfoang Timur	Kupang	NTT	62.700
45	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Maluku	901
46	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	21.480
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	15.040
47	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Maluku	77.900
48	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	4.027
49	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Maluku	14.460
50	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	276
51	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Maluku	2.500
52	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Maluku	50.100
53	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Maluku	45.290
54	Pulau Liran	Ustutun	Wetar	Maluku Barat Daya	Maluku	4.518
55	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Maluku Utara	117.000
56	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	20.000
57	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	10.000
58	Pulau Bras	Mapia	Supriori Barat	Supriori	Papua	25.550
59	Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	NTT	612.300
60	Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	3.037.000
61	Salaut Besar	Langi	Lafan	Simeulue	Aceh	1.422.000
62	Batek	Netemnanu Utara	Amfoang Timur	Kupang	NTT	62.700
NON PPKT						
63	Pulau Morotai (SKPT)	Daeo Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara	52.200
64	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Kepulauan Riau	2.957
65	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	433
66	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) I	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	678.400
	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) II	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	140.797
67	Pulau Sumangga Marinni	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	3.708

68	Pulau Sumangga Kayyang	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	34.183
69	Pulau Buraolei	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	422
70	Pulau Gusunduian	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	2.625
71	Pulau Lalungan	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	3.140
72	Pulau Kamarian Marinni	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	1.388
73	Pulau Kamarian Kayyang	Balabalakang	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	8.362
74	Pulau Malamber Marinni	Balabalakang Timur	Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	32.582
75	Pulau Lamudaan Marinni	Balabalakang	Kepulauan Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	2599
76	Pulau Lumu-lumu	Balabalakang	Kepulauan Balabalakang	Mamuju	Sulawesi Barat	1575

Contoh bentuk sertifikat PPK/T yang telah terbit sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 29. Contoh Sertifikat yang telah terbit

B. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus)

Gugus pulau adalah sekelompok pulau, termasuk perairan yang ada di dalamnya yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya, serta bentuk alami lain yang dijumpai, yang membentuk suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis dan politik.

Gugus pulau merupakan kumpulan beberapa pulau kecil yang jarak antar pulau saling berdekatan dengan batas fisik yang jelas, saling tergantung dan berinteraksi satu sama lain, dan memiliki keterikatan dalam berbagai aspek, seperti sosial dan budaya, ekonomi, serta ekosistemnya.

Pengembangan gugus pulau merujuk pada upaya terencana untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pulau-pulau kecil yang saling berdekatan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pengembangan gugus pulau memerlukan beberapa syarat utama sebagai berikut:

1. Gugus pulau harus memiliki potensi untuk menjadi wilayah mandiri dan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.
2. Pengembangan harus mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dan ruang yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Konektivitas antar pulau dalam gugus tersebut harus ditingkatkan untuk memudahkan mobilitas dan interaksi antar masyarakat pulau.

Tujuan utama dari pengembangan gugus pulau adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pembangunan wilayah kepulauan. Gugus pulau membantu dalam pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, pengembangan potensi wilayah, serta mempermudah hubungan antar pulau, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis.

C. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya

Kegiatan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai upaya meningkatkan optimalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar yang telah memiliki kepastian hukum. Pada periode pelaporan, kegiatan ini difokuskan pada pulau-pulau kecil/terluar yang telah disertipikatkan Hak Atas Tanah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai objek prioritas kerjasama pemanfaatan. Pelaksanaan kegiatan mencakup fasilitasi kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi, dan korporasi, baik dalam skema Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), melalui proses pendampingan penyusunan dan finalisasi dokumen kerja sama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar. Fasilitasi dilakukan dengan memastikan pemenuhan aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, kelayakan teknis, serta prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar sebagai dasar pelaksanaan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mitra usaha. Secara kuantitatif, output diukur melalui jumlah dokumen kerjasama yang difasilitasi dan jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya kerja sama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar yang berkontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meningkatnya nilai investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta bertambahnya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar pulau. Secara tidak langsung, kegiatan ini mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta memperkuat tata kelola pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar yang berkelanjutan.

Tabel 41. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04)								
Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan								
Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target	Capaian	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	3	4	133 atau 120% berdasarkan Kinerjajaku	-	3	133,33	9	44,44

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Keterangan: Pada tahun 2024 nomenklatur IKU “Pulau – pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)”. Terdapat perbedaan nomenklatur IKU pada tahun 2025 dengan tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” muncul pada tahun 2025. Target IKU ini sebanyak 3 pulau pada tahun 2025 dan tercapai sebanyak 4 lokasi. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi pada tahun 2025 diperoleh dari kegiatan:

1. Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Gugus Pulau Gili Kondo Kab. Lombok Timur: (1) Gili Kondo, (2) Gili Lampu, (3) Gili Bidara, (4) Gili Pasir, dan (5) Gili Petagan yang dilaksanakan pada bulan Juli – November 2025;
2. Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao, NTT yang dilaksanakan pada bulan April – Desember 2025;
3. Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan dan Sertifikasi Lahan Kamal Muara di Jakarta Utara, DKI Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Juli – November 2025;
4. Fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan Sertifikasi Hak atas Tanah di Pulau Lusi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Terdapat perbedaan nomenklatur IKU pada tahun 2025 dengan 2024. Nomenklatur IKU yang digunakan pada tahun 2024 adalah “Pulau – pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)”. Jadi, tidak dapat dibandingkan antara capaian tahun 2025 dengan tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Perbandingan capaian kinerja IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam renstra Ditjen PK tahun 2025–2029 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 42. Perbandingan capaian kinerja IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit.P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target 2029
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2365–Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil										
6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	9	9	9	9	3	4	133,33	44.44

Sumber: Direktorat P3K (Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa target IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” sebanyak 3 pulau pada tahun 2025 sedangkan capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” pada tahun 2025 sebanyak 4 lokasi sehingga capaian kinerja sebesar 133,33%. Capaian tahun 2025 sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Gugus Pulau Gili Kondo Kab. Lombok Timur: (1) Gili Kondo, (2) Gili Lampu, (3) Gili Bidara, (4) Gili Pasir, dan (5) Gili Petagan yang dilaksanakan pada bulan Juli – November 2025;
2. Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao, NTT yang dilaksanakan pada bulan April – Desember 2025;

3. Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan dan Sertifikasi Lahan Kamal Muara di Jakarta Utara, DKI Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Juli – November 2025;
4. Fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan Sertifikasi Hak atas Tanah di Pulau Lusi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Capaian IKU pada tahun 2025 melampaui target tahun 2025 dalam Renstra 2025–2029. Target Renstra tahun 2025 ditetapkan sebesar 3 kawasan, sementara realisasi pada tahun 2025 mencapai 4 kawasan. Selanjutnya perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir renstra tahun 2025–2029 (Khususnya pada tahun 2029) sebesar 44.44 %

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K pada tahun 2025, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun KKP sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang dimanfaatkan untuk Investasi (kumulatif) (lokasi)” dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah lokasi yang memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi Hak Atas Tanah serta penguatan fasilitasi kerja sama pemanfaatan dengan pelaku usaha, sehingga mendorong bertambahnya lokasi investasi secara kumulatif. Sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait turut mendukung kesiapan lokasi investasi di beberapa wilayah prioritas. Namun demikian, pencapaian target belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya kendala legalitas lahan, keterbatasan data spasial, lamanya proses perizinan lintas sektor, serta kesiapan sosial dan infrastruktur dasar di sebagian lokasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan percepatan penyiapan lokasi melalui (1) ketersediaan anggaran yang cukup; (2) sertifikasi lahan; (3) penguatan koordinasi lintas sektor; (4) peningkatan kualitas data dan informasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta (5) pendekatan partisipatif dengan masyarakat lokal melalui sosialisasi dan koordinasi yang intensif dan (6) percepatan sertifikasi Hak Atas Tanah pada pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir potensial. Penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan kementerian/lembaga teknis lainnya, terus dilakukan untuk meminimalkan hambatan sertifikasi Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil dan mempercepat kesiapan lokasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah lokasi yang siap dimanfaatkan untuk investasi secara berkelanjutan.

Keberhasilan kegiatan pelaksanaan IKU Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau) akan mendukung capaian/keberhasilan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Permasalahan yang dihadapi pada Triwulan II Tahun 2025 adalah adanya efisiensi dan blokir anggaran. Pada Triwulan II Tahun 2025, pencapaian target kegiatan masih terkendala oleh belum optimalnya kesiapan lokasi investasi akibat permasalahan legalitas lahan, keterbatasan dan ketidaksinkronan data spasial, serta lamanya proses koordinasi dan perizinan lintas sektor, yang berdampak pada tertundanya penambahan lokasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan secara kumulatif. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran dioptimalkan melalui pengintegrasian kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan dalam satu rangkaian pelaksanaan sehingga mengurangi duplikasi biaya operasional;

- b. Sumber daya manusia dimanfaatkan secara efisien melalui penugasan tim terpadu dan pemanfaatan pejabat fungsional sesuai kompetensi, dan melibatkan staff UPT/teknis;
- c. Efisiensi waktu dicapai dengan pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara paralel serta pemanfaatan pertemuan daring pada tahapan tertentu;
- d. Pemanfaatan data dan dokumen eksisting (sertipikasi lahan, peta spasial, dan dokumen perencanaan) mengurangi kebutuhan survei dan pengumpulan data ulang;
- e. Sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait mendukung pencapaian target IKU tanpa peningkatan signifikan terhadap kebutuhan sumber daya.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” adalah Kebijakan Bidang kemaritiman dan Kelautan (Kode PBW) khususnya berkaitan dengan Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (Kode PBW.002), dan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) khususnya berkaitan dengan Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.002.051).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung capaian IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini antara lain:

1. Survei Lokasi Pemanfaatan Pengelolaan Lahan Pengembangan Eduwisata Mangrove, Kamal Muara, Jakarta Utara tanggal 12 Mei 2025;
2. Fasilitasi kerjasama pemanfaatan Gugus Pulau Gili Kondo Kab. Lombok Timur: (1) Gili Kondo, (2) Gili Lampu, (3) Gili Bidara, (4) Gili Pasir, (5) Gili Petagan tanggal 18 Mei 2025;
3. Pemindahan aset lahan di Kamal Muara dari BPPSDM KP ke Ditjen Pengelolaan Kelautan tanggal 24 Mei 2025;
4. Sosialisasi Persiapan Pengembangan Kawasan di Kamal Muara tanggal 10 Juni 2025;
5. Sertifikasi hak atas tanah di Pulau Lusi di Kabupaten Sidoarjo tanggal 23–25 Juli 2025;
6. Fasilitasi terkait tindaklanjut sertifikasi pemanfaatan Gugus Pulau Gili Kondo Kab. Lombok Timur: (1) Gili Kondo, (2) Gili Lampu, (3) Gili Bidara, (4) Gili Pasir, (5) Gili Petagan tanggal 25 November 2025;

Sedangkan kegiatan yang mendukung Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao NTT antara lain:

1. Rapat Koordinasi Hilirisasi Komoditas Garam di Ruang Rapat Kawaluso, GMB III Lantai 9 (24 April 2025);
2. Rapat Pembahasan Tim Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (15 Mei 2025);
3. Rapat Pembahasan Tim Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (19 Mei 2025);
4. Rapat Pembahasan Dukungan Pemda dalam Program Modeling Tambak Garam di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Mina Bahari 2 dan Aplikasi Zoom (23 Mei 2025);
5. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Modeling Produksi Garam Tahun 2025 – 2026 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Lt.2, Gedung Mina Bahari II (27 Mei 2025);
6. Konferensi Pers Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Media Center KKP, GMB 4 Lt.1 (11 Juni 2025);
7. Rapat Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Mina Bahari II (12 Juni 2025);
8. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Garam di Ruang Rapat DJPK, GMB III Lantai 11 (15 Juni 2025);
9. Rapat Konfirmasi Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) KKP Tahun 2025 dalam rangka Swasembada Pangan dan Garam Nasional (23 Juni 2025);
10. Rakor Tim Garam di Ruang Rapat Padaido GMB III lantai 11 (26 Juni 2025);

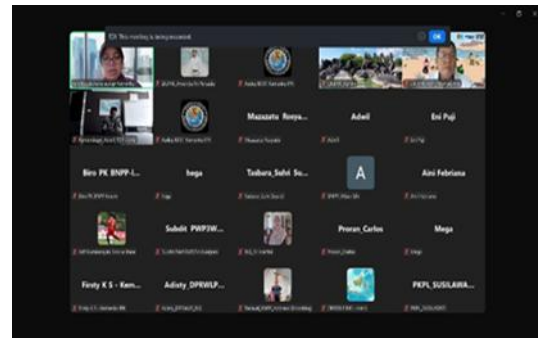
11. Perbaikan Usulan ABT Garam ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (3 Juli 2025);
12. Klarifikasi pengusulan Pulau-pulau Kecil dan Gugus Pulau-pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam RPP RTRWN dan Klarifikasi peta potensi lahan garam dan strategi spasial hilirisasi Komoditas Garam di Ruang Rapat Staf Khusus Lantai 6 GMB I (7 Juli 2025);
13. Pembahasan ABT Garam Tahun 2025 di Ruang Rapat Itjen Lantai 3 GMB III (9 Juli 2025);
14. Rapat Evaluasi Progress Swasembada Garam di Ruang Rapat Padaido, GMB III Lt. 11 (10 Juli 2025);
15. Pembahasan Pelaksanaan Program Kegiatan Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido (DJPK) GMB 3 Lantai 11 (14 Juli 2025);
16. Rapat Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Produksi Garam melalui Aplikasi Zoom (20 Juli 2025);
17. Pembahasan Swasembada Garam dengan OPD di Hotel Harper, Kota Kupang (22 Juli 2025);
18. Pemaparan dan Diskusi terkait Pembangunan Pergaraman Nasional Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (28 Juli 2025);
19. Sosialisasi Progress Program Swasembada Garam di Media Gathering KKP (1 Agustus 2025);
20. Rapat Pembahasan Penyusunan Video Project History Pembangunan Swasembada Garam di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (14-15 Agustus 2025);
21. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao di Ruang Rapat Padaido GMB III Lt. 11 (20 Agustus 2025);
22. Pembahasan Persiapan paparan WamenKP; Progress Garam, Progress RENSTRA & Perencanaan 2026 di Ruang Kerja Dirjen PK GMB III Lt. 11 (21 Agustus 2025);
23. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk Mendukung Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari III lantai 11 (24-25 Agustus 2025);
24. Penandatanganan BAST Konsolidasi Penyiapan Lahan Garam di Ruang Rapat Padaido Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (27 Agustus 2025);
25. Pembahasan FS Swasembada Garam dan Evaluasi Kegiatan Swasembada Garam melalui Aplikasi Zoom (29 Agustus 2025);
26. Rapat Konsolidasi Penyiapan Lahan Garam di Kabupaten Rote Ndao bertempat di Aviary Hotel Bintaro (31 Agustus 2025); Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman di Ruang Rapat Branding, Gedung Mina Bahari III Lt 15 (2 September 2025);
27. Rapat Koordinasi Usulan PSN Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido GMB III lantai 11 (2 September 2025);
28. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pergaraman di Aviary Hotel Bintaro dan Aplikasi Zoom (2 September 2025);
29. Pembahasan Panen Raya Garam bersama Dirut PT. Garam melalui Zoom Meeting (2 September 2025);
30. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pergaraman di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (3 September 2025);
31. Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Pembangunan K-SIGN Kab. Rote Ndao sesuai ketentuan yang berlaku di Ruang Kerja Inspektur I (4 September 2025)
32. Rapat Penyiapan Lahan KSIGN di Kabupaten Rote Ndao di Balai KIPM Denpasar (11 September 2025);
33. *Entry Meeting* Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Kegiatan Kawasan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang, Peningkatan Infrastruktur untuk Budidaya Udang (IISAP), serta Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Tahun 2025 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali (12 September 2025);
34. Sosialisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pembayaran LS Kontraktual dan Non Kontraktual ABT Garam TA.2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat (16 September 2025);
35. Rekonsiliasi Lanjutan Data Keuangan dan Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Anggaran ABT Garam 2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat (17 September 2025);

36. Penandatanganan Kontrak AMDAL Garam Rote Ndao di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (18 September 2025);
37. Persiapan Pengadaan Lahan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Bupati Rote Ndao (19 September 2025);
38. Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Swasembada Garam Nasional dan Ketersediaan Hasil Perikanan di Dalam Negeri di Maluku Room, Aryaduta Hotel Menteng (23 September 2025);
39. Pembahasan Perencanaan untuk Perizinan K-SIGN di Aone Hotel Jakarta (24 September 2025);
40. Diskusi atas Program Pergaraman Nasional pada Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (24 September 2025);
41. Audiensi Pengadaan Tanah dan/atau Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Modeling Ekstensifikasi dan Intensifikasi Tambak Garam di Ruang Rapat Lantai 2 Direktur Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Belakang Sarinah) (24 September 2025);
42. Rapat Rancangan Dokumen Perizinan KSIGN melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025);
43. Ekspose Proses Pengadaan Lahan K-SIGN oleh Kepala Kanwil BPN/ATR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ruang Rapat Padaido Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (30 September 2025);
44. Pembahasan Percepatan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Itjen Lt.2 GMB III (30 September 2025);
45. Penyusunan Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembangunan Prasarana Usaha Pergaraman dan Pengembangan Sentra Produksi Garam (Ekstensifikasi dan Intensifikasi) T.A. 2025 (1 Oktober 2025);
46. FGD dengan tema "Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Garam Nasional" melalui aplikasi zoom (2 Oktober 2025);
47. Paparan Hasil Pekerjaan Pemetaan Lahan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao Metode Lidar di Ruang Rapat Direktur P3K (Lantai 8 GMB III KKP) (2 Oktober 2025);
48. Ekspose Hasil Pemetaan Lidar Rote Ndao di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 (6 Oktober 2025);
49. Audiensi dan Konsultasi PT Pupuk Kaltim terkait Garam Industri dalam Rangka Persiapan Pabrik Soda Ash (6 November 2025) di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 (6 Oktober 2025);
50. Penandatanganan Kerjasama Pengembangan Lahan Garam dan Industri di Ruang Rapat Benny S. Muljana (BSM) Lantai 2, Gedung Bappenas;
51. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Produksi Garam melalui aplikasi zoom (13 Oktober 2025);
52. Permohonan Fasilitasi dan Pendampingan Kunjungan Lapang Lokasi Pembangunan K-SIGN Kab. Rote Ndao, NTT (15 Oktober 2025);
53. Diskusi atas Program Pergaraman Nasional pada DJPK di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 GMB III (16 Oktober 2025);
54. Pembahasan Penyediaan Lahan K-SIGN Tahap 2 di Kab. Rote Ndao di Aston Kupang Hotel & Convention Center (17 Oktober 2025);
55. Pembahasan Progress Swasembada Garam melalui aplikasi zoom (17 Oktober 2025);
56. Rekonsiliasi Data Keuangan, Pemantauan dan Verifikasi Pertanggungjawabab Keuangan Pelaksanaan Anggaran ABT Garam Periode TW III 2025 di Ruang Rapat KIPM Cirebon Stasiun Karantina Ikan Cirebon 24 Oktober 2025);
57. Tindak Lanjut Permohonan Dukungan Bahan Bakar dalam Pelaksanaan Pembangunan KSIGN melalui aplikasi zoom (28 Oktober 2025);
58. Pembahasan Program Prioritas Ekstensifikasi dan Intensifikasi Kawasan Tambak Garam Tahun 2025 di Ruang Rapat Berakhlak Lantai 3 GMB III KKP (28 Oktober 2025);
59. Pembahasan Evaluasi Kegiatan Swasembada Garam melalui Aplikasi Zoom (31 Oktober 2025);
60. Pembahasan Pengadaan Tanah Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ashley Hotel Wahid Hasyim Jakarta (3 November 2025);
61. Pemantauan Manajemen Risiko dalam Pembangunan Prasarana Usaha Pergaraman dan Pengembangan Sentra Produksi Garam (Ekstensifikasi dan Intensifikasi) TA. 2025 Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9 GMB III;

62. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9 (17 November 2025);
63. Rapat Perbaikan Hasil Konsultasi Publik Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Swasembada Garam Nasional dan Ketersediaan Hasil Perikanan di Dalam Negeri di Hotel Aryaduta Jakarta (23 November 2025);
64. Pembahasan perkembangan pekerjaan Izin K-SIGN Rote Ndao di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Mina Bahari 3 (27 November 2025);
65. Pembahasan *Draft* PKS Lahan K-SIGN di Harper Kupang (2 Desember 2025);
66. Pembahasan Progres Pekerjaan dan Pengadaan Lahan K-SIGN di Ruang Rapat Padaido Lt 11 GMB 3 KKP (3 Desember 2025);
67. Rekonsiliasi Data Lahan K-SIGN di Mercure Convention Center Ancol (4 Desember 2025);
68. FGD Profile Produksi dan Industri Pengolahan Garam Nasional untuk Mewujudkan Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Sugijanto Soegijoko (SS) 1-2 Lantai 2, Jakarta (4 Desember 2025);
69. Ekspose Perkembangan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao melalui Aplikasi Zoom (5 Desember 2025);
70. Rekonsiliasi Data Lahan K-SIGN di Mercure Convention Center Ancol (5 Desember 2025);
71. Laporan Progres Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kabupaten Rote Ndao melalui Aplikasi Zoom (19 Desember 2025);
72. Pembahasan Progres K-SIGN 2025, Pembahasan *Carry Over* 2026, Pembahasan Intensifikasi Pergaraman Lokasi pekerjaan pembangunan K-SIGN Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dan Aplikasi Zoom (23 Desember 2025).



Diskusi Pembahasan Sertifikasi Pulau Gili Kondo



Rapat Pembahasan Pemindahan Aset Muara Kamal Jakarta Utara melalui zoom meeting



Rapat Tindaklanjuti Pengembangan Kawasan di Kamal Muara Jakarta Utara



Rapat Tindaklanjuti Pengembangan Kawasan di Kamal Muara Jakarta Utara



Rapat Pembahasan Tindakanlanjutan Perjanjian Kerjasama Lahan KSIGN di Kabupaten Rote Ndao



Rapat Pembahasan Tindakanlanjutan Perjanjian Kerjasama Lahan KSIGN di Kabupaten Rote Ndao



Diskusi Pendampingan Sosialisasi Pembangunan KSIGN di Kabupaten Rote Ndao



Rapat Tindakanlanjutan Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Lusi Kabupaten Sidoarjo



Rapat Penyiapan Lahan KSIGN Tahap 2 di Aston Kupang, NTT



Rapat Penyiapan Lahan KSIGN Tahap 2 di Aston Kupang, NTT



Rapat Pembahasan Tindakanlanjutan Perjanjian Kerjasama Lahan KSIGN di Kabupaten Rote Ndao



Rapat Pembahasan Tindakanlanjutan Perjanjian Kerjasama Lahan KSIGN di Kabupaten Rote Ndao



Kunjungan Lapang Lokasi Pembangunan K-SIGN Kab. Rote Ndao, NTT



Kunjungan Lapang Lokasi Pembangunan K-SIGN Kab. Rote Ndao, NTT



Rapat Pembahasan Pembebasan Lahan KSIGN bersama Perwakilan Kecamatan Rote Timur



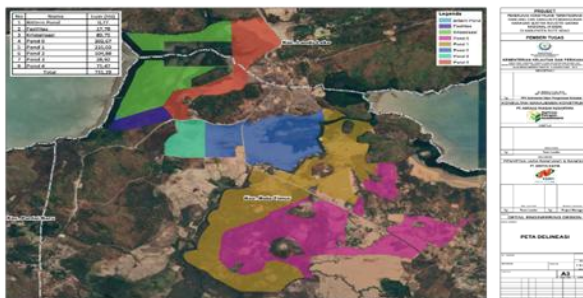
Rapat Pembahasan Penyusunan Prospektus Bisnis dan Inestasi Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Rote Ndao



Tindakanlanjut Penyiapan Lahan KSIGN di Kecamatan Rote Timur



Diskusi Tindakanlanjut Penyiapan Lahan KSIGN di Kabupaten Rote Ndao



Evaluasi Lahan dan Progres Pengadaan Lahan KSIGN di Kecamatan Rote Timur



Rapat Pembahasan Tindakanlanjut Pengadaan Lahan KSIGN di Kecamatan Rote Timur



Tindaklanjut Penyiapan Lahan KSIGN di Ruang Bupati Kabupaten Rote Ndao



Kunjungan Lapang Persiapan Lahan KSIGN di Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur



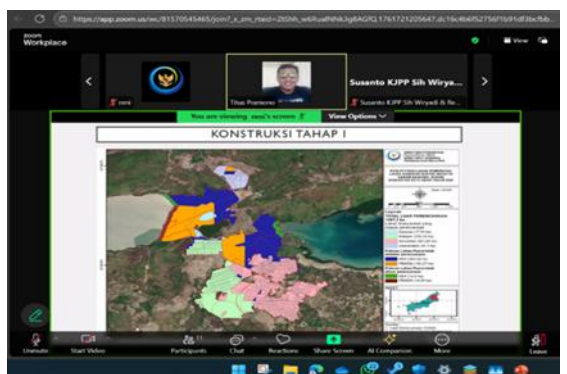
Pembahasan Tindaklanjut Penyiapan Lahan KSIGN dengan Perwakilan Desa di Kec. Rote Timur



Kunjungan Lahan KSIGN bersama Perwakilan Nindya Karya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao



Rekonsiliasi Data Keuangan, Pemantauan dan Verifikasi Dana ABT, Kota Cirebon



Expose Rancang Bangun Kawasan KSIGN secara zoom meeting



Rapat Evaluasi Pembangunan KSIGN



Rapat Tindaklanjuti Penyiapan Lahan KSIGN



Lanjutan...

Audiensi Pengadaan Tanah dan Konsolidasi Lahan



Rapat Tindaklanjuti Sertifikasi Pulau Lusi Kabupaten Sidoarjo

Gambar 30. Kumpulan Kegiatan pendukung Pemanfaatannya Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” sampai tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 43. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU “Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)” sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Pagu di RKAKL Tahun 2025 (Rp)	Pagu Efektif	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PBW 002. Rekomendasi Pengelolaan	2.570.506.000	1.935.790.000	625.937.279	1.261.651.870	1.887.589.149	97,51	8.200.851

Uraian	Pagu di RKAKL Tahun 2025 (Rp)	Pagu Efektif	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Pulau-Pulau Kecil/Terluar							
PFA.002.051. NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya	280.502.000	280.502.000	141.828.680	129.442.737	271.271.417	96,71	230.583
TOTAL	2.851.008.000	2.216.292.000	767.765.959	1.391.094.607	2.158.860.566	97,61	57.431.434

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Desember 2025)

Total pagu efektif sebesar Rp2.216.292.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp2.158.860.566, atau mencapai 97,61% dari anggaran yang tersedia, dan sisa anggaran Rp57.431.434.

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan I tahun 2026 antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 07. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 04 yaitu “Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. IKU ini memiliki target sejumlah 47 Lokasi yang tersalurkan bantuan sarana ekonomi produktif.

Kemiskinan dan kurangnya sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, dan juga rendahnya sumber daya manusia (SDM) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dikurangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat melalui pemberian bantuan sarana/prasarana.

Pada tahun 2025, IKU Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya berkaitan dengan bantuan sarana ekonomi produktif yang bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, pemberian bantuan sarana/prasarana ini merupakan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula penghitungan IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang menerima bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan.

Tabel 44. Target dan Realisasi “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04) Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target	Capaian	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	47	47	100	-	47	100	75	62,67

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Keterangan: Pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Target IKU Nomor 07 “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)” sebanyak 47 lokasi pada tahun 2025 dengan capaian sebanyak 47 lokasi sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45. Kelompok penerima bantuan sarana usaha ekonomi produktif T.A. 2025

No	Kelompok Penerima	Kabupaten	Jenis Bantuan	NO BAST
1	KUB Nelayan Rakan Laot	Aceh Utara	Mesin dan Perahu	BA 65/DJPK.1/PL.450/XII/2025
2	KUB Mina Segara Dampuk	Tabanan	Pancing dan Reel Maguro Navara	BA 43/DJPK.1/PL.450/X/2025
3	KUB Rampus Berdikari	Lebak	Jaring	BA 197/DJPK.1/PL.450/XII/2025
4	- KUB Mina Tirtohargo - KUB Karya Mina - KUB Drini Mandiri Lestari	Bantul dan Gunung Kidul	Life Jacket, Cooler Box, Jaring Indang Hanyut, Jaring Insang Hanyut, Jaring Hanyut, Perahu	BA 102/DJPK.1/PL.450/XII/2025
5	Kelompok Nelayan Kolana Utara	Alor	Cool Box, Mesin, Baling-Baling, Jaring	BA 81/DJPK.1/PL.450/XII/2025
6	KUB Mina Sagara	Cianjur 1	Perahu, Mesin, Senter Kepala, Life Jacket, Ringbouy, Jas Hujan, Aki Kering	BA 106/DJPK.1/PL.450/XII/2025
7	KUB Mekar Laksana	Cianjur 3	Perahu, Mesin, Senter Kepala, Life Jacket, Ringbouy, Jas Hujan, Aki Kering	BA 108/DJPK.1/PL.450/XII/2025

8	KUB Mina Sejahtera	Cianjur 2	Perahu, Mesin, Senter Kepala, <i>Life Jacket</i> , <i>Ringbony</i> , Jas Hujan, Aki Kering	BA 108.A/DJPK.1/PL.450/XII/2025
9	KUB Sagara Biru	Sukabumi	Perahu, Mesin, Jaring Rampus, Genset	BA 101/DJPK.1/PL.450/XII/2025
10	- Yayasan Bhakti Luhur Nusantara - Pokdakan Bukur Berkah Karang Mulya	Indramayu dan Cirebon	Mesin Viar, Mesin Cetak, Timbangan Duduk, Karung, <i>Cool Box</i>	BA 84/DJPK.1/PL.450/XII/2025
11	KNI Purbasari	Pangandaran 1	Perahu dan Mesin	BA 113/DJPK.1/PL.450/XII/2025
12	KUB Surya Bahari Laut Kidul	Pangandaran 2	Perahu, Mesin, dan Jaring	BA 112/DJPK.1/PL.450/XII/2025
13	- KUB Sido Dadi Mulyo - KUB Permata Bahari	Jepara	<i>Life Jacket</i> , Paket <i>Snorkling</i> , Mesin	BA 131/DJPK.1/PL.450/XII/2025
14	KUB Mina Jaya	Pati 1	Jiang Fa <i>Diesel Engine</i>	BA 52/DJPK.1/PL.450/XI/2025
15	KUB Mina Bahari Makmur	Pati 2	<i>Cool Box</i> , <i>Life Jacket</i> , Paket Jaring Benang Pelampung	BA 50/DJPK.1/PL.450/XI/2025
16	KUB Sido Mulyo	Wonosobo	Mesin, <i>Life Jacket</i> , Jaring Waring	BA 42/DJPK.1/PL.450/X/2025
17	- KUB Nuju Karso - KUB Berkah Mina Tirta	Kebumen	Jaket Pelampung, Jaring Gillnet Kantong, Mini <i>Cool Box</i> , Jaring Gillnet Bukan Kantong, <i>Cool Box</i> , Kapal, Suzuki <i>Stroke</i>	BA.51/DJPK.1/PL.450/XI/2025
18	- KUB Kuda Laut - Pokmaswas Pulau Merah Bahari - Pokmaswas Gua Pitu Mbedil	Banyuwangi	<i>Life Jacket</i> , Pakaian Adat Gandrung, Peralatan <i>Snorkling</i>	BA 104/DJPK.1/PL.450/XII/2025
19	KUB Sumbi Laut	Tuban	Garmin	BA.83/DJPK.1/PL.450/XII/2025
20	Lembaga Masyarakat Hukum Adat Burangasi	Buton Selatan	Honda GX270T 9 PK + As Manado Joing, Coldbox, Termon Es Maspion	BA.145/DJPK.1/PL.450/XII/2025
21	KUB Laut Biru	Mamuju Tengah	Perahu dan Mesin	BA 70/DJPK.1/PL.450/XII/2025
22	KN Paloh Gemilang	Sambas	Meskin Tempel, <i>Cool Box</i>	BA 46/DJPK.1/PL.450/XI/2025
23	KUB Tanjung Niaga Raya	Landak	Mesin Tempel, Perahu Kayu, Jaring	BA 45/DJPK.1/PL.450/XI/2025
24	Pemangkou Poyo Tono Hibun	Sanggau	Alat Musik Tradisional,	BA.49/DJPK.1/PL.450/XI/2025

			Pakaian Adat Dayak Hibun	
25	KUB Panglima Batur	Kotawaringin Barat	Kapal, Mesin, Jaring	BA 44/DJPK.1/PL.450/XI/2025
26	KUB Nelayan Nusantara	Tarakan	Mesin	BA 48/DJPK.1/PL.450/XI/2025
27	KUB Pangkalan Jernih	Karimun	Mesin	BA 107/DJPK.1/PL.450/XII/2025
28	KUB Biru Laut Sejahtera	Tulang Bawang 1	Perahu, Mesin, Cool Box	BA 114/DJPK.1/PL.450/XII/2025
29	KUB Kurnia Jaya	Tanggamus	CT	BA 82/DJPK.1/PL.450/XII/2025
30	KUB Medan Gerak Jaya	Lampung Timur	HP	BA 53/DJPK.1/PL.450/XI/2025
31	KUB Sumber Barokah	Tulang Bawang 2	Perahu, Mesin, Cool Box	BA 115/DJPK.1/PL.450/XII/2025
32	Kelompok Masyarakat Cahaya Seram	Maluku Tengah	Kapal, Mesin	BA 54/DJPK.1/PL.450/XI/2025
33	Kelompok Koperasi Nelayan Bajo Sejahtera	Kepulauan Sula	Meisn Out Board, Tali Senar Dolpin	BA 126/DJPK.1/PPK/XII/2025
34	POKMASWAS Muara Tanjung Lestari	Sumbawa	Perahu	BA 111/DJPK.1/PL.450/XII/2025
35	- KUB Tunas Harapan - KUB Napa Wutun	Lembata	Jaring Set	BA 125/DJPK.1/PL.450/XII/2025
36	KUB Sinar Laut	Rote Ndao	Mesin, Cool Box, Garmin, Transducer, Generator	BA 127/DJPK.1/PPK/ XII/2025
37	KUB Nelayan Rambawa Sorong (NRS)	Sorong	Mesin, Perahu	BA 47/DJPK.1/KP.450/XI/2025
38	KUB Bandi	Asmat	Mesin, Pelampung, Timah, Jaring	BA 108/DJPK.1/PL.450/XII/2025
39	KUB Katane	Merauke	Mesin, Perahu	BA 71/DJPK.1/PL.450/XII/2025
40	KUB Sipaingarang	Majene	Cool Box, Mesin, Jaring	BA 76/DJPK.1/PL.450/XI/2025
41	KUB Sinar Batu Bira	Mamuju	Garmin, Life Jacket, Radio SSB Rig Icom, Cool Box, Panel Surya Set	BA 129/DJPK.1/PL.450/XII/2025
42	KUB Bombang Sepe	Jeneponto	Jaring, Cool Box	BA 199/DJPK.1/PL.450/XII/2025
43	KUB Pengelolah Telaga Alam Tasiraya	Poso	Mesin Ketinting, Perahu	BA 116/DJPK.1/PL.450/XII/2025
44	KUB Bintang Nelayan	Muna Barat	Mesin, Cool Box	BA 130/DJPK.1/PL.450/XII/2025
45	- KN Basamo Mangko Manjadi - Banyu Biru Batuang - KN Tangkap Maju Bersama Sakato	Kab. Agam dan Kota Padang	Mesin Ketinting, Mesin Tempel	BA 132/DJPK.1/PL.450/XII/2025
46	KUB Belibis Putih	Kota Pariaman	Mesin, Cool Box	BA 107/DJPK.1/PL.450/XII/2025
47	KUB Berkat Yakin	Banyuasin	Engine Diesel, Cool Box, Marvel, Jaring	BA104/DJPK.1/PL.450/XII/2025

Sumber: Tim Kerja Sarana dan Prasarana, Direktorat P3K (Tahun 2025)

Capaian IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

(1) Aceh Utara, (2) Tabanan, (3) Lebak, (4) Bantul & Gndul, (5) Alor, (6) Cianjur 1, (7) Cianjur 2, (8) Cianjur 3, (9) Sukabumi, (10) Indramayu dan Cirebon, (11) Pangandaran 1, (12) Pangandaran 2, (13) Jepara, (14) Pati 1, (15) Pati 2, (16) Wonosobo, (17) Kebumen, (18) Banyuwangi, (19) Tuban, (20) Buton Selatan, (21) Mamuju Tengah, (22) Sambas, (23) Landak, (24) Sanggau, (25) Kotawaringin Barat, (26)

Tarakan, (27) Karimun, (28) Tulang Bawang 1, (29) Tanggamus, (30) Lampung Timur, (31) Tulang Bawang 2, (32) Maluku Tengah, (33) Kepulauan Sula, (34) Sumbawa, (35) Lembata, (36) Rote Ndao, (37) Kota Sorong, (38) Asmat, (39) Merauke, (40) Majene, (41) Mamuju, (42) Jenepono, (43) Poso, (44) Muna Barat, (45) Agam dan Kota Padang, (46) Kota Pariaman, dan (47) Banyuasin.

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Terdapat perbedaan nomenklatur IKU pada tahun 2025 dengan 2024. IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” berkaitan dengan bantuan ekonomi produktif pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2024, nomenklatur IKU yang digunakan adalah “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” yang berhubungan dengan pembangunan prasarana dermaga apung di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi, tidak dapat dibandingkan capaian tahun 2025 dengan 2024.

Namun demikian, nomenklatur IKU yang berkaitan dengan bantuan ekonomi produktif pada tahun 2024 adalah “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)”. Target IKU “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” pada 2024 sebanyak 55 unit sedangkan capaian sebanyak 56 unit sehingga capaian kinerja sebesar 101,82% pada tahun 2024.

Perbandingan capaian bantuan ekonomi produktif pada tahun 2025 dengan bantuan ekonomi produktif pada tahun 2024 adalah capaian bantuan ekonomi produktif pada tahun 2025 sebanyak 47 lokasi sedangkan capaian bantuan ekonomi produktif tahun 2024 sebanyak 56 unit. Terdapat perbedaan satuan IKU antara tahun 2025 (satuan IKU adalah lokasi) dan tahun 2024 (satuan IKU adalah unit). Salah satu kendala pada tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” sebesar 47 lokasi pada tahun 2025 sedangkan capaian sebanyak 47 lokasi sehingga capaian kinerja sebesar 100% (sudah tercapai). Perbandingan target dan capaian tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 46. Perbandingan target dan capaian tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	69	71	73	75	47	47	100	62.67

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa target Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K tahun 2025 dan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029 khususnya tahun 2025. Capaian atau realisasi tahun 2025 sebanyak 47 lokasi sehingga capaian tersebut adalah sama besar dengan target pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K tahun 2025 dan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025–2029 khususnya pada tahun 2025 sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir renstra tahun 2025–2029 (Khususnya pada tahun 2029) sebesar 62.67%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Target IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” sebesar 47 lokasi pada tahun 2025 sedangkan capaian sebanyak 47 lokasi sehingga capaian kinerja sebesar 100% (sudah tercapai).

IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Analisa penyebab keberhasilan karena pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik meskipun proses pengerjaan pengadaan bantuan ekonomi produktif pada tahun 2025 baru dimulai pada TW II. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola yang baru pada lingkup Direktorat maupun lingkup Ditjen. Meskipun begitu, pengadaan bantuan ekonomi produktif pada tahun 2025 dapat selesai dilaksanakan di 47 lokasi sesuai dengan target IKU melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun di daerah guna penyelesaian persyaratan administrasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat serah terima bantuan, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 2) Penggunaan mesin dan peralatan yang diakui sebagai barang milik negara (BMN) Direktorat P3K.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, efisiensi yang dilaksanakan adalah efisiensi penggunaan anggaran yaitu pelaksanaan verifikasi dan serah terima bantuan ekonomi produktif bersamaan dengan kegiatan lainnya.

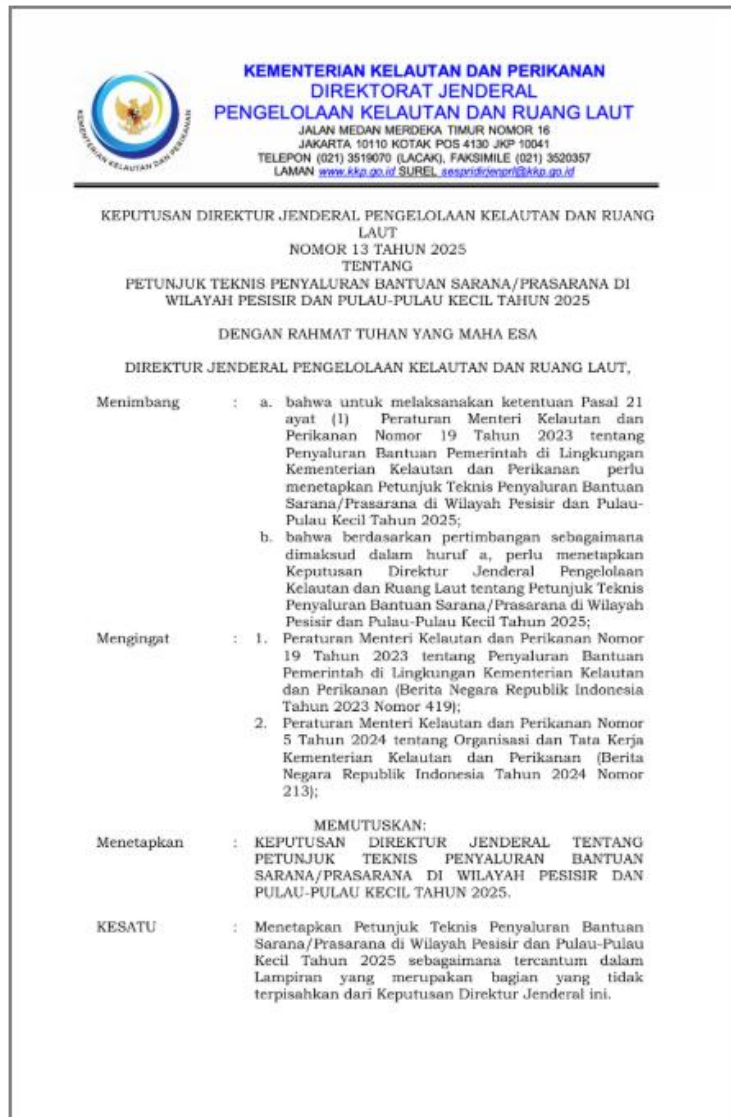
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang berkaitan dengan IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” ini adalah Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar khususnya berkaitan dengan Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode QEG.001.051.OA).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” pada tahun 2025 antara lain:

1. Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.



Gambar 31. Kepdirjen PKRL Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

2. Koordinasi dengan Tim Kerja PPKT terkait pembagian Lokasi rencana Bantuan Sarana Ekonomi Produktif ke masing masing anggota tim (24 Februari 2025).
3. Bimbingan Teknis Modul Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (13 Maret 2025).
4. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Aplikasi Zoom (28 April 2025).



Gambar 32. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Ekonomi Produktif TA 2025 secara daring

5. Pembahasan Implementasi Modul Bantuan Pemerintah pada Portal Data KKP melalui Aplikasi Zoom (30 April 2025).
6. Sosialisasi Percepatan Distribusi KUSUKA Cetak BRI di Ruang Rapat Vicon, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 dan Aplikasi Zoom (21 Mei 2025).
7. Validasi Data Informasi Geospasial Tematik Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2024 di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9 dan Aplikasi Zoom (26 Juni 2025)
8. Perkembangan kegiatan pendukung Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan Bulan Juli 2025, antara lain:
 - a. Daftar Usulan Proposal yang masuk untuk selanjutnya di jadwalkan verifikasi (25 Proposal/ 23 Paket) yaitu: 1) Kebumen, 2) Pati, 3) Pati, 4) Indramayu dan Cirebon, 5) Alor, 6) Wonosobo, 7) Mamuju, 8) Lampung Timur, 9) Tabanan, 10) Tulang Bawang, 11) Aceh Utara, 12) Pangandaran, 13) Sumbawa, 14) Banyuasin, 15) Kalimantan Barat, 16) Kalimantan Barat, 17) Kalimantan Barat, 18) Kab.Tarakan, 19) Kab.Pangkalan Bun, 20) Sukabumi, 21) Rote Ndao, 22) Cianjur, 23) Cianjur (2 Proposal).
 - b. Verifikasi Kelompok (11 Paket), yaitu : 1) Kebumen, 2) Pati, 3) Pati, 4) Indramayu dan Cirebon, 5) Wonosobo, 6) Tabanan, 7) Pangandaran, 8) Rote Ndao, 9) Kalimantan Barat, 10) Kalimantan Barat, 11) Kalimantan Barat.
 - c. Persiapan Pengadaan (10 Paket), yaitu : 1) Kebumen, 2) Pati, 3) Pati, 4) Indramayu dan Cirebon, 5) Wonosobo, 6) Tabanan, 7) Pangandaran, 8) Kalimantan Barat 9) Kalimantan Barat 10) Kalimantan Barat.



Gambar 33. Verifikasi calon kelompok penerima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Sanggau.

9. Perkembangan kegiatan pendukung Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan Bulan Agustus 2025, antara lain:
- Daftar Usulan Proposal (34 Paket): (1). Aceh Utara, (2). Tabanan, (3). Alor, (4). Cianjur 1, (5). Cianjur 2, (6). Sukabumi, (7). Indramayu dan Cirebon, (8). Pangandaran 1, (9). Pangandaran 2, (10). Pati 1, (11). Pati 2, (12). Wonosobo, (13). Kebumen, (14). Mamuju, (15). Sambas, (16). Sanggau, (17). Landak, (18). Kotawaringin Barat, (19). Tarakan, (20). Karimun, (21). Tulang Bawang 1, (22). Tanggamus, (23). Tulang Bawang 2, (24). Maluku Tengah, (25). Sumbawa, (26). Rote Ndao, (27). Sorong, (28). Merauke, (29). Asmat, (30). Jenepono, (31). Poso, (32). Pesisir Selatan, (33). Kota Pariaman, (34). Banyuasin.
 - Verifikasi Kelompok (14 Paket): (1). Tabanan, (2). Indramayu dan Cirebon, (3). Pangandaran 1, (4). Pati 1, (5). Pati 2, (6). Wonosobo, (7). Kebumen, (8). Sambas, (9). Sanggau, (10). Landak, (11). Tulang Bawang, (12). Sumbawa, (13). Rote Ndao, (14). Banyuasin.
 - Persiapan Pengadaan (12 Paket): (1). Tabanan, (2). Indramayu dan Cirebon, (3). Pangandaran 1, (4). Pati 2, (5). Wonosobo, (6). Kebumen, (7). Sambas, (8). Sanggau, (9). Landak, (10). Tulang Bawang, (11). Sumbawa, (12). Banyuasin.



Gambar 34 Verifikasi calon kelompok penerima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Tarakan

10. Perkembangan kegiatan pendukung Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan Bulan September 2025, antara lain:
- Daftar Usulan Proposal (38 Lokasi): (1). Aceh Utara, (2). Tabanan, (3). Bantul dan Gunung Kidul, (4). Alor, (5). Cianjur 1, (6). Cianjur 2, (7). Cianjur 3, (8). Sukabumi, (9). Indramayu dan Cirebon, (10). Pangandaran 1, (11). Pangandaran 2, (12). Pati 1, (13). Pati 2, (14). Wonosobo, (15). Kebumen, (16). Banyuwangi, (17). Mamuju, (18). Sambas, (19). Sanggau, (20). Landak, (21). Kotawaringin Barat, (22). Tarakan, (23). Karimun, (24). Tulang Bawang 1, (25). Tanggamus, (26). Tulang Bawang 2, (27). Maluku Tengah, (28). Sumbawa, (29). Lembata, (30). Rote Ndao, (31). Sorong, (32). Merauke, (33). Asmat, (34). Jenepono, (35). Poso, (36). Agam dan Kota Padang, (37). Kota Pariaman, (38). Banyuasin.
 - Verifikasi Kelompok dan Persiapan Pengadaan (23 Lokasi): (1). Aceh Utara, (2). Tabanan, (3). Alor, (4). Sukabumi, (5). Indramayu dan Cirebon, (6). Pangandaran 1, (7). Pangandaran 2, (8). Pati 1, (9). Pati 2, (10). Wonosobo, (11). Kebumen, (12). Sambas, (13). Sanggau, (14). Landak, (15). Karimun, (16). Tulang Bawang 1, (17). Sumbawa, (18). Rote Ndao, (19). Sorong, (20). Jenepono, (21). Agam dan Kota Padang, (22). Kota Pariaman, (23). Banyuasin.
 - Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Kontrak (9 Lokasi): (1). Tabanan, (2). Pangandaran 1, (3). Pati 2, (4). Wonosobo, (5). Kebumen, (6). Sambas, (7). Sanggau, (8). Landak, (9). Banyuasin.



Gambar 35. Verifikasi calon kelompok penerima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kota Sorong

11. Perkembangan kegiatan pendukung Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan Oktober 2025:

- a. Daftar Usulan Proposal (47 Paket): 1. Aceh Utara, 2. Tabanan, 3. Lebak, 4. Bantul & Gnkidul, 5. Alor, 6. Cianjur 1, 7. Cianjur 2, 8. Cianjur 3, 9. Sukabumi, 10. Indramayu dan Cirebon, 11. Pangandaran 1, 12. Pangandaran 2, 13. Jepara, 14. Pati 1, 15. Pati 2, 16. Wonosobo, 17. Kebumen, 18. Banyuwangi, 19. Tuban, 20. Buton Selatan, 21. Mamuju Tengah, 22. Sambas, 23. Landak, 24. Sanggau, 25. Kotawaringin Barat, 26. Tarakan, 27. Karimun, 28. Tulang Bawang 1, 29. Tanggamus, 30. Tulang Bawang 2, 31. Tulang Bawang 3, 32. Maluku Tengah, 33. Kepulauan Sula, 34. Sumbawa, 35. Lembata, 36. Rote Ndao, 37. Kota Sorong, 38. Asmat, 39. Merauke, 40. Majene, 41. Mamuju, 42. Jeneponto, 43. Poso, 44. Muna Barat, 45. Agam dan Kota Padang, 46. Kota Pariaman, 47. Banyuasin
 - b. Verifikasi dan persiapan pengadaan (42 Lokasi): (1) Aceh Utara, (2) Tabanan, (3) Lebak, (4) Bantul dan Gunung Kidul, (5) Alor, (6) Cianjur 1, (7) Cianjur 2, (8) Cianjur 3, (9) Sukabumi, (10) Indramayu dan Cirebon, (11) Pangandaran 1, (12) Pangandaran 2, (13) Pati 1, (14) Pati 2, (15) Wonosobo, (16) Kebumen, (17) Mamuju Tengah, (18) Sambas, (19) Landak, (20) Sanggau, (21) Kotawaringin Barat, (22) Tarakan, (23) Karimun, (24) Tulang Bawang 1, (25) Tanggamus, (26) Tulang Bawang 2, (27) Tulang Bawang 3, (28) Maluku Tengah, (29) Sumbawa, (30) Lembata, (31) Rote Ndao, (32) Kota Sorong, (33) Asmat, (34) Merauke, (35) Majene, (36) Mamuju, (37) Jeneponto, (38) Poso, (39) Muna Barat, (40) Agam & Kota Padang, (41) Kota Pariaman, (42) Banyuasin.
 - c. Progres PBJ dan Kontrak (20 Lokasi): (1) Aceh Utara, (2) Tabanan, (3) Pangandaran 1, (4) Pangandaran 2, (5) Pati 1, (6) Pati 2, (7) Wonosobo, (8) Kebumen, (9) Mamuju Tengah, (10) Sambas, (11) Landak, (12) Sanggau, (13) Karimun, (14) Tanggamus, (15) Tulang Bawang 2, (16) Maluku Tengah, (17) Rote Ndao, (18) Jeneponto, (19) Poso, (20) Banyuasin
 - d. Proses Pengiriman dan Serah Terima (7 Lokasi): (1) Tabanan, (2) Pati 2, (3) Wonosobo, (4) Kebumen, (5) Sambas, (6) Landak, (7) Sanggau
- Keterangan :
Dua (2) lokasi yang telah ada BAST, yaitu: (1) Tabanan dan (2) Wonosobo

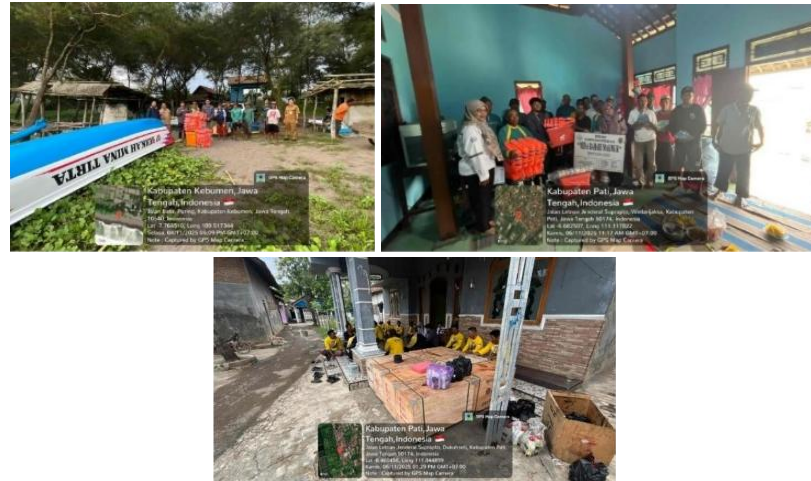


Gambar 36. Verifikasi calon kelompok penerima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Kepulauan Sula

12. Perkembangan kegiatan pendukung Bantuan Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan November 2025:

- a. Usulan Proposal dan Verifikasi (47 Lokasi) : (1) Aceh Utara, (2) Tabanan, (3) Lebak, (4) Bantul dan Gunung Kidul, (5) Alor, (6) Cianjur 1, (7) Cianjur 2, (8) Cianjur 3, (9) Sukabumi, (10) Indramayu dan Cirebon, (11) Pangandaran 1, (12) Pangandaran 2, (13) Jepara, (14) Pati 1, (15) Pati 2, (16) Wonosobo, (17) Kebumen, (18) Banyuwangi, (19) Tuban, (20) Buton Selatan, (21) Mamuju Tengah, (22) Sambas, (23) Landak, (24) Sanggau, (25) Kotawaringin Barat, (26) Tarakan, (27) Karimun, (28) Tulang Bawang 1, (29) Tanggamus, (30) Tulang Bawang 2, (31) Tulang Bawang 3, (32) Maluku Tengah, (33) Kepulauan Sula, (34) Sumbawa, (35) Lembata, (36) Rote Ndao, (37) Kota Sorong, (38) Asmat, (39) Merauke, (40) Majene, (41) Mamuju, (42) Jeneponto, (43) Poso, (44) Muna Barat, (45) Agam dan Kota Padang, (46) Kota Pariaman, (47) Banyuasin.

- b. Proses Kontrak dan Pengadaan (35 Lokasi) : (1) Aceh Utara, (2) Lebak, (3) Bantul dan Gunung Kidul, (4) Alor, (5) Cianjur 1, (6) Cianjur 2, (7) Cianjur 3, (8) Sukabumi, (9) Indramayu dan Cirebon, (10) Pangandaran 1, (11) Pangandaran 2, (12) Jepara, (13) Banyuwangi, (14) Tuban, (15) Buton Selatan, (16) Mamuju Tengah, (17) Kotawaringin Barat, (18) Karimun, (19) Tulang Bawang 1, (20) Tanggamus, (21) Lampung Timur, (22) Tulang Bawang 2, (23) Kepulauan Sula, (24) Sumbawa, (25) Lembata, (26) Rote Ndao, (27) Asmat, (28) Merauke, (29) Majene, (30) Mamuju, (31) Jeneponto, (32) Poso, (33) Muna Barat, (34) Agam dan Kota Padang, (35) Kota Pariaman.
- c. Serah Terima (12 Lokasi) : (1) Tabanan, (2) Pati 1, (3) Pati 2, (4) Wonosobo, (5) Kebumen, (6) Sambas, (7) Landak, (8) Sanggau, (9) Tarakan, (10) Lampung Timur, (11) Sorong, (12) Banyuasin.



Gambar 37. Serah Terima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Kebumen, Pati 1 dan Pati 2, Jawa Tengah.

13. Telah diserahterimakan bantuan pemerintah bantuan ekonomi produktif di 47 lokasi sebagai berikut: (1) Aceh Utara, (2) Tabanan, (3) Lebak, (4) Bantul & Gunung Kidul, (5) Alor, (6) Cianjur 1, (7) Cianjur 2, (8) Cianjur 3, (9) Sukabumi, (10) Indramayu dan Cirebon, (11) Pangandaran 1, (12) Pangandaran 2, (13) Jepara, (14) Pati 1, (15) Pati 2, (16) Wonosobo, (17) Kebumen, (18) Banyuwangi, (19) Tuban, (20) Buton Selatan, (21) Mamuju Tengah, (22) Sambas, (23) Landak, (24) Sanggau, (25) Kotawaringin Barat, (26) Tarakan, (27) Karimun, (28) Tulang Bawang 1, (29) Tanggamus, (30) Lampung Timur, (31) Tulang Bawang 2, (32) Maluku Tengah, (33) Kepulauan Sula, (34) Sumbawa, (35) Lembata, (36) Rote Ndao, (37) Kota Sorong, (38) Asmat, (39) Merauke, (40) Majene, (41) Mamuju, (42) Jeneponto, (43) Poso, (44) Muna Barat, (45) Agam dan Kota Padang, (46) Kota Pariaman, dan (47) Banyuasin.



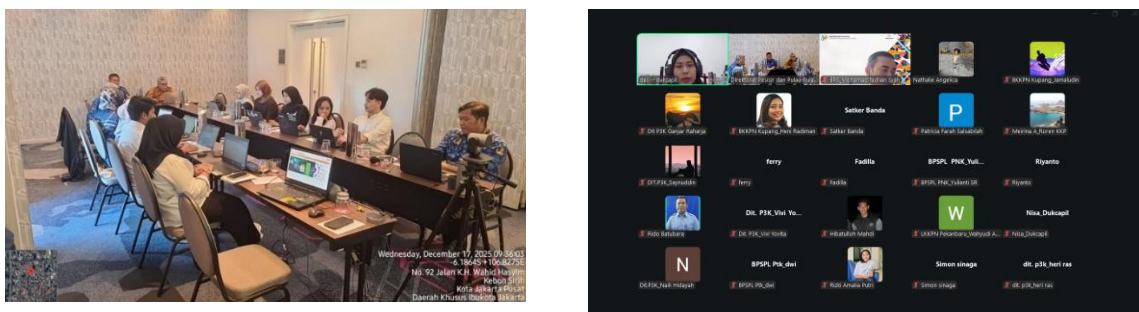
Gambar 38. Serah Terima bantuan ekonomi produktif TA 2025 di Kabupaten Maluku Tengah, Lampung Timur, Cianjur, dan Tanggamus



Gambar 39. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Ekonomi Produktif TA 2024 di Kabupaten Garut, Tabanan, dan Cilacap.

Kegiatan pendukung lainnya diluar IKU yang dilaksanakan pelaksanaan pemeliharaan Pulau Lusi di Kabupaten Sidoarjo dan Penyusunan Indeks Pulau-Pulau Kecil tahun 2025. Sampai TW IV Tahun 2025 kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan ini antara lain:

1. Pemeliharaan Pulau Lusi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (29-31 Desember 2025)
2. Diskusi Penyusunan Indeks Pengembangan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta (Desember 2025)



Gambar 40. Penyusunan Indeks Pulau-Pulau Kecil tahun 2025



Gambar 41. Pemeriksaan Pemeliharaan Pulau Lusi, Kabupaten Sidoarjo.

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKU Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 47. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)” Sampai Dengan 31 Desember 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran T.A. 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
QEG.001.051.OA. Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000.000	5.500.000.000	4.881.168.674	612.664.776	5.493.833.450	99,89 %	6.166.550
RBQ.001.052.OA. Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
Menjadi	100.000.000	100.000.000	0	98.999.483	98.999.483	99,00%	1.000.517
RBQ.001.052.OA. Penyusunan Prospektus Pengembangan Gugus Pulau Kecil							
Total	7.100.000.000	5.600.000.000	4.881.168.674	711.664.259	5.592.832.933	99,82	7.167.067

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Desember 2025)

Total pagu efektif sebesar Rp5.600.000.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp5.592.832.933, atau mencapai 99,82% dari anggaran yang tersedia, dan sisa anggaran Rp 7.167.067.

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi pada Triwulan I tahun 2026, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengeloan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi pesisir dan laut yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dikelola untuk keberlangsungan dan masa depan bangsa dengan tetap memperhatikan identitas budaya dan hak-hak tradisional masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 42. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025–2029).

Pemerintah mempunyai tugas selain melakukan pengakuan dan perlindungan MHA perlu juga memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kongkrit dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan MHA. Pemberdayaan dilakukan didasarkan pada undang-undang dan aturan yang berlaku, upaya-upaya pemberdayaan antara lain seperti memberikan bantuan sarana dan prasarana usaha, melakukan pendampingan dan penguatan dalam proses pemberian bantuan, serta melakukan mediasi dalam penetapan proses bantuan sarana dan prasarana oleh pemerintah.

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja (IK) Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal tahun 2025–2029 yaitu: “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)”. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 12/2024 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2025, KKP telah melakukan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA terhadap 28 komunitas MHA yang tertuang dalam 24 Peraturan Bupati/Wali Kota.



No	Peraturan	Isi Peraturan
1	Perbup Sorong No. 7 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Di Kampung Malaumkanta Distrik Makbon Kabupaten Sorong
2	Perbup Buton Selatan No. 24 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Pulau Siompu Di Kabupaten Buton Selatan
3	Perbup Maluku Tengah No. 81 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah
4	Perwali Kota Tual 43 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Pulau Mangur dan Pulau Kalmear Kota Tual
5	Perbup Wakatobi No. 40 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat Kadie Uya Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
6	Perbup Kepulauan Talaud No. 36 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Hukum Adat Desa Kikorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud
7	Perbup Buton No. 13 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat
8	Perbup Maluku Tenggara No. 166 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Tanebar Ewaw (Tanimbar Kel) Kecamatan Keli Besar Kabupaten Maluku Tenggara
9	Perbup Blok Nomor No. 34 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Pulau Oail dan Pulau Auki Kabupaten Blok Nomor
10	Perbup Seram Bagian Timur No. 16 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Kataloka Kabupaten Seram Bagian Timur
11	Perbup Fakfak No. 4 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Petuanan Arguni, Petuanan Wertuar dan Pik Pik Sekar Desa/Pulau Arguni dan Ugar Distrik Arguni dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
12	Perbup Tambora No. 12 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wenar Distrik Bilar Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat Kabupaten Tambora
13	Perwali Ambon No. 21 Tahun 2019	Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Negeri Hukurila
14	Perbup Buton Selatan No. 65 Tahun 2019	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Wapulaka Kabupaten Buton Selatan
15	SK Bup. Kep. Tanimbar No. 523-598 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Desa Adat Kabupaten Kep. Tanimbar
16	Perbup Tambora No. 21 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Mpur Wot di Distrik Amberbak Barat Kabupaten Tambora
17	Perbup Desa Nuwewang No. 43 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA di Desa Nuwewang Kab. Maluku Barat Daya
18	Perbup Negeri Ambar Sikanu No. 16 Tahun 2021	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Ambar Sikanu Kab. Seram Bagian Timur
19	Perbup Buton Selatan No. 7 Tahun 2022	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Ambalau di Pulau Ambalau Kab. Buton Selatan
20	Perbup Buton Selatan No. 41 Tahun 2022	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Burangas Kab. Buton Selatan
21	Perwali Ambon No. 15 Tahun 2023	Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut di Negeri Ruteng
22	Perbup SBB No. 3 Tahun 2023	Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Nusa Puan Pulau Buano di Kecamatan Huamual Belikang
23	Perbup Wakatobi No. 1 Tahun 2024	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Kadie Kapeta Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
24	SK Bupati Maluku Tenggara No. 358/K Tahun 2024	Pengakuan dan Perlindungan MHA Ohoi Ohoirenan Kecamatan Keli Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara

Gambar 43. Peraturan Bupati/Walikota Tentang MHA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 – 2025, KKP mendukung Aksi HAM untuk Kelompok Masyarakat Hukum Adat dengan sasaran strategis Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat. Pemenuhan sasaran strategis yang dilakukan ialah dengan Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dengan kriteria keberhasilan Tersedianya jaminan hukum pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Kelompok Masyarakat Adat. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi pengakuan dan perlindungannya berupa kegiatan pendampingan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup/Perwali).

Sesuai dengan beban kerja dan target pencapaian pelaksanaan kegiatan tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu: "Meningkatnya ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan adat dan Lokal". Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Indikator kinerja ini dihitung dengan menjumlahkan komunitas:

1. Penguatan kapasitas SDM MHA setelah diakui dengan terbitnya SK/Peraturan bupati/walikota untuk pengakuan MHA.
2. Rekomendasi PKKPR untuk masyarakat lokal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 08 "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" masuk Sasaran Kegiatan Nomor 05 yaitu "Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya (komunitas) adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, dan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan dari kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Melindungi dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk generasi mendatang.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula penghitungan IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja tahun 2025 adalah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di: Masyarakat Hukum Adat Wapulaka, Kab. Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 44. Fasilitasi Penguatan MHA

Dalam rangka Penguatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K), Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PDSPKP) melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wapulaka berupa Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Oktober 2025 di Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan peningkatan berdasarkan dari potensi sumberdaya perikanan di MHA Wapulaka adalah bimbingan dan praktek pengolahan hasil perikanan seperti abon ikan dan baso ikan yang nantinya dapat diperluas dengan pengolahan sambal ikan dan stik ikan. Potensi lain yang bisa digali adalah potensi wisata bahari seperti wisata pantai dan wisata snorkling dan selam. Hal selanjutnya yang perlu mendapat pelatihan lebih lanjut adalah masalah pemasaran seperti penjualan di supermarket, dan masalah perijinan seperti nomor Industri Rumah Tangga dan Sertifikasi Halal. Tindak lanjut berikutnya apabila akan diberikan bantuan perlu identifikasi lanjutan namun sejalan dengan peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan.



Gambar 45. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Buton Selatan, Prop. Sulawesi Tenggara

Tabel 48. Target dan Realisasi IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)								
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target	Capaian	% Capaian	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	2	2	100	-	2	100	3	66,67

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Target IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode tahun 2025 sebanyak 2 komunitas, sedangkan capaian sebanyak 2 komunitas, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian IKU ini pada tahun 2025 sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wapulaka Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.
- Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Permukiman Masyarakat Lokal Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Target IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode tahun 2025 sebanyak 2 komunitas, sedangkan capaian sebanyak 2 komunitas, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian tahun 2025 sama dengan target tahun 2025. IKU ini muncul pada tahun 2025 dan tidak ada IKU ini pada tahun 2024. Jadi, capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Perbandingan antara target dan capaian Direktorat P3K pada tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 49. Perbandingan antara target dan capaian Direktorat P3K pada tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya	2	3	3	3	3	2	2	100	66.67

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2025)

Target IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode tahun 2025 sebanyak 2 komunitas, sedangkan capaian sebanyak 2 komunitas, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian tahun 2025 sama dengan target tahun 2025. Selanjutnya, perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir renstra tahun 2025-2029 (Khususnya pada tahun 2029) sebesar 66.67%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

IKU Nomor “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan, capaian kinerja, kendala dan solusi

Analisis penyebab keberhasilan, kendala, dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan IKU 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah dukungan pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, maupun kelompok masyarakat.

b. Kendala

Kendala yang dihadapi pada tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian target Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada tahun 2025 adalah Penyusunan NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Kode PFA.001.052.OA), Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya (Kode QDD.001), serta Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (QDD.003).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada tahun 2025 antara lain:

1. Rapat Pembahasan Indeks Kemandirian MHA di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (Rapat Internal Direktorat P4K) (14 Januari 2025)
2. Rapat Tindak Lanjut Fasilitasi Penguatan MHA Provinsi Maluku Kantor Rare Indonesia Kota Bogor (16 Januari 2025)
3. Asia Land Forum 2025 Panel diskusi dengan tema “Reforma Agraria Bagi Penghormatan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan Nelayan.” (19 Februari 2025)
4. Menerima Audiensi dari Ketua Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seluruh Indonesia (12 Maret 2025)
5. Penanggap pada tema: “Pemulihan Lingkungan dan Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat di Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil: Potret Pembelajaran Pengelolaan Areal Konservasi Kelola Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui Aplikasi Zoom (24 April 2025)
6. Rapat Pembahasan Permohonan PKKPRL Masyarakat Lokal di Kabupaten Bombana di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lt. 8 (8 Mei 2025)
7. Audiensi Penyusunan Peta Indikatif Wilayah Adat di Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Ruang (8 Mei 2025)
8. Rapat Koordinasi Persiapan Diseminasi MHA Kab. Teluk Wondama di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lt. 8 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025)
9. Rapat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kantor Bupati Kabupaten Bintan (21 Mei 2025)
10. Diskusi Terpimpin Nasional mengenai “Pendekatan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat: Pembelajaran dari *Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)*, Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia (3 Juni 2025)
11. Kick Off Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (24 Juni 2025)

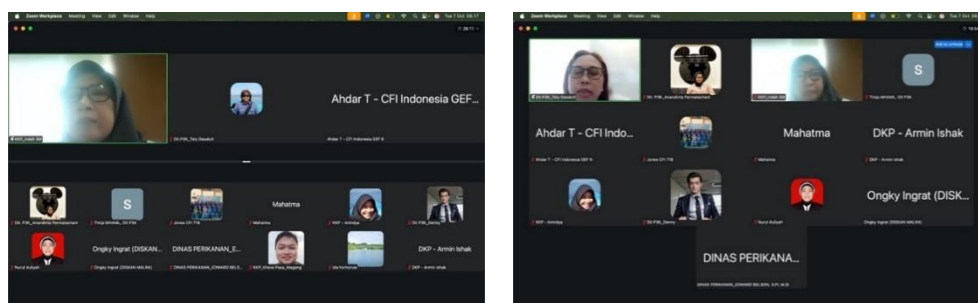
12. Penanggap *talk show* dalam *Kick Off* Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Hotel Mercure Sabang (24 Juni 2025)
13. Rapat Pembahasan Permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas di Ruang Rapat Selaru, Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (25 Juni 2025)
14. Diskusi Seri Ke-1 Mengangkat Tema “Pengakuan Wilayah Adat dan Reforma Agraria Inklusif” di Hotel Erian Jakarta (15 Juli 2025)
15. Narasumber pada Kegiatan Lokakarya Peluang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat dalam Kerangka Kebijakan Nasional dan Daerah: Pembelajaran Pemetaan Partisipatif di Desa Sumberklompok, Penjarakan, Sumberkima, dan Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (15 Juli 2025)
16. Narasumber terkait Identifikasi Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan/atau Masyarakat Lokal pada acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan di Hotel Borobudur Jakarta (16 Juli 2025)
17. FGD RUU Masyarakat Adat di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung Kementerian HAM (17 Juli 2025)
18. Koordinasi terkait Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan MHA Ohoi Ohoirenang di Ruang Rapat Selaru, GMB III, Lantai 8 dan aplikasi zoom (17 Juli 2025)
19. Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Wilayah Pesisir di *Holiday Inn Express* Jakarta (18 Juli 2025)
20. Koordinasi Teknis Fasilitasi Pengakuan dan Penguatan MHA di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kantor Rare Indonesia, Kota Bogor (22 Juli 2025)
21. Rapat Identifikasi dan Fasilitasi Wilayah Administrasi Kecamatan dan Pulau di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kantor Kementerian Dalam Negeri (22 Juli 2025)
22. Rapat Persiapan Koordinasi Awal Fasilitasi Pengakuan MHA Kab. Seram Bagian Barat melalui Aplikasi Zoom (29 Juli 2025)
23. Sarasehan “Masyarakat Adat sebagai Penjaga Tradisi Pangan Lokal dan Benih Leluhur Nusantara” di Plaza Insan Berprestasi Gedung A Lantai 1, Jakarta (7 Agustus 2025)
24. Workshop Peningkatan Kapasitas Adaptasi Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Desa Pesisir di Sulawesi Tenggara” di Hotel Galaxy Inn Baubau (20 Agustus 2025)
25. “Workshop Peningkatan Kapasitas Adaptasi Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim di Desa Pesisir di Sulawesi Tenggara” di Hotel Galaxy Inn Baubau (21-22 Agustus 2025)
26. Pembahasan Analisis Data Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Grand Savero Hotel Bogor (21 Agustus 2025)
27. Penanggap pada kegiatan Diseminasi Kajian: “Menegaskan Hak, Mengukuhkan Ruang Hidup – Praktik Pemetaan Partisipatif di Wilayah Adat” di Hotel di Bogor (27 Agustus 2025)
28. Serial Diskusi Para Ahli untuk mempertajam rumusan arah kebijakan dan strategi Peta Jalan Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Pada Diskusi Seri Ke-3 kami mengangkat tema ‘Ancaman dan Risiko terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di ARTOTEL Hub Sempang Temu Jakarta (4 September 2025) (4 September 2025)
29. Audiensi terkait Kegiatan Pertambangan Pulau Pulau Kecil di Prov. Kepulauan Riau bersama Pemda Provinsi Kepulauan Riau di RR. Padaid GMB III Lt. 11 (16 September 2025)
30. Sosialisasi Fasilitasi PKKPRM bagi Masyarakat Lokal melalui Aplikasi Zoom (22 September 2025)
31. Diskusi Rencana Pelaksanaan Simposium Nasional antara bersama WGII pada tanggal 2 Oktober 2025

Telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 mengenai rencana pelaksanaan Simposium Nasional antara Working Group ICCA Indonesia (WGII) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), maka diselenggarakan kembali rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan kolaborasi dalam mendukung penguatan kelembagaan serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui kegiatan simposium tersebut. Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat dicapai kesepakatan waktu pelaksanaan yang tepat serta peningkatan sinergi antar lembaga dan mitra terkait, guna memastikan kegiatan simposium berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan peran MHA dalam tata kelola kelautan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 46. Rencana pelaksanaan Simposium Nasional

32. Pembahasan Draft Akhir Laporan Hasil Inventarisasi Potensi SDKP pada tanggal 7 Oktober 2025
- Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dilakukan Rapat Pembahasan Draft Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Potensi SDKP Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ohoi Ohoiren, yang dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Kasubagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, PMU GEF 6 CFI Indonesia, Site Manager GEF 6 Indonesia WPP 718, Tenaga Ahli Sosial Ekonomi, serta Pelaksana Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal. Rapat ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 September, dan pada kesempatan kali ini menjadi rapat pembahasan terakhir sebelum penyusunan laporan akhir. Melalui kegiatan ini, diharapkan penyempurnaan substansi laporan dapat dilakukan secara komprehensif, mencakup verifikasi data lapangan, penajaman hasil analisis, serta penyelarasan rekomendasi dengan arah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat. Rapat pembahasan draft hasil kegiatan inventarisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kelola MHA Ohoiren, berfokus pada peninjauan laporan penelitian terkait data inventarisasi potensi dan rekomendasi konkret untuk kegiatan peningkatan kapasitas. Rapat ini mencakup berbagai aspek pengelolaan sumber daya laut, termasuk praktik panen, peluang pengembangan produk, dan kebutuhan pengembangan kapasitas bagi masyarakat setempat.



Gambar 47. Rapat Pembahasan Draft Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Potensi SDKP Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ohoi Ohoiren,

33. Pembahasan Modul Inventarisasi potensi SDKP dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada Tanggal 28 Oktober 2025
- Masyarakat hukum adat (MHA) telah lama menjadi penjaga sekaligus pemanfaat utama sumber daya tersebut dengan sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal yang terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologi dan sosial. Namun, inventarisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan masyarakat hukum adat masih terbatas dan belum terdokumentasi secara sistematis. Oleh karena itu, perlu disusun modul inventarisasi yang tidak hanya menginventarisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai budaya, sosial, serta praktik tradisional masyarakat hukum adat. Modul ini diharapkan menjadi acuan dalam pemetaan potensi sekaligus dasar pengelolaan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan rapat pembahasan ini dilaksanakan di AONE Hotel Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Dr. Akhmad Solihin, S.Pi., MH. (PKSPL IPB), perwakilan Tim Kerja Pengelolaan Lahan, perwakilan Tim

Kerja Sarana dan Prasarana, perwakilan Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, perwakilan Tata Usaha Dit. P3K, dan Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini ialah menyusun kerangka modul inventarisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai dengan karakteristik MHA di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dan menyelaraskan metode inventarisasi dengan pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal agar hasilnya dapat diterima serta digunakan oleh MHA.



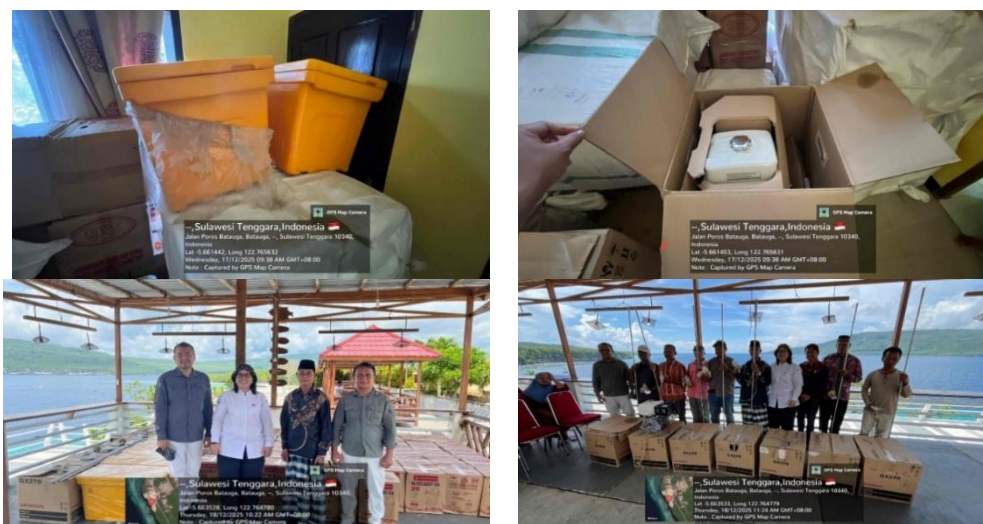
Gambar 48. Pembahasan Modul Inventarisasi potensi SDKP dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada Tanggal 28 Oktober 2025

34. Rapat Koordinasi Persiapan Simposiun Nasional Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal pada tanggal 18 November 2025
Menindaklanjuti diskusi yang telah dilaksanakan antara WGII Bersama KKP pada 2 Oktober 2025 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Simposium Nasional Memperkuat Pengakuan dan Perlindungan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang laut bagi Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP menyelenggarakan kembali rapat koordinasi persiapan kegiatan simposim nasional tahun 2025.
35. Simposium Nasional Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal pada tanggal 10 Desember 2025
Simposium Nasional Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal Tahun 2025 diselenggarakan sebagai upaya memperkuat pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA dan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekerja sama dengan *Working Group ICCAs Indonesia*. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring yang dihadiri dari perwakilan kementerian/lembaga, perguruan tinggi/akademisi, organisasi internasional, NGO/LSM/Media, dinas kelautan dan perikanan provinsi, dan dinas perikanan kabupaten/kota pada tanggal 10 Desember 2025 di *IPB International Convention Center*, Kota Bogor.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan yang menyampaikan arahan mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA dan masyarakat lokal sebagai bentuk kepastian hukum, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta penguatan sistem pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis komunitas. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari setiap narasumber Direktur Pemanfaatan ruang laut, Akademisi, masyarakat
36. Serah Terima Bantuan Ekonomi Produktif untuk Masyarakat Hukum Adat Burangasi, Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 16-19 Desember 2025
Pekerjaan bantuan Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang berasal dari belanja barang persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil periode Tahun Anggaran 2025 berdasarkan surat tugas Nomor B.3203/DJPK.4/KP.440/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 hadir untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima bantuan pada kelompok penerima bantuan ekonomi produktif Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Kegiatan pemeriksaan bantuan dilakukan untuk memastikan barang yang akan diserahkan ke kelompok masyarakat penerima bantuan sudah sesuai dengan spesifikasi yang diajukan pada proses pengadaan. Proses serah terima

bantuan kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi stimulan bagi kelompok masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dari kegiatan masyarakat. Bantuan sarana ekonomi produktif merupakan jenis bantuan pemerintah yang diserahterimakan kepada masyarakat/pemda yang mana jenis bantuannya telah ditetapkan dalam petunjuk teknis bantuan pemerintah. Salah satu kelompok penerima bantuan sarana ekonomi produktif pada TA 2025 adalah Masyarakat Hukum Adat Burangasi di Kabupaten Buton Selatan. Bantuan sarana ekonomi produktif akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada tahun yang akan datang sehingga diharapkan bantuan ini akan dinilai efektifitasnya sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatannya; Barang bantuan sarana ekonomi produktif yang diserahterimakan antara lain dan dengan jumlah dan nilai sebagai berikut:'

Tabel 50. Barang bantuan sarana ekonomi produktif yang diserahterimakan antara lain dan dengan jumlah dan nilai

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total
1	Mesin Honda GX 270 T 9 PK + As Manado Joing	7	unit	9,546,000	66,822,000
2	Coolbox Tanaga 100 liter	7	unit	1,248,750	8,741,250
3	Termos Es Maspion 26 liter	65	unit	399,105	22,041,825
Total					97,605,075
Terbilang: Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah					



Gambar 49. bantuan sarana ekonomi produktif yang diserahterimakan

37. Metadata Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di Perairan Laut pada tanggal 22 Desember 2025

Poin pembahasan sebagai berikut:

- Masih ditemukan beberapa metadata yang belum lengkap dan perlu segera dilengkapi.
- Peta yang diproduksi wajib memenuhi aspek kelengkapan dan validitas melalui penerapan tata kelola data yang baik.
- Standarisasi tampilan peta perlu diperhatikan, termasuk keseragaman jenis dan ukuran huruf (font).
- Perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap penulisan distrik atau negeri yang setara dengan kecamatan atau desa, meskipun terdapat perbedaan istilah penyebutan.
- Penyesuaian standar ISO 19115 dilakukan dengan memilih menu *edit* dan langsung mengganti kode yang diperlukan, seperti contoh IGT_MHA_AR_50K.



Gambar 50. Metadata Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di Perairan Laut pada tanggal 22 Desember 2025

38. Pembahasan Inventarisasi Data dan Informasi dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada tanggal 23 Desember 2025

Pembahasan inventarisasi data dan informasi potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. P3K), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai upaya untuk menyamakan pemahaman lintas sektor, mengidentifikasi kebutuhan data yang komprehensif, serta memperkuat dasar perumusan kebijakan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 di Hotel Aloft Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari BBP3KP, subbagian Tata Usaha, tim kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, tim kerja Sarana dan Prasarana, tim kerja Perizinan dan Pengendalian, tim kerja Restorasi, tim kerja Pengelolaan Lahan, beserta narasumber dari PKSPL IPB. Hasil pembahasan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam penyusunan panduan inventarisasi data dan informasi potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Inventarisasi yang terstandar, terintegrasi dengan perencanaan desa dan daerah, serta didukung oleh data lintas sektor yang komprehensif diharapkan mampu memperkuat pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal, termasuk dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat. Tindak lanjut dari kegiatan ini meliputi penyusunan modul teknis atau petunjuk pelaksanaan inventarisasi potensi SDKP yang bersifat implementatif dan analisis penguatan rantai pasok.



Gambar 51. Pembahasan Inventarisasi Data dan Informasi dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat pada tanggal 23 Desember 2025

9. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 51. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Sampai Dengan 31 Desember 2025

Uraian	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PFA 001 Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000.000	2.613.000	2.612.700	0	2.612.700	99,99	300
QDD. Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	900.000.000	474.746.000	333.433.848	120.047.575	453.481.423	95,52	21.264.577
TOTAL	1.100.000.000	477.359.000	336.046.548	120.047.575	456.094.123	95,55	21.264.877

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Desember 2025)

Total pagu efektif sebesar Rp477.359.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp456.094.123, atau mencapai 95,55% dari anggaran yang tersedia, dan sisa anggaran Rp21.264.877.

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi pada periode Triwulan I tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

IKU 09. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Nomor 06 yaitu “Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya baik PMA, PMDN, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat maupun perseorangan, mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk melengkapi dokumen legalitas usaha dan perizinan yang dipersyaratkan. **Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia, baik untuk kegiatan penanaman modal asing (PMA) maupun kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN), wajib memiliki izin atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.** Pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil wajib memiliki:

- Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA); atau
- Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pelaku usaha baik PMA maupun PMDN wajib mengajukan izin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 mulai berlaku.

Tujuan utama penertiban perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah untuk memastikan pemanfaatan pulau-pulau tersebut dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Perizinan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan pulau-pulau kecil, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak terkontrol. Dengan demikian, penertiban perizinan bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI PERIZINAN PEMANFAATANNYA

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km². Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target untuk melakukan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, utamanya adalah untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata.

Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi dokumen pulau-pulau kecil yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya melalui berbagai kegiatan pendukung seperti koordinasi/pertemuan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi perizinan, verifikasi lapangan perizinan, atau penerbitan perizinan pemanfaatan.

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, sejak tahun 2021, Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan.

Prosedur pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) dapat dilakukan oleh korporasi, koperasi, maupun orang perseorangan. Bagi penanaman modal asing, harus mendapatkan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Beberapa persyaratan Usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN; (iii) Surat Keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan persetujuannya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain (Bukti Kepemilikan seperti HGB/HGU, Surat Jual Beli, Akta Pelepasan Hak, Surat Perjanjian Sewa dsb); (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi (Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Rencana pemberian akses publik; Rencana Pengalihan Teknologi; Rencana Kerjasama dengan Peserta Indonesia; Rencana Pengalihan Saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan Pertimbangan aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi dan (v) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara untuk Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas di Bawah 100 km², persyaratan usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah: (i) Permohonan pemenuhan komitmen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; (ii) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau Kementerian ATR/BPN (iii) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan yang sah atau

Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain; (iv) Dokumen rencana usaha yang meliputi Penjelasan Rencana usaha dan Jenis Kegiatan; Peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; Data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau; Mengikuti aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil; Mengikuti standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² berdasarkan luasan, topografi dan tipologi pulau dan (v) Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Teknik menghitung IKU ini adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan antara lain melalui kegiatan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan atau penerbitan perizinan.

Pada Renstra 2025–2029, IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) memiliki target tahun 2029 sebesar 1.752 dokumen. Adapun capaian pada tahun 2025 mencapai 164 dokumen, sehingga capaian tahun 2025 berkontribusi sebesar 9,36% terhadap target tahun 2029.

Tabel 52. Target dan Realisasi IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 06 (SK-06) Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil								
Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan Thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	152	164	107,89	-	152	107,89	1.752	9,36

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” muncul pada tahun 2025 dengan target sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025, sedangkan capaian sebanyak 164 dokumen, sehingga capaian kinerja sebesar 107,89% berdasarkan Kinerjaku. Capaian tahun 2025 sebanyak 164 dokumen berdasarkan:

1. Dokumen Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Matahari Terbenam.
2. Dokumen Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Onu Mentawai Internasional.
3. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Randayan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Selui, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
5. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat oleh PT Dharma Inti Bersama.

6. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Bunyu, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Garda Tujuh Buana.
7. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Gili Gede, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB oleh PT Ultimate Gili Gede.
8. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Bela Sulu Mentawai (Villa Mimpi).
9. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Bela Sulu Mentawai (Villa Kubu).
10. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat oleh PT Bela Sulu Mentawai (Villa dalam Pembangunan).
11. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat oleh PT Dharma Inti Bersama.
12. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Pisang, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Kepri Island Resort.
13. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Pisangbatu (Pisang Anak), Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Kepri Island Resort.
14. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) Bidang 1 di Pulau Parit, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Karimun Sarana Surya.
15. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) Bidang 2 di Pulau Parit, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Karimun Sarana Surya.
16. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) Bidang 3 di Pulau Parit, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Karimun Sarana Surya.
17. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Tulang, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Karimun Sarana Surya.
18. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Arnalaya Resorts.
19. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Bali Cruises Nusantara.
20. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT BJTP Gamat Sunset.
21. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Castaway Villas Lembongan.
22. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Dive Resort Internasional.
23. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Eco Warisan Penida.
24. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Indiana Island I.
25. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Indiana Island II.
26. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Java Pama Temple.
27. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Jukung Dive Penida Resort.
28. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Lembongan Jati.

29. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Mantascape Diving Indonesia.
30. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Pretty Sally Indonesia.
31. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Seven Dreams Nusa Penida.
32. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT The Palms Ceningan.
33. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Two Fish Bali.
34. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Alas Villa.
35. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Aurora Beach View.
36. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Baliwood Social Club.
37. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Baruna Frangipani.
38. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Bay Shore Huts.
39. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Coconut Village Guest House.
40. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh CV Mola Mola Lembongan.
41. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh D'Byas Dream Beach Club and Villa.
42. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh D'Coin Lembongan Cottage and Spa.
43. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh D'Muncuk Huts Lembongan.
44. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Dream Beach Lembongan.
45. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Fin Island Bar and Restaurant.
46. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Jenggala Hill.
47. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Jennys Place Lembongan.

48. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Kawan Inn Lembongan.
49. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Kenanga Spa.
50. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Penerbitan Klungkung, Provinsi Bali oleh Koji Garden Huts.
51. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Le Biu Garden View.
52. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Le Nusa Beach Club.
53. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lembongan Beach Club Bar & Restoran Resort.
54. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lembongan Spa.
55. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lemongrass Bar & Restaurant.
56. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Nusa Indah Bungalow.
57. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Nusa Indah Onai.
58. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Nusa Veranda Sunset Villa.
59. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Oishii Bar and Grill.
60. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Pondok Jengala.
61. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Dream Beach Lembongan.
62. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Laksana Perkasa Group.
63. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Laksana Perkasa Group II.
64. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Love Land Management.
65. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Nusa Bali Mesari.

66. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Selancar Nusa Abadi.
67. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Tiara Cipta Nirwana.
68. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Tirta Nusa Mesari.
69. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Puri Kirana Cottage Lembongan.
70. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Secret Point Huts.
71. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Song Lambung Beach Huts.
72. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Sunset Garden Nusa Lembongan.
73. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The Palm Grove Villas.
74. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The Tanis Villa.
75. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The White Orchid.
76. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh The Widari Spa.
77. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Twin Islands Villas.
78. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Villa Giyor.
79. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Ceningan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Villa Kembang.
80. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Warung Bambu.
81. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Water Blow Huts Lembongan.
82. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh Lembongan Boutique Cottage.
83. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Blue Corner.

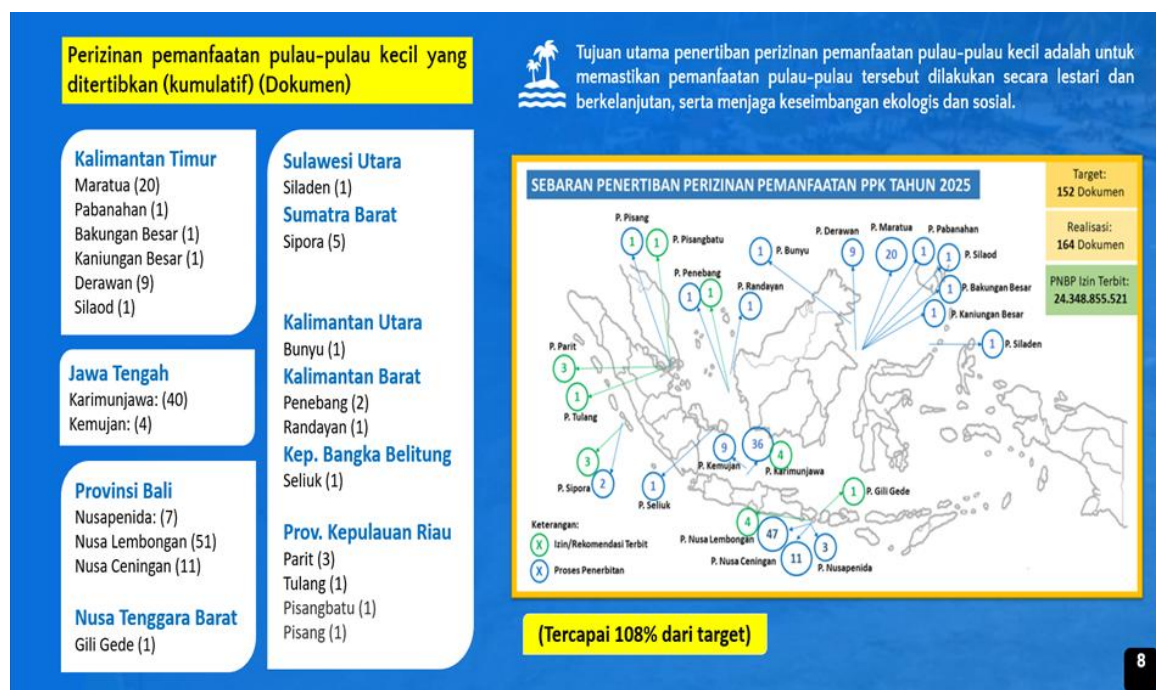
84. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT French Kiss Divers.
85. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Pure Dive Resort.
86. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh 211 Garden Cottage.
87. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Lautan Fokus Cairan.
88. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali oleh PT Nusa Usaha Semitra Anugerah.
89. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Jaga Mandira Perkasa.
90. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Atlante Hostel.
91. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Aulia Homestay.
92. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Ayu Hotel Karimunjawa.
93. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Basa-Basi Lodge.
94. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Berkah Hostel.
95. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Blue Laguna Inn.
96. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh CV Alcheringa Bermimpi Bahagia Jepara.
97. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh CV Kinara Kinari Alam Lestari.
98. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Karimun Jaya Bersama.
99. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Dafista Homestay.
100. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Deepsky Villa.
101. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Dua Putri Homestay.

102. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Griya Zeni Homestay.
103. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Homestay Windrisari.
104. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Hotel Summer Inn.
105. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Inap.Inap.
106. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Karimunjannah House.
107. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Lazuardy Guest House.
108. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Liandri Homestay.
109. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Loyal Friend Hostel.
110. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Mekarsari Homestay.
111. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Mirabelle Joglo Village.
112. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Nemo Homestay.
113. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pak Wawan Homestay.
114. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pantura Homestay.
115. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pondok Wisata Septiana.
116. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Pondok Wisata Zainal.
117. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Blue Garden Boutique Hotel.
118. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Putri Karimunjawa.
119. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Sadewo Homestay.

120. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Salma Dive Shop.
121. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Sama-sama Homestay.
122. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh The Big K Hostel.
123. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Toko Mak Yul.
124. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Tri Putra Homestay.
125. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Wahyu Izza Homestay.
126. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Wisma Cikal.
127. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Zahra Homestay.
128. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Leandra Sunset Beach.
129. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Kemujan Indah Resort.
130. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Karimun Indah Raya.
131. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh Penginapan Bunga Jabe.
132. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Eco Casa Vacanza.
133. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Maratua Paradise.
134. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Maratua Seaview Resort.
135. Dokumen Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Maratua Island Diving Resort.
136. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Penginapan Hidayah.
137. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Maratua Dive Center.
138. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Grage Guest House.

139. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Penginapan Deby Maratua.
140. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Homestay Tia Maratua.
141. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Noah Maratua Resort.
142. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Nouri Cottage.
143. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Homestay Rihana.
144. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Jade Homestay.
145. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Penginapan Putri Vivi.
146. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh CV Borneo Cottage Maratua.
147. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh CV Maratua Bay Sands Resorts.
148. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Maratua Beachfront Cottage.
149. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Penginapan Borneo.
150. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Penginapan Emelia.
151. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Penginapan Fariz.
152. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Maratua Dive Resort.
153. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Warung Makan Ira Sari.
154. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Reza Cottage.
155. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Ranga Homestay.
156. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Penginapan Readl Al.

157. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Penginapan Dina.
158. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Penginapan Derawan Utama.
159. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh Mirrorliz Pelangi.
160. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh CV Maratua Dive Center (Scuba Add Derawan).
161. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh CV Maratua Dive Center (Danakan Homestay).
162. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) di Pulau Sialod, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Maratua Nusa Sentosa.
163. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) di Pulau Kaniungan Besar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur oleh CV Multi Travel Indonesia.
164. Dokumen Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) di Pulau Siladen, Kota Manado, Provinsi Kalimantan Timur oleh Celebez Divers.



Gambar 52. Perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2025)

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

IKU "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" baru muncul pada tahun 2025. Ada perbedaan IKU pada tahun 2025 dengan IKU tahun 2024. Target IKU pada tahun 2025 sebanyak 152 dokumen dan capaian IKU tahun 2025 sebanyak 164 dokumen sehingga

capaian kinerja sebesar 107,89%. Capaian IKU tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

IKU Nomor 09, yaitu “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (dokumen)”, muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 152 dokumen, sedangkan realisasi capaian mencapai 164 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 107,89% berdasarkan Kinerja.

Tabel 53. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (dokumen)

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2365-Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	552	952	1.352	1.752	152	164	107,89	9,36

Sumber: Direktorat P3K (Tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan target IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (dokumen)” pada Renstra Tahun 2025-2029. Capaian IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 164 sehingga capaian kinerja sebesar 107,89%. Selanjutnya, perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir Renstra tahun 2025-2029 (khususnya pada tahun 2029) sebesar 9,36%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target IKU ini antara lain: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah; dan (iii) pelaksanaan gerai perizinan kepada pelaku usaha lebih intensif dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025 yang berdampak kepada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya sebagai berikut: 1) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 2) penggunaan mesin dan peralatan sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh Direktorat P3K, 3) pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Ditjen PK dan 4) Pelaksanaan verifikasi administrasi perizinan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pelibatan Tim UPT Teknis DJPK dan pertemuan secara daring (online) sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT Teknis DJPK.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” adalah Kebijakan Bidang kemaritiman dan Kelautan (Kode PBW) khususnya berkaitan dengan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PBW.001), dan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) khususnya berkaitan dengan Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.002.051).

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung IKU Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai tahun 2025 sebagai berikut:

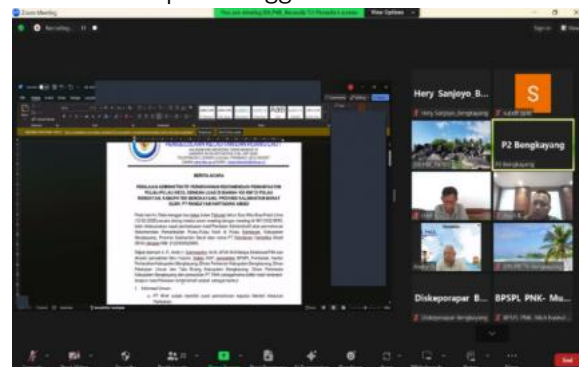
1. Rapat Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Pulau dengan PSDKP tanggal 13 Januari 2025;
2. Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Sipora pada tanggal 14-18 Januari 2025;
3. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Penebang tanggal 9-16 Februari 2025;
4. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Randayan tanggal 12 Februari 2025;
5. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Randayan tanggal 17-20 Februari 2025;
6. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Gili Gede pada tanggal 6 Maret 2025;
7. Pembahasan Validasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 11 April 2025;
8. Pembahasan dan Finalisasi Usulan Penyempurnaan KBLI Tahun 2020 lingkup KKP pada tanggal 16 April 2025;
9. Audiensi dari Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO terkait Pembahasan Sustainable Development of Small Islands pada tanggal 17 April 2025;
10. Verifikasi Administrasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 di Pulau Seliu pada tanggal 30 April 2025;
11. Audiensi dengan PT Batamindo Investment Cakrawala pada tanggal 5 Mei 2025;
12. Rapat Pembahasan Implementasi Fiktif Positif Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 Mei 2025;
13. Rapat Koordinasi Pendataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 9 Mei 2025;
14. Rapat Tindak Lanjut Surat Forum Pelaku Pariwisata di Pantai Timur Pulau Bintan pada tanggal 21 Mei 2025;
15. Audiensi dari team kelompok kerja regional unesco terkait Pembahasan Sustainable Development of Small Islands pada tanggal 22 Mei 2025;
16. Kunjungan Lapangan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12-14 Juni 2025;

17. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Pisang pada tanggal 20 Juni 2025;
18. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Pisangbatu pada tanggal 20 Juni 2025;
19. Verifikasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Pisang pada tanggal 21 Juni 2025;
20. Verifikasi Administrasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Pisangbatu pada tanggal 21 Juni 2025;
21. Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) oleh PT Darma Inti Bersama di Pulau Penebang pada tanggal 23 Juni 2025;
22. Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali pada tanggal 14 Juni sd 4 Juli 2025;
23. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora oleh PT Bela Sulu Mentawai (I) pada tanggal 8 Juli 2025;
24. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora oleh PT Bela Sulu Mentawai (II) pada tanggal 8 Juli 2025;
25. Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora oleh PT Bela Sulu Mentawai (III) pada tanggal 8 Juli 2025;
26. Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Pada Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 24 Juli 2025;
27. Rapat Koordinasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 25 Juli 2025;
28. Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Pisang oleh PT Kepri Island Resort pada tanggal 3 Agustus 2025;
29. Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Pisangbatu oleh PT Kepri Island Resort pada tanggal 3 Agustus 2025;
30. Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Jepara pada tanggal 28 Juli – 15 Agustus 2025;
31. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pendahuluan dalam Rangka Permohonan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Citlim, Kab. Karimun, Provinsi Kepri pada tanggal 26–28 Agustus 2025;
32. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 5 September 2025;
33. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2025;
34. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 16–17 September 2025;
35. Konsultasi Publik Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 25 September 2025;
36. Verifikasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) Di Pulau Seliu (Seliuk), Kabupaten Belitung, Provins! Kepulauan Bangka Belitung Oleh: PT Berkah Akuakultur Bahari pada tanggal 4–7 Oktober 2025;
37. Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Oleh: PT Garda Tujuh Buana pada tanggal 6–12 Oktober 2025;
38. Kegiatan Pendampingan BPK untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas PNBP KKP di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 22–25 Oktober 2025;
39. Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Bali pada tanggal 27 Oktober 2025;
40. Kegiatan Pendampingan BPK untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas PNBP KKP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 30 Oktober – 1 November 2025;
41. Konsultasi dan Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Oktober – 3 November 2025;

42. FGD Pertambangan di Pulau Kecil: Implementasi Pasal 35 UU 27/2007 pada tanggal 11 November 2025;
43. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Penebang pada tanggal 11-17 November 2025;
44. Rapat Koordinasi Pertambangan PT TMS pada tanggal 25 November 2025;
45. Rapat Pembahasan Kajian Akademis Penyelenggaraan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 26 November 2025;
46. FGD Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 4 Desember 2025;
47. Konsultasi dan Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 8-12 Desember 2025;
48. FGD Penyusunan Naskah Akademik Regulasi Sempadan Pantai pada tanggal 14-16 Desember 2025;
49. FGD Penyusunan Naskah Akademis tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil pada tanggal 18-20 Desember 2025;
50. Penanaman Mangrove Pulau Rote pada tanggal 20-30 Desember 2025;
51. FGD Penyusunan Naskah Akademis tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil pada tanggal 28-30 Desember 2025;
52. FGD Penyusunan Naskah Akademik Regulasi Reklamasi pada tanggal 28-30 Desember 2025;
53. Penanaman Mangrove di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20-31 Desember 2025.



Rapat Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Pulau dengan PSDKP tanggal 13 Januari 2025



Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Randayan tanggal 12 Februari 2025;



Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Sipora pada tanggal 14-18 Januari 2025



Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Randayan tanggal 17-20 Februari 2025;



Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali pada tanggal 14 Juni sd 4 Juli 2025;



Kunjungan Lapangan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12-14 Juni 2025;



Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Jepara pada tanggal 28 Juli – 15 Agustus 2025;



Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pendahuluan dalam Rangka Permohonan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Citlim, Kab. Karimun, Provinsi Kepri pada tanggal 26-28 Agustus 2025;



Konsultasi Publik Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 pada tanggal 25 September 2025;



Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Oleh: PT Garda Tujuh Buana pada tanggal 6-12 Oktober 2025;



Kegiatan Pendampingan BPK untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT) atas PNBP KKP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 30 Oktober - 1 November 2025;

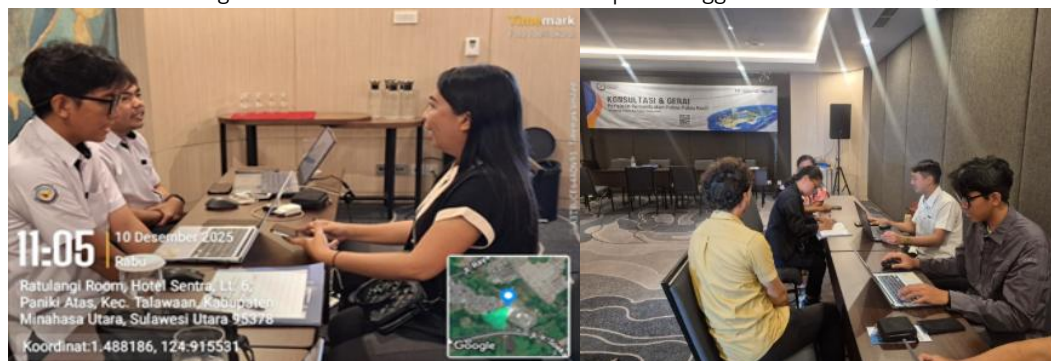


Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Penebang pada tanggal 11-17 November 2025;

Lanjutan...



FGD Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 4 Desember 2025;



Konsultasi dan Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 8-12 Desember 2025;



Rapat Pembahasan Kajian Akademis Penyelenggaraan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 26 November 2025 pada tanggal 19 dan 29 Desember 2025;



Penanaman Mangrove di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 20–31 Desember 2025

Gambar 53. Kumpulan Kegiatan Pendukung Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 54. Realisasi Anggaran Kegiatan yang Mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Sampai Dengan 31 Desember 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PBW 001. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	12.043.000.000	9.181.916.000	4.395.445.000	4.639.567.499	9.035.012.499	98,40	146.903.501
PFA 002. Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	280.502.000	280.502.000	141.828.680	129.442.737	271.271.417	96,71	9.230.583
Total	12.323.502.000	9.462.418.000	4.537.273.680	4.769.010.236	9.306.283.916	97,56	156.134.084

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sampai dengan 31 Desember 2025)

Total pagu efektif sebesar Rp9.462.418.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp9.306.283.916, atau mencapai 97,56% dari anggaran yang tersedia, dan sisa anggaran Rp156.134.084.

11. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi pada triwulan I tahun 2026 antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKM 10. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang

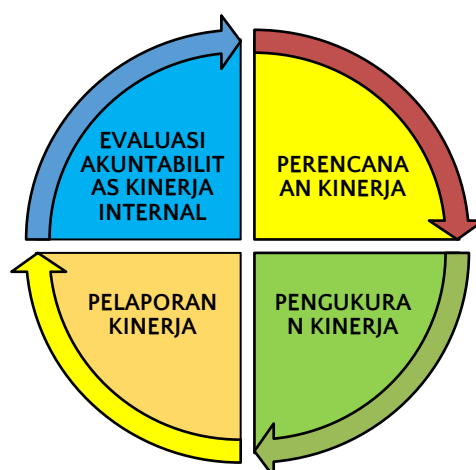
Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 70 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Indikator Kinerja “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian, antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).



Gambar 54. Siklus Pengelolaan Kinerja

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.

Tabel 55. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki

Predikat	Nilai	Interpretasi
		sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) pada periode tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 56. Target dan Capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
86,60	70	87	124,29%	Peningkatan capaian tahun 2025 sebesar 0,46% dibandingkan tahun 2024.	70	124,29%.	78	111,54%

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Analisis target dan capaian IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Target IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 sebesar 70 sedangkan capaian sebesar 87 sehingga capaian kinerja sebesar 124,29% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Capaian kinerja tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Nomor B.3740/DJPK.1/RC.610/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memperoleh nilai 87.00 dengan predikat A (Memuaskan) dari nilai maksimum 100.

Tabel 57. Hasil Penilaian AKIP pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
			2025
1	Perencanaan Kinerja	30	24.60
2	Pengukuran Kinerja	30	27.60
3	Pelaporan Kinerja	15	13.05

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
			2025
4	Evaluasi Internal	25	21,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	87,00
Predikat Penilaian			A

Sumber: Surat Nomor B.3740/DJPK.1/RC.610/XII/2025 pada tanggal 23 Desember 2025, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan capaian nilai PM SAKIP Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 dengan nilai PM SAKIP Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) Tahun 2023 dan 2024 dijelaskan pada table di bawah ini.

Tabel 58. Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP Direktorat P3K Tahun 2025 dengan Nilai PM SAKIP Direktorat P4K Tahun 2024 dan 2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai PM SAKIP Direktorat P4K / Direktorat P3K		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20	27,60	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,00	27,60	27,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10	12,90	13,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	18,50	21,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	83,30	86,60	87,00
Predikat			A	A	A

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/inplke>

Tabel di atas menunjukkan perkembangan nilai PM SAKIP Direktorat P4K Tahun 2023 dan 2024 (RPJMN Tahun 2020–2024) serta nilai PM SAKIP Direktorat P3K Tahun 2025 (RPJMN Tahun 2025–2029) yang meningkat setiap tahunnya. Tiga komponen pembentuk nilai PM SAKIP Direktorat P3K Tahun 2025 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2023 dan 2024, yaitu: pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Namun demikian, satu komponen yaitu perencanaan kinerja pada tahun 2025 cenderung menurun dibandingkan nilai perencanaan kinerja pada tahun 2023 dan 2024.

Nilai PM SAKIP Direktorat P3K Tahun 2025 ini merupakan *baseline* nilai tahun awal pada periode RPJMN Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, Direktorat P3K perlu berupaya cerdas dan fokus kepada peningkatan berkelanjutan nilai PM SAKIP pada tahun 2026–2029.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Target IKM 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 sebesar 70. Frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Capaian IKM ini pada tahun 2025 sebesar 87 sehingga capaian kinerja sebesar 124,29% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Tabel di bawah ini menampilkan perbandingan antara target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029 khususnya tahun 2025 dengan capaian IKM ini pada tahun 2025.

Tabel 59. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra dengan Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan										
10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	72	74	76	78	70	87	124,29	111,54

Sumber: Direktorat P3K (Tahun 2025)

Berdasarkan tabel di atas, target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 70% sedangkan capaian sebesar 87% sehingga capaian kinerja sebesar 124,29% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Capaian IKM pada tahun 2025 sebesar 87% sehingga capaian kinerja sebesar 124,29% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% pada aplikasi kinerja KKP. Selanjutnya, perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target Renstra Tahun 2025-2029 (khususnya target pada tahun 2029) sebesar 111,54%. Pencapaian ini disebabkan oleh adanya dukungan pimpinan, tim kerja, dan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat P3K. Namun demikian, Direktorat P3K perlu upaya cerdas dan fokus untuk meningkatkan terus nilai PM SAKIP hingga tahun 2029.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Capaian Nilai PM SAKIP setiap satuan kerja (satker) di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 60. Capaian Nilai PM SAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025

NILAI AKUNTABILITAS									
NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT	Ranking
1	1201000000	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	24.60	25.20	13.05	21.00	83.85	A	10
2	1202000000	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM	22.20	22.20	11.55	17.75	73.7	BB	14
3	1203000000	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	23.10	24.00	11.10	19.25	77.45	BB	13
4	1204000000	DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	24.60	27.60	13.05	21.75	87	A	8
5	1205000000	DIREKTORAT JASA BAHARI	23.10	24.60	11.85	20.50	80.05	A	12
6	1206000000	DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN	24.00	24.60	11.85	20.50	80.95	A	11
7	2070000000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG	28.50	27.60	13.80	24.25	94.15	AA	1
8	2080000000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	26.10	26.10	13.05	23.00	88.25	A	7
9	2090000000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN	27.60	27.60	13.80	23.00	92	AA	2

NILAI AKUNTABILITAS									
NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT	Ranking
		LAUT MAKASSAR							
10	210000000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	25.20	26.10	12.60	23.00	86.9	A	9
11	212000000	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	26.10	28.50	14.25	23.00	91.85	AA	3
12	211000000	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	25.20	27.60	13.80	23.00	89.6	A	6
13	213000000	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	27.60	26.10	13.80	23.00	90.5	AA	4
14	214000000	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	25.20	27.60	13.80	23.00	89.6	A	5

Sumber: Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025

Tabel Capaian Nilai PM SAKIP Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 di atas menunjukkan:

- Nilai PM SAKIP satuan kerja (satker) baik satker pusat maupun satker UPT di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan (DJPK) pada tahun 2025. Ada empat satker UPT yang mendapatkan predikat "AA", yaitu: BPSPL Padang (nilai 94,15, peringkat atau *ranking* 1), BPSPL Makassar (nilai 92, *ranking* 2), BKKPN Kupang (nilai 91,85, *ranking* 3), dan LPSPL Pekanbaru (nilai 90,5, *ranking* 4). Sedangkan 4 satker UPT lainnya seperti LPSPL Serang (nilai 89,6, *ranking* 5), LPSPL Sorong (nilai 89,6, *ranking* 6), BPSPL Pontianak (nilai 88,25, *ranking* 7), dan BPSPL Denpasar (nilai 86,9, *ranking* 9) mendapatkan predikat "A".
- Nilai PM SAKIP untuk satker pusat pada tahun 2025 sebagai berikut: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) (nilai 87, *ranking* 8), Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (nilai 83,85, *ranking* 10), Direktorat Sumberdaya Kelautan (Direktorat SDK) (nilai 80,95, *ranking* 11), Direktorat Jasa Bahari (nilai 80,05, *ranking* 12), Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Direktorat KSG) (nilai 77,45, *ranking* 13), dan Direktorat Konservasi Ekosistem (Direktorat KE) (nilai 73,7, *ranking* 14).

Di samping itu, pada bahasan ini berupaya melakukan *benchmarking* dengan instansi lain. Secara umum, *benchmarking* merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa instansi yang bisa dijadikan *benchmarking*, antara lain:

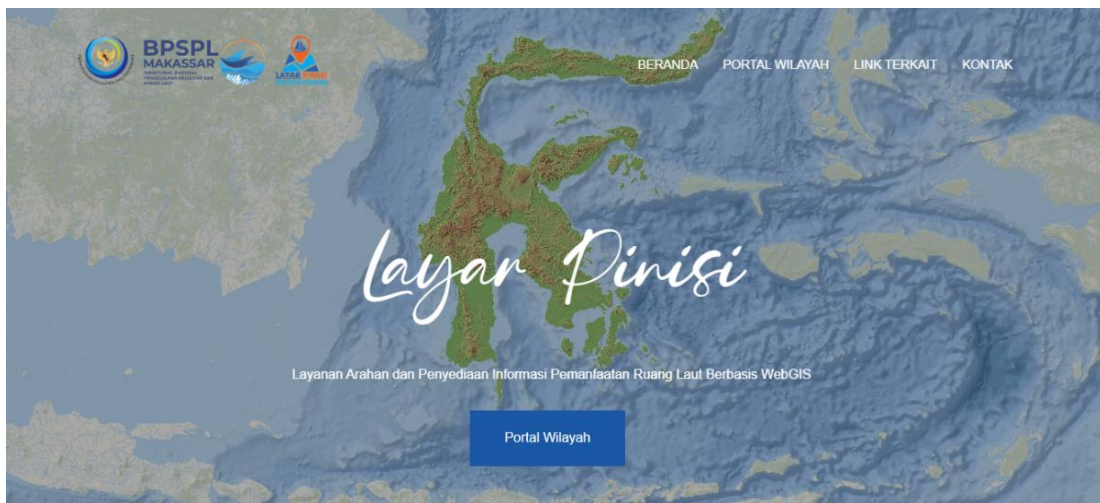
a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan seperti BKKPN Kupang, BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, BPSPL Denpasar dan BPSPL Makassar, telah membuat berbagai inovasi dan mendapatkan banyak prestasi baik pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tusi) unit kerja, dan melancarkan operasional kegiatan unit kerja.

Berbagai inovasi dan prestasi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi (IT) berupa platform digital atau aplikasi guna mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi, perencanaan berbasis data, kolaborasi berbagai pihak (stakeholders) terkait, dan partisipasi aktif masyarakat, seperti Platform Layar Pinisi.

Layar Pinisi adalah inovasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar berupa platform *WebGIS* yang menyediakan layanan pemanfaatan ruang laut di wilayah Sulawesi secara digital. Platform ini mengintegrasikan data geospasial Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir (RTRWP) dengan matriks alokasi zonasi laut, sehingga stakeholder memverifikasi kesesuaian lokasi aktivitas secara interaktif dan *real-time*.²⁰

Sebagai Unit Pelaksana Teknis KKP, BPSPL Makassar bertanggung jawab atas perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir-laut Sulawesi, termasuk penerbitan Izin Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) berdasarkan Perda RTRW provinsi. Tantangan akses informasi zonasi sebelumnya menghambat efektivitas perizinan, sehingga Layar Pinisi menjawabnya melalui era digitalisasi pelayanan publik.



Gambar 55. Dashboard Layar Pinisi

Keunggulan Inovasi:

- Akses *Real-time*: Peta interaktif zonasi laut, regulasi, arahan pemanfaatan ruang laut Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.²¹
- Percepat Perizinan: Dukung penerbitan Izin Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai UU Cipta Kerja, sehingga mengurangi hambatan informasi.
- *Stakeholder Friendly*: Fasilitasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pahami optimalisasi ruang laut berbasis data.

²⁰ Website Resmi <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-makassar/news/detail/kunjungan-kerja-spesifik-komisi-iv-dpr-ri-ke-kantor-bpspl-makassar/>

²¹ Platform Resmi <https://layarpinisi.id>



Gambar 56. Tampilan Fitur Layanan Layar Pinisi

Transformasi pelayanan digital membantu percepatan informasi, transparansi publik sehingga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat mengenai ruang laut dan mencegah konflik ruang laut.

b. Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta

Digitalisasi menjadi fondasi pemerintahan responsif, transparan, dan efisien di Pemda D.I. Yogyakarta (DIY). Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemprov DIY berkomitmen akselerasi transformasi digital guna tingkatkan kemandirian fiskal daerah. Inisiatif Digitalisasi Pemprov DIY antara lain:

- Melalui SK Gubernur No. 393 Tahun 2025, telah dilakukan pemutakhiran *roadmap* Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), agar percepatan digitalisasi berjalan lebih terarah, dan selaras dengan kebijakan nasional.²²
- Jogja Smart Province merupakan salah satu upaya pemerintah dengan pendekatan kreatif dan inovatif dalam penyelesaian isu-isu strategis DIY. Pemetaan yang dibagi dalam 6 dimensi pada Jogja *Smart Province* bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat DIY. Pemetaan dibagi dalam 6 dimensi utama untuk wujudkan layanan publik terbaik bagi masyarakat DIY:²³
 - *Smart Governance*: Tata kelola pemerintahan cerdas, transparan, akuntabel.
 - *Smart Branding*: Identitas daerah kuat berbasis nilai budaya Jawa.
 - *Smart Economy*: Ekonomi digital dukung UMKM via SiBakul, QRIS.
 - *Smart Living*: Kualitas hidup tinggi (pembayaran digital, pelayanan publik).
 - *Smart Society*: Masyarakat cerdas literasi AI, kolaborasi 5K (Kota-Kampung-Kampus-Komunitas-Korporat).
 - *Smart Environment*: Lingkungan berkelanjutan pengelolaan sampah-air.

Rencana Aksi JSP via Pergub DIY No. 32/2024, sinergi TP2DD, evaluasi berkala Diskominfo DIY. Nilai survei positif: *Smart Living* 3,70; *Smart Governance* 3,40 tertinggi.²⁴

- Peluncuran dan rebranding aplikasi dan alat pembayaran yaitu E-Posti QRIS timewa dan penyerahan MPOS untuk OPD di DIY

²² Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>

²³ Website Resmi <https://dprd.jogjakota.go.id/detail/index/39726/yogyakarta-genjot-smart-city-wujudkan-layanan-cerdas-lewat-jogja-smart-service-2025-05-08>

²⁴ Ibid

Pada 3 Desember 2025, peluncuran E-Posti QRIStimewa menjadi langkah strategis Pemprov DIY mendorong penerapan QRIS untuk pembayaran pajak daerah serta *Mobile Point of Sale (MPOS)* untuk retribusi pelayanan publik. Inisiatif ini memperkuat ekosistem transaksi non-tunai yang aman, transparan, dan minim kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).²⁵



Gambar 57. Peluncuran E-Posti QRIStimewa

Platform ini bagian dari akselerasi digitalisasi menuju *Jogja Smart Province*, integrasikan pembayaran elektronik ke seluruh layanan pemerintahan provinsi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kemandirian fiskal daerah. *Platform* ini merupakan upaya sinergi dengan Bank Indonesia dan ekosistem *fintech* nasional untuk mendukung target elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) 2025–2029.

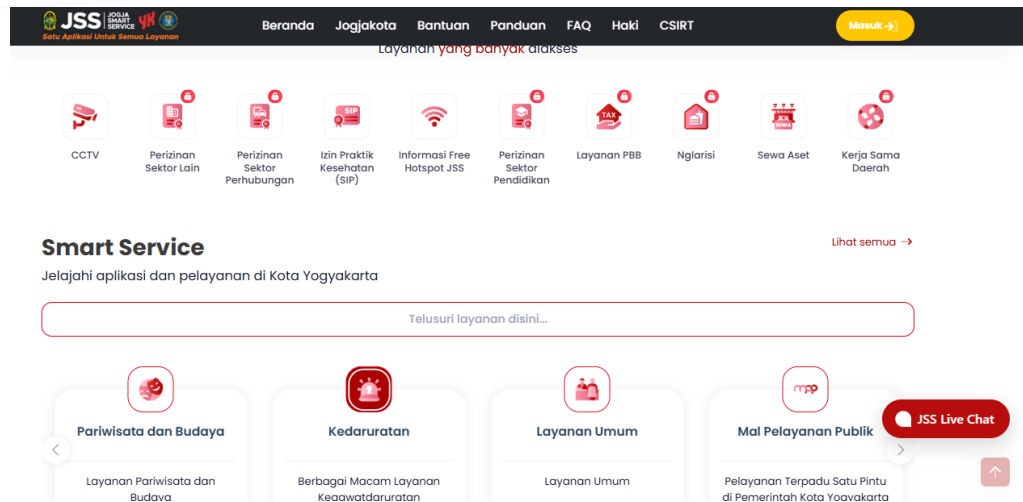
- *Jogja Smart Service (JSS)*: Merupakan aplikasi terpadu layanan pemerintah yang mengintegrasikan ratusan layanan publik dalam satu platform, termasuk perizinan online, informasi pajak, dan pengelolaan lingkungan.²⁶

Aplikasi ini mencakup perizinan online, informasi pajak, pengelolaan kependudukan seperti KTP dan KK, serta layanan lingkungan melalui konsep *Single ID*, *Single Window*, dan *Single Sign-On* untuk pelayanan mandiri. Tersedia juga fitur *helpdesk* berbasis *chatbot* 24 jam pada versi terbaru (4.0), mitra pemerintah, dan layanan umum seperti pendidikan.²⁷

²⁵ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>

²⁶ Gumilar, M. G. (2019). Inovasi pemerintahan daerah Jogja Smart Service dalam menciptakan smart and liveable city di Kota Yogyakarta. *Jurnal Gama Societa*, 3(1), 19–27.

²⁷ Platform Resmi <https://jss.jogjakota.go.id/>



Gambar 58. Tampilan Jogja Smart Service (JSS)

JSS dapat diunduh di *Google Play Store*, *App Store*, atau akses via *website* jss.jogjakota.go.id, kompatibel dengan Android, iOS, dan web. Diluncurkan sejak 7 Juni 2018, aplikasi ini telah memiliki lebih dari 221 ribu pengguna hingga 2023 dan terus dikembangkan untuk *e-government*.²⁸

- Jogja Digdaya: Inovasi kolaborasi digital yang dirancang untuk menanggulangi bencana melalui keterbukaan data pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sistem ini membuat sekolah dan madrasah dapat melaporkan dampak bencana atau kejadian darurat secara cepat, termasuk kerusakan infrastruktur, kondisi siswa, guru, dan proses belajar mengajar. Tujuannya menciptakan mekanisme pelaporan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung respons cepat pemerintah.²⁹



Gambar 59. Tampilan Jogja Digdaya

Dikembangkan bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY, Dinas Kominfo DIY, Forum Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) DIY, Sekretariat SPAB DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, serta Yayasan Plan International Indonesia. Integrasi data ke sistem kebencanaan daerah dan nasional memperkuat komitmen keterbukaan informasi.³⁰

²⁸ Youtube Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta <https://youtu.be/26HfyNT2lko?si=JpP5cFivSdiGOQvd>

²⁹ Website Resmi <https://dikpora.jogjaprovo.go.id/jogjadigdaya/beranda>

³⁰ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://www.jogjaprovo.go.id/berita/detail-berita/diy-luncurkan-jogja-digdaya-solusi-efektif-hadapi-kebencanaan-di-sektor-pendidikan>

- Jogja Dataku merupakan sistem informasi pengelolaan data dan statistik sektoral Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbasis website yang dapat diakses melalui <https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/>. Dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY sejak 2014, aplikasi ini menyediakan menu komprehensif: Master Data, Indikator Kinerja Utama (IKU), Sustainable Development Goals (SDGs), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Infografik, dan Publikasi.³¹



Gambar 60. Platform Jogja Dataku

Sebagai *e-portal* Satu Data Indonesia (SDI) tingkat provinsi, Jogja Dataku mengintegrasikan data yang disepakati seluruh OPD DIY, kabupaten/kota, dan instansi vertikal dengan kualitas akurat, mutakhir, serta mudah diakses. Platform ini mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sepanjang siklus manajemen pembangunan daerah DIY melalui visualisasi data time series terverifikasi triwulanan.

- Jogja Belajar merupakan inisiatif Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Dinas Pendidikan DIY sebagai layanan unggulan Jogja Smart Province untuk pembelajaran daring tanpa batas ruang-waktu, dikembangkan sejak 2020 adaptasi era digital³². Akses utama: <https://jogjabelajar.org>.



Gambar 61. Platform Jogja Belajar

³¹ Instagram resmi Bapperida DIY <https://www.instagram.com/p/DOVVivQDwJz/>

³² Website Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/jogja-belajar-class-solusi-pembelajaran-daring>

Portal Jogjabelajar terbagi dalam beberapa layanan strategis. Layanan strategis tersebut adalah Jogja Belajar Class (JB Class), Jogja Belajar Media (JB Media), Jogja Belajar Televisi (JB TV), Jogja Belajar Radio (JB Radio), Jogja Belajar Budaya (JB Budaya) serta layanan baru yang akan dikembangkan oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY yaitu Jogja Belajar Riset Preneur (JB RP).³³

Pada *High Level Meeting* TP2DD se-DIY 3 Desember 2025 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menegaskan komitmen Pemprov DIY tidak hanya membangun sistem digital, tetapi juga kultur kerja modern yang terpercaya dan inovatif. Sri Paduka berharap DIY menjadi role model nasional modernisasi keuangan daerah melalui percepatan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah).³⁴ Inovasi-inovasi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DIY untuk menjadi contoh penerapan *Smart Province* di Indonesia, dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Direktorat P3K pada periode tahun 2025 berupaya untuk:

- a. Menyiapkan dokumen dan data dukung Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) pada 4 (empat) aspek yaitu aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP.

Tidak ada kendala pada IKM ini. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, melengkapi dokumen data dukung kinerja sesuai format yang ada, serta mengelola arsip secara digital dengan baik dan tertib.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode tahun 2025, antara lain:

1. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPKRL Tahun 2025 Ruang Rapat Wunga Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (8-9 Januari 2025).
2. Rapat Paparan Rancangan Awal Renstra DJPKRL 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III dan Aplikasi Zoom (10 Januari 2025).
3. Pembahasan Matriks *Cascading* Kinerja DJPKRL Tahun 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (13 Januari 2025).
4. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (14-16 Januari 2025).
5. Rapat Evaluasi Kegiatan 2024 dan Rencana Kegiatan 2025 di RR. Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (15 Januari 2025).

³³ Platform Resmi <https://jogjabelajar.org/>

³⁴ Website Resmi Portal Pemerintah Daerah DIY <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/akselerasi-digitalisasi-tingkatkan-kemandirian-daerah>

6. Pembahasan Rancangan Awal Kerangka Kinerja dan Pendanaan DJPK dan DJPRL Tahun 2025 – 2029 (19, 21–22 Januari 2025).
7. Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (23–24 Januari 2025).
8. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Eselon I baru (4 Februari 2025).
9. Dialog kinerja serta pengisian SKP TA 2025 di Ruang Rapat Selaru, Lt. 8 GMB III (25–26 Februari 2025).
10. Rapat Penyusunan Uraian Fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Ndana, Gedung Mina Bahari III Lt. 9 (26 Februari 2025).
11. Pembahasan Rancangan Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ditjen Penataan Ruang Laut (13 Maret 2025).
12. Pembahasan Manual Indikator Kinerja Level 2 satker lingkup DJPKRL melalui Aplikasi Zoom (19 Maret 2025).
13. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Lingkup DJPKRL melalui Aplikasi Kinerjaku KKP melalui Aplikasi Zoom (14 April 2025).
14. Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja KKP dan Unit Organisasi Eselon I Triwulan I Tahun 2025 (15 April 2025)
15. Rapat Pimpinan Penyiapan Rancangan Program dan Anggaran KKP Tahun 2026 di RR Tuna, GMB IV Lantai 15 (15 April 2025).
16. Penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2025 di R.R. Terubuk Lantai 10 GMB 3 (17 April 2025).
17. Penyusunan Laporan Kinerja KKP Triwulan I Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (21 April 2025).
18. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV dan Aplikasi Zoom (21 April 2025).
19. Rapat Rancangan Awal Renstra KKP 2025–2029 di Ruang Rapat Biro Perencanaan, GMB I Lantai 3A (21 April 2025).
20. Permohonan Hadir mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI terkait Pembahasan mengenai, Efisiensi Anggaran (Blokir) Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV), Gedung Nusantara II (22 April 2025).
21. Rapim Program dan Anggaran 2026 – 2029 di GMB I Lantai 7 (24 April 2025).
22. Pembahasan Program dan Kegiatan DJPK Tahun 2025 di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9 Gedung Mina Bahari III (30 April 2025).
23. Rapat Pembahasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026–2029 di Ruang Rapat Padaido Lantai 11, GMB III (2 Mei 2025).
24. Koordinasi Pembagian Personil, Penganggaran, dan Dokumen (P3D) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (9 Mei 2025).
25. Rapat Pembahasan Usulan Pemutakhiran Renja DJPK TA 2025 dan TA 2026 melalui Aplikasi Zoom (16 Mei 2025).
26. Pembahasan Program Prioritas Lingkup Ditjen PK di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim (23 Mei 2025).
27. *Launching* Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP melalui Aplikasi Zoom (4 Juni 2025)
28. Rapat Pembahasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026–2029 di Ruang Rapat Padaido Lantai 11, GMB III (11 Juni 2025)
29. Rapat Pimpinan Pembahasan *Strategic Planning* KKP Tahun 2025–2029 (26 Juni 2025)
30. Rapat Pimpinan Pembahasan *Strategic Planning* KKP Tahun 2025–2029 di Ruang Rapat ZEE, GMB I Lantai 7 (30 Juni 2025).
31. Rapat Pelaksanaan Penggunaan Dana PNBK Tahun 2025 pada Ditjen PK dan Ditjen PRL di Ruang Rapat Padaido Lantai 11, GMB III (1 Juli 2025)
32. Pembahasan Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Lingkup DJPK Tahun 2026 di Ruang Rapat Kawaluso, Lantai 9, GMB III (3 Juli 2025)

33. Rapat Pelaksanaan Penggunaan Dana PNBp Tahun 2025 pada Ditjen PK dan Ditjen PRL di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 GMB III (7 Juli 2025)
34. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026 dan Isu-Isu Aktual Lainnya (7 Juli 2025)
35. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL dengan UAPPA-E1 Periode Semester I 2025 (8-11 Juli 2025)
36. Penyusunan dan Reviu Dokumen Anggaran Pagu Indikatif Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2026 di Hotel Aone Jakarta (16 Juli 2025)
37. Penyusunan Laporan Kinerja KKP Triwulan II Tahun 2025 di Ruang Rapat Biro Perencanaan GMB I Lantai 3 A (21 Juli 2025)
38. Penyusunan Laporan Kinerja DJPK Triwulan II Tahun 2025 di HR Building, Jakarta Pusat (23 Juli 2025)
39. Pemaparan dan Diskusi terkait Pengelolaan PNBp Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (28 Juli 2025)
40. Rapat Pembahasan Penggunaan PNBp di Ruang Rapat Padaido, Lantai 11, GMB III (31 Juli 2025)
41. Penyusunan dan Reviu Dokumen Pagu Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan TA 2026 di Grand Mercure Harmoni (1 Agustus 2025)
42. Pembahasan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas KKP Juni 2025 melalui Aplikasi Zoom (1 Agustus 2025)
43. Konfirmasi Penyesuaian Target RO berdasarkan Anggaran Efektif Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (8 Agustus 2025)
44. Reviu dokumen penambahan pagu penggunaan dana PNBp TA. 2025 di RR. Selaru Gd Mina Bahari III Lt. 8 (12-14 Agustus 2025)
45. Pembahasan Program Prioritas Tahun 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran DJPK Tahun 2026 di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (20 Agustus 2025)
46. Rapat Progress Persiapan RAKERNIS DJPK melalui zoom meeting (8 September 2025)
47. Raker Komisi IV DPR RI - Penyesuaian RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV), Gedung Nusantara, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta (16 September 2025)
48. Rapat pembahasan progres kegiatan Dit. P3K Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (19 September 2025)
49. Rapat Pembahasan Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2026 di Ruang Graha Sawala, Gd. Ali Wardhana Lantai 1 Kemenko Bidang Perekonomian (22 September 2025)
50. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029 melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025)
51. Pengenalan Hasil Pengembangan Fitur Aplikasi Kinerja KKP lingkup DJPK di Ruang Rapat Lantai G1, Gedung HR, Kantor LAUTRA (29 September 2025)
52. Rapat Pimpinan Persiapan Rencana Kerja Teknis (Rakernis) DJPK Tahun 2025 (29 September 2025).
53. Penyusunan Dokumen Penganggaran Pagu Alokasi Anggaran T.A. 2026 Lingkup DJPK (8-10 Oktober 2025).
54. Penyusunan Laporan Kinerja DJPK dan Setditjen PK TW III 2025 di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 GMB III KKP (15-16 Oktober 2025).
55. Verifikasi Pelaporan Online Triwulan III Tahun 2025 melalui Aplikasi e-Monev Bappenas di Ruang Rapat BMKT Lantai 2 GMB IV (20 Oktober 2025).
56. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Lingkup DJPK di Bigland Hotel Bogor (27 Oktober 2025).
57. Rapat Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pasca Terbitnya DIPA Penambahan Penggunaan Dana PNBp Lingkup DJPK TA 2025 melalui Aplikasi Zoom (4 November 2025).
58. Pengawasan Program/Kegiatan Prioritas KKP dan Penyelenggaraan Peringatan Hakordia Tahun 2025 di Ruang Rapat BerAkhlak Gedung Mina Bahari III Lantai 3 (14 November 2025).

59. Pleno Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di Tamarin Hotel Jakarta (2–3 Desember 2025).
60. Pembahasan Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029 di Tamarin Hotel Jakarta (22–24 Desember 2025).

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 61. Realisasi Anggaran IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		%	Sisa (Rp)
	Pagu Efektif	Realisasi		
WA.2367.EBA.962.051.CC Penunjang Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Direktorat P3K	134.821.000	134.820.709	100	291
WA.2367.EBA.962.051.CD Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil	332.434.000	331.998.281	99,87	435.719
Total	467.255.000	466.818.990	99,82%	436.010

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil, 2025

Total pagu efektif sebesar Rp 467.255.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp 466.818.990, atau mencapai 99,82% dari anggaran yang tersedia, dan hanya menyisakan Rp 436.010.

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 antara lain Direktorat P3K berupaya akan memperbaiki dan melengkapi dokumen data dukung dalam pengelolaan kinerja pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, serta memperhatikan dan berupaya meningkatkan nilai empat aspek tersebut pada periode mendatang.

IKM 11. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 11 “Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Dokumen)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil”. Target IKM ini pada tahun 2025 sebanyak 3 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Capaian IKM yaitu 3 dokumen, Capaian tersebut memiliki nilai sama besar dengan target atau 100% berdasarkan Kinerjaku.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen–KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Tahun 2025 s.d. Triwulan IV Tahun 2025. Teknik menghitung adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun oleh Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.

Target dan capaian IKM Nomor 11 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) pada 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 62. Target dan Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” tahun 2025.

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian Tahun 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	% Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
4	3	3	100	25	3	100	-	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Keterangan: Target Renstra untuk IKM No 11 belum tersedia

Analisis Target dan Capaian IKM Nomor 11 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Target IKM ini pada tahun 2025 sebanyak 3 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Capaian IKM yaitu 3 dokumen, Capaian tersebut memiliki nilai sama besar dengan target atau 100% berdasarkan Kinerjaku. Capaian IKM Nomor 11 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2025 adalah sama yaitu 3 dokumen, yang terdiri dari:

- Laporan Triwulan 1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 (MEMORANDUM NOMOR 74/DJPK.4/TU.140/IV/2025)
- Laporan Triwulan 2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 (MEMORANDUM NOMOR 605/DJPK.4/TU.140/VII/2025)
- Laporan Triwulan III Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 (NOTA DINAS NOMOR 1181/DJPK.4/TU.140/X/2025)

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Tahun 2024

Target pada tahun 2024 sebanyak 4 dokumen dengan capaian pada tahun 2024 sebanyak 4 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Target IKM ini pada tahun 2025 sebanyak 3 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Capaian IKM yaitu 3 dokumen, Capaian tersebut memiliki nilai sama besar dengan target atau 100% berdasarkan Kinerjaku. Capaian IKM Nomor 11 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2025 adalah sama yaitu 3 dokumen, yang terdiri dari:

- Laporan Triwulan 1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 (MEMORANDUM NOMOR 74/DJPK.4/TU.140/IV/2025)
- Laporan Triwulan 2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 (MEMORANDUM NOMOR 605/DJPK.4/TU.140/VII/2025)
- Laporan Triwulan III Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 (NOTA DINAS NOMOR 1181/DJPK.4/TU.140/X/2025)

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target dan capaian IKM Nomor 11 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2025 adalah masing-masing 3 dokumen sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian IKM pada 2025 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029 karena belum ada target IKM ini pada Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029.

Tabel 63. Target dan capaian IKM Nomor 11 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) pada tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target 2029
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan										
11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Dokumen)	-	-	-	-	-	3	3	100	-

Sumber: Direktorat P3K (Tahun 2025)

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sama dengan capaian di Unit kerja Eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan pada tahun 2025 yaitu sebanyak 3 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Target IKM ini pada tahun 2025 sebanyak 3 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Capaian IKM yaitu 3 dokumen, Capaian tersebut memiliki nilai sama besar dengan target atau 100% berdasarkan Kinerjaku. Capaian IKM Nomor 11 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2025 adalah sama yaitu 3 dokumen, yang terdiri dari:

- Laporan Triwulan 1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 (MEMORANDUM NOMOR 74/DJPK.4/TU.140/IV/2025)
- Laporan Triwulan 2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 (MEMORANDUM NOMOR 605/DJPK.4/TU.140/VII/2025)
- Laporan Triwulan III Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 (NOTA DINAS NOMOR 1181/DJPK.4/TU.140/X/2025)

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Faktor keberhasilan pencapaian target IKM ini antara lain: (1) penyusunan laporan SPIP tepat waktu, (2) tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP, dan (3) tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Tidak terdapat kendala pada pencapaian target IKM ini karena pengumpulan dokumen data dukung dikoordinasikan dengan Tim Kerja lingkup Direktorat P3K, Tim Kerja Keuangan dan BMN Setditjen Pengelolaan Kelautan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target IKM ini adalah fokus kepada penyampaian laporan SPIP sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 11 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKM “Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” pada tahun 2025, antara lain: pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan dan penyusunan Laporan SPIP triwulanan.

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 64. Realisasi Anggaran IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		%	Sisa (Rp)
	Pagu Efektif	Realisasi		
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penunjang Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Resiko (Dit. P3K)	55.130.000	55.130.000	100%	0

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Total pagu efektif sebesar Rp 55.130.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp 55.130.000, atau mencapai 100% dari anggaran yang tersedia, dan tidak ada sisa anggaran.

10. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah Direktorat P3K akan meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP, serta pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

IKM 12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKU pada tahun 2025 ini sebesar 80, dengan capaian sebesar 83, 36. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat semesteran.

Beberapa definisi berkaitan dengan IKM 12 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)”, antara lain:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), Kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat PIM, Diklat Teknis/Jabfung, Diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi capaian penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2024 lingkup P4K dengan mengirimkan memorandum terkait pengisian SKP. Penilaian perilaku serta melakukan asistensi dalam setiap pengisian SKP lingkup satker Direktorat P3K.
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
1. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
2. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
3. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
4. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2025 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi *Dashboard* Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>. Cara Mengukur yaitu:

$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$	$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$ $W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$ $W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$ $W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$
--	---	---

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Gambar 62 Penghitungan capaian IKM

Pada semester 1 tahun 2025, capaian kinerja mencapai 82,34%, meningkat menjadi 83,36% pada semester 2, dengan peningkatan sebesar 1,24% dibandingkan semester sebelumnya. Target dan capaian IKM Nomor

12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 65. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)								
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat P3K (indeks)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	% Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
88,06	80	83,36	104,20%	5,34	80	104,20% berdasarkan Kinerja	84	99,24%

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Analisis Target dan Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat P3K (indeks)” pada periode tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Pada semester 1 tahun 2025, capaian kinerja mencapai 82,34%, meningkat menjadi 83,36% pada semester 2, dengan peningkatan sebesar 1,24% dibandingkan semester sebelumnya. Target 2025 sebesar 80, sedangkan capaian 2025 sebesar 83,36 atau 104,20% berdasarkan Kinerja. Capaian tahun 2025 lebih besar daripada target tahun 2025.

Berdasarkan Lampiran Surat Nomor B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 Hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memperoleh nilai 83,36.

Lampiran Surat
Nomor : B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester II Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,04	28,66	24,67	5	81,58
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,78	33,62	25	5	86,4
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,55	32,1	25	5	85,65
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,52	28,93	25,91	5	83,36
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,67	30	26,33	5	85
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23,03	31,36	26,45	5	85,83
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	21,75	35,18	27,11	5	89,04
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	21,93	34,73	24,77	5	86,43
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	22,5	34,52	27,8	5	89,82
10.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	21,94	34,5	25,41	5	86,85
11.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	21,79	34,02	25,18	5	85,98
12.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	21,49	34,68	26,28	4,91	87,36
13.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	22,18	37,05	27,82	5	92,05
14.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	22,5	33,42	27,5	5	88,42

Keterangan :
Nilai diatas dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN melalui tautan <http://rnpes.kkp.go.id/4080/ip-asn/2025>

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Gambar 63. Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Frekuensi penghitungan IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat semesteran. Target IKM ini pada Semester I 2025 sebesar 78 dengan capaian sebesar 82,34. Sedangkan target IKM ini pada Semester I 2024 sebesar 83 dengan capaian sebesar 86,77.

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Semester II 2025 (akhir tahun 2025) sebesar 80 dengan capaian 83,36 sehingga capaian kinerja sebesar 104,20%. Target IKM ini pada Semester II 2024 (akhir tahun 2024) sebesar 88 sedangkan capaian 88,06 sehingga capaian kinerja sebesar 100,07%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Frekuensi penghitungan IKM “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” adalah bersifat semesteran. Target IKM ini pada Semester I 2025 sebesar 78 dengan capaian sebesar 82,34.

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” pada Semester II 2025 (akhir tahun 2025) sebesar 80 dengan capaian 83,36 sehingga capaian kinerja sebesar 104,20%. Capaian tahun 2025 ini lebih besar daripada target pada Renstra Ditjen PK Tahun 2025-2029 khususnya pada tahun 2025. Selanjutnya, perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target Renstra tahun 2025-2029 (khususnya target pada tahun 2029) sebesar 99,24%.

Tabel 66. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan										
12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	81	82	83	84	80	83,36	104,20	99,24

Sumber: Direktorat P3K (Tahun 2025)

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Ditjen PK pada Semester II tahun 2025 atau akhir tahun 2025 merujuk kepada Lampiran Surat Nomor B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 Hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dijelaskan pada tangkapan layar (*screenshot*) di bawah ini.

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,04	28,66	24,67	5	81,58
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,78	33,62	25	5	86,4
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,55	32,1	25	5	85,65
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,52	28,93	25,91	5	83,36
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,67	30	26,33	5	85
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23,03	31,36	26,45	5	85,83
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	21,75	35,18	27,11	5	89,04
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	21,93	34,73	24,77	5	86,43
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	22,5	34,52	27,8	5	89,82
10.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	21,94	34,5	25,41	5	86,85
11.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	21,79	34,02	25,18	5	85,98
12.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	21,49	34,68	26,28	4,91	87,36
13.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	22,18	37,05	27,82	5	92,05
14.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	22,5	33,42	27,5	5	88,42

Keterangan :
 Nilai diatas dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN melalui tautan <http://ropea.kkp.go.id/4080/ip-asn/2025/>

Gambar 64. Tabel Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester II Tahun 2025

Mengacu kepada capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Semester II Tahun 2025 tersebut di atas, capaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) masih lebih rendah dibandingkan satuan kerja (satker) lainnya di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Untuk itu, Direktorat P3K perlu meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), khususnya pada aspek Kompetensi yang memiliki bobot terbesar 40% dalam komponen IP ASN, yang memberikan dampak signifikan terhadap capaian kinerja keseluruhan IP ASN di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

IKM Nomor 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pengisian sudah menggunakan aplikasi SKP BKN *online* versi terbaru dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPK.
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) sehingga memungkinkan pegawai untuk menghadiri Bimtek/Pelatihan/Seminar melalui daring.
- 3) Peningkatan disiplin disebabkan oleh tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi *online* dan tidak telat melakukan presensi.

b. Kendala

Kendala pada IKM ini, antara lain:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat disebabkan oleh keterbatasan kuota dan formasi untuk izin belajar dan tugas belajar.
- 2) Unit kerja eselon II teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri karena tuisi kediklatan berada di BPPSDM KP.

- 3) Masih kurangnya perhatian (*attention*) dan kesadaran para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti sehingga data yang diinput dalam e-kinerja BKN masih kurang maksimal. Pelaporan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti melalui My ASN (BKN) saat ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat tersebut dalam My ASN (BKN).

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat P3K untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, memberikan perhatian terhadap *reward and punishment* untuk disiplin pegawai, dan perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (jabfung) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti dalam My ASN (BKN).

6. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya mengikuti bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*).

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan 05 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung IKM Nomor 12 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)” pada tahun 2025 antara lain:

- a. Mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) pada Bulan Juli hingga September 2025 baik yang diselenggarakan oleh internal Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maupun pihak eksternal.
- b. Melakukan presensi (kehadiran) pada saat datang di kantor dan pulang kantor melalui aplikasi e-presensi.
- c. Penginputan target dan capaian SKP tahun 2025.
- d. Melakukan unggahan (*upload*) sertifikat bimtek/pelatihan/seminar yang telah diterima ke dalam aplikasi My ASN BKN.

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 67. Realisasi Anggaran IKM “Indeks Profesionalitas ASN” sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		%	Sisa (Rp)
	Pagu Efektif	Realisasi		
WA.2367.EBA.962.051.CA. Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	121.286.000	121.286.000	100	0

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Total pagu efektif sebesar Rp 121.286.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp 121.286.000, atau mencapai 100% dari anggaran yang tersedia, dan tidak ada sisa anggaran.

10. Rencana Aksi Pada Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026, antara lain: menginput e-kinerja BKN (SKP BKN) periode triwulan I tahun 2026 beralamat <https://kinerja.bkn.go.id/login>, memotivasi para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

IKM 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Target IKM ini adalah 80 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan waktu pengukuran.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit. P3K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. P3K}} \times 100$$

Tabel 68. Target dan Capaian IKM 13 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Tahun 2025.

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
93,10	80	94,30	117,88	Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 94,30%, menunjukkan peningkatan sebesar 1,29% terhadap tahun 2024.	80	117,88	84	112,26

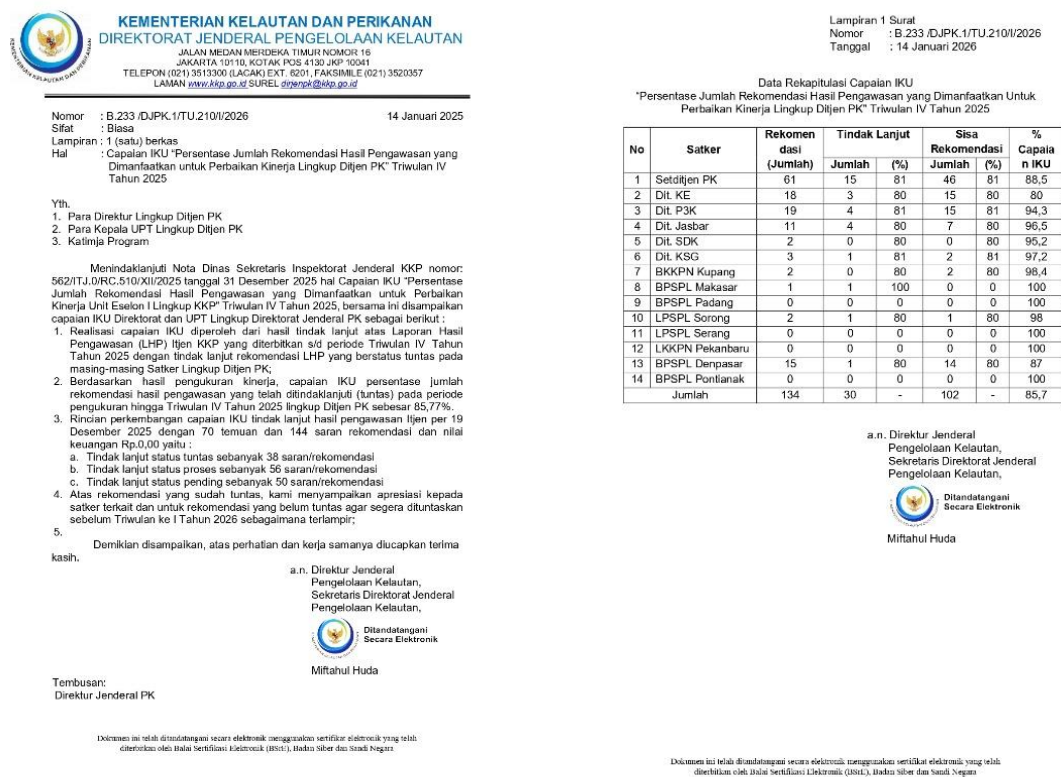
Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Target IKM Nomor 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 94,3% berdasarkan Surat Nomor B.233 /DJP.1/TU.210/I/2026 Tanggal 14 Januari

2026, Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025. Ini berarti bahwa capaian lebih besar dari target yang ditetapkan, sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 117,88% berdasarkan Kinerjaku, sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 65. Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Target IKM Nomor 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 sebesar 80%, sedangkan capaiannya sebesar 94,3% sehingga capaian kinerja sebesar 117,88%. Capaian tahun 2025 lebih besar dibandingkan target 2025.

Target IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” pada tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 93,10% sehingga capaian kinerja sebesar 116,38%. Capaian pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan capaian pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 93,10%, menunjukkan peningkatan sebesar 1,29% terhadap tahun 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKM Nomor 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 sebesar 80%, sedangkan capaiannya sebesar 94,3% sehingga capaian kinerja sebesar 117,88%. Capaian tahun 2025 lebih besar dibandingkan target 2025. Selanjutnya, perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target Renstra Tahun 2025-2029 (khususnya pada tahun 2029) sebesar 112,26%. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah triwulanan. Sedangkan target IKM ini pada target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 adalah tahunan. Capaian IKM ini pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan target tahun 2025 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan pada tahun 2025-2029.

Tabel 69. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan										
13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	80	81	82	83	84	80	94,3	117,88	112,26

Sumber: Direktorat P3K (Tahun 2025)

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Perbandingan target dan capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” di Unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PK periode tahun 2025 terdapat dalam surat Nomor B.233 /DJPK.1/TU.210/I/2026 Tanggal 14 Januari 2025, Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025, di bawah ini.

Lampiran 1 Surat
Nomor : B.233 /DJPK.1/TU.210/I/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025

No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	61	15	81	46	81	88,5
2	Dit. KE	18	3	80	15	80	80
3	Dit. P3K	19	4	81	15	81	94,3
4	Dit. Jasbar	11	4	80	7	80	96,5
5	Dit. SDK	2	0	80	0	80	95,2
6	Dit. KSG	3	1	81	2	81	97,2
7	BKKPN Kupang	2	0	80	2	80	98,4
8	BPSPL Makasar	1	1	100	0	0	100
9	BPSPL Padang	0	0	0	0	0	100
10	LPSPL Sorong	2	1	80	1	80	98
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
12	LKKPN Pekanbaru	0	0	0	0	0	100
13	BPSPL Denpasar	15	1	80	14	80	87
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
Jumlah		134	30	-	102	-	85,7

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Gambar 66. Rekapitulasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendapatkan capaian sebesar 94,3% dengan 19 Rekomendasi dan 4 yang telah ditindaklanjuti. Satker lainnya memiliki nilai di atas yang diperoleh Direktorat P3K, hanya ada 4 satker yang memiliki nilai di bawah yang diperoleh Direktorat P3K. Untuk itu, Direktorat P3K dan satker level II lingkup Ditjen PK belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, serta perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi internal satker untuk menuntaskan rekomendasi pengawasan dari Itjen sebelum Triwulan ke I Tahun 2026.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Keberhasilan IKM ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja (Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing-masing koordinator lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Kegiatan pendukung pencapaian target pada tahun 2025, antara lain Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan yang Belum Ditindaklanjuti.

8. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 70. Realisasi Anggaran IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		%	Sisa (Rp)
	Pagu Efektif	Realisasi		
WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan, Persediaan dan BMN	117.571.000	117.571.000	100	0
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko	55.130.000	55.130.000	100	0
Total	172.701.000	172.701.000	100	0

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Total pagu efektif sebesar Rp 172.701.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp 172.701.000, atau mencapai 100% dari anggaran yang tersedia, dan tidak ada sisa anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan LHP.

IKM 14. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 14 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat P3K merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Teknik menghitung “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit P3K yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit P3K}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Target dan capaian IKM 14 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 71. Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
100	100	100	100	Sama (100%)	100	100	-	-

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada periode tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Frekuensi pengukuran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah tahunan. Target dan capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 adalah masing-masing 100%. Data dukung berupa NOTA DINAS NOMOR 119/DJPK.1/TU.210/I/2026, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah menindaklanjuti temuan

kepatuhan dan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

NOTA DINAS
NOMOR 119/DJPK.1/TU.210/I/2026

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan
Lingkup Ditjen PK Tahun 2025
Tanggal : 14 Januari 2026

Bersama ini kami melaporkan kepada Bapak, bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah menindaklanjuti temuan kepatuhan dan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Adapun temuan tersebut antara lain 2 (dua) temuan kepatuhan senilai Rp357.650.852,00 yang sudah disetor ke Kas Negara per 15 Mei 2025 dan 2 (dua) temuan SPI yang sudah disampaikan tanggapan sepakat dan telah dilengkapi dokumen dukung yang dimaksud. Rincian 4 (empat) temuan kepatuhan tersebut sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Belanja Barang Non 526 tidak sesuai ketentuan pada Ditjen PK senilai Rp109.734.338,00;
2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi belanja 526 tidak sesuai kontrak pada Ditjen PK senilai Rp247.916.514,00;

Sedangkan rincian 2 (dua) temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terdiri dari:

1. Penatausahaan Belanja Operasional dan Belanja Nonoperasional tidak sesuai ketentuan;
2. Pembayaran Upah Tenaga Kerja melalui Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tidak Sesuai Ketentuan.

Demikian kami melaporkan, sekaligus mohon arahan Bapak lebih lanjut.


Ditandatangani
Secara Elektronik
Miftahul Huda

Gambar 67. Nota Dinas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Target dan capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 maupun tahun 2024 adalah masing-masing 100%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025–2029

Frekuensi pengukuran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah tahunan. Target dan capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada tahun 2025 adalah masing-masing 100%. Tidak ada target IKM ini dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025–2029 sehingga capaian IKM ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan tahun 2025–2029.

Tabel 72. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan										
14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (%)	-	-	-	-	-	100	100	100	-

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Frekuensi pengukuran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Pada Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (%)” adalah tahunan. Target dan capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Pada Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (%)” pada tahun 2025 adalah masing-masing 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja, Kendala dan Solusi

Pencapaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” ini nantinya akan didukung komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM sebagai berikut: Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 14 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil”. Kegiatan Pendukung yang dilakukan pada tahun 2025 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P3K guna menyelesaikan temuan lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 14 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 73. Realisasi Anggaran IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		%	Sisa (Rp)
	Pagu Efektif	Realisasi		
WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan, Persediaan dan BMN	117.571.000	117.571.000	100	0
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko	55.130.000	55.130.000	100	0
Total	172.701.000	172.701.000	100	0

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Total pagu efektif sebesar Rp 172.701.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp 172.701.000, atau mencapai 100% dari anggaran yang tersedia, dan tidak ada sisa anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan I Tahun 2026 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P3K dalam rangka pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. (IKM) 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” merupakan IKM yang muncul pada tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKM ini adalah bersifat tahunan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik Menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sebagai berikut:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a) Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip.
 - Penggunaan Arsip.
 - Pemeliharaan Arsip.
 - Penyusutan Arsip.

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b) Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumber Daya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 74. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 75. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Periode tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07								
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)								
Tahun 2024	Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian 2025	% Peningkatan atau Penurunan Capaian 2025 Thd Capaian Tahun 2024	Target PK	% Realisasi 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
96,74	80	98,40	120% berdasarkan Aplikasi Kinerjaku KKP	Capaian tahun 2024 sebesar 96,74. Peningkatan capaian tahun 2025 sebesar 1,72% di bandingkan tahun 2024.	80	120% berdasarkan Kinerjaku	84	117,14%

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Analisis Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" muncul pada tahun 2024. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80, dengan capaian sebesar 98,40. Capaian ini lebih besar daripada target. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

Capaian IKM ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum KKP Nomor 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 Tanggal 21 November 2025, Hal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025, menyebutkan bahwa capaian IKM ini untuk Direktorat P3K pada tahun 2025 sebesar 98,40 (Kategori AA "Sangat Memuaskan") sehingga capaian kinerja sebesar 123% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Nilai ini membuat Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memperoleh peringkat 1 di lingkup direktorat dan peringkat 5 di KKP.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut							
8	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	68.40	30.00	98.40	AA (SANGAT MEMUASKAN)	5	1
9	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	67.38	30.00	97.38	AA (SANGAT MEMUASKAN)	10	2
10	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	66,71	27,75	94,46	AA (SANGAT MEMUASKAN)	16	3
11	Direktorat Jasa Kelautan	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	19	4
12	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	70.00	27.75	92.81	AA (SANGAT MEMUASKAN)	29	5

Gambar 68. Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" muncul pada tahun 2024. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 75 dengan capaian sebesar 96,74. Sedangkan target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80 dengan capaian sebesar 98,40. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan capaian IKM ini pada tahun 2025 jika dibandingkan capaian tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" muncul pada tahun 2024. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Capaian IKM ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum KKP Nomor 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 Tanggal 21 November 2025 Hal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025 menyebutkan bahwa capaian IKM ini untuk Direktorat P3K pada tahun 2025 sebesar 98,40 sehingga capaian kinerja sebesar 123% atau memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP.

Target IKM "Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" khususnya pada tahun 2025 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 adalah sebesar 80. Capaian IKM ini pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025 dalam Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 76. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

No.	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra (Tahun)					Target Pada PK Dit P3K Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2367- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan										
15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	81	82	83	84	80	98,40	123% atau 120% berdasarkan kinerja KKP	117,14% atau 120% berdasarkan kinerja KKP

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Capaian IKM ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum KKP Nomor 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 Tanggal 21 November 2025 Hal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025 menyebutkan bahwa capaian IKM ini untuk Direktorat P3K pada tahun 2025 sebesar 98,40 (Kategori AA "Sangat Memuaskan").

Nilai capaian Direktorat P3K sebesar 98,40 pada tahun 2025 ini merupakan lima terbesar perolehan capaian Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025 setelah Setditjen PSDKP (nilai 100), Setditjen PDSPKP (nilai 99,40), Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Setjen KKP (nilai 99,33), dan Sekretariat BPPSDMKP (nilai 98,89). Salah satu UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan yaitu BPSPL Pontianak berhasil mendapatkan capaian nilai sebesar 99,40. Di lain sisi, salah satu satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berhasil mendapatkan capaian nilai sebesar 99,33.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan, capaian kinerja, kendala dan solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dari Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada tahun 2025 antara lain adanya komitmen Pimpinan untuk menertibkan administrasi kearsipan di lingkungan Direktorat P3K.

b. Kendala/Permasalahan

Pada tahun 2025, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian kearsipan lingkup Direktorat P3K.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (efisiensi penggunaan anggaran melalui penatausahaan kearsipan dari kegiatan lingkup Direktorat P3K dilakukan di kantor (Direktorat P3K); 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang arsiparis dan teknologi informasi (TI); dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K (BMN).

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Ditjen PKRL di Ruang Rapat Kawaluso GMB 3 Lantai 9 (6 Januari 2025).
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (13 Januari 2025).
3. Sosialisasi Pelatihan Kearsipan Tahun 2025 (14 Januari 2025).
4. Pemaparan Menu TTDE Lingkup PKRL (19 Januari 2025).
5. Program Kegiatan Kearsipan Tahun 2025 di R.R. Tuna Lantai 15 GMB 4 (21 Januari 2025).
6. Sosialisasi Penyusutan Arsip Dinamis melalui Usul Musnah dan Usul Serah (23 Januari 2025).
7. Sosialisasi Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2025 (24 Januari 2025).
8. Rencana Kerja Kegiatan Tim Penyelamatan dan Penataan Arsip Dinamis Lingkup Kantor Pusat KKP (19 Februari 2025).
9. Rapat Koordinasi Penyesuaian Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (21 Februari 2025).
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (10 Maret 2025).
11. Publikasi Arsip KKP pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) lingkup DJPT dan Ditjen PKRL (12 Maret 2025).
12. Tindak Lanjut Publikasi Arsip KKP pada JIKN di lingkungan DJPKRL (14 Maret 2025).
13. Asistensi Arsip Usul Musnah DJPKRL Tahun 2025 di Ruang Rapat Ndana, DJPKRL Gedung Mina Bahari III Lantai 9 (17 Maret 2025).
14. Sosialisasi Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 di Ruang Rapat Arwana GMB II Lantai 14 (16 April 2025).
15. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2025 di Ruang Rapat Tuna GMB IV Lantai 15 (30 April 2025).
16. Pemantauan Pengisian Form ASKI Pengawasan Kearsipan di Ruang Rapat Kawaluso Lt. 9 Gedung Mina Bahari 3 (28 Mei 2025).
17. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 di Ruang Rapat Arwana, GMB II Lantai 14 (4 Juni 2025).
18. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom GMB 3 Lantai 1 (10 Juni 2025).
19. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom GMB 3 Lantai 1 (11 Juni 2025).
20. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom GMB 3 Lantai 1 (12 Juni 2025).
21. Verifikasi dokumen pengawasan kearsipan internal lingkup kantor pusat tahun 2025 (18 Juni 2025).
22. Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga di Ballroom, GMB III KKP (7 Juli 2025).
23. Rapat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III dan aplikasi zoom (15 Juli 2025).
24. Verifikasi dokumen pengawasan kearsipan internal lingkup UPT Tahap I tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1 (25-27 Agustus 2025).
25. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (21 Agustus 2025).

26. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI lingkup Ditjen PK di Ruang Rapat Cakalang, Gedung Mina Bahari III Lantai 1 (3 September 2025)
27. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom (9-11 September 2025).
28. Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Data Utama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Arwana, GMB II Lantai 14 (15 September 2025).
29. Pembahasan Manual Indikator Kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal pada Direktorat dan UPT Tahun 2025 pasca pengembangan organisasi DJPKRL di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (15 September 2025).
30. Pembahasan Hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat dan UPT Tahun 2025 di Ruang Rapat Arwana (24 September 2025)
31. Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Kabinet Indonesia Maju dan Arsip Kemaritiman di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1 (30 Oktober 2025)
32. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip PT. Indoarsip Kertaskarya Buanasentosa Cikarang, Jawa Barat.
33. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Tuna, Gedung Mina Bahari IV lantai 15 (11 Desember 2025).
34. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip BPSPL Pontianak Kantor BPSPL Pontianak dan melalui Aplikasi Zoom (22 Desember 2025).

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 77. Realisasi Anggaran IKM "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		%	Sisa (Rp)
	Pagu Efektif	Realisasi		
WA.2367.EBA.962.051.CA. Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	121.286.000	121.286.000	100	0

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

Total pagu efektif sebesar Rp 121.286.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp 121.286.000, atau mencapai 100% dari anggaran yang tersedia, dan tidak ada sisa anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi periode Triwulan I Tahun 2026 antara lain: mendokumentasikan, menata, dan merapikan persuratan yang ada di Direktorat P3K.

3.2. Perkembangan Karbon Biru (*Blue Carbon*) Pada Tahun 2025

Blue carbon atau karbon biru merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. *Blue carbon* atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3–5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) sampai dengan periode tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 78. Perkembangan Kegiatan yang Berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) Pada Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Diskusi tim KI dengan IBCI terkait Karbon Biru di Ruang Direktur P4K Lantai 8 GMB 3 (21 Januari 2025)
2.	Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi dan Pentahapan Pembangunan Rendah Karbon dalam Rancangan RPJMN 2025–2029 (22 Januari 2025)
3.	Diskusi penjaringan masukan dalam rangka penyelarasan kebijakan, regulasi dan inisiatif eksisting lintas Kementerian/Lembaga terkait <i>Roadmap</i> Pelaksanaan Strategi Karbon Biru Indonesia (31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	<i>Talkshow</i> Bincang Bahari Edisi I Tahun 2025 “Pengelolaan Karbon Biru Yang Berkelanjutan Tapi Berpotensi Cuan” (6 Februari 2025)
2.	Diskusi antar Kementerian/Lembaga Tentang Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan (13 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Pra-implementasi <i>profiling</i> karbon biru di ASEAN di Harper Malioboro Yogyakarta (6–7 Maret 2025)
2.	Rencana Pertemuan tentang Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) (11 Maret 2025)
3.	Audiensi terkait Perdagangan Karbon (11 Maret 2025)
4.	Diskusi lanjutan pra-implementasi <i>profiling</i> karbon biru di ASEAN (17–18 Maret 2025)
5.	Pembahasan Lokasi Cadangan Karbon Biru (18 Maret 2025)
6.	Narasumber Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (19 Maret 2025)
7.	Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru dan Kelembagaan NBCAP (21 Maret 2025)
Bulan April 2025	
1.	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional) (11 April 2025)
2.	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 di Ruang Rapat Cakalang Lantai 1 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
3.	Rapat Koordinasi Capaian Penyusunan Dokumen Kajian Kebijakan <i>Blue Carbon</i> di Kawasan Konservasi di Ruang Rapat Selaru Lt.8 Gedung Mina Bahari III (15 April 2025)
4.	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 di Ruang Rapat Cakalang Lantai 1 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
5.	Percepatan Ekosistem Nilai Ekonomi Karbon di Ruang Sumatera Hotel Shangri-La Jakarta (16 April 2025)
6.	Koordinasi Kerjasama <i>Enabling Blue Carbon</i> di Ruang Direktorat P3K GMB 3 Lantai 8 (21 April 2025)

7.	Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun di Hotel Oria, Jakarta (23–24 April 2025)
8.	Rapat Tingkat Menteri Pelaporan Hasil Masukan Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca di Ruang Rapat Utama, Graha Mandiri, Gd. Kemenko Bidang Pangan, Lantai 3 (25 April 2025)
9.	Pembahasan Dokumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) dan Pembentukan Tim Teknis Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (30 April 2025)
10.	Rapat pembahasan pengusulan KBLI pengelolaan karbon biru sektor kelautan di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (30 April 2025)
Bulan Mei 2025	
1.	Rapat Konsolidasi Pengelolaan Karbon Biru di Ruang Rapat Direktur Konservasi Ekosistem Lantai 10, GMB III (5 Mei 2025)
2.	Pertemuan dengan YKAN tentang Blue Carbon (6 Mei 2025)
3.	Diskusi Percepatan Enabling Conditions Karbon Biru Menuju Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Ruang Rapat Kawaluso Lt 9 Gedung Mina Bahari III (7 Mei 2025)
4.	Audiensi Konservasi Indonesia terkait Karbon Biru di Ruang Rapat Selaru Lantai 8 Gedung Mina Bahari III KKP
5.	Rapat Konsolidasi Pengelolaan Karbon Biru di Ruang Rapat Direktur Konservasi Ekosistem Lantai 10, GMB III (5 Mei 2025)
6.	Rapat Koordinasi Status Data Terumbu Karang dan Padang Lamun di RR Kawaluso Lt. 9 Gedung Mina Bahari III (8 Mei 2025)
7.	Diskusi dalam rangka Penyusunan <i>Draft Roadmap Blue Carbon</i> di Ruang Rapat Kakap Putih Lantai 6, GMB IV (16 Mei 2025)
8.	Pertemuan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (20 Mei 2025)
9.	Diskusi Hasil Studi Kelayakan Proyek Karbon di KKP3K–KDPS di Kantor DKP Provinsi Kalimantan Timur (20 Mei 2025)
10.	Pertemuan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (21 Mei 2025)
11.	Diskusi Tentang Perencanaan Belitong sebagai <i>Carbon Free Island</i> melalui Aplikasi Zoom (22 Mei 2025)
12.	Pertemuan <i>Start-up Team Proyek Enabling Blue Carbon in Indonesia</i> di Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta (23 Mei 2025)
Bulan Juni 2025	
1.	Koordinasi <i>High Integrity Blue Carbon Market Project</i> di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, Gedung Minabahari III (2 Juni 2025)
2.	<i>Workshop Pengembangan Desain Capacity Building Blue Carbon Development</i> IPB <i>International Convention Center</i> , Botani Square Building, Kota Bogor (3 Juni 2025)
3.	Rapat Persiapan Penyusunan Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kelautan di Ruang Rapat Lt. II Gedung Mina Bahari II (3 Juni 2025)
4.	Diskusi Perdagangan Karbon di Ruang Rapat Direktorat Jasa Bahari Lt. 2, Gedung Mina Bahari 2 (16 Juni 2025)
5.	Rapat penyiapan rencana tata kelola karbon biru dengan menyusun peta jalan dan rencana aksi karbon biru nasional (23 Juni 2025)
Bulan Juli 2025	
1.	<i>Demo Day Program Blue Innovative Startup Acceleration</i> (BISA) di Soehanna Hall, The Energy Building Lantai 2, SCBD Lot 11A (1 Juli 2025)
2.	Workshop Integrasi <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)</i> ke Dalam Strategi Rencana Aksi Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Nasional di Aryaduta Hotel Menteng (2 Juli 2025)
3.	Koordinasi Penyusunan Peta Terumbu Karang dan Lamun Nasional di Hotel Mercure Sabang (3 Juli 2025)
4.	Pertemuan <i>Start-Up Team</i> Pembaruan <i>Roadmap Blue Carbon</i> di Novote Bogor Golf Resort and Convention Center (11 Juli 2025)
5.	Pemetaan Ekosistem Karbon Biru Berbasis SIG di Hotel Lombok Astoria, NTB (15–17 Juli 2025)

6.	Pertemuan Komite Pengarah (<i>Steering Committee</i>) Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) Wyndham Casablanca di Casablanca VII, Level B-1 (16 Juli 2025)
7.	Diskusi Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru di Morrissey Hotel Jakarta Pusat (16 Juli 2025)
8.	Diskusi Kerangka dan Mekanisme Pembiayaan Komersial dan Non Profit untuk Mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di The Hermitage Hotel Jakarta Pusat (17 Juli 2025)
9.	Validasi Publik Penyusunan Peta Terumbu Karang dan Padang Lamun Indonesia di Hotel Arya Duta Menteng Jakarta dan aplikasi zoom (22 Juli 2025)
10.	Audiensi Penjajakan Kerjasama Karbon Biru di Ruang Rapat Direktorat Jasa Bahari GMB II Lantai 2 (22 Juli 2025)
11.	Koordinasi Awal Penyusunan Status Terumbu Karang Nasional di Hotel Aone Jakarta Pusat (23 Juli 2025)
12.	Diskusi Pemanfaatan Karbon Biru Peluang Ekonomi Baru di Hotel Harper, Kota Kupang (23 Juli 2025)
13.	Pembahasan Program Carbon di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (28 Juli 2025)
14.	Penyelarasan dan Implementasi Proyek Karbon Biru di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (28 Juli 2025)
15.	Workshop Peningkatan Kapasitas Perhitungan Emisi Karbon Biru Lamun Hotel Luminor Padjadjaran, Kota Bogor (29-30 Juli 2025)
16.	Pembahasan Dokumen Mandate Agreement untuk Dukungan Teknis dan Transaction Advisory Services (TAS) dalam Pengembangan Karbon Biru melalui Aplikasi Zoom (30 Juli 2025)
Bulan Agustus 2025	
1.	Internal Workshop Penyusunan Standar Metodologi Pemantauan dan Inventarisasi Karbon Lamun di Hotel Novotel Makassar (1 Agustus 2025)
2.	Diskusi Inisiatif Kawasan <i>Carbon Free Island</i> melalui Aplikasi Zoom (1 Agustus 2025)
3.	Penyusunan Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru di Hotel Novotel Jakarta Cikini (5 Agustus 2025)
4.	Narasumber pada acara Workshop Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem Mangrove di Indonesia terkait Penguatan Ekosistem Karbon Biru untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan di Pullman Hotel Jakarta (7 Agustus 2025)
5.	Rapat Pembahasan Muatan Karbon Biru Dalam Renstra KKP 2025-2029 di Hotel Grand Savero Kota Bogor (8 Agustus 2025)
6.	Pembahasan Dokumen Mandate Agreement untuk Dukungan Teknis dan Transaction Advisory Services (TAS) dalam Pengembangan Karbon Biru melalui Aplikasi Zoom (8 Agustus 2025)
7.	Pelaksanaan Proyek Karbon Biru di Kawasan Konservasi di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (11 Agustus 2025)
8.	Pertemuan <i>Training Measurement, Reporting, and Verification (MRV)</i> Proyek Karbon dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Karbon Biru di Indonesia untuk Proyek Indonesia <i>Climate Change Trust Fund (ICCTF)</i> di Hotel The 101 Suryakencana, Bogor (14 Agustus 2025)
9.	Konsolidasi Isu Mangrove dalam Konteks <i>Enabling Blue Carbon</i> di Hotel JS Luwansa, Jakarta (15 Agustus 2025)
10.	Penyusunan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun di Mercure Sabang Jakarta (19-20 Agustus 2025)
11.	Pembahasan Dokumen Pengadaan terhadap persetujuan <i>No Objection Letter (NOL)</i> pekerjaan <i>"The Assessment of Blue Carbon as a Nature-based Solution for Climate Change Mitigation"</i> di Ruang Rapat Selaru Lantai 8 GMB 3 (19 Agustus 2025)
12.	Penyusunan SK Kelompok Kerja Terumbu Karang dan Padang Lamun Nasional di Mercure Sabang Jakarta (21 Agustus 2025)
13.	FGD Validasi Data dan Informasi Dokumen Rencana Aksi (RENAKSI) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Hotel Pullman Jakarta (22 Agustus 2025)
14.	Diskusi Pemanfaatan Karbon Biru Peluang Ekonomi Baru di Hotel Lombok Astoria (22 Agustus 2025)
15.	Narasumber Sosialisasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Hotel Lombok Astoria (22 Agustus 2025)
16.	Diskusi Peta Jalan dan Kelembagaan Karbon Biru di Hotel Aone Jakarta (25 Agustus 2025)
17.	Diskusi <i>Seagrass Monitoring Kit</i> untuk Pokmaswas melalui Aplikasi Zoom (25 Agustus 2025)

18.	Pembahasan Rencana Identifikasi Lokasi Calon Proyek Karbon Biru di Hotel Aone Jakarta (26 Agustus 2025)
19.	Workshop Penguatan Jejaring Data Karbon Biru di Hotel Harper Kupang (26 Agustus 2025)
20.	Permohonan Hadir Bersama Pada Rapat Antar Kementerian Pembahasan Revisi Perpres Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pencapaian Target Kontribusi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam hal pembangunan nasional di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan (28 Agustus 2025)
Bulan September 2025	
1.	Pembahasan Draft Pokja Penyusunan Peta Jalan Karbon Biru dan Penentuan Lokasi untuk persiapan pendanaan dari mitra di Ruang Gedung Mina Bahari II Lantai 2 (1 September 2025)
2.	Pelaporan Kegiatan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Agustus 2025 melalui Aplikasi Zoom (2 September 2025)
3.	<i>Kick-off Meeting</i> Tim Pelaksana Komite Teknis Program <i>Low Carbon Development Indonesia (LCDI)</i> di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan dan Aplikasi Zoom (8 September 2025)
4.	Rapat Koordinasi Pengembangan Proyek Karbon Biru di Mercure Cikini, Jakarta (9 September 2025)
5.	Permohonan Hadir Bersama Pada Kegiatan Konsinyering Pembahasan Revisi Perpres Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (9 September 2025)
6.	Penyusunan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun di Mercure Cikini, Jakarta (10-11 September 2025)
7.	Pertemuan Pembahasan Dukungan GGGI dan Roadmap Ekosistem Karbon Biru di THE 101 Bogor Suryakencana dan Aplikasi Zoom (12 September 2025)
8.	Pertemuan Lanjutan Panitia Antar Kementerian (PAK) Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional di Hotel Grand Melia Jakarta (16 September 2025)
9.	Diskusikan terkait tata kelola restorasi mangrove dan karbon biru melalui Aplikasi Zoom (16 September 2025)
10.	Pertemuan Lanjutan Panitia Antar Kementerian (PAK) Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional di Hotel Gran Melia Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (16-17 September 2025)
11.	Penyusunan Draft Awal <i>Roadmap Blue Carbon</i> di Mercure Hotel Cikini (22 September 2025)
12.	Pembahasan Proses Perizinan dan Pengembangan Karbon Biru di Ruang Rapat Terubuk, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 (25 September 2025)
13.	Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pengembangan Proyek Karbon Biru di Hotel Aryaduta (26 September 2025)
14.	Pembahasan Dokumen <i>Mandate Agreement</i> untuk Dukungan Teknis dan <i>Transaction Advisory Services (TAS)</i> dalam Pengembangan Karbon Biru melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025)
15.	Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> Penataan Kawasan Karbon Biru di Provinsi Jawa Tengah di RR. Segoro Waseso, Gedung Mina Bahari II, Lt. 15, KKP (30 September 2025)
Bulan Oktober 2025	
1.	Pembahasan Panduan Identifikasi Lokasi Potensial untuk Proyek Karbon Biru (3 Oktober 2025)
2.	Workshop on Carbon Trading Mechanism in Indonesian Agriculture di Hotel Tentrem Semarang (7 Oktober 2025)
3.	Pelatihan teknis dasar-dasar kredit karbon biru dan penerapannya di Tingkat lokal, workshop metodologi karbon (perhitungan stok karbon, MRV dan standar internasional yang relevan), dan Diskusi tematik mengenai pengalaman implementasi karbon biru di Indonesia dan internasional di Ruang Rapat Kerapu Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (7-9 Oktober 2025)
4.	Pembahasan Dokumen <i>Mandate Agreement</i> untuk Dukungan Teknis dan <i>Transaction Advisory Services (TAS)</i> dalam Pengembangan Karbon Biru (8 Oktober 2025)

5.	Pertemuan Start Up Team Enabling Blue Carbon (EBC) – Penyempurnaan Draft Roadmap Blue Carbon Ecosystem dan Persiapan Partisipasi COP 30 UNFCCC di Swiss Bellin Bogor (10 Oktober 2025)
6.	Rapat Koordinasi Pembahasan Blue Carbon Option Policy Brief M4CR di Hotel Grand Hyatt Jakarta (14 Oktober 2025)
7.	Permohonan Hadir Bersama pada Pertemuan Dialog Multi Pihak tentang Mekanisme Pembagian Manfaat Karbon (Benefit Sharing Mechanism) di Indonesia melalui aplikasi zoom (16 Oktober 2025)
8.	Forum Dialog Multipihak Nasional-Daerah: Akselerasi Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon 2025-2029 di Hotel Westin, Jakarta Selatan dan Aplikasi Zoom (17 Oktober 2025)
9.	Pertemuan Konsultasi Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan untuk Mitigasi Perubahan Iklim (Karbon Biru) (21 Oktober 2025)
10.	Pertemuan Konsultasi Kawasan Konservasi Perairan untuk Mitigasi Perubahan Iklim (Karbon Biru) di Hotel Ibis Style Pajajaran Kota Bogor dan aplikasi zoom (21 Oktober 2025)
11.	Finalisasi Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun di Hotel Santika Bogor dan aplikasi zoom (22 Oktober 2025)
12.	Pembahasan Peta Jalan Karbon Biru di Hotel Permata Bogor (22 Oktober 2025)
13.	Finalisasi Concept Note Kajian Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor KP di Ruang Rapat Selaru Lantai 8 GMB III KKP (22 Oktober 2025)
14.	Diskusi dan Permintaan Penawaran Peralatan Lapangan Pengumpulan Data Karbon Biru di Ruang Rapat Selaru Lantai 8, GMB III KKP (22 Oktober 2025)
15.	Rapat Perkembangan Tender Paket Pekerjaan <i>The Assessment of Blue Carbon as a Nature-Based Solution for Climate Change Mitigation</i> di Aryaduta Hotel Menteng (27 Oktober 2025)
16.	Simposium Lamun Indonesia 2025 dengan Tema “Mempercepat Ilmu Pengetahuan Lamun melalui Kolaborasi Nasional untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lamun yang Berkelanjutan” di Mercure Hotel Sanur Bali (28-30 Oktober 2025)
17.	Rapat Penyusunan Modul Pelatihan Informasi Geospasial Habitat Bentik Laut Dangkal dan Informasi Geospasial Tematik Abrasi dan Akresi di Luminor Hotel Padjadjaran Bogor (29-31 Oktober 2025)
Bulan November 2025	
1.	Pembahasan Draft Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru di Ruang Rapat Direktorat Jasa Bahari, Lt. 2, GMB II (3 November 2025)
2.	Lokakarya Nasional Tahun 2025: “Evaluasi Capaian Indikator Lingkup Lingkungan Hidup dalam RPJMN 2020-2024 (Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim serta Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati)” di Hotel Crowne Plaza Kota Bandung (4-6 November 2025)
3.	Rapat Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Proyek Karbon Bakau Berbasis Masyarakat “Ibu Bakau” di Ruang Rapat Segoro Waseso, Lt. 15 GMB 2 dan Aplikasi Zoom (6 November 2025)
4.	Rapat Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pelatihan Informasi Geospasial Abrasi dan Akresi di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center (7 November 2025)
5.	Sinkronisasi Proyek Karbon Biru serta Neraca Sumber Daya Laut di Ashley Hotel Tanah Abang (10 November 2025)
6.	Rapat Pembahasan Jenis Data Informasi yang Diinteroperabilaskan dalam Dashboard Pemantauan Ekosistem Karbon Biru Nasional – Kemenko Pangan Luminor Hotel Padjadjaran Bogor (17 November 2025)
7.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Karbon Biru di The Phoenix Hotel Yogyakarta (18-21 November 2025)
8.	Audiensi Penguatan Tata Kelola NDC dan Implementasi di Sektor Karbon Biru (19 November 2025)
9.	Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kelautan di Oria Hotel Jakarta (24 November 2025)
10.	Third Blue Carbon Community of Practice Green Office 9 Building, Tangerang (26 November 2025)
11.	Narasumber terkait Ocean climate policy Indonesia pada kegiatan Lokakarya Towards Carbon-Zero Islands: Integrating Environmental Mapping for Climate-Resilient Island Futures di Lune Ballroom, Movenpick Hotel, Central Jakarta (27 November 2025)
12.	Lokakarya Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) dalam Pengembangan Program Karbon Biru Mangrove pada Proyek M4CR dan Dialog Interaktif dengan Kelompok

	Masyarakat Desa Mandiri Peduli Mangrove (DPMPM) di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo (27 November 2025)
13.	Narasumber terkait Peran Karbon Biru dalam Penguatan KKMN di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo (27 November 2025)
Bulan Desember 2025	
1.	<i>Workshop</i> Perhitungan Stok dan Emisi Karbon Lamun <i>Enabling Blue Carbon in Indonesia (EBC)</i> di Mercure Sabang, Jakarta Pusat (2–3 Desember 2025)
2.	Diseminasi Peta Nasional Karang dan Padang Lamun Indonesia 2025 di Hotel Discovery Ancol (4 Desember 2025)
3.	Konferensi pers tentang Program Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dalam Mendukung Pelaksanaan Ekonomi Biru Sektor Kelautan dan Perikanan di Command Center Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari I, Lt. GF (4 Desember 2025)
4.	Narasumber terkait Pengenalan Karbon Biru pada kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Metro Park View Hotel (5 Desember 2025)
5.	Rapat Koordinasi Progres Pengembangan Blue Economy melalui Aplikasi Zoom (9 Desember 2025)
6.	Pembahasan Video dan Promosi Pengelolaan Karbon Biru di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (11 Desember 2025)
7.	FGD Pemaparan Rekomendasi Kebijakan Potensi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP dan PAD) Ekosistem Karbon Biru, Serta Peta Jalan Peningkatan Nilai Karbon Biru di Kawasan Konservasi Perairan di Morrissey Hotel Jakarta (11 Desember 2025)
8.	Pemaparan Hasil Akhir pre-feasibility study Karbon Biru Jawa Tengah: Bagian Rekomendasi Metodologi dan Potensi Kredit Karbon di Ruang Rapat Segoro Waseso, Lt. 15, Gedung Mina Bahari 2 (15 Desember 2025)
9.	Rapat Koordinasi Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods (Blue-Coast) di Sasono Mulyo 3 Ballroom Hotel Le Meridien dan Aplikasi Zoom (18 Desember 2025)
10.	Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Manual Pengukuran Karbon Biru pada Ekosistem Padang Lamun Hotel Aryaduta Menteng (18 Desember 2025)
11.	Pelatihan Teknis Pengukuran Manual Blue Carbon Seagrass di Swiss-bell Hotel Makassar dan Aplikasi Zoom (19 Desember 2025)
12.	Pembahasan Finalisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Manual Pengukuran Karbon Biru pada Ekosistem Padang Lamun di Hotel Luminor Bogor (30 Desember 2025)

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2025)

Perkembangan karbon biru pada Direktorat P3K tahun 2025 adalah:

1. Telah tersusunnya kajian final penyusunan Kepmen Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan dan di targetkan kepmen dapat terbit pada semester 1 tahun anggaran 2026
2. Penilaian karbon biru di 20 lokasi Lautra saat ini telah memasuki tahap negosiasi dengan perusahaan dan di targetkan pada bulan Februari 2026 akan dilakukan penandatanganan kontrak bersama pemenang tender
3. Pengembangan *database* karbon biru saat ini dalam progres dalam penyediaan peralatan pengumpulan data karbon biru di kawasan Lokasi Lautra.

3.3. Perkembangan *Ocean For Prosperity* (LAUTRA) Pada Tahun 2025

Bagian ini memberikan sekilas informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan “Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)”. LAUTRA akan membantu meningkatkan ketahanan pesisir dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan perikanan prioritas serta meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan konservasi perairan terpilih di Indonesia. Melalui LAUTRA, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia termasuk terumbu karang dan ekosistem wilayah pesisir.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan LAUTRA pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 79. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan LAUTRA Pada Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Rapat <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (13 Januari 2025)
2.	Tindak Lanjut Rapat Pimpinan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA Ruang Rapat Ndana Lantai 9 Gedung Mina Bahari III (16 Januari 2025)
3.	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (19 Januari 2025)
4.	Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (22 Januari 2025)
5.	Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (23–24, 30–31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	Rapat finalisasi materi Lautra (khususnya terkait OMS & dana bergulir) (5 Februari 2025)
2.	Rapat Pembahasan Hasil Audit Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (6 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Rapat Pembahasan Mekanisme Pendanaan Bergulir <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (4 Maret 2025)
2.	Rapat Pembahasan <i>Ocean Monitoring System (OMS)</i> Pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (4, 19–20 Maret 2025)
3.	Rapat pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (6 Maret 2025)
4.	Rapat Restrukturisasi Pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (10 Maret 2025)
Bulan April 2025	
1.	Pembahasan paparan terkait LAUTRA di Ruang meeting DIRJEN PKRL – GMB III lantai 11 (14 April 2025)
2.	Pendampingan kegiatan MKP terkait Pembahasan terkait LAUTRA (14 April 2025)
3.	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit Pertanggungjawaban LAUTRA TA 2024 pada Satker DJPKRL di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
4.	Rapat Pembahasan Team Garam dan LAUTRA terkait Pembentukan SK Team Garam dan Team Lautra di Ruang meeting DIRJEN PKRL – GMB III lantai 11 (15 April 2025)
5.	Rapat Pembahasan LAUTRA Komponen 2 di Ruang Rapat (RR) Ditjen Pengelolaan Kelautan Lt. 11 GMB 3 (21 April 2025)
6.	Rapat Pembahasan LAUTRA Komponen 2 di Ruang Rapat (RR) Ditjen Pengelolaan Kelautan Lt. 11 GMB 3 (22 April 2025)
7.	Pertemuan Persiapan Kegiatan OMS <i>Oceans for Prosperity Project</i> -LAUTRA di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (28 April 2025)
8.	Rapat Pembahasan Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 Program Infrastruktur Terumbu Karang Lautan Sejahtera (Insan Terang-Lautra): Perluasan peluang ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi di Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Lt.2, Gedung Mina Bahari II dan Aplikasi Zoom (29 April 2025)

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Mei 2025	
1.	Pertemuan Penyusunan Naskah Option Paper dan Explanatory Note Komponen 1.1 OMS Proyek Oceans for Prosperity – Lautra melalui Aplikasi Zoom (2 Mei 2025)
2.	Pembahasan Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 Program Infrastruktur Terumbu Karang Lautan Sejahtera (Insan Terang-Lautra): Perluasan Peluang Ekonomi di Dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi di Ruang Rapat Lt. II Gedung Mina Bahari II (8 Mei 2025)
3.	Rapat Koordinasi Proyek LAUTRA Tahun Anggaran 2025 pasca ditandatanganinya Risalah Persetujuan Pelaksanaan Proyek di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (9 Mei 2025)
4.	Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pelaksanaan Proyek Oceans for Prosperity – Lautra Tahun Anggaran 2025 di Aviary Hotel Bintaro dan Aplikasi Zoom (16 Mei 2025)
5.	Permohonan Pemaparan Kronologis Pinjaman LAUTRA (9498-ID) di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 GMB 3 (19 Mei 2025)
6.	<i>Request for Meeting on LAUTRA – KKP</i> (21 Mei 2025)
7.	Finalisasi Rancangan Pengelolaan Anggaran Proyek LAUTRA Pasca Persetujuan di Grand Mercure Harmoni (21-22 Mei 2025)
8.	Pertemuan Persiapan <i>Implementation Support Mission</i> Proyek LAUTRA di Grand Mercure Harmoni, Jakarta (27-28 Mei 2025)
Bulan Juni 2025	
1.	Pembahasan Restrukturisasi Proyek LAUTRA di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (2 Juni 2025)
2.	Pertemuan <i>Implementation Support Mission</i> Proyek LAUTRA di Thamrin Room Lantai 3 Mandarin Oriental Hotel (3-4 Juni 2025)
3.	Koordinasi Pengamanan Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Safeguard</i>) <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9 dan Aplikasi Zoom (5 Juni 2025)
4.	Pembahasan usulan Program Prioritas Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) Ruang Rapat Lantai 11, GMB III (5 Juni 2025)
5.	Pembahasan <i>Term of Reference</i> dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa LAUTRA
6.	Rapat Persiapan Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Lautra Tahun 2026 di Hotel Aviary Bintaro (25 Juni 2025)
7.	Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Lautra 2026 di Hotel Aviary Bintaro (25-26 Juni 2025)
8.	Rapat dengan PPK dan penanggung jawab tiap komponen LAUTRA di Hotel Aviary Bintaro (25 Juni 2025)
9.	Sosialisasi Petunjuk Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Oceans for Prosperity Project – LAUTRA di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025)
Bulan Juli 2025	
1.	Penyusunan dan Reviu Dokumen Anggaran <i>Ocean for Prosperity Project</i> (LAUTRA) Pagu Indikatif Tahun 2026 di Hotel Aone Jakarta (16 Juli 2025)
2.	Potensi Dukungan untuk Program LAUTRA di Aloft Hotel Jakarta (16 Juli 2025)
3.	Rapat Koordinasi Rencana Kerjasama Riset Komunikasi, Penyusunan Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Media untuk Program LAUTRA di Ruang Rapat Perpustakaan GMB IV Lantai 2 (17 Juli 2025)
4.	Pembahasan <i>Progress Ocean for Prosperity Project</i> – LAUTRA Komponen 2 di Hotel Platinum Jimbaran (18 Juli 2025)
5.	Pertemuan Teknis Restrukturisasi PHLN LAUTRA di Ruang Rapat Padaido GMB III, Lantai 11 (22 Juli 2025)
6.	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 LAUTRA di Hotel Herper Kota Kupang (22-23 Juli 2025)
7.	Penyelarasan dan Percepatan Proyek LAUTRA Komponen 1 Infrastruktur dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di Hotel Herper Kota Kupang (22-23 Juli 2025)
8.	<i>Steering Committee Meeting</i> Proyek <i>Oceans for Prosperity</i> – LAUTRA di Ruang Rapat SS 1-2, Lt 2 Gedung 2A Bappenas (25 Juli 2025)

No.	Uraian Kegiatan
9.	Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Proyek LAUTRA Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (25 Juli 2025)
10.	Rapat Pimpinan Progres Pelaksanaan Proyek <i>Oceans For Prosperity</i> – Lautra Tahun Anggaran 2025 di HR Building Lantai G2, Jakarta (29 Juli 2025)
11.	Workshop Pengadaan Barang/Jasa Proyek LAUTRA di Kantor Proyek LAUTRA, Menteng, Jakarta Pusat dan Aplikasi Zoom
Bulan Agustus 2025	
1.	Tindak Lanjut Penyiapan Dokumen Lelang LAUTRA di HR Building Lantai 1, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta (20 Agustus 2025)
2.	Audiensi Tindak Lanjut Rencana Kerjasama Riset Komunikasi Program Oceans for Prosperity Project (LAUTRA) di Ruang Rapat GMB II lantai 17 dan Aplikasi Zoom (25 Agustus 2025)
3.	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Nota Penjelasan Restrukturisasi Proyek LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (26 Agustus 2025)
4.	Workshop Ocean Monitoring System (OMS) LAUTRA Kantor LAUTRA di Gedung HR, Menteng, Kota Jakarta Pusat (27 Agustus 2025)
5.	Finalisasi Nota Penjelasan Restrukturisasi Proyek LAUTRA di Hotel Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD (28 Agustus 2025)
6.	Audiensi Lautra dengan Bank Dunia melalui Aplikasi Zoom (29 Agustus 2025)
7.	Pembahasan Perkembangan Proyek LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (29 Agustus 2025)
Bulan September 2025	
1.	Reviu RKAKL LAUTRA TA 2025 di Kantor LAUTRA, Lantai G1, Jakarta Pusat dan Aplikasi Zoom (8 September 2025)
2.	Rapat Evaluasi Progress LAUTRA melalui zoom meeting (8 September 2025)
3.	Implementasi Proyek LAUTRA dengan Bank Dunia Kayu di Room Lantai 1, Swiss-Belhotel Airport Jakarta (10 September 2025)
4.	Pertemuan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan LAUTRA TA. 2025 Episode Hotel Gading Serpong, Tangerang (17 September 2025)
5.	Pertemuan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan LAUTRA TA. 2025 Episode Hotel Gading Serpong (18 September 2025)
6.	Pertemuan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan LAUTRA TA. 2025 Episode Hotel Gading Serpong (19 September 2025)
7.	OMS Benchmarking Workshop – LAUTRA di Kantor World Bank Indonesia, IDX Tower 2 Lantai 12 dan Aplikasi Zoom (23 September 2025)
8.	Monitoring dan Evaluasi Proyek LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025)
9.	Pembahasan Konsolidasi Procurement PHLN LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025)
10.	Diskusi dan Berbagi Informasi Kegiatan LAUTRA (Lautan Sejahtera) di Ruang Rapat Selaru Lt. 8 GMB 3 (29 September 2025)
Bulan Oktober 2025	
1.	Penyusunan <i>Annual Work Plan</i> LAUTRA T.A. 2026 di Aviary Hotel Bintaro (2-3 Oktober 2025)
2.	Rapat Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 Program LAUTRA Perluasan Peluang Ekonomi di Dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi melalui aplikasi zoom (7 Oktober 2025)
3.	Koordinasi <i>Progress</i> Pengadaan Barang/Jasa LAUTRA di HR Building Lantai G1 Jakarta dan aplikasi zoom (7 Oktober 2025)
4.	<i>Invitation to LAUTRA Mid-Term Review (MTR)</i> melalui Aplikasi Zoom (9 Oktober 2025)
5.	<i>Workshop Mid-Term Review (MTR)</i> LAUTRA di Kantor World Bank Indonesia IDX Tower 2 Lantai 12 dan aplikasi zoom (9 Oktober 2025)
6.	Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 Program LAUTRA Perluasan Peluang Ekonomi di Dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi melalui aplikasi zoom (9 Oktober 2025)
7.	Diskusi Bantuan Pemerintah yang Bersumber dari Anggaran PHLN Ocean for Prosperity Project – LAUTRA melalui aplikasi zoom (20 Oktober 2025)

No.	Uraian Kegiatan
8.	Monitoring dan Evaluasi Proyek LAUTRA (24 Oktober 2025)
9.	Finalisasi Draft Laporan <i>Mid-Term Review</i> Proyek LAUTRA di Bigland Hotel Bogor (28 Oktober 2025)
Bulan November 2025	
1.	Ekspose Hasil Pengawasan Proyek PHLN <i>Oceans for Prosperity</i> - LAUTRA Tahun 2025 di Ruang Rapat Berakhlak, Lantai 3 Gedung Mina Bahari III (5 November 2025)
2.	Bimbingan Teknis Pengarusutamaan <i>Gender Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA Tahun 2025 di Swiss-Bell Hotel Makassar, Sulawesi Selatan (5-7 November 2025)
3.	Monitoring dan Evaluasi LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (7 November 2025)
4.	Pembahasan SOP Tata Kelola Keuangan <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA di Ruang Rapat Kawaluso, Lantai 9, GMB III (12 November 2025)
5.	Pemantauan Manajemen Risiko <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA TA.2025 di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9 GMB III (13 November 2025)
6.	Monitoring dan Evaluasi Proyek LAUTRA melalui Aplikasi Zoom (14 November 2025)
7.	Pendampingan Audiensi LAUTRA dengan Bank Dunia di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari III, Lantai 11 (17 November 2025)
8.	Pembahasan Annual Work Plan (AWP) LAUTRA 2026 di Lombok Astoria Hotel (19 November 2025)
9.	Penelaahan Penyusunan Manajemen Risiko TA.2025 Pasca Revisi dan Penyusunan Manajemen Risiko TA.2026 <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA di Swiss-Belhotel Bogor (25-26 November 2025)
10.	Workshop Pengelolaan Media Sosial dan Penulisan untuk mendukung Program LAUTRA di Hotel Mercure Sabang (26-27 November 2025)
Bulan Desember 2025	
1.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA TA 2025 di Ruang Rapat Mangkai Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (2 Desember 2025)
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan <i>Blue Coast</i> dengan Lautra Melalui Aplikasi Zoom (3 Desember 2025)
3.	Bimbingan Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial (Environmental & Social Safeguard) <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA Tahun 2025 di Aston Kupang Hotel & Convention Center (16 Desember 2025)
4.	Pembahasan Pre-MTR Wrap-Up Proyek LAUTRA di Fraser Residence Menteng Jakarta (15 Desember 2025)
5.	Bimbingan Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial (Environmental & Social Safeguard) <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA Tahun 2025 di Aston Kupang Hotel & Convention Center (17 Desember 2025)
6.	Pembahasan Pre-MTR Wrap-Up Proyek LAUTRA di Fraser Residence Menteng Jakarta (17 Desember 2025)
7.	Rekonsiliasi Data Keuangan dan Pemantauan Penyelesaian Data Keuangan, Dokumen Dukung, Perpajakan Satker Pusat Kegiatan <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA di Hotel Horison Ultima Bekasi (18-19 Desember 2025)
8.	Pemantauan Lanjutan atas Penyesuaian MR Pasca Revisi <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA TA 2025 di Ruang Rapat Wisma Gracilaria Pulo Mas Rawamangun Jakarta Timur dan Aplikasi Zoom (22 Desember 2025)
9.	Pemantauan Lanjutan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan <i>Oceans for Prosperity Project</i> - LAUTRA TA 2025 di Ruang Rapat Wisma Gracilaria Pulo Mas Rawamangun Jakarta Timur dan Aplikasi Zoom (23-24 Desember 2025)

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tahun 2025)

Perkembangan kegiatan LAUTRA Direktorat P3K hingga akhir Desember 2025 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan pengumpulan basis data karbon biru
2. Pelatihan informasi geospasial tematik abrasi dan akresi pada tanggal 15-19 November 2025

3. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem karbon biru, terutama rehabilitasi mangrove dan lamun telah dilaksanakan di 6 lokasi yaitu, mangrove di Kabupaten Rote, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pangkep (lamun).

3.4. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Dukungan Penyiapan Lahan Garam Tahun 2025

Garam merupakan salah satu bahan sederhana yang lazim ditemukan di dapur rumah tangga, sesungguhnya merupakan komoditas strategis bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia.

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan intensitas matahari tinggi sepanjang tahun, seharusnya memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung garam dunia. Namun ironi terjadi, selama bertahun-tahun, negeri maritim ini justru mengimpor ratusan ribu ton garam setiap tahunnya terutama bagi sektor industri. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menargetkan swasembada garam.

Pada tahun 2024, produksi garam nasional mencapai sekitar 2,04 juta ton garam, melampaui target 2 juta ton. Sementara itu, produksi garam konsumsi pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 2,25 juta ton, dengan stok cadangan 836 ribu ton. Jumlah ini diperkirakan mampu memenuhi sekitar 63% dari total kebutuhan nasional.

Kebutuhan nasional garam diperkirakan mencapai 4,9 hingga 5 juta ton, dengan lebih dari 3 juta ton digunakan oleh sektor industri. Industri pangan, farmasi, dan *Chlor Alkali Plant (CAP)* merupakan pengguna utama garam berkualitas tinggi. Garam yang diproduksi dalam negeri harus memenuhi standar SNI 8207:2016, yakni memiliki kadar *Natrium Klorida (NaCl)* di atas 97% dan kadar air maksimal 0,5 persen. Saat ini, kualitas dan kuantitas produksi domestik masih terbatas, sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri dan menyebabkan ketergantungan terhadap impor.

Ketimpangan antara kapasitas produksi nasional dan kebutuhan industri menjadi faktor utama yang mendorong ketergantungan Indonesia terhadap impor garam. Meskipun produksi garam nasional menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, kesenjangan (*gap*) antara pasokan dan permintaan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan target swasembada garam pada tahun 2027 melalui sejumlah kebijakan dan strategi penguatan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menekankan pentingnya transformasi industri garam sebagai penopang ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional serta upaya pemerintah mengurangi ketergantungan negara pada garam impor, dimana Indonesia menargetkan swasembada garam pada tahun 2027 (bunyi Pasal 2 Ayat 1 Perpres 17/2025). Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tersebut sekaligus mencabut Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang kebijakan serupa. Swasembada garam sendiri berarti kemampuan suatu negara memenuhi seluruh kebutuhan garam dari produksi dalam negeri. Swasembada garam bukan sekadar ambisi retorik, tetapi menjadi keharusan untuk memperkuat kedaulatan pangan, industri, dan ekonomi nasional.

Swasembada garam akan dapat dicapai melalui keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam memenuhi kebutuhan garam nasional yang terus meningkat. Dalam rangka pencapaian target swasembada garam tersebut, maka perlu adanya strategi optimasi usaha pergaraman dari hulu ke hilir mulai dari tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran. Untuk mewujudkan pengelolaan pergaraman dari hulu ke hilir dan terbatasnya waktu untuk mencapai target swasembada garam pada tahun 2027 perlu dibangun suatu kawasan industri sebagai sentra garam nasional. KKP akan melaksanakan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao sebagai *modelling* ekstensifikasi lahan garam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono melakukan *kick-off* pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Pasca kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono dalam rangka *Kick Off* Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao yang mulai dikerjakan tahun ini, Pemkab Rote Ndao menggelar Sosialisasi

Percepatan Penyiapan Lahan K-SIGN yang digelar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 di Desa Daiama Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan ini dalam rangka menyamakan persepsi dalam proses penyiapan lahan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025 bersama masyarakat pemilik lahan.

Pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025–2026, yang ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2025.

Kawasan yang ditetapkan mencakup luas lahan sebesar 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan. Proses penyiapan lahan akan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan.

Berdasarkan target lahan dari pemerintah pusat, lahan yang dibutuhkan sekitar 13.000 hektare lebih yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dikerjakan 1.000 hektare lebih, tahap kedua 9.000 hektare, dan tahap ketiga 4.000 hektare lebih.

Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam nasional. Rote Ndao dipilih sebagai kawasan sentra industri garam nasional karena lokasi tersebut memiliki iklim yang mendukung untuk produksi garam dimana jumlah bulan panasnya bisa mencapai 6–8 bulan per tahun, selain itu, lokasi tersebut mempunyai potensi geografis yang sesuai karena memiliki topografi relatif datar, tanah yang tidak porus dan tersedia dalam hamparan yang luas. Rote Ndao juga memiliki kualitas air yang baik sebagai sumber air baku garam. Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2025 meliputi:

- a. Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao (pembuatan kolam lahan tambak garam, pembuatan meja garam/meja kristalisasi, saluran air tua, pekerjaan instalasi pompa dan utilitas, pekerjaan pemasangan pelapis geomembran dan struktur petak, jalan inspeksi lime stone), jalan sekunder aspal mix dan pekerjaan jalan utama aspal).
- b. Pembangunan Bangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao (kantor pengelola, dan gudang garam).

Program K-SIGN diperkirakan menyerap sekitar 13.000 hingga 26.000 pekerja langsung dan 15.000 hingga 20.000 pekerja tidak langsung, dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta menghidupkan usaha turunan lainnya. Program K-SIGN ini akan berdampak kepada pembukaan lowongan pekerjaan untuk para pekerja baik pekerja langsung maupun pekerja tidak langsung seperti pada sektor logistik, perdagangan, dan jasa.

Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkaitan dengan pergaraman pada tahun 2025 adalah dukungan penyiapan lahan. Besaran anggaran untuk dukungan penyiapan lahan garam pada tahun 2025 sebesar Rp 6.024.750.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar Rp 5.426.656.824 atau 90,07% dari besaran anggaran, sedangkan sisa anggarannya sebesar Rp 598.093.176. Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pergaraman pada tahun 2025 dijelaskan di bawah ini.

Kegiatan yang mendukung Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao antara lain:

1. Rapat Koordinasi Hilirisasi Komoditas Garam di Ruang Rapat Kawaluso, GMB III Lantai 9 (24 April 2025);
2. Rapat Pembahasan Tim Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (15 Mei 2025);
3. Rapat Pembahasan Tim Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (19 Mei 2025);
4. Rapat Pembahasan Dukungan Pemda dalam Program Modeling Tambak Garam di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Mina Bahari 2 dan Aplikasi Zoom (23 Mei 2025);

5. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Modeling Produksi Garam Tahun 2025 – 2026 di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Lt.2, Gedung Mina Bahari II (27 Mei 2025);
6. Konferensi Pers Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Media Center KKP, GMB 4 Lt.1 (11 Juni 2025);
7. Rapat Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Mina Bahari II (12 Juni 2025);
8. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Garam di Ruang Rapat DJPK, GMB III Lantai 11 (15 Juni 2025);
9. Rapat Konfirmasi Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) KKP Tahun 2025 dalam rangka Swasembada Pangan dan Garam Nasional (23 Juni 2025);
10. Rakor Tim Garam di Ruang Rapat Padaido GMB III lantai 11 (26 Juni 2025);
11. Perbaikan Usulan ABT Garam ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (3 Juli 2025);
12. Klarifikasi pengusulan Pulau-pulau Kecil dan Gugus Pulau-pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam RPP RTRWN dan Klarifikasi peta potensi lahan garam dan strategi spasial hilirisasi Komoditas Garam di Ruang Rapat Staf Khusus Lantai 6 GMB I (7 Juli 2025);
13. Pembahasan ABT Garam Tahun 2025 di Ruang Rapat Itjen Lantai 3 GMB III (9 Juli 2025);
14. Rapat Evaluasi Progress Swasembada Garam di Ruang Rapat Padaido, GMB III Lt. 11 (10 Juli 2025);
15. Pembahasan Pelaksanaan Program Kegiatan Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido (DJPK) GMB 3 Lantai 11 (14 Juli 2025);
16. Rapat Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Produksi Garam mealui Aplikasi Zoom (20 Juli 2025);
17. Pembahasan Swasembada Garam dengan OPD di Hotel Harper, Kota Kupang (22 Juli 2025);
18. Pemaparan dan Diskusi terkait Pembangunan Pergaraman Nasional Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (28 Juli 2025);
19. Sosialisasi Progress Program Swasembada Garam di Media Gathering KKP (1 Agustus 2025);
20. Rapat Pembahasan Penyusunan Video Project History Pembangunan Swasembada Garam di Ruang Rapat Terubuk Lantai 10, GMB III (14-15 Agustus 2025);
21. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao di Ruang Rapat Padaido GMB III Lt. 11 (20 Agustus 2025);
22. Pembahasan Persiapan paparan WamenKP; Progress Garam, Progress RENSTRA & Perencanaan 2026 di Ruang Kerja Dirjen PK GMB III Lt. 11 (21 Agustus 2025);
23. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk Mendukung Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari III lantai 11 (24-25 Agustus 2025);
24. Penandatanganan BAST Konsolidasi Penyiapan Lahan Garam di Ruang Rapat Padaido Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (27 Agustus 2025);
25. Pembahasan FS Swasembada Garam dan Evaluasi Kegiatan Swasembada Garam melalui Aplikasi Zoom (29 Agustus 2025);
26. Rapat Konsolidasi Penyiapan Lahan Garam di Kabupaten Rote Ndao bertempat di Aviary Hotel Bintaro (31 Agustus 2025); Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman di Ruang Rapat Branding, Gedung Mina Bahari III Lt 15 (2 September 2025);
27. Rapat Koordinasi Usulan PSN Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Ruang Rapat Padaido GMB III lantai 11 (2 September 2025);
28. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pergaraman di Aviary Hotel Bintaro dan Aplikasi Zoom (2 September 2025);
29. Pembahasan Panen Raya Garam bersama Dirut PT. Garam melalui Zoom Meeting (2 September 2025);
30. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pergaraman di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 dan Aplikasi Zoom (3 September 2025);
31. Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Pembangunan K-SIGN Kab. Rote Ndao sesuai ketentuan yang berlaku di Ruang Kerja Inspektur I (4 September 2025)
32. Rapat Penyiapan Lahan KSIGN di Kabupaten Rote Ndao di Balai KIPM Denpasar (11 September 2025);

33. *Entry Meeting* Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Kegiatan Kawasan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang, Peningkatan Infrastruktur untuk Budidaya Udang (IISAP), serta Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Tahun 2025 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali (12 September 2025);
34. Sosialisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pembayaran LS Kontraktual dan Non Kontraktual ABT Garam TA.2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat (16 September 2025);
35. Rekonsiliasi Lanjutan Data Keuangan dan Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Anggaran ABT Garam 2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat (17 September 2025);
36. Penandatanganan Kontrak AMDAL Garam Rote Ndao di Ruang Direktur P3K Lantai 8 GMB 3 (18 September 2025);
37. Persiapan Pengadaan Lahan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Bupati Rote Ndao (19 September 2025);
38. Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Swasembada Garam Nasional dan Ketersediaan Hasil Perikanan di Dalam Negeri di Maluku Room, Aryaduta Hotel Menteng (23 September 2025);
39. Pembahasan Perencanaan untuk Perizinan K-SIGN di Aone Hotel Jakarta (24 September 2025);
40. Diskusi atas Program Pergaraman Nasional pada Ditjen Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9, GMB III (24 September 2025);
41. Audiensi Pengadaan Tanah dan/atau Konsolidasi Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Modeling Ekstensifikasi dan Intensifikasi Tambak Garam di Ruang Rapat Lantai 2 Direktur Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Belakang Sarinah) (24 September 2025);
42. Rapat Rancangan Dokumen Perizinan K-SIGN melalui Aplikasi Zoom (26 September 2025);
43. Ekspose Proses Pengadaan Lahan K-SIGN oleh Kepala Kanwil BPN/ATR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ruang Rapat Padaido Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (30 September 2025);
44. Pembahasan Percepatan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Itjen Lt.2 GMB III (30 September 2025);
45. Penyusunan Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembangunan Prasarana Usaha Pergaraman dan Pengembangan Sentra Produksi Garam (Ekstensifikasi dan Intensifikasi) T.A. 2025 (1 Oktober 2025);
46. FGD dengan tema "Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Garam Nasional" melalui aplikasi zoom (2 Oktober 2025);
47. Paparan Hasil Pekerjaan Pemetaan Lahan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao Metode Lidar di Ruang Rapat Direktur P3K (Lantai 8 GMB III KKP) (2 Oktober 2025);
48. Ekspose Hasil Pemetaan Lidar Rote Ndao di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 (6 Oktober 2025);
49. Audiensi dan Konsultasi PT Pupuk Kaltim terkait Garam Industri dalam Rangka Persiapan Pabrik Soda Ash (6 November 2025) di Ruang Rapat Padaido GMB III Lantai 11 (6 Oktober 2025);
50. Penandatanganan Kerjasama Pengembangan Lahan Garam dan Industri di Ruang Rapat Benny S. Muljana (BSM) Lantai 2, Gedung Bappenas;
51. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Produksi Garam melalui aplikasi zoom (13 Oktober 2025);
52. Permohonan Fasilitas dan Pendampingan Kunjungan Lapang Lokasi Pembangunan K-SIGN Kab. Rote Ndao, NTT (15 Oktober 2025);
53. Diskusi atas Program Pergaraman Nasional pada DJPK di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 GMB III (16 Oktober 2025);
54. Pembahasan Penyediaan Lahan K-SIGN Tahap 2 di Kab. Rote Ndao di Aston Kupang Hotel & Convention Center (17 Oktober 2025);
55. Pembahasan Progress Swasembada Garam melalui aplikasi zoom (17 Oktober 2025);
56. Rekonsiliasi Data Keuangan, Pemantauan dan Verifikasi Pertanggungjawabab Keuangan Pelaksanaan Anggaran ABT Garam Periode TW III 2025 di Ruang Rapat KIPM Cirebon Stasiun Karantina Ikan Cirebon 24 Oktober 2025);
57. Tindak Lanjut Permohonan Dukungan Bahan Bakar dalam Pelaksanaan Pembangunan K-SIGN melalui aplikasi zoom (28 Oktober 2025);
58. Pembahasan Program Prioritas Ekstensifikasi dan Intensifikasi Kawasan Tambak Garam Tahun 2025 di Ruang Rapat Berakhlak Lantai 3 GMB III KKP (28 Oktober 2025);

59. Pembahasan Evaluasi Kegiatan Swasembada Garam melalui Aplikasi Zoom (31 Oktober 2025);
60. Pembahasan Pengadaan Tanah Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ashley Hotel Wahid Hasyim Jakarta (3 November 2025);
61. Pemantauan Manajemen Risiko dalam Pembangunan Prasarana Usaha Pergaraman dan Pengembangan Sentra Produksi Garam (Ekstensifikasi dan Intensifikasi) TA. 2025 Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9 GMB III;
62. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan K-SIGN di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9 (17 November 2025);
63. Rapat Perbaikan Hasil Konsultasi Publik Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Swasembada Garam Nasional dan Ketersediaan Hasil Perikanan di Dalam Negeri di Hotel Aryaduta Jakarta (23 November 2025);
64. Pembahasan perkembangan pekerjaan Izin K-SIGN Rote Ndao di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Mina Bahari 3 (27 November 2025);
65. Pembahasan *Draft* PKS Lahan K-SIGN di Harper Kupang (2 Desember 2025);
66. Pembahasan Progres Pekerjaan dan Pengadaan Lahan K-SIGN di Ruang Rapat Padaido Lt 11 GMB 3 KKP (3 Desember 2025);
67. Rekonsiliasi Data Lahan K-SIGN di Mercure Convention Center Ancol (4 Desember 2025);
68. FGD Profile Produksi dan Industri Pengolahan Garam Nasional untuk Mewujudkan Swasembada Garam Nasional di Ruang Rapat Sugijanto Soegijoko (SS) 1-2 Lantai 2, Jakarta (4 Desember 2025);
69. Ekspose Perkembangan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao melalui Aplikasi Zoom (5 Desember 2025);
70. Rekonsiliasi Data Lahan K-SIGN di Mercure Convention Center Ancol (5 Desember 2025);
71. Laporan Progres Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kabupaten Rote Ndao melalui Aplikasi Zoom (19 Desember 2025);
72. Pembahasan Progres K-SIGN 2025, Pembahasan *Carry Over* 2026, Pembahasan Intensifikasi Pergaraman Lokasi pekerjaan pembangunan K-SIGN Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Nda dan Aplikasi Zoom (23 Desember 2025).

Capaian Intervensi Direktorat P3K dalam Fasilitasi Lahan Garam melalui Program KSIGN adalah sebagai berikut:

1. Telah ada Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 04/DJPK/KKP/PKS/VI/2025 dan Nomor : 751/PKS-53.14/UP.04.06/VI/2025 Tentang Sertifikasi Lahan Dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (pada Tanggal 3 Juni 2025).
2. BAST konsolidasi lahan dari Pemda Rote Ndao ke KKP, Nomor 500.5/797./DPI/2025 pada tanggal 6 Agustus 2025
3. Proses Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemda Rote Ndao dengan masyarakat.
4. Target ekstensifikasi oleh pemerintah selesai pada tahun 2026.



BAST Hasil Konsolidasi Lahan Pembangunan K-Sign di Kabupaten Rote Ndao, Nomor 500.5/797./DPI/2025 pada tanggal 6 Agustus 2025



Lampiran Perjanjian Kerja Sama
Nomor : 04/DJPK/KKP/PSK/VI/2025
Nomor : 751/PSK-53.14/UP.04.06/VI/2025
Tanggal : 3 Juni 2025

RENCANA AKHIR
SERTIFIKASI LAHAN DALAM Mendukung PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL
DI KABUPATEN ROTE NDAO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemeriksaan lokasi pembangunan KSIGN	Mengumpulkan data lokasi yang akan dijadikan lahan pembangunan KSIGN	Mengumpulkan data lokasi yang akan dijadikan lahan pembangunan KSIGN	Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur	2025-2030	Tercapainya paling sedikit 1 (satu) objek pada lokasi pembangunan KSIGN	Meningkatnya produktivitas dan terwujudnya kesejahteraan
2.	Pelaksanaan inventarisasi, pengumpulan, pemilahan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah (DIPAT)	Mengumpulkan data lokasi yang akan dijadikan lahan pembangunan KSIGN	Mengumpulkan data lokasi yang akan dijadikan lahan pembangunan KSIGN	Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur	2025-2030	Tercapainya paling sedikit 1 (satu) objek pada lokasi pembangunan KSIGN	Meningkatnya produktivitas dan terwujudnya kesejahteraan

PKS Antara Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 04/DJPK/KKP/PSK/VI/2025 dan Nomor : 751/PSK-53.14/UP.04.06/VI/2025

Gambar 69. Intervensi Direktorat P3K dalam Fasilitasi Lahan Garam Program KSIGN

3.5. Realisasi Anggaran Direktorat P3K per/ Tanggal 31 Desember 2025

A. Realisasi Anggaran Per Tanggal 31 Desember 2025

Kondisi realisasi keuangan Direktorat P3K sampai dengan akhir Desember 2025 dijelaskan, antara lain:

- Pagu anggaran, realisasi anggaran, persentase (%) realisasi anggaran, dan sisa anggaran Direktorat P3K sampai dengan 31 Desember 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 80. Pagu anggaran Efektif, Realisasi Anggaran, Persentase (%) Realisasi Anggaran, dan Sisa Anggaran Direktorat P3K sampai dengan 31 Desember 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1	FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	23.140.397.000	-	23.140.397.000	20.321.232.686	87,82	2.819.164.314
2	FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000	1.856.528.000	929.302.000	903.363.182	97,21	25.938.818
4	HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26.133.883.000	8.658.316.000	17.475.567.000	17.242.800.121	98,67	232.766.879
5	WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL	2.261.242.000	60.595.000	2.200.647.000	2.194.097.719	99,70	6.549.281
Total			54.321.352.000	10.514.844.000	43.745.913.000	40.661.493.708	92,95	3.084.419.292

Sumber: Tim Perencanaan dan Tim Keuangan Direktorat P3K Tahun 2025

- Monitoring kontraktual pada tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 81. Monitoring Kontrak Dit. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil s.d Desember 2025

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
1	622145	A/175.250008 67/0/1	PT SERASI AUTORAYA	12-FEB-25	334/DJPKRL.3/II/ 2025	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon 2	522141	17-FEB-25	31-DEC-25	138,178,572	138,178,572	-
2	622145	A/175.25001124 /0/0	CV. GLOBAL ANDELIS	'06-MAR-25	507/PPK/DJPKRL .3/III/2025	Pekerjaan Belanja Sewa Gudang Arsip dan BMN Direktorat P4K	522141	'06-MAR-25	31-DEC-25	103,500,000	103,500,000	-
3	622145	A/140.2500148 7/0/0	PT. DODIKA PRABSCO RESIK ABADI	12-NOV-25	EP- 01K9TZX996PJ9 G6Y8Q7Y67JJ2J	Pengadaan Incinerator Kabupaten Lombok Utara	532111	12-NOV-25	31-DEC-25	9,793,450,000	9,793,450,000	-
4	622145	A/140.2500157 6/0/0	PT. URBAN TEKNOLOGI INDONESIA	21-NOV-25	EP- 01KAJFAJE0W30 D3GHGCQBSV3 00-AD01	Pengadaan Peralatan Pengumpulan Basis Data Karbon Biru	532111	21-NOV-25	21-DEC-25	2,141,050,980	2,141,050,980	-
5	622145	A/175.2500168 8/0/0	CV. FAIZ PUTRA JAYA	30-APR-25	46/PPK/DJPK.1/I V/2025	Pengadaan Bantuan Sarana TPS/PDU di Desa Pesisir Bersih Kota Denpasar	526115	30-APR-25	30-MAY-25	111,796,980	111,796,980	-
6	622145	A/175.2500354 4/0/0	PT. TERRA DRONE INDONESIA	19-AUG-25	EP- 01K2C95M78QT HF9KWC4MF7D 7ZD	Pemetaan Lahan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K- SIGN) di Kabupaten Rote Ndao Metode Lidar	522191	19-AUG-25	'02-OCT-25	4,726,847,877	4,726,847,877	-
7	622145	A/175.2500354 7/0/0	CV. FAIZ PUTRA JAYA	28-JUL-25	EP- 01K0XYV0B6SX R1RHKCONPJ6AZ P	Pengadnan Drone RealTime Kinematics (RTK) DJI Matrice 4 pada Pengelolaan Lahan Garam	532111	28-JUL-25	'03-SEP-25	296,370,000	296,370,000	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
8	622145	A/175.2500406 5/0/0	CV. WALUYA	10-SEP-25	EP- 01K49V25X7BKQ XWVZ2BXGKBSF W	Pengadaan motor tempel Suzuki 15 PK 2 unit dan perahu fiber 1 unit	526112	10-SEP-25	11-OCT-25	78,525,396	78,525,396	-
9	622145	A/175.2500477 7/0/0	CV. DUTA RAYA TECHNO	'02-OCT-25	EP- 01K5ZYQ27JPNR WVACQSRXWZ P3N	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab. Tabanan	526112	'03-OCT-25	16-OCT-25	98,301,600	98,301,600	-
10	622145	A/175.2500477 8/0/0	CV. RIZQI ANANDA	'06-OCT-25	EP- 01K627D9A9FE4 DG733PPF6YYW 8	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar Kab. Pati	526112	'07-OCT-25	'06-NOV-25	96,098,250	96,098,250	-
11	622145	A/175.2500477 9/0/0	CV. ASTA BIMA	'01-OCT-25	EP- 01K5ZN22FTP36 31TEE8FFMTXT	Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Wonosobo (1 Roll Jaring Waring, 15 Unit Mesin Honda GX 200 T 6,5 HP dan 15 Unit Life Jacket)	526112	'01-OCT-25	30-OCT-25	98,259,975	98,259,975	-
12	622145	A/175.2500496 0/0/0	HERMAWAN APRIADI	'08-OCT-25	P- 01K5DXEC406Z OB8TFT1X68TE1A -AD01	Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Sambas (2 unit mesin tempel 15 PK dan 12 unit Coolbox)	526112	'08-OCT-25	25-OCT-25	98,568,000	98,568,000	-
13	622145	A/175.2500496 1/0/0	HERMAWAN APRIADI	'08-OCT-25	EP- 01K57WNX8CTY V9P2GH1RWPSG 9W-AD01	Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Sanggau (Alat	526112	'08-OCT-25	25-OCT-25	96,015,000	96,015,000	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
						Musik Tradisional dan Pakaian adat Dayak Hibun)						
14	622145	A/175.2500496 2/0/0	RIZKY APRILI	'08-OCT-25	EP- 01K5DYN3S3SBX 6DDAM99ENW H18-AD01	Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Sanggau, Landak (Perahu, Mesin Tempel 15 PK dan Jaring)	526112	'08-OCT-25	25-OCT-25	94,905,000	94,905,000	-
15	622145	A/175.2500501 1/0/0	CV. PERDANA SAMUDRA PERKASA	'08-OCT-25	EP- 01K6FEKRG8R2E 3DGR9SJD8MD9 8	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kabupaten Kebumen	526112	'08-OCT-25	'06-NOV-25	97,295,274	97,295,274	-
16	622145	A/175.2500535 0/0/0	PT DANUREKSA SARANA CIPTA	18-SEP-25	1942/PPK/DJPK.4 /ABT/IX/2025	Jasa Konsultasi Pembuatan Dokumen KKPRL, Amdal dan Izin Produksi Garam Kegiatan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kab. Rote Ndao	522191	18-SEP-25	31-DEC-25	5,242,700,413	5,242,700,413	-
17	622145	A/175.2500559 7/0/0	CV. RISGERD	27-OCT-25	EP- 01K80C5D61NBZ D588Z4H8CAS8 N	Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kota Sorong (Perahu Fiber dan Mesin Tempel 15 PK)	526112	27-OCT-25	'09-NOV-25	97,859,820	97,859,820	-
18	622145	A/175.2500579 0/0/0	CV. ERA FIBERBOAT PERKASA	29-OCT-25	EP- 01K8ME32QTKV QJKE0WT8DHF OH5	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Poso	526112	29-OCT-25	11-NOV-25	98,568,000	98,568,000	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
19	622145	A/175.2500579 1/0/0	CV. BAHTERA CAHAYA MUTIARA	29-OCT-25	SP:EP- 01K8M8GS12CM KHXXHTTD95CB8 5M	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Merauke 1	526112	29-OCT-25	17-NOV-25	70,929,000	70,929,000	-
20	622145	A/175.2500579 9/0/0	CV. KARYA PUTRA GROUP	30-OCT-25	EP- 01K8MYSZT5BC R0SPHH739003 C2	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanggamus	526112	30-OCT-25	30-NOV-25	97,698,870	97,698,870	-
21	622145	A/175.250058 00/0/0	PT. NARASI ANTARKATA	29-OCT-25	EP- 01K87YX9EAKTE 6PVE34XHT3J1N	Pengadaan bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Pati 1	526112	29-OCT-25	29-NOV-25	98,135,100	98,135,100	-
22	622145	A/175.250058 01/0/0	CV. BAHTERA CAHAYA MUTIARA	29-OCT-25	EP- 01K8M7Z2VFGW NVHNFXXYFV7 29	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Aceh Utara 1	526112	29-OCT-25	17-NOV-25	52,469,700	52,469,700	-
23	622145	A/175.2500584 9/0/0	CV. FAIZ PUTRA JAYA	'02-NOV-25	EP- 01K8T1EM8V8DS 2ZF5N0C8W9SS Y	Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Lampung Timur	526112	'02-NOV-25	30-NOV-25	99,622,500	99,622,500	-
24	622145	A/175.250059 08/0/0	CV. ALEESHA RIZKI MAKMUR	'02-NOV-25	EP- 01K8WVW0POXD NE14R45ZS9T3A GD	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Karimun	526112	'02-NOV-25	21-NOV-25	89,100,000	89,100,000	-
25	622145	A/175.250059 09/0/0	CV. DEMIAN ABADI	'03-NOV-25	EP- 01K8W9J6KCFA1 Q3B3FV5WCQA G4	Pengadaan Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Alor	526112	'03-NOV-25	19-NOV-25	94,700,760	94,700,760	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
26	622145	A/175.2500594 6/0/0	CV. ERA FIBERBOAT PERKASA	'01-NOV-25	EP- 01K8SEAFEEJ1RO BVF8CB42GZZY	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Mamuju Tengah	526112	'01-NOV-25	20-NOV-25	98,568,000	98,568,000	-
27	622145	A/175.2500607 7/0/0	CV. ERA FIBERBOAT PERKASA	'08-NOV-25	EP- 01K9E1SRGOA8D OB4576Y5X9KBC	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Jeneponto	526112	'08-NOV-25	27-NOV-25	98,783,618	98,783,618	-
28	622145	A/175.2500620 5/0/0	PESAGI JAYA MAKMUR	'06-NOV-25	EP- 01K8W7WYXNK 2EMQ7E5ZRDSY N36	Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Maluku Tengah	526112	'06-NOV-25	'05-DEC-25	85,248,000	85,248,000	-
29	622145	A/175.2500620 6/0/0	CV. LUMUBER SEJAHTERA	'08-NOV-25	EP- 01K9BD8CJEENB G58DH8FRC9P41	Pengadaan Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul	526112	11-NOV-25	'08-DEC-25	97,911,990	97,911,990	-
30	622145	A/175.2500640 5/0/0	CV. RESYA ABADI	12-NOV-25	EP- 01K9E1HA8SV7A YV6PSC99N0EH N	Pengadaan Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Indramayu dan Cirebon	526112	12-NOV-25	12-DEC-25	98,790,000	98,790,000	-
31	622145	A/175.2500640 6/0/0	CV. SAKA DUTA PERSADA	12-NOV-25	EP- 01K9E6EP5FDNX X2SOP19KX74CQ	Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat (Perahu bahan kayu, Mesin diesel 24	526112	12-NOV-25	10-DEC-25	96,441,240	96,441,240	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
						HP, Alat tangkap (jaring gillnet)						
32	622145	A/175.25006407/0/0	CV. PUTRI MANDIRI	14-NOV-25	EP-01K9V9XW2TBVTV7NESC1MXMNZQ	Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Cianjur	526112	14-NOV-25	10-DEC-25	295,998,705	295,998,705	-
33	622145	A/175.25006408/0/0	CV. CAKRA MAS	10-NOV-25	EP-01K9E2V2A08X7GVHN2TXFVT6K7	Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Majene	526112	10-NOV-25	'01-DEC-25	88,892,885	88,892,885	-
34	622145	A/175.25006409/0/0	CV. RONI MARINE	14-NOV-25	EP-01K99D9NSQ9PCKQA1G3XWF4T92	Pengadaan Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Sukabumi	526112	14-NOV-25	'09-DEC-25	95,830,000	95,830,000	-
35	622145	A/175.25006530/0/0	CV. LENCANA KARYA	17-NOV-25	EP-01K8MNFHMQRX9GG8G4MWY53H8C-AD01	"Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif (Mesin Yamaha 15 PK, Mesin Honda GX 390T + AS KKK, Mesin Honda GX 200 T + AS KKK, Coolbox 45 Liter merk Tanaga) di Kota Pariaman, Prov. SumateraBarat"	526112	17-NOV-25	'03-DEC-25	98,906,550	98,906,550	-
36	622145	A/175.25006678/0/0	CV. HY PRATAMA PRIMA	14-NOV-25	EP-01K9VHERJD3MBQV7AC6Q8WJ8SE	Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Buton Selatan	526112	14-NOV-25	12-DEC-25	97,605,075	97,605,075	-
37	622145	A/175.25006702/0/0	CV. PAPARAZZI CONSTRUCT ION	19-NOV-25	EP-01KA0J3M5XTS4W10Q3AH19W6C7	Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Muna Barat	526112	19-NOV-25	18-DEC-25	98,024,100	98,024,100	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
38	622145	A/175.2500670 3/0/0	PT. KLAF MEDIA TEKNOLOGI	20-NOV-25	EP- 01KADDFRCRW Z4W2GP3MZ2TA TCK	Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Mamuju	526112	20-NOV-25	19-DEC-25	95,199,150	95,199,150	-
39	622145	A/175.2500670 4/0/0	CV. FAIZ PUTRA JAYA	20-NOV-25	EP- 01KADA69PX99 Y2S84CBYVCM8 X6	Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Jepara	526112	20-NOV-25	19-DEC-25	98,881,020	98,881,020	-
40	622145	A/175.2500670 5/0/0	CV. MUGO BERKAH	19-NOV-25	EP- 01K9VGTD3D3Z T94QVN9224SD QA	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Tuban berupa 10 Unit GARMIN FF350 PLUS WITH TRANSDUSER GT20/GT15-M	526112	19-NOV-25	'02-DEC-25	94,294,500	94,294,500	-
41	622145	A/175.2500679 3/0/1	PT. ARTERIA DAYA MULIA	19-NOV-25	EP- 01KA7M95AK1SC 5WY38BAW9Q9 MN	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif (Jaring Insang Monofilamen 2 Inci Dia 0.28 mm) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, (108 set/pcs).	526112	19-NOV-25	22-DEC-25	89,998,800	89,998,800	-
42	622145	A/175.250068 02/0/0	CV. SEPULUH BERSAUDAR A	24-NOV-25	EP-01 K9RNA97ENKTZ V8YPMSKR71A2	Cool Box Merek Marvel 220 liter 14 Unit; Mesin Perahu 40 PK Merk Yamaha E40 JMHL, 2 Tak sebanyak 2 unit; Perahu Speed 2 unit.	526112	24-NOV-25	12-DEC-25	187,237,020	187,237,020	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
43	622145	A/175.250068 03/0/0	CV. BAHTERA CAHAYA MUTIARA	19-NOV-25	2861/PPK/DJPKR L.3/XI/2025	Pengadaan Paket Sosialisasi dan Praktik Lapang Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	522191	19-NOV-25	29-NOV-25	189,040,740	189,040,740	-
44	622145	A/175.250068 04/0/0	CV. ANDALAS SAIYO SAKATO	21-NOV-25	EP- 01K8PT96REA8C W08P4ERYFVZR 2	Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif (Mesin Yamaha 40 PK, Mesin Honda GX 270 T + AS KKK di Kabupaten Agam dan Kota Padang, Prov. Sumatera Barat	526112	21-NOV-25	'01-DEC-25	98,404,000	98,404,000	-
45	622145	A/175.2500684 2/0/0	PT. KARYA BAHARI ABADI	21-NOV-25	EP- 01K9BZM06JJYV 05RQCOF88S3P N-AD01	Motor Tempel Yamaha Outboard E 15 DMHL - 15 HP, 2 unit	526112	21-NOV-25	11-DEC-25	57,650,000	57,650,000	-
46	622145	A/175.2500687 6/0/0	CV. DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA	25-NOV-25	EP- 01KANMPVHX0S 8PVX6JJM9RGET 9	Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi	526112	25-NOV-25	'05-DEC-25	97,413,600	97,413,600	-
47	622145	A/175.25007116 /0/0	CV. SEGARA BENING	27-NOV-25	EP- 01K9RACXKNAZ 7RC2B89J61YF9C .Add.01	Perahu Fiber 1 unit; Mesin perahu merk yamaha 25 PK, Tipe : E25BMH 2 silinder 1 unit;tali tambat 50 meter, tali jangkar 50 meter, jangkar 5 kg; life jaket 2 buah	526112	27-NOV-25	15-DEC-25	89,910,000	89,910,000	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
48	622145	A/175.2500726 8/0/0	PERKUMPULAN AHLI REKAYASA PANTAI INDONESIA	27-NOV-25	3309/DJPK.1/PPK/XI/2025	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS TENTANG PENGELOLAAN REKLAMASI PESISIR	522191	27-NOV-25	31-DEC-25	600,000,000	600,000,000	-
49	622145	A/175.2500726 9/0/0	PERKUMPULAN AHLI PENGELOLAAN PESISIR INDONESIA	27-NOV-25	3308/DJPK.1/PPK/XI/2025	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS TENTANG PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI	522191	27-NOV-25	31-DEC-25	600,000,000	600,000,000	-
50	622145	A/175.2500727 0/0/0	PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT INSTITUT PERTANIAN BOGOR	27-NOV-25	3307/DJPK.1/PPK/XI/2025	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL	522191	27-NOV-25	31-DEC-25	600,000,000	600,000,000	-
51	622145	A/175.2500730 2/0/0	CV. CIPTA BUMI LESTARI	28-NOV-25	3320A/PPK/DJPK.4/XI/2025	Pengadaan Paket Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	522191	28-NOV-25	22-DEC-25	199,834,038	199,834,038	-
52	622145	A/175.2500734 1/0/0	CV. DUTA RAYA TECHNO	28-NOV-25	3320C/DJPK.1/PPK/XI/2025	Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Rote Ndao	526112	28-NOV-25	'08-DEC-25	99,594,001	99,594,001	-
53	622145	A/175.2500743 8/0/0	CV. WAILO PRATAMA	'03-DEC-25	EP-01KBEKS6R5ZXH37H5QWJSW03DD	Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Kepulauan Sula	526112	'03-DEC-25	17-DEC-25	97,635,600	97,635,600	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
54	622145	A/175.2500762 4/0/0	CV. IHSAN CEMERLANG	'08-DEC-25	EP- 01KBXN1WC7SD 85J77D6JB118RM	Pengadaan alat pengolah data Dit P3K	532111	'08-DEC-25	14-DEC-25	99,345,000	99,345,000	-
55	622145	A/175.2500769 3/0/1	PT. SENTRAL DATA KOMUNIKAS I	'08-DEC-25	EP- 01KBMA5ZCZW 5F27WHSTYJPH AQG	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Pendukung Survey	532111	'08-DEC-25	31-DEC-25	1,130,646,000	1,130,646,000	-
56	622145	A/175.2500787 4/0/0	PT. PUTRATAMA INTI NUSANTARA	15-DEC-25	3490F/DJPK.1/PP K/XII/2025	Pekerjaan Pengadaan Bantuan Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Sumatera Barat 2	521219	15-DEC-25	23-DEC-25	150,000,000	150,000,000	-
57	622145	A/175.2500787 5/0/0	PT. PUTRATAMA INTI NUSANTARA	15-DEC-25	3490E/DJPK.1/PP K/XII/2025	Pekerjaan Pengadaan Bantuan Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Sumatera Barat 1	521219	15-DEC-25	23-DEC-25	150,000,000	150,000,000	-
58	622145	A/175.2500788 8/0/0	CV. JALADRI NUSANTARA BARAT	15-DEC-25	3475/PPK/DJPK.4 /XII/2025	Pengadaan Bantuan Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sumatera Utara 1	521219	15-DEC-25	23-DEC-25	149,861,100	149,861,100	-
59	622145	A/175.2500788 9/0/0	CV. JALADRI NUSANTARA BARAT	15-DEC-25	3477/PPK/DJPK.4 /XII/2025	Pengadaan Bantuan Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan	521219	15-DEC-25	23-DEC-25	149,963,220	149,963,220	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
						Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sumatera Utara 2						
60	622145	A/175.2500789 2/0/0	PT. ANINDYA KARYA DESAIN	15-DEC-25	3490i/DJPK.1/PP K/XII/2025	Penyusunan Masterplan Pengembangan Mangrove di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	522191	15-DEC-25	22-DEC-25	199,954,000	199,954,000	-
61	622145	A/175.2500794 0/0/0	PT. SINERGI OCEANA JAYA	15-DEC-25	3490j/DJPK.1/PP K/XII/2025	Penanaman Mangrove di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur lokasi di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao	522191	15-DEC-25	31-DEC-25	199,976,490	199,976,490	-
62	622145	A/175.250080 30/0/0	CV MEKAR KARYA FORMULA	15-DEC-25	3490L/DJPK.1/PP K/XII/2025	Penanaman Mangrove di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	521219	15-DEC-25	31-DEC-25	199,976,490	199,976,490	-
63	622145	A/175.2500817 7/0/0	CV. PILAR MAHKOTA SEJAHTERA	19-DEC-25	3525A /DJPK.1/PPK/XII/ 2025	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Pendukung Survey	532111	19-DEC-25	31-DEC-25	197,965,000	197,965,000	-

NO	SATKER	NO CAN	SUPPLIER	TGL.KONTRAK	NOMOR	URAIAN KONTRAK	AKUN	TGL MULAI	TGL AKHIR	NILAI KONTRAK	NILAI REALISASI	NILAI SISA
64	622145	A/175.2500817 8/O/O	CV. RAJA FASYA	18-DEC-25	3258/PPK/DJPK. 4/XII/2025	Pengadaan Bantuan Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh	521219	18-DEC-25	23-DEC-25	100,000,000	100,000,000	-
65	622145	A/175.2500817 9/O/O	CV. RAJA FASYA	18-DEC-25	3259/PPK/DJPK. 4/XII/2025	Pengadaan Bantuan Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara, Provinsi Aceh	521219	18-DEC-25	23-DEC-25	198,500,000	198,500,000	-

Sumber : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Direktorat P3K Tahun 2025

Pada periode berjalan terdapat permintaan pembatalan sebagian data kontrak dengan Nomor Kontrak : 334/DJPKRL.3/II/2025 dengan Supplier PT Serasi Autoraya berupa Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon 2 dari Nilai Kontrak semula Rp 145.750.000,- menjadi Rp 138.178.572,- sesuai Surat Pembatalan Data Kontrak Nomor : 388/PPK/622145/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, hal ini dilakukan agar tidak ada *outstanding* kontrak di OMSPAN.

- Pendapatan Negara Bukan Pajak yang direalisasikan oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sampai dengan periode akhir pelaporan adalah sebesar Rp 24.348.855.521,- berupa Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 senilai
 - Rp 24.341.796.800 di Lokasi Pulau Penebang oleh PT Dharma Inti Bersama dengan luas 936 ha dengan NTPN No : 319F961QVDBRHVRS,
 - NTB No : 137408326100 tanggal 23 Juni 2025, di lokasi Pulau Pisang oleh PT. Kepri Island Resort dengan luas 8,16 ha senilai Rp 207.753.600,- dengan NTPN No : EBAFB48VVOAOP1Q7
 - NTB No : 000093093404 tanggal 28 Juli 2025, di lokasi Pulau Pisang Batu oleh PT Kepri *Island Resort* dengan luas 0,02 ha senilai Rp 509.200,- dengan NTPN No : 17EEF61QVDFOLMD9
 - NTB No : 000093192072 tanggal 1 Agustus 2025, di lokasi Pulau Tulang oleh PT Karimun Sarana Surya dengan luas 2,950 ha senilai Rp 75.107.000,- dengan NTPN No : E50EF0NAOEC1LTH6
 - NTB No : 610050346571 tanggal 17 November 2025, di lokasi Pulau Parit 1 oleh PT Karimun Sarana Surya dengan luas 1,940 ha senilai Rp 49.392.400,- dengan NTPN No : E26F01JNG8UE2UC7
 - NTB No : 810050346621 tanggal 17 November 2025, di lokasi Pulau Parit 2 oleh PT Karimun Sarana Surya dengan luas 2,350 ha senilai Rp 59.831.000,- dengan NTPN No : 2FBF71JNG8UE2UKA
 - NTB No : 510050346601 tanggal 17 November 2025, di lokasi Pulau Parit 3 oleh PT Karimun Sarana Surya dengan luas 4,660 ha senilai Rp 118.643.600,- dengan NTPN No : 4E5C955DFJ7VNOTE, NTB No : 210050346580 tanggal 17 November 2025 serta Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing) dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

Rekapitulasi PNBP Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing Tahun 2025											
No.	Uraian	Pemohon	Lokasi Pulau	Luas (Ha)	Nilai PNBP Per Ha (5%XFaktor S)	Jumlah Setoran PNBP	Tanggal Billing	Kode Billing	NTPN	NTB	Tanggal Bayar
1	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Gili Gede) oleh PT. Ultimate Gili Gede dengan luas 0,068000009 ha	PT. Ultimate Gili Gede	P. Gili Gede	0,0680	30.824.106	2.096.040	5 Mar 2025	820250305484866	352B648VVNTIVM22	510046393120	5 Mar 2025
2	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Sipora) oleh PT Bela Sulu Mentawai (Bidang 1) dengan luas 0,087 ha	PT Bela Sulu Mentawai	P. Sipora	0,0870	30.824.106	2.681.697	23 Jun 2025	820250623002317	BE3096U8F7U70HMD	021130427243	23 Jun 2025
3	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Sipora) oleh PT Bela Sulu Mentawai (Bidang 2) dengan luas 0,037 ha	PT Bela Sulu Mentawai	P. Sipora	0,0370	30.824.106	1.140.492	23 Jun 2025	820250623012171	BB0D92G50328VRAB	644482384239	23 Jun 2025
4	Setoran PNBP Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Izin Pemanfaatan PPK dengan dalam rangka PMA (P. Sipora) oleh PT Bela Sulu Mentawai (Bidang 3) dengan luas 0,037 ha	PT Bela Sulu Mentawai	P. Sipora	0,0370	30.824.106	1.140.492	23 Jun 2025	820250623013067	E5ACC48VVO71PS6B	185780236328	23 Jun 2025
Total						7.058.721					

Gambar 70. Rekapitulasi PNBP Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Tahun 2025

Rincian Rekap PNBPN pada Direktorat P3K tahun 2025 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Rekapitulasi Penerimaan Bukan Pajak Direktorat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil				
Akun PNBPN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	REALISASI
XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DILAUT				
425259	J. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi)	per ha	25.460.000,00	24.341.796.800
425259	K. Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing	per ha	5% x Faktor S	7.058.721
			Total	24.348.855.521
			Target	28.489.956.000
			Persentase	85,46%

Gambar 71. Rekapitulasi Penerimaan Bukan Pajak Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Surat Perintah Membayar (SPM)
Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat penerbitan 16 SPM gaji dan 4 SPM THR PPNPN, 90 SPM LS Banyak Penerima, 19 SPM GUP, 10 SPM Honor Operasional Satker, 9 SPM GUP KKP, 73 SPM Kontraktual, 99 SPM LS Non Kontraktual, 16 SPM LS Bendahara, 28 SPM PTUP. Rincian Pengajuan SPM Direktorat P3K sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 82. DAFTAR SPM/SP2D DIT. P3K Periode Desember 2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
1	251751503000106	01-02-2025	80,009,906	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00071T/622145/2025	23-01-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Januari Tahun 2025 untuk 15 Pegawai.
2	251751303000214	30-01-2025	340,000	NON GAJI	00075T/622145/2025	23-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 1 orang a.n Mikha Hasudungan ST No: B.41/DJPKRL.3/KP.440/I/2025 tgl 07 Januari 2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
3	251751303000216	30-01-2025	1,495,000	NON GAJI	00074T/622145/2025	23-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 4 orang a.n Isya Kharisma dkk ST No: B.50/DJPKRL.3/KP.440/I/2025 tgl 8 Januari 2025
4	251751303000215	30-01-2025	4,974,500	NON GAJI	00073T/622145/2025	23-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Angle Agata Nender dkk ST No: B.85/DJPKRL.3/KP.440/I/2025 tgl 10 Januari 2024
5	251751303000222	30-01-2025	17,031,009	NON GAJI	00072T/622145/2025	23-01-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 8 orang a.n Muhammad Yusuf dkk ST No: B.3953/DJPKRL.3/KP.40/X11/2024 tgl 30 Desember 2024
6	251751303000567	05-02-2025	1,215,000	GUP KKP	00149T/622145/2025	04-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No: 4365 8300 5016 6017 a.n A Aris)
7	251751303000659	06-02-2025	3,756,500	NON GAJI	00143T/622145/2025	04-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
8	251751303000794	06-02-2025	49,520,888	GUP	00170T/622145/2025	05-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang
9	251751303001277	18-02-2025	67,886,685	PENGHASILAN PPNPN SUSULAN	00209T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Susulan Bulan Januari Tahun 2025 untuk 12 Pegawai.
10	251751303001302	19-02-2025	1,720,000	NON GAJI	00223T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 2 orang a.n Budiman dkk sesuai ST No: B.71/DJPKRL.3/KP.440/I/2025 tgl 9 Januari 2025
11	251751303001297	19-02-2025	5,412,000	NON GAJI	00221T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 7 orang a.n Bagus Afrianto dkk sesuai ST No: B.71/DJPKRL.3/KP.440/I/2025 tgl 9 Januari 2025
12	251751303001301	19-02-2025	13,330,640	NON GAJI	00219T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 1 orang a.n Angke Agata Nender sesuai ST No: B.148/DJPKRL.3/KP.440/I/2025 tgl 15 Januari 2025
13	251751303001299	19-02-2025	40,470,560	NON GAJI	00210T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 3 orang a.n Dyah Erowati dkk (pihak eksternal) sesuai ST No: B.309/SJ.6/KP.440/I/2025 tgl 17 Januari 2025
14	251751303001298	19-02-2025	59,955,019	NON GAJI	00217T/622145/2025	17-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 3 orang a.n Ifan Setiawan dkk sesuai ST No: B.148/DJPKRL.3/KP.440/I/2025 tgl 15 Januari 2025
15	251751303001390	20-02-2025	390,000	NON GAJI	00236T/622145/2025	18-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Yono Haryono ST No: B.214/DJPKRL.3/KP.440/I/2025 tgl 21 Januari 2025
16	251751303001574	24-02-2025	34,629,699	GUP	00248T/622145/2025	21-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
17	251751303001576	24-02-2025	42,900,000	GUP	00256T/622145/2025	21-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
18	251751303001735	26-02-2025	17,762,000	GUP KKP	00268T/622145/2025	26-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No: 4365 8300 5016 5993 a.n Ahmad Aris)
19	251751303001868	28-02-2025	8,626,193	GUP KKP	00280T/622145/2025	28-02-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No: 4365-8300-5012-4891 a.n TU Dit. P4K)
20	251751503000197	01-03-2025	80,009,906	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00242T/622145/2025	21-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2025 untuk 15 Pegawai.
21	251751503000203	01-03-2025	68,351,156	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00257T/622145/2025	24-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2025 untuk 12 Pegawai.

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
22	251751503000261	01-03-2025	5,844,202	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00267T/622145/2025	26-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2025 untuk 1 Pegawai.
23	251751503000260	01-03-2025	33,124,534	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00266T/622145/2025	26-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2025 untuk 7 Pegawai.
24	251751303001922	05-03-2025	3,756,500	NON GAJI	00278T/622145/2025	27-02-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
25	251751303001934	03-03-2025	17,532,606	PENGHASILAN PPNPN SUSULAN	00287T/622145/2025	03-03-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Susulan Bulan Januari Tahun 2025 untuk 3 Pegawai.
26	251751303002196	06-03-2025	121,995,496	NON GAJI KONTRAKTUAL	00294T/622145/2025	04-03-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 334/DJPKRL.3/II/2025 tgl 12/2/2025, BAST No: 362/PPK/DJPKRL.3/II/2025 tgl 17/2/2025, BAP No: 476/PPK/DJPKRL.3/III/2025 tgl 3/3/2025, SPKPB No: 000365/SLS /TRAC-JKT1/3/2025 tgl 3/3/2025.
27	251751303002216	05-03-2025	57,777,985	GUP	00296T/622145/2025	05-03-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
28	251751302003300	14-03-2025	91,378,378	NON GAJI KONTRAKTUAL	00318T/622145/2025	12-03-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 507/PPK/DJPKRL.3/III/2025 tgl 6/3/2025, BAST No: 537/PPK/DJPKRL.3/III/2025 tgl 12/3/2025, BAP No: 538/PPK/DJPKRL.3/III/2025 tgl 12/3/2025, SPKPB : 0291/GA /III/2025 tgl 12/3/2025
29	251751503000334	18-03-2025	80,941,000	SPM THR PPNPN	00339T/622145/2025	17-03-2025	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 15 Pegawai.
30	251751301003935	19-03-2025	33,727,757	NON GAJI	00319T/622145/2025	17-03-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bantuan Sarana TPS/PDU di Desa Pesisir Bersih Kota Denpasar sesuai BAST No: 391/PPK/DJPKRL.3/II/2025 tgl 20/2/2025, Kwitansi No: SJ-12-250219001 tgl 20/2/2025
31	251751303003267	20-03-2025	8,750,000	GUP	00354T/622145/2025	19-03-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
32	251751503000482	21-03-2025	59,834,461	SPM THR PPNPN	00367T/622145/2025	20-03-2025	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 12 Pegawai.
33	251751503000551	01-04-2025	187,149,842	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00383T/622145/2025	24-03-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Maret Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
34	251751503000550	24-03-2025	8,095,140	SPM THR PPNPN	00384T/622145/2025	24-03-2025	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 3 Pegawai.
35	251751503000615	27-03-2025	2,698,380	SPM THR PPNPN	00399T/622145/2025	26-03-2025	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 1 Pegawai.
36	251751303003704	27-03-2025	2,008,589	GUP KKP	00400T/622145/2025	26-03-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP Nomor 4365-8300-5012-4891 a.n TU DIT P4K)
37	251751303003812	10-04-2025	3,756,500	NON GAJI	00407T/622145/2025	08-04-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Maret 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
38	251751303003981	14-04-2025	11,627,082	GUP	00414T/622145/2025	11-04-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
39	251751503000695	01-05-2025	187,149,842	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00439T/622145/2025	22-04-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan April Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
40	251751303005006	07-05-2025	1,852,500	NON GAJI	00470T/622145/2025	05-05-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan April 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
41	251751503000846	01-06-2025	187,149,842	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00529T/622145/2025	22-05-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Mei Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
42	251751303006868	02-06-2025	10,171,299	GUP	00550T/622145/2025	02-06-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
43	251751301009069	04-06-2025	99,207,230	NON GAJI KONTRAKTUAL	00545T/622145/2025	02-06-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bantuan Sarana TPS/PDU di Desa Pesisir Bersih Kota Denpasar sesuai Kontrak No: 46/PPK/DJPK.1/IV/2025 tgl 30/4/2025, BAST No: 74/PPK/DJPK.1/V/2025 tgl 21/5/2025, BAP No: 75/PPK/DJPK.1/V/2025 tgl 21/5/2025
44	251751303006968	04-06-2025	1,852,500	NON GAJI	00554T/622145/2025	02-06-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Mei 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
45	251751303007790	13-06-2025	17,636,000	GUP KKP	00594T/622145/2025	12-06-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No. 4365 8300 5016 5993 an. Ahmad Aris)
46	251751303007792	13-06-2025	5,672,500	GUP	00584T/622145/2025	12-06-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
47	259991531002932	01-07-2025	188,883,948	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00664T/622145/2025	25-06-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2025 untuk 35 Pegawai
48	259991330045906	04-07-2025	1,852,500	NON GAJI	00683T/622145/2025	02-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Juni 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
49	259991330046338	02-07-2025	8,707,799	GUP	00676T/622145/2025	02-07-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
50	259991330047139	04-07-2025	4,720,000	NON GAJI	00674T/622145/2025	02-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Apriani Nurlaela dkk ST No: B.854/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025
51	259991330080014	17-07-2025	60,344,400	NON GAJI	00727T/622145/2025	15-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n ANDI RENALD dkk (pihak eksternal) sesuai ST No: 661/ND-700.34.PP.04.03/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025
52	259991330080006	17-07-2025	31,341,991	NON GAJI	00741T/622145/2025	15-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang an. Estika Ayu Citra Utami dkk sesuai ST No: B.379/DJPKRL.3/KP.440/II/2025 tanggal 10 Februari 2025
53	259991330080011	17-07-2025	58,220,632	NON GAJI	00731T/622145/2025	15-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang an. Partini dkk sesuai ST No: B.91/DJPKRL.3/KP.440/I/2025 tgl 10 Januari 2025
54	259991330080013	17-07-2025	28,957,140	NON GAJI	00730T/622145/2025	15-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 6 orang an. Dyah Erowati dkk (pihak eksternal) ST No: B.219/SJ.6/KP.440/I/2025 tgl 13/1/2025 dan 5 orang an. Navila Ulfi Fauziyanti dkk (pihak eksternal) ST No: B.648/BPSPL.1/KP.440/V/2025 tgl 8/5/
55	259991330094079	24-07-2025	106,356,565	NON GAJI	00785T/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas ABT Garam 6 orang an. Estika Ayu Citra Utami dkk sesuai ST No: B.427/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 14 Mei 2025
56	259991330094025	24-07-2025	14,764,644	NON GAJI	00792T/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang an Apriani Nurlaela dkk sesuai ST No: B.857/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 26 Juni 2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
57	259991330094023	24-07-2025	9,074,000	NON GAJI	00791T/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (PNBP) 3 orang a.n Ganjar Raharja dkk ST No: B.1224/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025
58	259991330094026	24-07-2025	125,324,896	NON GAJI	00784T/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (pihak eksternal) ABT Garam 40 orang an. Imam Fauzi dkk sesuai ST No: B.772/BKKPN/KP.440/V/2025 tanggal 16 Mei 2025
59	259991330094024	24-07-2025	1,530,000	NON GAJI	00789T/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang an. Dwi Ismi Wulandari dkk sesuai ST No: B.1123/DJPRK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025
60	259991330094078	24-07-2025	2,300,000	NON GAJI	00793T/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang an Irfan Darmawan sesuai ST No: B.857/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 26 Juni 2025
61	259991330094077	24-07-2025	510,000	NON GAJI	00790T/622145/2025	22-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 1 orang an. Angle Agata nender sesuai ST No: B.1123/DJPRK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025
62	259991330094804	24-07-2025	113,857,405	NON GAJI	00794T/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas ABT Garam 5 orang a.n Reni Indrawati dkk sesuai ST No: B.427/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 14 Mei 2025
63	259991330094807	25-07-2025	58,406,804	NON GAJI	00796T/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Ahmad Aris dkk sesuai ST No: B.150/DJPK/KP.440/IV/2025 tanggal 28 April 2025
64	259991702013390	24-07-2025	-	GTUP NIHIL	00807T/622145/2025	23-07-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (P3K Lautra)
65	259991330096644	25-07-2025	80,759,639	NON GAJI	00826T/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n Yoga Dwi Priyatmoko dkk sesuai ST No: B.712/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
66	259991330096582	25-07-2025	146,294,712	NON GAJI	00825T/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 7 orang a.n Partini dkk sesuai ST No: B.712/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
67	259991330096584	25-07-2025	162,803,470	NON GAJI	00823T/622145/2025	23-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (pihak eksternal) 16 orang an. Zulhamdi sesuai ST No: B.713/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
68	259991330097452	28-07-2025	44,835,000	NON GAJI	00837T/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Paket Meeting Fullboard sesuai BAST No: 363/PPK/622145/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, Kwitansi No: AWH-AR/25/06/00395 tanggal 24 Mei 2025
69	259991330099326	28-07-2025	1,050,000	NON GAJI	00841T/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Tely Dasaluti sesuai ST No: B.627/DJPKRL.3/KP.440/III/2025 tanggal 4 Maret 2025
70	259991330099403	28-07-2025	1,060,000	NON GAJI	00844T/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Anandinta Permatachani dkk sesuai ST No: B.517/DJPKRL.3/KP.440/II/2025 tanggal 21 Februari 2025
71	259991330099402	28-07-2025	1,050,000	NON GAJI	00842T/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Anandinta Permatachani sesuai ST No: B.627/DJPKRL.3/KP.440/III/2025 tanggal 4 Maret 2025
72	259991330099325	28-07-2025	1,855,000	NON GAJI	00843T/622145/2025	24-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.517/DJPKRL.3/KP.440/II/2025 tanggal 21 Februari 2025
73	259991320175490	31-07-2025	28,263,289	NON GAJI	00899T/622145/2025	29-07-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pengadaan Alat Pendukung Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sesuai BAST No: 1846/DJPK.1/PPK/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025, Kwitansi No: 036/KW/HMS/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
74	259991330110564	31-07-2025	10,000,000	CUP	00922T/622145/2025	30-07-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
75	259991531005969	01-08-2025	188,883,948	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00777T/622145/2025	21-07-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juli Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
76	259991330116375	05-08-2025	1,852,500	NON GAJI	00952T/622145/2025	01-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Juli 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
77	259991330132440	11-08-2025	96,151,200	NON GAJI	01017T/622145/2025	07-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas luar negeri 1 orang a.n Ahmad Aris sesuai ST No: B.635/DJPK/KP.440/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025. Surat Setneg No: B-00001512/KSN/S/PDLN/LN.00/07/2025 tanggal 16 Juli 2025
78	259991330133355	12-08-2025	6,546,151	NON GAJI	01007T/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang an. Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.897/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025
79	259991330133353	12-08-2025	795,000	NON GAJI	01010T/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Mahatma Alvinia Putri dkk sesuai ST No: B.710/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
80	259991330133352	12-08-2025	478,500	NON GAJI	01009T/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Anandinta Permatachani sesuai ST No: B.575/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 28 Mei 2025
81	259991330133354	12-08-2025	795,000	NON GAJI	01008T/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.710/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025
82	259991330135266	12-08-2025	7,849,780	NON GAJI	01031T/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Masterina Rahmadya sesuai ST No. B.1520/DJPK/KP.440/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025
83	259991330135273	12-08-2025	23,549,340	NON GAJI	01030T/622145/2025	08-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Heri Rasdiana dkk sesuai ST No: B.1520/DJPK/KP.440/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025
84	259991330141171	14-08-2025	61,922,520	NON GAJI	01061T/622145/2025	12-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas luar negeri - Uang Harian a.n Ahmad Aris sesuai ST No. B.635/DJPK/KP.440/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025. Surat Setneg No. B-00001512/KSN/S/PDLN/LN.00/07/2025 tanggal 16 Juli 2025
85	259991330147525	19-08-2025	499,000	NON GAJI	01100T/622145/2025	14-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Anandinta Permatachani sesuai ST No: B.1228/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025
86	259991330147527	19-08-2025	2,606,000	NON GAJI	01083T/622145/2025	14-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.1102/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025
87	259991330147526	19-08-2025	1,060,000	NON GAJI	01087T/622145/2025	14-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.1181/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025
88	259991330155705	22-08-2025	1,060,000	NON GAJI	01120T/622145/2025	20-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 3 orang a.n Partini dkk sesuai ST No: B.1315/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025
89	259991330155695	22-08-2025	795,000	NON GAJI	01121T/622145/2025	20-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 2 orang a.n Yoga Dwi Priyatmoko dkk sesuai ST No: B.1302/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
90	259991330160528	22-08-2025	129,766,606	CUP	01129T/622145/2025	21-08-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP)
91	259991330170105	27-08-2025	19,998,848	CUP	01171T/622145/2025	26-08-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Dit.P3K)
92	259991330170372	28-08-2025	51,430,000	NON GAJI	01168T/622145/2025	26-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas pihak eksternal 72 orang a.n Yeanes Riwu, S.Pi dkk sesuai ST No: 523/236/Dpi 4.1 tanggal 30 Juli 2025
93	259991330171817	28-08-2025	13,825,000	NON GAJI	01170T/622145/2025	26-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang honor narasumber pihak eksternal 8 orang a.n Jusup B. Messakh, S.Pd dkk sesuai ST no. 000.1.2.3/256/Dpi/2025 tanggal 30 Juli 2025
94	259991531010009	01-09-2025	188,883,948	PENGHASILAN PPNPN INDUK	01130T/622145/2025	21-08-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Agustus Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
95	259991330177480	01-09-2025	19,776,200	NON GAJI	01183T/622145/2025	28-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas Non ASN 2 orang a.n Pria Wibawa Utama dkk sesuai ST No: B.1732/DJPk.4/KP.440/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2025
96	259991330177481	01-09-2025	80,514,200	NON GAJI	01182T/622145/2025	28-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas ASN 4 orang a.n Fahrizal Ari Iwari dkk sesuai ST No: B.1693/DJPk.4/KP.440/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025
97	259991330177479	01-09-2025	9,541,400	NON GAJI	01184T/622145/2025	28-08-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas pihak eksternal 4 orang a.n Frits Nataniel Yohanes Rumbino dkk sesuai ST No: B.1733/DJPk.4/KP.440/VIII/2026 tanggal 25 Agustus 2025
98	259991330183486	03-09-2025	9,196,320	NON GAJI	01206T/622145/2025	01-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Simon Boyke Sinaga sesuai ST No: B.857/DJPk.4/KP.440/V/2025 tanggal 26 Juni 2025
99	259991330183487	03-09-2025	1,852,500	NON GAJI	01205T/622145/2025	01-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Agustus 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
100	259991330183480	03-09-2025	2,300,000	NON GAJI	01207T/622145/2025	01-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Irfan Darmawan sesuai ST No: B.1206/DJPk.4/KP.440/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025
101	259991310569601	08-09-2025	262,995,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	01226T/622145/2025	03-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pengadaan Drone RealTime Kinematics pada Pengelolaan Lahan Garam sesuai Kontrak No: EP-01K0XYV0B6SXR1RHKCONPJ6AZP tgl 28-07-2025, BAST No: 2396/BAST/PPK/DJPk/VIII/2025 tgl 28-8 -2025, BAP No: 2397/PPK/DJPk/VIII/2025
102	259991320320699	10-09-2025	44,325,000	NON GAJI	01250T/622145/2025	08-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Alat pendukung survey sesuai BAST No: 2463/DJPk.1/PPK/IX/2025 tanggal 4 September 2025, Kwitansi No: 88/KW/PIN/IX/2025 tanggal 4 September 2025
103	259991702029494	10-09-2025	-	GTUP NIHIL	01281T/622145/2025	09-09-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP P3K)
104	259991702029869	11-09-2025	-	GTUP NIHIL	01290T/622145/2025	10-09-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
105	259991330208285	12-09-2025	19,279,280	NON GAJI	01289T/622145/2025	10-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Muhammad Nurkholis Fauzi dkk sesuai ST No: B.1206/DJPk.4/KP.440/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025
106	259991330211927	15-09-2025	96,151,200	NON GAJI	01306T/622145/2025	11-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas luar negeri - Tiket. 1 orang a.n Ahmad Aris sesuai ST No: B.635/DJPk/KP.440/VII/2025, tanggal 28

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
								Juli 2025, Surat Setneg No: B-00001512/KSN/S/PDLN/LN.00/07/2025, tanggal 16 Juli 2025
107	259991330212681	15-09-2025	1,900,000	NON GAJI	01308T/622145/2025	11-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Tely Dasaluti sesuai ST No: B.1890/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 9 September 2025
108	259991330212674	15-09-2025	28,000,000	NON GAJI	01309T/622145/2025	11-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Anandinta Permatachani dkk sesuai ST No: B.1890/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 9 September 2025
109	259991330219250	17-09-2025	11,724,000	NON GAJI	01335T/622145/2025	15-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Vivi Yovita Indriasari sesuai ST No: B.1948/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 15 September 2025
110	259991702031396	16-09-2025	-	GTUP NIHIL	01336T/622145/2025	15-09-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
111	259991330227077	22-09-2025	43,696,280	NON GAJI	01367T/622145/2025	18-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Masterina Rahmadya dkk, ST No: B.1980/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 16 September 2025
112	259991330227087	22-09-2025	56,927,580	NON GAJI	01366T/622145/2025	18-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n Heri Rasdiana dkk, ST No: B.1981/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 16 September 2025
113	259991330234323	24-09-2025	27,627,905	NON GAJI	01398T/622145/2025	22-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Simon Boyke Sinaga dkk sesuai ST No: B.1978/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 16 September 2025
114	259991330234314	24-09-2025	5,524,005	NON GAJI	01399T/622145/2025	22-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Irfan Darmawan sesuai ST No: B.1948/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 12 September 2025
115	259991330234324	24-09-2025	12,212,097	NON GAJI	01401T/622145/2025	22-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Ahmad Aris sesuai ST No: B.536/DJPK.4/KP.440/VII/2025 tanggal 17-Juli-2025
116	259991702034577	24-09-2025	-	GTUP NIHIL	01409T/622145/2025	23-09-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (ABT Garam Dit.P3K)
117	259991310703018	25-09-2025	44,144,144	NON GAJI	01403T/622145/2025	23-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pengembangan Aplikasi SIAP Kerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai BAST No: 2603/DJPK.1/PPK/IX/2025 tanggal 18-9-2025, Kwitansi No: KW-25-043 tanggal 19-9-2025
118	259991330238182	26-09-2025	2,650,000	NON GAJI	01411T/622145/2025	24-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 5 orang a.n Dwi Ismi Wulandari dkk sesuai ST No: B.1975/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 16 September 2025
119	259991330240576	26-09-2025	395,000	NON GAJI	01426T/622145/2025	24-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 1 orang a.n Achmad Sulaiman sesuai ST No: B.505/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 22 Mei 2025
120	259991330240485	26-09-2025	790,000	NON GAJI	01425T/622145/2025	24-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 2 orang a.n Saynuddin dkk sesuai ST No: B.505/DJPK.4/KP.440/V/2025 tanggal 22 Mei 2025
121	259991702035109	25-09-2025	-	GTUP NIHIL	01441T/622145/2025	24-09-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (ABT Garam Dit.P3K)
122	259991330244688	26-09-2025	14,999,449	GUP	01453T/622145/2025	26-09-2025	NON GAJI	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang (Dit.P3K 14.999.449)
123	259991531013683	01-10-2025	183,039,746	PENGHASILAN PPNPN INDUK	01393T/622145/2025	22-09-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan September Tahun 2025 untuk 34 Pegawai.

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
124	259991330248995	01-10-2025	3,509,635	NON GAJI	01497T/622145/2025	29-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Agus Suparman dkk sesuai ST No: B.1980/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 16 September 2025
125	259991330248996	01-10-2025	9,495,170	NON GAJI	01496T/622145/2025	29-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n Ahmad Aris dkk sesuai ST No: B. 1072/DJPK/KP.440/IX/2025 tanggal 18 September 2025
126	259991320405690	01-10-2025	43,077,973	NON GAJI	01495T/622145/2025	29-09-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal sesuai BAST No: BA.1671/DJPK.1/PPK/VI/2025 tgl 17/6/2025, Kwitansi No: 032/KW/HMS/VI/2025 tgl 23/9/2025
127	259991320422721	06-10-2025	3,554,000	NON GAJI	01517T/622145/2025	02-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal sesuai BAST No: BA.1672/DJPK.1/PPK/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025, Kwitansi No: 034/KW/HMS/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025
128	259991330260195	06-10-2025	45,866,215	NON GAJI	01526T/622145/2025	02-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (pihak eksternal) 7 orang a.n Paulus Henuk, SH dkk sesuai ST No: Pim.000.1.2.1/232/UM/2025 tanggal 9 September 2025
129	259991330260193	06-10-2025	10,494,320	NON GAJI	01521T/622145/2025	02-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Achmad Sulaiman dkk sesuai ST No: B.2085/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 24 September 2025
130	259991330260194	06-10-2025	42,899,900	NON GAJI	01520T/622145/2025	02-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 7 orang a.n Ahmad Aris dkk sesuai ST No: B.1100/DJPK/KP.440/IX/2025 tanggal 22 September 2025
131	259991330260372	06-10-2025	29,279,320	NON GAJI	01508T/622145/2025	02-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Simon Boyke Sinaga dkk sesuai ST No: B.2084/DJPK.4/KP.440/IX/2025 tanggal 24 September 2025
132	259991330263746	06-10-2025	1,852,500	NON GAJI	01528T/622145/2025	02-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang honor operasional satuan kerja bulan September 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
133	259991330286808	13-10-2025	49,905,149	CUP	01641T/622145/2025	10-10-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Dit.P3K)
134	259991310858527	16-10-2025	28,958,559	NON GAJI	01652T/622145/2025	14-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Paket Pertemuan Kegiatan Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 sesuai BAST No: 1944/PPK/DJPK.4/IX/2025 tgl 18/9/2025, Kwitansi No: AR-RCP-MJC-SEP-25-06738 tgl 18/9/2025
135	259991320479448	16-10-2025	8,820,000	NON GAJI	01653T/622145/2025	14-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai BAST No: 2672/DJPK.1/PPK/IX/2025 tgl 25/9/2025, Kwitansi No: 024/SM/AMHCC/IX/2025 tgl 25/9/2025
136	259991330297800	17-10-2025	29,766,920	NON GAJI	01671T/622145/2025	15-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Simon Boyke Sinaga dkk sesuai ST No: B.2303/DJPK.4/KP.440/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025
137	259991320485832	17-10-2025	9,062,000	NON GAJI	01670T/622145/2025	15-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Dit. P3K sesuai BAST No: 2742/DJPK.1/PPK/X/2025 tgl 2/10/2025, Kwitansi No: 92/KW/PIN/X/2025 tgl 4/10/2025
138	259991330310128	23-10-2025	16,182,200	NON GAJI	01696T/622145/2025	21-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Vivi Yovita Indriasari dkk sesuai ST No: B.2199/DJPK.4/KP.440/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
139	259991330313909	23-10-2025	1,530,000	NON GAJI	01734T/622145/2025	21-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang a.n Dwi Ismi Wulandari dkk sesuai ST No: B.2285/DJPK.4/KP.440/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025
140	259991330313908	23-10-2025	170,000	NON GAJI	01735T/622145/2025	21-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 1 orang a.n Angle Agata Nender sesuai ST No: B.2285/DJPK.4/KP.440/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025
141	259991310910625	24-10-2025	87,231,600	NON GAJI KONTRAKTUAL	01730T/622145/2025	22-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K5ZYQ27JPNRWVACQSRXWZP3N tgl 2/10/2025, BAST No: 2884/DJPK.1/PPK/X/2025 tgl 16/10/2025, BAP No: 2885/DJPK.1/PPK/X/2025 tgl 16/10/2025
142	259991310910694	24-10-2025	87,194,662	NON GAJI KONTRAKTUAL	01731T/622145/2025	22-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K5ZN22FTP3631TEE8FFMTXT tgl 1/10/2025, BAST No: 2912/DJPK.1/PPK/X/2025 tgl 19/10/2025, BAP No: 2901/DJPK.1/PPK/X/2025 tgl 19/10/2025
143	259991330320066	24-10-2025	7,231,000	GUP	01747T/622145/2025	23-10-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP Dit.P3K)
144	259991702047632	27-10-2025	-	GTUP NIHIL	01770T/622145/2025	24-10-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
145	259991702047631	27-10-2025	-	GTUP NIHIL	01769T/622145/2025	24-10-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
146	259991702048090	28-10-2025	-	GTUP NIHIL	01773T/622145/2025	27-10-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
147	259991330331319	31-10-2025	9,020,080	NON GAJI	01776T/622145/2025	29-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Irfan Darmawan sesuai ST No: B.2286/DJPK.4/KP.440/X/2025 tgl 13 Oktober 2025
148	259991330331322	31-10-2025	24,862,740	NON GAJI	01775T/622145/2025	29-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Tely Dasaluti dkk sesuai ST No: B.2222/DJPK.4/KP.440/X/2025 tgl 13 Oktober 2025
149	259991310954453	31-10-2025	85,276,375	NON GAJI KONTRAKTUAL	01774T/622145/2025	29-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K627D9A9FE4DG733PPF6YYW8 tgl 6/10/2025, BAST No: BA.2890/DJPK.1/PPK/X/2025 tgl 16/10/2025, BAP No: BA.2890.A/DJPK.1/PPK/X/2025 tgl 16/10/2025
150	259991702051803	31-10-2025	-	GTUP NIHIL	01799T/622145/2025	31-10-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP Dit.P3K)
151	259991330294139	15-10-2025	8,843,000	GUP KKP	01651T/622145/2025	14-10-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP a.n Heri Rasdiana No. 4365 8300 5016 6207)
152	259991330294140	15-10-2025	12,987,000	GUP KKP	01650T/622145/2025	14-10-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP a.n. Ahmad Aris : 4365 8300 5016 5993)
153	259991320508852	23-10-2025	4,109,376,758	NON GAJI KONTRAKTUAL	01729T/622145/2025	21-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K2C95M78QTHF9KWC4MF7D7ZD tgl 19/8/2025, BAST No: 2115/PPK/DJPK.4/ABT/X/2025 tgl 2/10/2025, BAP No: 2192/PPK/DJPKRL.3/X/2025 tgl 7/10/2025
154	259991531017748	01-11-2025	101,295,734	PENGHASILAN PPNPN INDUK	01732T/622145/2025	21-10-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Oktober Tahun 2025 untuk 19 Pegawai.
155	259991310970452	04-11-2025	84,217,500	NON GAJI KONTRAKTUAL	01780T/622145/2025	31-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K5DYN3S3SBX6DDAM99ENWH18-AD01 tgl 8/10/2025, BAST No: 2960A/PPK/DJPKRL.1/X/2025 tgl 23/10/2025, BAP No: 2967/PPK/DJPK.1/X/2025 tgl 24/10/2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
156	259991310970698	04-11-2025	87,468,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	01781T/622145/2025	31-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: P-01K5DXEC406Z0B8TFT1X68TE1A-AD01 tgl 8/10/2025, BAST No: 2960C/PPK/DJPKRL.1/X/2025 tgl 23/10/2025, BAP No: 2968/PPK/DJPK.1/X/2025 tgl 24/10/2025
157	259991310970699	04-11-2025	85,202,500	NON GAJI KONTRAKTUAL	01779T/622145/2025	31-10-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K57WNX8CTYV9P2GH1RWPSG9W-AD01 tgl 8/10/2025, BAST No: 2959/PPK/DJPK.1/X/2025 tgl 23/10/2025, BAP No: 2958/PPK/DJPK.1/X/2025 tgl 23/10/2025
158	259991702051803	31-10-2025	-	GTUP NIHIL	01799T/622145/2025	31-10-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP Dit.P3K)
159	259991320557570	05-11-2025	28,432,025	NON GAJI	01811T/622145/2025	03-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pekerjaan Belanja Alat Pendukung Survei di Dit. P3K sesuai BAST No: 3005/DJPK.1/PPK/X/2025 tgl 28/10/2025, Kwitansi No: 128/KW/PIN/X/2025 tgl 29/10/2025
160	259991330343916	05-11-2025	43,499,730	NON GAJI	01819T/622145/2025	03-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Banyuasin, di Provinsi Sumatera Selatan sesuai BAST No: 2891/DJPK.1/PPKA/X/2025 tgl 17/10/2025, Kwitansi No: 032/GM/X/20 25 tgl 17/10/2025
161	259991320563529	05-11-2025	43,481,982	NON GAJI	01821T/622145/2025	03-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Banyuasin 2 di Provinsi Sumatera Selatan sesuai BAST No: 2893/DJPK.1/PPKA/X/2025 tgl 17/10/2025, Kwitansi No: 028/KW/KPG /X/2025 tgl 17/10/2025
162	259991330348976	06-11-2025	1,852,500	NON GAJI	01829T/622145/2025	04-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Oktober 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPRL-KPA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025
163	259991320580608	07-11-2025	24,598,378	NON GAJI	01844T/622145/2025	05-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Merauke 2 sesuai BAST No: 3048/PPK/DJPK.4/X/2025 tgl 31/10/2025, Kwitansi No: 21/BCM/KW/X/2025 tgl 31/10/2025
164	259991320580611	07-11-2025	62,941,500	NON GAJI KONTRAKTUAL	01859T/622145/2025	05-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: SP:EP-01K8M8GS12CMKHXTTD95CB85M tgl 29/10/2025, BAST No: 3064/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 3/11/2025, BAP No: 3065/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 3/11/2025
165	259991320580609	07-11-2025	40,997,298	NON GAJI	01843T/622145/2025	05-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Aceh Utara 2 sesuai BAST No: 3022/PPK/DJPK.4/X/2025 tgl 30/10/2025, Kwitansi No: 016/BCM/KW/X/2025 tgl 30/10/2025
166	259991320580610	07-11-2025	46,560,950	NON GAJI KONTRAKTUAL	01860T/622145/2025	05-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8M7Z2VFGWNVHNFXYFFV729 tgl 29/10/2025, BAST No: 3068/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 3/11/2025, BAP No: 3069/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 3/11/2025
167	259991702054073	06-11-2025	-	GTUP NIHIL	01863T/622145/2025	05-11-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (ABT P3K)
168	259991702054069	06-11-2025	-	GTUP NIHIL	01848T/622145/2025	05-11-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (ABT P3K)
169	259991311019659	07-11-2025	87,468,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	01861T/622145/2025	05-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8ME32QTKVQJKEOWT8DHF0H5 tgl 29/10/2025, BAST No: 3066/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 3/11/2025, BAP No: 3067/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 3/11/2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
170	259991311032496	10-11-2025	68,897,192	NON GAJI KONTRAKTUAL	01846T/622145/2025	06-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K49V25X7BKQXWFZ2BXGKBSFW tgl 10/9/2025, BAST No: 2924/DJPK.1/PPKA/X/2025 tgl 20/10/2025, BAP No: 2925/DJPK.1/PPKA/X/2025 tgl 20/10/2025
171	2.59991E+14	11-11-2025	22,428,450	NON GAJI	01886T/622145/2025	07-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pendukung Survei di Dit. P3K sesuai BAST No: 3080/DJPK.1/PPK/X/2025 tgl 04/11/2025, Kwitansi No: 86/KW/TAJ/XI/2025 tgl 04/11/2025
172	2.59991E+14	11-11-2025	17,197,567	NON GAJI	01883T/622145/2025	07-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat sesuai BAST No: 2895/DJPK.1/PPKA/X/2025 tgl 17/10/2025, Kwitansi No: 035/GM/X/2025 tgl 17/10/2025
173	259991311043201	11-11-2025	86,338,599	NON GAJI KONTRAKTUAL	01887T/622145/2025	07-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K6FEKRG8R2E3DGR9SJD8MD98 tgl 8/10/2025, BAST No: BA.3077/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 4/11/2025, BAP No: BA.3078/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 4/11/2025
174	259991311059824	11-11-2025	87,468,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	01916T/622145/2025	07-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8SEAFEEJ1ROBVF8CB42GZZY tgl 1/11/2025, BAST No: 3071/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 4/11/2025, BAP No: 3072/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 4/11/2025
175	259991340089591	14-11-2025	33,000,000	NON GAJI	01965T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bibit Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kab. Raja Ampat sesuai BAST No: 2763/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 12/11/2025, Kwitansi No: 007/M M/XI/2025 tgl 12/11/2025
176	259991340089590	14-11-2025	38,000,000	NON GAJI	01966T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Propagul dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Kab. Raja Ampat sesuai BAST No: 2764/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 12/11/2025, Kwitansi No: 005/MM/XI/2025 tgl 12/11/2025
177	259991340089578	14-11-2025	42,187,500	NON GAJI	01928T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bibit Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 2681/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 07/11/2025, Kwitansi No: tgl 30/12/1899
178	259991340089579	14-11-2025	42,187,500	NON GAJI	01927T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bibit Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 2603/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 03/11/2025, Kwitansi No: tgl 30/12/1899
179	259991340089589	14-11-2025	27,540,000	NON GAJI	01967T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Mangrove dalam Rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kab. Raja Ampat sesuai BAST No: 2765/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 12/11/2025, Kwitansi No: 006/MM/XI/2025 tgl 12/11/2025
180	259991311078415	14-11-2025	41,350,000	NON GAJI	01922T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Lamun dalam Rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru P. Kapopsang Kab. Pangkajene Kepulauan sesuai BAST No: 2674/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 11/07/2025, Kwitansi No: 002/WS/XI/2025 tgl 11
181	259991311078412	14-11-2025	45,000,000	NON GAJI	01932T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Propagul Mangrove, dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Maluku Tenggara sesuai BAST No: 2679/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/X/2025 tgl 07/11/2025, Kwitansi No: 003/PMBB/XI/2025 tgl 07/11/2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
182	259991311078419	14-11-2025	31,500,000	NON GAJI	01934T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Propagul Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Alor sesuai BAST No: 2685/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 07/11/2025, Kwitansi No: 007 /FKNK/XI/2025 tgl 07/11/2025
183	259991311078421	14-11-2025	49,999,000	NON GAJI	01929T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bibit Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Alor sesuai BAST No: 2605/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 03/11/2025, Kwitansi No: 001/FK NK/XI/2025 tgl 03/11/2025
184	259991311078414	14-11-2025	35,000,000	NON GAJI	01964T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Propagul Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Maluku Tenggara sesuai BAST No: 2759/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/X/2025 tgl 12/11/2025, Kwitan si No: 007/PMBB/XI/2025 tgl 12/11/2025
185	259991311078420	14-11-2025	42,000,000	NON GAJI	01933T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Propagul Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Alor sesuai BAST No: 2607/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 03/11/2025, Kwitansi No: 002 /FKNK/XI/2025 tgl 03/11/2025
186	259991311078417	14-11-2025	30,000,000	NON GAJI	01968T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Lamun dalam Rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Kab. Pangkep, Pulau Kapoposang sesuai BAST No: 2766/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 12/11/2025 , Kwitansi No: 003/WS/X/2025 tgl 12/11/
187	259991311078413	14-11-2025	25,000,000	NON GAJI	01918T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai BAST No: 2642/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 05/11/2025, Kwitansi No: 002/PMBB/XI/2025 tgl 06/11/2025
188	259991311078418	14-11-2025	49,999,000	NON GAJI	01931T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bibit Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Alor sesuai BAST No: 2683/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 07/11/2025, Kwitansi No: 006/FK NK/XI/2025 tgl 07/11/2025
189	259991311078422	14-11-2025	41,350,000	NON GAJI	01924T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Lamun dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru P. Gondongbali Kab. Pangkajene Kepulauan sesuai BAST No: 2675/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 11/07/2025, Kwitansi No: 002/CB/X/2025 t
190	259991311078411	14-11-2025	45,000,000	NON GAJI	01930T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Propagul Mangrove, dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Maluku Tenggara sesuai BAST No: 2601/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/X/2025 tgl 03/11/2025, Kwita nsi No: 001/PMBB/XI/2025 tgl 03/11/2025
191	259991311078423	14-11-2025	48,000,000	NON GAJI	01923T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Lamun dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru P. Gondongbali Kab. Pangkajene Kepulauan sesuai BAST No: 2597/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 11/03/2025, Kwitansi No: 001/CB/X/2025 t
192	259991311078416	14-11-2025	48,000,000	NON GAJI	01921T/622145/2025	12-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Lamun dlm rgk Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru P. Kapopsang Kab. Pangkajene Kepulauan sesuai BAST No: 2596/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 11/03/2 025, Kwitansi No: 001/WS/X/2025 tgl 11/
193	259991311096074	14-11-2025	30,000,000	NON GAJI	01969T/622145/2025	13-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Lamun dalam Rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Kab. Pangkep, Pulau Gondongbali sesuai BAST No: 2767/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 12/11/202 5, Kwitansi No: 003/CB/X/2025 tgl 12/11

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
194	259991340090814	14-11-2025	39,000,000	NON GAJI	01920T/622145/2025	13-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bibit Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Raja Ampat sesuai BAST No: 2673/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 11/07/2025, Kwitansi No: 004/MM/XI/202 5 tgl 11/07/2025
195	259991340090813	14-11-2025	42,000,000	NON GAJI	01925T/622145/2025	13-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Propagul Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Mangrove Kab. Raja Ampat sesuai BAST No: 2652/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 06/11/2025, Kwitansi No: 002/MM/X I/2025 tgl 06/11/2025
196	259991340090815	14-11-2025	48,000,000	NON GAJI	01919T/622145/2025	13-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bibit Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Raja Ampat sesuai BAST No: 2595/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 11/03/2025, Kwitansi No: 001/MM/XI/202 5 tgl 11/03/2025
197	259991340090812	14-11-2025	45,000,000	NON GAJI	01926T/622145/2025	13-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Ekosistem Karbon Biru Kab. Raja Ampat sesuai BAST No: 2653/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 06/11/2025, Kwitansi No: 003/MM/XI/2025 tgl 06/11/20
198	259991311096520	17-11-2025	36,365,000	NON GAJI	01962T/622145/2025	13-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Ajir Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 2689/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 07/11/2025, Kwitansi No: 00 5/KUBS/XI/2025 tgl 07/11/2025
199	259991311096521	17-11-2025	31,250,000	NON GAJI	01961T/622145/2025	13-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Propagul Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 2687/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 07/11/2025, Kwitansi No : 004/KUBS/XI/2025 tgl 07/11/2025
200	259991311100171	17-11-2025	87,083,850	NON GAJI KONTRAKTUAL	01963T/622145/2025	13-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K87YX9EAKTE6PVE34XHT3J1N tgl 29/10/2025, BAST No: BA.3092/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 06/11/2025, BAP No: BA.3093/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 06/11/2025
201	259991311100325	14-11-2025	86,839,570	NON GAJI KONTRAKTUAL	01959T/622145/2025	13-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K80C5D61NBZD588Z4H8CAS8N tgl 27/10/2025, BAST No: 3095/PPK/DJPKRL.1/X /2025 tgl 06/11/2025, BAP No: 3102/PPK/DJPK.1/X/2025 tgl 07/11/2025
202	259991340091303	18-11-2025	27,220,000	NON GAJI	01983T/622145/2025	14-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarpras Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 2691/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 07/11/2025, Kwitansi No: 2025/11/977 tgl 07/11/2025
203	259991311101752	18-11-2025	31,500,000	NON GAJI	01984T/622145/2025	14-11-2025	NON GAJI	PengadPembayaran belanja barang Pengadaan Propagul Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Alor sesuai BAST No: 2761/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 12/11/2025, Kwitansi N o: 008/FKKNK/XI/2025 tgl 12/11/2025
204	259991330384143	18-11-2025	5,259,370	NON GAJI	01989T/622145/2025	14-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (Pihak eksternal) 5 orang a.n Fajar Adi Purnama dkk sesuai ST No: B.2515/DJPK.4/KP.440/X/2025 tgl 29 Oktober 2025
205	259991330384140	18-11-2025	3,774,500	NON GAJI	01988T/622145/2025	14-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 a.n Irfan Darmawan sesuai ST No: B.2580/DJPK.4/KP.440/XI/2025 tgl 3 November 2025
206	259991330384142	18-11-2025	29,950,648	NON GAJI	01987T/622145/2025	14-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Vivi Yovita Indriasari dkk sesuai ST No: B.2468/DJPK.4/KP.440/X/2025 tgl 27 Oktober 2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
207	259991311103088	18-11-2025	48,600,000	NON GAJI	01981T/622145/2025	14-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kota Tarakan 1 sesuai Kwitansi No: 004/IOMT.CS/XI /2A25 tgl 12/11/2025
208	259991311103089	18-11-2025	48,600,000	NON GAJI	01982T/622145/2025	14-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kota Tarakan 2 sesuai Kwitansi No: 005/IOMT.CS/XI /2A25 tgl 12/11/2025
209	259991311119547	19-11-2025	89,100,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	01960T/622145/2025	17-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8VWVOPXDNE14R45ZS9T3AGD tgl 02/11/2025, BAST No: 3133/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 10/11/2025, BAP No: 3134/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 10/11/2025
210	259991311140774	21-11-2025	1,610,000	NON GAJI	02039T/622145/2025	19-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Lamun dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Kab. Pangkep, Pulau Kapoposang sesuai BAST No: 2838/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 18/11/2025 , Kwitansi No: 004/WS/X/2025 tgl 18/11/
211	259991311140775	21-11-2025	1,610,000	NON GAJI	02040T/622145/2025	19-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Lamun dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Kab. Pangkep, Pulau Gondongbali sesuai BAST No: 2840/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 18/11/2025 5, Kwitansi No: 004/CB/X/2025 tgl 18/11/
212	259991311142917	21-11-2025	87,659,336	NON GAJI KONTRAKTUAL	02041T/622145/2025	19-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9E1SRG0A8D0B4576Y5X9KBC tgl 08/11/2025, BAST No: 3202/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 17/11/2025, BAP No: 3203/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 17/11/2025
213	2.59991E+14	24-11-2025	88,403,750	NON GAJI KONTRAKTUAL	02042T/622145/2025	20-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8T1EM8V8DS2ZF5N0C8W9SSY tgl 02/11/2025, BAST No: BA.2789/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 14/11/2025, BAP No: BA.2837/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 18/11/2025
214	259991702062569	24-11-2025	-	GTUP NIHIL	02071T/622145/2025	21-11-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
215	259991330408190	25-11-2025	1,125,000	NON GAJI	02068T/622145/2025	21-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Yono Haryono dkk sesuai ST No: B.2422/DJPK.4/KP.440/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025
216	259991330408131	25-11-2025	2,425,000	NON GAJI	02069T/622145/2025	21-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Agung Aji Nugraha sesuai ST No: B.2422/DJPK.4/KP.440/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025
217	259991702063887	25-11-2025	-	GTUP NIHIL	02094T/622145/2025	24-11-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
218	259991702063888	25-11-2025	-	GTUP NIHIL	02111T/622145/2025	24-11-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra Dit.P3K)
219	259991702064831	26-11-2025	-	GTUP NIHIL	02114T/622145/2025	25-11-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP P3K)
220	259991330421167	28-11-2025	7,100,000	NON GAJI	02121T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Kab. Raja Ampat sesuai BAST No: 2942/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 24/11/2025, Kwitansi N o: 023/2025 tgl 24/11/2025
221	259991311195112	28-11-2025	5,400,000	NON GAJI	02120T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai BAST No: 2940/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 24/11/2025, Kwitansi No: 015/PMBB/XI/2025 tgl 24/11/2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
222	259991311195113	28-11-2025	2,960,000	NON GAJI	02123T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Alor sesuai BAST No: 2960/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 25/11/2025, Kwitansi No: 010/MS/XI/2025 tgl 25/11/2025
223	259991311195114	28-11-2025	3,500,000	NON GAJI	02122T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 2958/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 25/11/2025, Kwi tansi No: 2025/11/1015 tgl 25/11/2025
224	259991702066276	27-11-2025	-	GTUP NIHIL	02124T/622145/2025	26-11-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan belanja barang (PNBP P3K)
225	259991330421798	28-11-2025	24,424,880	NON GAJI	02129T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Mochammad Rizki Rohmatullah dkk sesuai ST No: B.2749/DJPK.4/KP.440/X/2025 tanggal 12 November 2025
226	259991330421779	28-11-2025	5,103,196	NON GAJI	02130T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Irfan Darmawan sesuai ST No: B.2580/DJPK.4/KP.440/XI/2025 tanggal 3 November 2025
227	2.59991E+14	28-11-2025	85,580,740	NON GAJI KONTRAKTUAL	02128T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9E6EP5FDNXX2SOP19KX74GQ tgl 12/11/2025, BAST No: 3275/PPK/DJPKRL.1/XI/2025 tgl 24/11/2025, BAP No: 3282/PPK/DJPK.1/X/2025 tgl 25/11/2025
228	259991311196105	28-11-2025	23,959,459	NON GAJI	02119T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang pembuatan perahu fiber 1 unit sesuai BAST No: 3248/DJPK.1/PPKA/XI/2025 tgl 21/11/2025, Kwitansi No: 128 /WALUYA/XI/2025 tgl 21/11/2025
229	259991311196112	28-11-2025	44,262,883	NON GAJI	02126T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Asmat 2 sesuai BAST No: 3280A/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 24/11/2025, Kwitansi No: 13/KW/CVPA/XI/2025 tgl 24/11/2025
230	259991311196113	28-11-2025	43,429,626	NON GAJI	02125T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Asmat 1 sesuai BAST No: 3246/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 21/11/2025, Kwitansi No: 07/PI/XI/2025 tgl 21/11/2025
231	259991311196109	28-11-2025	75,648,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	02127T/622145/2025	26-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8W7WYXNK2EMQ7E5ZRD SYN36 tgl 06/11/2025, BAST No: 3233/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 20/11/2025, BAP No: 3280C/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 24/11/2025
232	259991702067031	27-11-2025	-	GTUP NIHIL	02140T/622145/2025	27-11-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP P3K)
233	259991702067906	28-11-2025	-	GTUP NIHIL	02157T/622145/2025	27-11-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP P3K)
234	259991320647631	20-11-2025	648,016,664	NON GAJI KONTRAKTUAL	02015T/622145/2025	18-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 1942/PPK/DJPK.4/ABT/IX/2025 tgl 18/9/2025, BAPP No: 2778/BAPP/PPK/DJPK.4/ABT/XI/2025 tgl 13/11/2025, BAP No: 2787/BAP IPPKIDJPK.4/ABT/XI/2025 tgl 17/11/2025
235	259991531021990	01-12-2025	107,139,935	PENGHASILAN PPNNP INDUK	02110T/622145/2025	25-11-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNNP Bulan November Tahun 2025 untuk 20 Pegawai.

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
236	259991311207756	01-12-2025	21,600,000	NON GAJI	02156T/622145/2025	27-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai BAST No: 2944/PPK-PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 24/11/2025, Kwitansi No: 006/KUBS/XI/2025 tgl 24/11/2025
237	259991311214335	02-12-2025	17,500,000	NON GAJI	02164T/622145/2025	28-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Penanaman Mangrove (Ajir) dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Alor sesuai BAST No: 2964/PPK-PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 25/11/2025, K witansi No: 011/FKNK/XI/2025 tgl 25/11/
238	259991311216072	02-12-2025	87,768,425	NON GAJI KONTRAKTUAL	02155T/622145/2025	28-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8MNFHMQRX9CGG8G4MWY53H8C-AD01 tgl 17/11/2025, BAST No: 3295/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 26/11/2025, BAP No: 3296/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 26/11/2025
239	259991330430179	02-12-2025	41,911,750	NON GAJI	02149T/622145/2025	28-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data Dit. P3K sesuai BAST No: 3278/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 24/11/2025, Kwitansi No: 89/KW/TAJ/XI/2025 tgl 24/11/2025
240	259991320704411	02-12-2025	20,627,941	NON GAJI	02148T/622145/2025	28-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data Dit. P3K sesuai BAST No: 3250/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 21/11/2025, Kwitansi No: 68/KWT/AM/XI/2025 tgl 21/11/2025
241	259991320704397	02-12-2025	33,835,193	NON GAJI	02147T/622145/2025	28-11-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data Dit. P3K sesuai BAST No: 3227/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 19/11/2025, Kwitansi No: 77/KW/ARJ/XI/2025 tgl 19/11/2025
242	259991311235820	03-12-2025	34,000,000	NON GAJI	02176T/622145/2025	01-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Upah Penanaman Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Alor sesuai BAST No: 2990/PPK-PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 28/11/2025, Kwitansi No: 013/F KNK/XI/2025 tgl 28/11/2025
243	259991311237054	03-12-2025	84,036,260	NON GAJI KONTRAKTUAL	02175T/622145/2025	01-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8W9J6KCFATQ3B3FV5WCQAC4 tgl 03/11/2025, BAST No: BA.3297/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAP No: BA.3298/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025
244	259991311237058	03-12-2025	4,461,340	NON GAJI	02165T/622145/2025	01-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bantuan Ekonomi Produktif di Kabupaten Majene sesuai BAST No: 3310b/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, Kwitansi No: 0134b/CV.CM/2025 tgl 27/11/2025
245	259991311237057	03-12-2025	78,882,525	NON GAJI KONTRAKTUAL	02169T/622145/2025	01-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9E2V2A08X7GVHN2TXFVT6K7 tgl 10/11/2025, BAST No: 3310a/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAP No: 3310c/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025
246	259991320724599	04-12-2025	86,696,745	NON GAJI KONTRAKTUAL	02190T/622145/2025	02-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8MYSZT5BGROSPHH739003C2 tgl 30/10/2025, BAST No: BA.3310F/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAP No: BA.3345/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 01/12/2025
247	259991311258553	04-12-2025	83,675,750	NON GAJI KONTRAKTUAL	02191T/622145/2025	02-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9VCTD3D3ZT94QVN9224SDQA tgl 19/11/2025, BAST No: 3303/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAP No: 3341/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 01/12/2025
248	259991320731851	05-12-2025	166,900,834	NON GAJI KONTRAKTUAL	02177T/622145/2025	03-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 2861/PPK/DJPKRL.3/XI/2025 tgl 19/11/2025, BAST No: 2992/PPK/DJPKRL.3/XI/2025 tgl 28/11/2025, BAP No: 2993/PPK/DJPKRL.3/XI/2025 tgl 28/11/2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
249	259991311269319	05-12-2025	87,322,468	NON GAJI KONTRAKTUAL	02189T/622145/2025	03-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K8PT96REA8CW08P4ERYFVZR2 tgl 21/11/2025, BAST No: 3292a/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 26/11/2025, BAP No: 3293/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 26/11/2025
250	259991311271761	05-12-2025	22,716,400	NON GAJI	02195T/622145/2025	03-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Biaya Pemeliharaan Kendaraan Mobil Dinas sesuai Kwitansi No: 0650/NT-AG/12-25 tgl 01/12/2025
251	259991330446974	05-12-2025	14,727,940	NON GAJI	02196T/622145/2025	03-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Ahmad Aris dkk sesuai ST No: B.1630/DJPK/KP.440/XI/2025 tgl 18 November 2025
252	259991320746364	05-12-2025	87,665,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	02219T/622145/2025	03-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9E1HA8SV7AYV6PSC99NOEHN tgl 12/11/2025, BAST No: BA.3352/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 02/12/2025, BAP No: BA.3353/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 02/12/2025
253	259991320752662	08-12-2025	17,730,000	NON GAJI	02222T/622145/2025	04-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pekerjaan Pengadaan Pendukung Fasilitas Perizinan sesuai Kwitansi No: 121/KW/KPG/XII/2025 tgl 03/12/2025
254	259991330469484	10-12-2025	12,015,519	NON GAJI	02263T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Eksternal) an.Wiji.kk(Rembang,Balikipapan,Cilegon).Dit SDK sesuai ST Nomor 800.1.11.1/334/2025 tgl 24 November 2025 sebesar Rp. 12.015.519.-
255	259991311335393	10-12-2025	24,000,000	NON GAJI	02236T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Biaya/Upah Penanaman Mangrove untuk 200 HOK dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Maluku Tenggara sesuai BAST No: 2983/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XI/2025 tgl 27/11/2025, Kwitansi No: 017/PMBB/XI/202
256	259991311335230	10-12-2025	86,885,865	NON GAJI KONTRAKTUAL	02239T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9BD8CJEENBG58DH8FRC9P41 tgl 08/11/2025, BAST No: BA.3377/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 04/12/2025, BAP No: BA.3378/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 04/12/2025
257	259991311335231	10-12-2025	86,443,600	NON GAJI KONTRAKTUAL	02238T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01KANMPVHXOS8PVX6JJM9RGET9 tgl 25/11/2025, BAST No: 3375/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 04/12/2025, BAP No: 3376/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 04/12/2025
258	259991311336547	10-12-2025	36,400,000	NON GAJI	02266T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Pulau Kapoposang Kab. Pangkep sesuai BAST No: 3098/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XII/2025 tgl 05/12/2025, Kwitansi No: 005/WS/XII/2025 tgl 05/12/2025
259	259991311336548	10-12-2025	36,400,000	NON GAJI	02267T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Ekosistem Karbon Biru Pulau Gondongbali Kab. Pangkep sesuai BAST No: 3099/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XII/2025 tgl 05/12/2025, Kwitansi No: 005/CB/XII/2025 tgl 05/12/2025
260	259991340109658	10-12-2025	33,000,000	NON GAJI	02268T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pembayaran Upah Tenaga Kerja Penanaman Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru Kabupaten Raja Ampat sesuai BAST No: 3097/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XII/2025 tgl 05/12/2025, Kwitansi No: 008/MM/XII/2025 tgl
261	259991311337208	10-12-2025	85,038,333	NON GAJI KONTRAKTUAL	02269T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K99D9NSQ9PCKQA1G3XWF4T92 tgl 14/11/2025, BAST No: BA.3393/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 05/12/2025, BAP No: BA.3394/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 05/12/2025
262	259991311337536	10-12-2025	42,562,000	NON GAJI	02272T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Karimun 2 sesuai BAST No:

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
								3380E/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 04/12/2025, Kwitansi No: 13/CVARM/XII/2025 tgl 04/12/2025
263	259991330470748	10-12-2025	14,653,500	NON GAJI	02274T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Irfan Darmawan dkk sesuai ST No: B.2901/DJPK.4/KP.440/XI/2025 tanggal 25 November 2025
264	259991330470798	10-12-2025	32,339,098	NON GAJI	02273T/622145/2025	08-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Heri Rasdiana dkk sesuai ST No: B.2904/DJPK.4/KP.440/XI/2025 tanggal 25 November 2025
265	259991330488691	11-12-2025	103,923,177	PENGHASILAN PPNPN SUSULAN	02312T/622145/2025	09-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Susulan Bulan Desember Tahun 2025 untuk 20 Pegawai.
266	259991311383614	12-12-2025	6,688,500	NON GAJI	02355T/622145/2025	10-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Paket Meeting Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sesuai Kwitansi No : 982/XII/MJSB/2025 tgl 01/12/2025
267	259991311388790	15-12-2025	45,600,000	NON GAJI	02369T/622145/2025	11-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pembayaran Penyelesaian Penanaman Mangrove dalam rangka Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru di Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 3150/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XII/2025 tgl 09/12/2025, Kwitansi No: 010/KUBS/XII/2025 tgl
268	259991311390286	15-12-2025	79,785,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	02316T/622145/2025	11-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9RACXKNAZ7RC2B89J61YF9G.Add.01 tgl 27/11/2025, BAST No: 3419/DJPK.1/PPKA/XII/2025 tgl 08/12/2025, BAP No: 3420./DJPK.1/PPKA/XII/2025 tgl 08/12/2025
269	259991311398954	12-12-2025	262,665,517	NON GAJI KONTRAKTUAL	02324T/622145/2025	11-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9V9XW2TBVT7NESC1MXMNZQ tgl 14/11/2025, BAST No: BA.3428/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 08/12/2025, BAP No: BA.3429/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 08/12/2025
270	259991320823272	16-12-2025	166,151,770	NON GAJI KONTRAKTUAL	02318T/622145/2025	12-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9RNA97ENKTZV8YPMSKR71A2 tgl 24/11/2025, BAST No: 3425/DJPK.1/PPKA/XII/2025 tgl 09/12/2025, BAP No: 3426./DJPK.1/PPKA/XII/2025 tgl 09/12/2025
271	259991311413553	16-12-2025	51,157,883	NON GAJI KONTRAKTUAL	02317T/622145/2025	12-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9BZM06JJYW05RQCOF8853PN-AD01 tgl 21/11/2025, BAST No: 3423/DJPK.1/PPKA/XII/2025 tgl 09/12/2025, BAP No: 3424./DJPK.1/PPKA/XII/2025 tgl 09/12/2025
272	259991330504558	15-12-2025	15,631,000	GUP KKP	02409T/622145/2025	12-12-2025	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP a.n Ahmad Aris No: 4365 8300 5016 5993)
273	259991320833460	17-12-2025	70,655,805	NON GAJI	02425T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri a.n Dedhy Wibowo Setiawan dkk sesuai ST No: B.2597,B.3006,B.1489,B.1493,B.2747/DJPK.1,DJPK.2,DJPK.3,DJPK.4/KP.440/XI/2025 tanggal 10,11 dan 12 N ovember 2025
274	259991330508006	17-12-2025	11,895,990	NON GAJI	02426T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri a.n Oktavia Fajariyanti dkk sesuai ST No:B.2597/DJPK.1/KP.440/XI/2025 tanggal 10 November 2025
275	259991330508007	17-12-2025	13,762,246	NON GAJI	02423T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri a.n Muhammad Arkan Prasidya sesuai ST No:B.3151/DJPK.4/KP.440/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
276	259991330507959	17-12-2025	90,120,849	NON GAJI	02421T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri a.n Djumadi Parluhutan dkk sesuai ST No:B.2178,B.2228,B.2234/DJPK.6/KP.440/XI/2025 tanggal 23 dan 28 November 2025
277	259991330507958	17-12-2025	26,836,494	NON GAJI	02422T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri a.n Indah Setya Murti dkk sesuai ST No:B.3151/DJPK.4/KP.440/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025
278	259991330510049	17-12-2025	48,203,019	NON GAJI	02427T/622145/2025	16-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pihak Eksternal a.n Dida Daniarsyah dkk sesuai ST No:B.4538,B.969,B.2980/SJ.3,SJ.4,DJPK.1/KP.440/XI/2025 tanggal 11 dan 12 November 2025
279	259991330510620	17-12-2025	238,378,378	NON GAJI KONTRAKTUAL	02393T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Termin 1 sesuai Kontrak No: 3309/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAPP No: 3439/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 10/12/2025, BAP No: 3440/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 10/12/2025
280	259991330510618	17-12-2025	238,378,378	NON GAJI KONTRAKTUAL	02390T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Termini 1 sesuai Kontrak No: 3307/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAPP No: 3438/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 10/12/2025, BAP No: 3439a/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 10/12/2025
281	259991330510621	17-12-2025	238,378,378	NON GAJI KONTRAKTUAL	02391T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Termin 1 sesuai Kontrak No: 3308/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 27/11/2025, BAPP No: 3438a/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 10/12/2025, BAP No: 3439b/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 10/12/2025
282	259991320838025	17-12-2025	88,157,500	NON GAJI KONTRAKTUAL	02389T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja modal sesuai Kontrak No: EP-01KBXN1WVC7SD85J77D6J8118RM tgl 08/12/2025, BAST No: 3440d/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 10/12/2025, BAP No: 3440e/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 10/12/2025
283	259991311429499	17-12-2025	87,144,751	NON GAJI KONTRAKTUAL	02412T/622145/2025	15-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 3320C/DJPK.1/PPK/XI/2025 tgl 28/11/2025, BAST No: 3420L/DJPK.1/PPK/VI/2025 tgl 08/12/2026, BAP No: 3420M/DJPK.1/PPK/VI/2025 tgl 08/12/2025
284	259991311433089	18-12-2025	87,745,770	NON GAJI KONTRAKTUAL	02457T/622145/2025	16-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01KADA69PX99Y2S84CBYVCM8X6 tgl 20/11/2025, BAST No: 3498a/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 16/12/2025, BAP No: 3498b/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 16/12/2025
285	259991311432926	18-12-2025	85,431,150	NON GAJI KONTRAKTUAL	02461T/622145/2025	16-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01KBKS6R5ZXH37H5QWJWSW03DD tgl 03/12/2025, BAST No: 3490C/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAP No: 3490H/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025
286	259991311433056	18-12-2025	43,698,200	NON GAJI	02462T/622145/2025	16-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Paket Meeting Focus Group Discussion (FDG) Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai Kwitansi No: 160/04/12/2025/DHA tanggal 15 Desember 2025
287	259991330512286	18-12-2025	79,863,800	NON GAJI KONTRAKTUAL	02366T/622145/2025	16-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01KA7M95AK1SC5WY38BAW9Q9MN tgl 19/11/2025, Addendum No: EP-01KA7M95AK1SC5WY38BAW9Q9MN-ADD01 tgl 1/12/2025, BAST No: 3436/DJPK.1/PPKA/XII/2025 tgl 10/12/2025, BAP No: 3437/DJPK.1/PPKA/XII/2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
288	259991330512162	18-12-2025	84,255,938	NON GAJI KONTRAKTUAL	02460T/622145/2025	16-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01KBCQHA8B7EQZM3P1TR3FQZ9 tgl 03/12/2025, BAST No: 3490C/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAP No: 3490D/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025
289	259991330515975	19-12-2025	5,416,000	NON GAJI	02488T/622145/2025	17-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n IRFAN DARMAWAN dkk sesuai ST No: B.3108/DJPK.4/KP.440/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
290	259991330515977	19-12-2025	32,254,280	NON GAJI	02487T/622145/2025	17-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Muhammad Nurkholis Fauzi dkk sesuai ST No: B.3108/DJPK.4/KP.440/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
291	259991330515976	19-12-2025	43,133,870	NON GAJI	02489T/622145/2025	17-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 4 orang a.n Himayatul Syarofi dkk sesuai ST No: B.2332/DJPK.6/KP.440/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
292	259991311440925	19-12-2025	86,985,350	NON GAJI KONTRAKTUAL	02496T/622145/2025	17-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01KA0J3M5XTS4W10Q3AH19W6C7 tgl 19/11/2025, BAST No: 3498g/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 16/12/2025, BAP No: 3498h/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 16/12/2025
293	259991330518480	19-12-2025	84,478,525	NON GAJI KONTRAKTUAL	02495T/622145/2025	17-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01KADDFRCRWZ4W2GP3MZ2TATCK tgl 20/11/2025, BAST No: 3498d/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 16/12/2025, BAP No: 3498e/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 16/12/2025
294	259991340122323	19-12-2025	484,500,000	NON GAJI KONTRAKTUAL	02474T/622145/2025	17-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01KACXWNSTQBQA2NM4HW4MCJ33 tgl 19/11/2025, BAST No: 3225/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAP No: 3226/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XII/2025 tgl 15/12/2025
295	259991330523895	22-12-2025	111,045,852	NON GAJI	02537T/622145/2025	18-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 10 orang a.n Partini dkk sesuai ST No: B.3075/DJPK.4/KP.440/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025
296	259991330523929	22-12-2025	8,820,000	NON GAJI	02530T/622145/2025	18-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Paket Meeting, Kegiatan Rapat Diskusi Penyusunan Indesk Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) sesuai Kwitansi No: AWH-AR/25/12/00946 tgl 18/12/2025
297	259991330523896	22-12-2025	176,526,373	NON GAJI	02538T/622145/2025	18-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa pihak eksternal a.n Moh Hosni Mubarak dkk sesuai ST No: B.1071/SJ.4/KKP.440/XII/2025 tanggal 6 Desember 2025
298	259991330523930	22-12-2025	16,366,000	NON GAJI	02529T/622145/2025	18-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Paket Meeting, Kegiatan Rapat Diskusi Penyusunan Indesk Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) sesuai Kwitansi No: AWH-AR/25/12/00943 tgl 17/12/2025
299	259991330523928	22-12-2025	38,371,820	NON GAJI	02535T/622145/2025	18-12-2025	NON GAJI	Pemabayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Amanda Tri Persada dkk sesuai ST No: B.3027/DJPK.4/KP.440/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025
300	259991320864958	23-12-2025	33,904,330	NON GAJI	02528T/622145/2025	19-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kota Agam (Mesin Longtail Honda GX 270 9 PK 6 Set (Paket Lengkap)) sesuai Kwitansi No: 051/RA-KKP/XII/2025 tgl 18/12/2025
301	259991320864959	23-12-2025	37,536,478	NON GAJI	02527T/622145/2025	19-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kota Agam (Mesin Longtail Honda GX 270 9 PK 6 Set (Paket Lengkap)) sesuai Kwitansi No: 050/RA-KKP/XII/2025 tgl 18/12/2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
302	259991320864968	23-12-2025	3,544,726,721	NON GAJI KONTRAKTUAL	02561T/622145/2025	19-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Termin 2 sesuai Kontrak No: 1942/PPK/DJPK.4/ABT/IX/2025 tgl 18/09/2025, BAPP No: 3229/BAPP/PPK/DJPK.4/ABTXII/2025 tgl 15/12/2025, BAP No: 3229a/BAPP/PPK/DJPK.4/ABTXII/2025 tgl 15/12/2025
303	259991320868909	24-12-2025	133,108,108	NON GAJI KONTRAKTUAL	02625T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 3490F/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAST No: 3560.J/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 20/12/2025, BAP No: 3560.L/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 20/12/2025
304	259991320868910	24-12-2025	133,108,108	NON GAJI KONTRAKTUAL	02623T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 3490E/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAST No: 3560.I/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 20/12/2025, BAP No: 3560.K/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 20/12/2025
305	259991320869076	24-12-2025	44,100,000	NON GAJI	02573T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pengembangan Pulau Sumanga Marinni di Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju sesuai BAST No: 3530K /DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, Kwitansi No: 013/DBN.KWT/XII/2025 tgl 19/12/2025
306	259991320869072	24-12-2025	44,100,000	NON GAJI	02572T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pengembangan Pulau Kamarian Marinni di Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju sesuai BAST No: 3530I /DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, Kwitansi No : 012/DBN.KWT/XII/2025 tgl 19/12/2025
307	259991320869073	24-12-2025	44,100,000	NON GAJI	02571T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pengembangan Pulau Kamarian Kayyang di Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju sesuai BAST No: 3530G /DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, Kwitansi No: 011/DBN.KWT/XII/2025 tgl 19/12/2025
308	259991320869074	24-12-2025	44,100,000	NON GAJI	02570T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pengembangan Pulau Sumanga Kayyang di Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju sesuai BAST No: 3530E /DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, Kwitansi No: 004/DBN.PRP/XI/2025 tgl 19/12/2025
309	259991320869075	24-12-2025	44,100,000	NON GAJI	02569T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pengembangan Pulau Malamber Marinni di Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju sesuai BAST No: 3530C /DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, Kwitansi No: 009/DBN.KWT/XII/2025 tgl 19/12/2025
310	259991320869059	24-12-2025	22,050,000	NON GAJI	02559T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bahan Publikasi Kwitansi No: 052/KW/KPC/XII/2025 tgl 19/12/2025
311	259991320869058	24-12-2025	40,138,257	NON GAJI	02543T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pemeliharaan Pulau Lusi Kabupaten Sidoarjo sesuai Kwitansi No: 040/KW/AMK/XII/2025 tgl 18/12/2025
312	259990302021587	24-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02653T/622145/2025	22-12-2025	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 3307/DJPK.1/PPK/XI/2025 untuk PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL
313	259990302021518	24-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02654T/622145/2025	22-12-2025	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 3308/DJPK.1/PPK/XI/2025 untuk PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS TENTANG PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI
314	259990302021517	24-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02655T/622145/2025	22-12-2025	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 3309/DJPK.1/PPK/XI/2025 untuk PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS TENTANG PENGELOLAAN REKLAMASI PESISIR
315	259990302021567	24-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02809T/622145/2025	22-12-2025	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 1942/PPK/DJPK.4/ABT/IX/2025 untuk Jasa Konsultansi Pembuatan Dokumen KKPR, Amdal dan Izin

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
								Produksi Garam Kegiatan Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kab. Rote Ndao
316	259990302021563	24-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02686T/622145/2025	22-12-2025	LAINN YA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 3490L/DJPK.1/PPK/XII/2025 untuk Penanaman Mangrove di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
317	259990302021521	24-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02690T/622145/2025	22-12-2025	LAINN YA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01KBMA5ZCZW5F27WHSTYJPHAQG, Addendum Nomor EP-01KBMA5ZCZW5F27WHSTYJPHAQG-AD01 untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Pendukung Survey
318	259990302021584	24-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02685T/622145/2025	22-12-2025	LAINN YA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 3490k/DJPK.1/PPK/XII/2025 untuk Penanaman Mangrove di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
319	259990302021516	24-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02672T/622145/2025	22-12-2025	LAINN YA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 3490j/DJPK.1/PPK/XII/2025 untuk Penanaman Mangrove di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timurlokasi di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao
320	259991320875268	24-12-2025	21.070,000	NON GAJI	02786T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Bahan Komputer sesuai Kwitansi No: 043/KW/HMS/XII/2025 tgl 20/12/2025
321	259991320875193	24-12-2025	44.100,000	NON GAJI	02785T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Pengadaan ATK sesuai Kwitansi No: 054/KW/RA/XII/2025 tgl 20/12/2025
322	259991311463926	24-12-2025	38.265,657	NON GAJI	02636T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Belanja bahan pendukung fasilitasi perizinan sesuai Kwitansi No: 071/KW/DPP/XII/2025 tgl 19/12/2025
323	259991311463925	24-12-2025	35.446,394	NON GAJI	02637T/622145/2025	21-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Belanja bahan pendukung fasilitasi perizinan sesuai Kwitansi No: 072/KW/DPP/XII/2025 tgl 19/12/2025
324	259991320879881	24-12-2025	2.141,050,980	NON GAJI KONTRAKTUAL	02833T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No: EP-01KAJFAJEOW30D3GHGCCBQSV300-AD01 tgl 21/11/2025, BAST No: 3534A/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 20/12/2025, BAP No: 3296/PPK-P3K/PLN-LAUTRA/XII/2025 tgl 22/12/2025
325	259990302023930	31-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02813T/622145/2025	22-12-2025	LAINN YA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor EP-01K9TZX996PJ9G6Y8Q7Y67JJ2J untuk Pengadaan Incinerator Kabupaten Lombok Utara
326	259991330536449	24-12-2025	132.984,850	NON GAJI KONTRAKTUAL	02795T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No: 3475/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAST No: 3533X/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 20/12/2025, BAP No: 3533Y/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 20/12/2025
327	259991330536448	24-12-2025	133.075,470	NON GAJI KONTRAKTUAL	02796T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No: 3477/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAST No: 3533Z/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 20/12/2025, BAP No: 3533AA/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 20/12/2025
328	259991320880324	24-12-2025	44.100,000	NON GAJI	02567T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pengembangan Pulau Lalungan di Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju sesuai Kwitansi No: 008/DBN.KWT/XII/2025 tgl 19/12/2025
329	259991320880313	24-12-2025	86.320,697	NON GAJI KONTRAKTUAL	02666T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: EP-01K9VHERJD3MBQV7AC6Q8WJ8SE tgl 14/11/2025, BAST No: 3490R/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAP No: 3490S/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
330	259991311470167	24-12-2025	44,100,000	NON GAJI	02784T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pulau Rote Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 3271/DJPK.4/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, Kwitansi No: 0123/MARVEST/SEK-KW/XII/2025 tgl 19/12/2025
331	259991311470166	24-12-2025	44,100,000	NON GAJI	02781T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pulau Doo Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 3267/DJPK.4/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, Kwitansi No: 0124/MARVEST/SEK-KW/XII/2025 tgl 19/12/2025
332	259991311470168	24-12-2025	44,100,000	NON GAJI	02783T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pulau Nuse Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 3269/DJPK.4/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, Kwitansi No: 0125/MARVEST/SEK-KW/XII/2025 tgl 19/12/2025
333	259991311470165	24-12-2025	44,100,000	NON GAJI	02782T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang Penyusunan Prospektus Pulau Ndao Kabupaten Rote Ndao sesuai BAST No: 3265/DJPK.4/PPK/XII/2025 tgl 19/12/2025, Kwitansi No: 0126/MARVEST/SEK-KW/XII/2025 tgl 19/12/2025
334	259991320881129	24-12-2025	43,953,000	NON GAJI	02804T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Penyusunan Prospektus Investasi Pulau-Pulau Kecil di Pulau Pasu Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai Kwitansi No: 012/CV.DA/KW/XII/2025 tgl 20/12/2025
335	259991320881112	24-12-2025	44,065,700	NON GAJI	02803T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Penyusunan Prospektus Investasi Pulau-pulau Kecil di Pulau Tokong Berlayar Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai Kwitansi No: 011/CV.DA/KW/XII/2025 tgl 20/12/2025
336	259991320881127	24-12-2025	43,941,730	NON GAJI	02807T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Penyusunan Prospektus Investasi Pulau-Pulau Kecil di Pulau Selai Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai Kwitansi No: 014/CV.DA/KW/XII/2025 tgl 20/12/2025
337	259991320881113	24-12-2025	43,614,900	NON GAJI	02810T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Penyusunan Prospektus Investasi Pulau-Pulau Kecil di Pulau Tanjung Momong Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai Kwitansi No: 016/CV.DA/KW/XII/2025 tgl 20/12/2025
338	259991320881126	24-12-2025	43,840,300	NON GAJI	02808T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Penyusunan Prospektus Investasi Pulau-Pulau Kecil di Pulau Telaga Besar Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai Kwitansi No: 015/CV.DA/KW/XII/2025 tgl 20/12/2025
339	259991320881128	24-12-2025	43,896,650	NON GAJI	02806T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Penyusunan Prospektus Investasi Pulau-Pulau Kecil di Pulau Akar Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai Kwitansi No: 013/CV.DA/KW/XII/2025 tgl 20/12/2025
340	259991311470908	29-12-2025	176,430,052	NON GAJI KONTRAKTUAL	02794T/622145/2025	23-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No: 3320A/PPK/DJPK.4/XI/2025 tgl 28/11/2025, BAST No: 3533M/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 20/12/2025, BAP No: 3533N/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 20/12/2025
341	259991311470904	29-12-2025	176,146,397	NON GAJI KONTRAKTUAL	02870T/622145/2025	23-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No: 3259/PPK/DJPK.4/XII/2025 tgl 18/12/2025, BAST No: 3299/PPK/DJPKRL.4/XII/2025 tgl 22/12/2025, BAP No: 3301/PPK/DJPKRL.4/XII/2025 tgl 22/12/2025
342	259991320882012	29-12-2025	176,535,964	NON GAJI KONTRAKTUAL	02793T/622145/2025	23-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No: 3490i/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 15/12/2025, BAST No: 3533P/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 20/12/2025, BAP No: 3533Q/DJPK.1/PPK/XII/2025 tgl 20/12/2025

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
343	259991330537221	24-12-2025	50,335,436	NON GAJI	02851T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n. Simon Boyke Sinaga, dkk sesuai ST B.3212/DJP.K.4/KP.440/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025
344	259991330537212	24-12-2025	11,548,800	NON GAJI	02852T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n. Irfan Darmawan, dkk sesuai ST No. B.3300/DJP.K.4/KP.440/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
345	259991330537223	24-12-2025	62,905,362	NON GAJI	02819T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri a.n Partini dkk sesuai ST No: B.3188,B.3244,B.3279,B.3297/DJP.K.4/KP.440/XII/2025 tgl 12,17,19,22 Desember 2025
346	259991330537163	24-12-2025	694,946,252	NON GAJI	02855T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas pihak eksternal a.n. Zetnityadi M. Johannis, dkk sesuai ST Nomor 523/865b/Dpi 4.1 tanggal 10 Desember 2025
347	259991330537222	24-12-2025	356,845,937	NON GAJI	02848T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 25 orang a.n Ahmad Aris, dkk sesuai ST B.1772/DJP.K.4/KP.440/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025
348	259991330537213	24-12-2025	20,541,752	NON GAJI	02820T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri a.n Amanda Tri Persada dkk sesuai ST No:B.3244,B.3279,B.3297/DJP.K.4/KP.440/XII/2025 tgl 12, 19, 22 Desember 2025
349	259991330537211	24-12-2025	116,986,122	NON GAJI	02850T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 7 orang a.n. Masterina Rahmadya, dkk sesuai ST B.3004/DJP.K.4/KP.440/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025
350	259991330537164	24-12-2025	7,640,000	NON GAJI	02821T/622145/2025	22-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pihak Eksternal a.n Yoki Juliansyah dkk sesuai ST No:B.2711/PSDKPSta.5/KP.440/X/2025 tgl 23 Oktober 2025
351	259990302025625	29-12-2025	-	PENAMPUNGAN RPATA	02872T/622145/2025	23-12-2025	LAINN YA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 3525A /DJP.K.1/PPK/XII/2025 untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Pendukung Survey
352	259991311471794	29-12-2025	88,738,739	NON GAJI KONTRAKTUAL	02871T/622145/2025	23-12-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak No: 3258/PPK/DJP.K.4/XII/2025 tgl 18/12/2025, BAST No: 3298/PPK/DJP.KRL.4/XII/2025 tgl 22/12/2025, BAP No: 3300/PPK/DJP.KRL.4/XII/2025 tgl 22/12/2025
353	259991702129984	30-12-2025	-	GUP NIHIL	02930T/622145/2025	29-12-2025	LAINN YA	Penggantian Uang Persediaan Dana PNBPN untuk Keperluan Belanja Barang
354	259991702129982	30-12-2025	-	GUP NIHIL	02938T/622145/2025	29-12-2025	LAINN YA	Penggantian Uang Persediaan Dana RM untuk Keperluan Belanja Barang
355	259991702129981	30-12-2025	-	GTUP NIHIL	02952T/622145/2025	29-12-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Dit.P3K RM)
356	259991702129985	30-12-2025	-	GUP NIHIL	02929T/622145/2025	29-12-2025	LAINN YA	Penggantian Uang Persediaan dana RM untuk Keperluan Belanja Barang
357	259991702129983	30-12-2025	-	GUP NIHIL	02937T/622145/2025	29-12-2025	LAINN YA	Penggantian Uang Persediaan Dana PNBPN untuk Keperluan Belanja Barang
358	259991702133111	30-12-2025	-	GTUP NIHIL	02951T/622145/2025	30-12-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
359	259991702133109	30-12-2025	-	GTUP NIHIL	02996T/622145/2025	30-12-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
360	259991702133110	30-12-2025	-	GTUP NIHIL	02955T/622145/2025	30-12-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)

NO	NOMOR SP2D	TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	JENIS SPM	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	JENIS SP2D	DESKRIPSI
361	259991702135166	31-12-2025	-	GTUP NIHIL	03000T/622145/2025	30-12-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (ABT P3K)
362	259991702155891	31-12-2025	-	GTUP NIHIL	03011T/622145/2025	31-12-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Lautra P3K)
363	259991702156417	31-12-2025	-	GTUP NIHIL	03002T/622145/2025	30-12-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Dana RM ABT Garam untuk Keperluan Belanja Barang
364	251750000001027	31-12-2025	-	GTUP NIHIL	03001T/622145/2025	31-12-2025	LAINN YA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Dana PNBPN untuk Keperluan Belanja Barang sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP TA 2025

Sumber: Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Direktorat P3K (Tahun 2025)

DAFTAR SPM/SP2D DIT. P3K								
Periode September 2025								
No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi
1	251751503000106	01-02-2025	80.009.906	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00071T/622145/2025	23-01-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Januari Tahun 2025 untuk 15 Pegawai.
2	251751303000214	30-01-2025	340.000	NON GAI	00075T/622145/2025	23-01-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 1 orang a.n Mikha Hasudungan ST No: B.41/DJPKRL.3/KP.440/V/2025 tgl 07 Januari 2025
3	251751303000216	30-01-2025	1.495.000	NON GAI	00074T/622145/2025	23-01-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 4 orang a.n Isha Kharisma dkk ST No: B.50/DJPKRL.3/KP.440/V/2025 tgl 01 Januari 2025
4	251751303000215	30-01-2025	4.974.500	NON GAI	00073T/622145/2025	23-01-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Angle Agata Nender dkk ST No: B.85/DJPKRL.3/KP.440/V/2025 tgl 10 Januari 2024
5	251751303000222	30-01-2025	17.031.009	NON GAI	00072T/622145/2025	23-01-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 6 orang a.n Muhammad Yusuf dkk ST No: B.3953/DJPKRL.3/KP.40/X11/2024 tgl 30 Desember 2024
6	251751303000567	05-02-2025	1.215.000	GUP KKP	00149T/622145/2025	04-02-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persewaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No: 4365 B800 5016 6017 a.n A.Arie)
7	251751303000659	06-02-2025	3.756.500	NON GAI	00145T/622145/2025	04-02-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPKRL-KPA/V/2025 Tanggal 2 Januari 2025
8	251751303000794	06-02-2025	4.9520.888	GUP	00170T/622145/2025	05-02-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persewaan untuk Keperluan Belanja Barang
9	251751303001277	18-02-2025	67.886.685	PENGHASILAN PPNPN SUSULAN	00209T/622145/2025	17-02-2025	NON GAI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Susulan Bulan Januari Tahun 2025 untuk 12 Pegawai
10	251751303001302	19-02-2025	1.720.000	NON GAI	00225T/622145/2025	17-02-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 2 orang a.n Budiman dkk sesuai ST No: B.71/DJPKRL.3/KP.440/V/2025 tgl 19 Januari 2025
11	251751303001297	19-02-2025	5.412.000	NON GAI	00221T/622145/2025	17-02-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 7 orang a.n Bagus Afrianto dkk sesuai ST No: B.71/DJPKRL.3/KP.440/V/2025 tgl 19 Januari 2025
12	251751303001301	19-02-2025	13.330.640	NON GAI	00219T/622145/2025	17-02-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 1 orang a.n Angke Agata Nender sesuai ST No: B.148/DJPKRL.3/KP.440/V/2025 tgl 15 Januari 2025
13	251751303001299	19-02-2025	4.0470.560	NON GAI	00210T/622145/2025	17-02-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 3 orang a.n Dyah Erowati dkk (pihak eksternal) sesuai ST No: B.30951.6/KP.440/V/2025 tgl 17 Januari 2025
14	251751303001298	19-02-2025	59.955.019	NON GAI	00217T/622145/2025	17-02-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas biasa 3 orang a.n Fan Setiawan dkk sesuai ST No: B.148/DJPKRL.3/KP.440/V/2025 tgl 15 Januari 2025
15	251751303001390	20-02-2025	390.000	NON GAI	00236T/622145/2025	18-02-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Yono Haryono ST No: B.214/DJPKRL.3/KP.440/V/2025 tgl 21 Januari 2025
16	251751303001574	24-02-2025	34.629.699	GUP	00248T/622145/2025	21-02-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persewaan untuk keperluan belanja barang
17	251751303001576	24-02-2025	42.900.000	GUP	00256T/622145/2025	21-02-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persewaan untuk keperluan belanja barang
18	251751303001735	26-02-2025	17.762.000	GUP KKP	00268T/622145/2025	26-02-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persewaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No: 4365 B800 5016 5993 a.n Ahmad Aris)
19	251751303001868	28-02-2025	8.626.193	GUP KKP	00280T/622145/2025	28-02-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persewaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No: 4365 B800 5012 4 B81 a.n TU DK. P4K)
20	251751503000197	01-03-2025	80.009.906	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00242T/622145/2025	21-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2025 untuk 15 Pegawai.
21	251751503000203	01-03-2025	68351.156	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00257T/622145/2025	24-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2025 untuk 12 Pegawai.
22	251751503000261	01-03-2025	5.844.202	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00267T/622145/2025	26-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2025 untuk 1 Pegawai.
23	251751503000260	01-03-2025	33.124.534	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00266T/622145/2025	26-02-2025	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Februari Tahun 2025 untuk 7 Pegawai.
24	251751303001922	05-03-2025	3.756.500	NON GAI	00278T/622145/2025	27-02-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DJPKRL-KPA/V/2025 Tanggal 2 Januari 2025
25	251751303001934	03-03-2025	17.532.606	PENGHASILAN PPNPN SUSULAN	00287T/622145/2025	03-03-2025	NON GAI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Susulan Bulan Januari Tahun 2025 untuk 3 Pegawai
26	251751303002196	06-03-2025	121.995.496	NON GAI KONTRAKTUAL	00294T/622145/2025	04-03-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 334/DJPKRL.3/II/2025 tgl 12/2/2025, BAST No: 362/PKP/DJPKRL.3/II/2025 tgl 11/2/2025, BAP No: 476/PKP/DJPKRL.3/III/2025 tgl 3/3/2025, SPKP BJI No: 000365/SL/STRAC-JKT1/3/2025 tgl 3/3/2025.
27	251751303002216	05-03-2025	57.777.985	GUP	00296T/622145/2025	05-03-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persewaan untuk keperluan belanja barang
28	251751303003300	14-03-2025	91.378.378	NON GAI KONTRAKTUAL	00318T/622145/2025	12-03-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No: 507/PKP/DJPKRL.3/III/2025 tgl 6/3/2025, BAST No: 537/PKP/DJPKRL.3/III/2025 tgl 12/3/2025, BAP No: 538/PKP/DJPKRL.3/III/2025 tgl 12/3/2025, SPKP BJI : 0291/GA/II/2025 tgl 12/3/2025
29	251751503000334	18-03-2025	80.941.000	SPM THR PPNPN	00339T/622145/2025	17-03-2025	GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 15 Pegawai.
30	251751303000395	19-03-2025	33.727.757	NON GAI	00319T/622145/2025	17-03-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bantuan Sarana TPS/PDU di Desa Pesisir Bersih Kota Denpasar sesuai BAST No: 391/PKP/DJPKRL.3/II/2025 tgl 20/2/2025, Kwansi No: SI-12-250219001 tgl 20/2/2025

Lanjutan.....

31	251.751303003267	20-03-2025	8.750.000	GUP	003547/622145/2025	19-03-2025	H OH GAI	Penggantian Uang Perisediaan untuk keperluan belanja barang
32	251.751303000482	21-03-2025	59.834.461	SPM THR PPNPH	003677/622145/2025	20-03-2025	GAI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 12 Pegawai.
33	251.751303000551	01-04-2025	187.149.842	PER GHASIAH PPNPH IN DUK	003897/622145/2025	24-03-2025	GAI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPN PH Bulan Maret Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
34	251.751303000550	24-03-2025	8.095.140	SPM THR PPNPH	003847/622145/2025	24-03-2025	GAI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 3 Pegawai.
35	251.751303000615	27-03-2025	2.698.380	SPM THR PPNPH	003997/622145/2025	26-03-2025	GAI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 Untuk 1 Pegawai.
36	251.751303003704	27-03-2025	2.008.589	GUP KKP	004007/622145/2025	26-03-2025	H OH GAI	Penggantian Uang Perisediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP Honor 4365-B300-5012-4891 a.n TU DIT P46)
37	251.751303003812	10-04-2025	3.756.500	H OH GAI	004077/622145/2025	08-04-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Maret 2025 berdasarkan Keputusan EPA nomor 16/ DJPRL- EPA/ 2025 Tanggal 2 Januari 2025
38	251.751303003901	14-04-2025	11.627.082	GUP	004147/622145/2025	11-04-2025	H OH GAI	Penggantian Uang Perisediaan untuk keperluan belanja barang
39	251.751303000695	01-05-2025	187.149.842	PER GHASIAH PPNPH IN DUK	004397/622145/2025	22-04-2025	GAI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPN PH Bulan April Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
40	251.751303005006	07-05-2025	1.852.500	H OH GAI	004707/622145/2025	05-05-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan April 2025 berdasarkan Keputusan EPA nomor 16/ DJPRL- EPA/ 2025 Tanggal 2 Januari 2025
41	251.751303000846	01-06-2025	187.149.842	PER GHASIAH PPNPH IN DUK	005297/622145/2025	22-05-2025	GAI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPN PH Bulan Mei Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
42	251.751303006868	02-06-2025	10.171.299	GUP	005507/622145/2025	02-06-2025	H OH GAI	Penggantian Uang Perisediaan untuk keperluan belanja barang
43	251.751301009069	04-06-2025	99.207.230	H OH GAI KONTRAKTUAL	005457/622145/2025	02-06-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang Pengadaan Bantuan Sarana TPS/PDU di Desa Praji Besih Kota Denpasar sesuai Kontrak No: 46/PPK/DJPK.1/V/2025 tgl 30/4/2025, BAST No: 74/PPK/DJPK.1/V/2025 tgl 21/5/2025, BAP No: 75/PPK/DJPK.1/V/2025 tgl 21/5/2025
44	251.751303006968	04-06-2025	1.852.500	H OH GAI	005547/622145/2025	02-06-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Mei 2025 berdasarkan Keputusan EPA nomor 16/ DJPRL- EPA/ 2025 Tanggal 2 Januari 2025
45	251.751303007790	13-06-2025	17.636.000	GUP KKP	005947/622145/2025	12-06-2025	H OH GAI	Penggantian Uang Perisediaan KKP untuk keperluan belanja barang (KKP No. 4365 B300 501 6 5993 an. Ahmad Aji)
46	251.751303007792	13-06-2025	5.672.500	GUP	005847/622145/2025	12-06-2025	H OH GAI	Penggantian Uang Perisediaan untuk keperluan belanja barang
47	2599913301002982	01-07-2025	188.883.948	PER GHASIAH PPNPH IN DUK	006647/622145/2025	25-06-2025	GAI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPN PH Bulan Juni Tahun 2025 untuk 35 Pegawai
48	259991330045906	04-07-2025	1.852.500	H OH GAI	006897/622145/2025	02-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Juni 2025 berdasarkan Keputusan EPA nomor 16/ DJPRL- EPA/ 2025 Tanggal 2 Januari 2025
49	259991330046388	02-07-2025	8.707.799	GUP	006787/622145/2025	02-07-2025	H OH GAI	Penggantian Uang Perisediaan untuk keperluan belanja barang
50	259991330047139	04-07-2025	4.720.000	H OH GAI	006747/622145/2025	02-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Apriani Wulandari dkk ST No: B.054/DJPK.4/KP.440/M/2025 tanggal 26 Juni 2025
51	259991330080014	17-07-2025	60.344.400	H OH GAI	007277/622145/2025	15-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n ANDI REMALD dkk (pihak eksternal) sesuai ST No: 661/HD-700.34.PP.04.03/VI/2025 tanggal 10 Juli 2025
52	259991330080006	17-07-2025	31.341.991	H OH GAI	007417/622145/2025	15-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n. Erika Ayu Citra Utami dkk sesuai ST No: B.379/DJPK.3/KP.440/VI/2025 tanggal 10 Februari 2025
53	259991330080011	17-07-2025	58.220.632	H OH GAI	007317/622145/2025	15-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n. Patini dkk sesuai ST No: B.91/DJPK.3/KP.440/VI/2025 tgl 10 Januari 2025
54	259991330080013	17-07-2025	28.957.140	H OH GAI	007307/622145/2025	15-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n. Dyah Eriwati dkk (pihak eksternal) ST No: B.219/SI.6/KP.440/VI/2025 tgl 13/1/2025 dan 5 orang a.n. Hawla Ulfi Fauzyanti dkk (pihak eksternal) ST No: B.64/BPSPL.1/KP.440/VI/2025 tgl 8/5/2025
55	259991330094079	24-07-2025	106.356.565	H OH GAI	007857/622145/2025	22-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas ABT Gatam 6 orang a.n. Erika Ayu Citra Utami dkk sesuai ST No: B.427/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 14 Mei 2025
56	259991330094025	24-07-2025	14.764.644	H OH GAI	007927/622145/2025	22-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Apriani Wulandari dkk sesuai ST No: B.857/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025
57	259991330094023	24-07-2025	9.074.000	H OH GAI	007917/622145/2025	22-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (PNB) 3 orang a.n Ganjar Rahajaja dkk ST No: B.1224/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 21 Juli 2025
58	259991330094026	24-07-2025	125.324.896	H OH GAI	007847/622145/2025	22-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (pihak eksternal) ABT Gatam 40 orang a.n. Imam Fauzi dkk sesuai ST No: B.772/BKPPH/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Mei 2025
59	259991330094024	24-07-2025	1.530.000	H OH GAI	007897/622145/2025	22-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam Kota 3 orang a.n. Dwi Ismi Wulandari dkk sesuai ST No: B.1123/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 14 Juli 2025
60	259991330094078	24-07-2025	2.300.000	H OH GAI	007937/622145/2025	22-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Irfan Darmawan sesuai ST No: B.857/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025
61	259991330094077	24-07-2025	510.000	H OH GAI	007907/622145/2025	22-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam Kota 1 orang a.n. Angie Agatha Ntendi sesuai ST No: B.1123/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 14 Juli 2025
62	259991330094004	24-07-2025	113.857.405	H OH GAI	007947/622145/2025	23-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas ABT Gatam 5 orang a.n Reini Indrawati dkk sesuai ST No: B.427/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 14 Mei 2025
63	259991330094007	25-07-2025	58.406.804	H OH GAI	007967/622145/2025	23-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 2 orang a.n Ahmad Aji dkk sesuai ST No: B.150/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 28 April 2025
64	259991702013390	24-07-2025	-	GTU P Nihil	008077/622145/2025	23-07-2025	LAH NYA	Perangungjawa dan Tambahan Uang Perisediaan untuk keperluan belanja barang (PSK Lautia)
65	259991330096644	25-07-2025	80.759.639	H OH GAI	008267/622145/2025	23-07-2025	H OH GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 5 orang a.n Yoga Dwi Priyamoto dkk sesuai ST No: B.712/DJPK.4/KP.440/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025

Lanjutan....

66	59991330096582	25-07-2025	146.294.712	NON GAI	00837/622145/2025	23-07-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 7 orang a.n Partini dkk sesuai ST No: B.712/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 16 Juni 2025
67	59991330096584	25-07-2025	162.803.470	NON GAI	00837/622145/2025	23-07-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas (pihak eksternal) 16 orang a.n Zuhaimi sesuai ST No: B.713/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 16 Juni 2025
68	59991330097452	28-07-2025	44.835.000	NON GAI	00837/622145/2025	24-07-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang Paket Meeting Fullboard sesuai BAST No: 363/PPK/622145/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, Kwatansi No: AWH-AR/ZS/06/0035 tanggal 24 Mei 2025
69	59991330099326	28-07-2025	1.050.000	NON GAI	00841/622145/2025	24-07-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Tedy Dasuluti sesuai ST No: B.627/DIPKRL.3/KP.440/MI/2025 tanggal 4 Maret 2025
70	59991330099403	28-07-2025	1.060.000	NON GAI	00844/622145/2025	24-07-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Anandinka Permatachani dkk sesuai ST No: B.517/DIPKRL.3/KP.440/MI/2025 tanggal 21 Februari 2025
71	59991330099402	28-07-2025	1.050.000	NON GAI	00847/622145/2025	24-07-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Anandinka Permatachani sesuai ST No: B.627/DIPKRL.3/KP.440/MI/2025 tanggal 4 Maret 2025
72	59991330099325	28-07-2025	1.855.000	NON GAI	00843/622145/2025	24-07-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang a.n Tedy Dasuluti dkk sesuai ST No: B.517/DIPKRL.3/KP.440/MI/2025 tanggal 21 Februari 2025
73	59991330175490	31-07-2025	28.263.289	NON GAI	00899/622145/2025	29-07-2025	NON GAI	Pembayaran belanja modal Pengadaan Alat Pendukung Kegiatan Fasilitas Pemeliharaan Pulau-Pulau Kecil sesuai BAST No: 1846/DIPK.1/PPK/MI/2025 tanggal 4 Juli 2025, Kwatansi No: 036/KW/HMS/MI/2025 tanggal 4 Juli 2025
74	59991330110564	31-07-2025	10.000.000	GUP	00922/622145/2025	30-07-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
75	59991531005969	01-08-2025	188.883.948	PENGHASILAN PPNPN INDUK	00777/622145/2025	21-07-2025	GAI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juli Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
76	59991330116375	05-08-2025	1.852.500	NON GAI	00952/622145/2025	01-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang Honor Operasional Satuan Kerja bulan Juli 2025 berdasarkan Keputusan KPA nomor 16/DIPKLP/PA/2025 Tanggal 2 Januari 2025
77	59991330132440	11-08-2025	96.151.200	NON GAI	01017/622145/2025	07-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas luar negeri 1 orang a.n Ahmad Anis sesuai ST No: B.635/DIPK/KP.440/MI/2025 tanggal 28 Juli 2025, Surat Setneg No: B-00001512/SHN/S/PO/LN/DQ/D/2025 tanggal 16 Juli 2025
78	59991330133355	12-08-2025	6.546.151	NON GAI	01007/622145/2025	08-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Tedy Dasuluti dkk sesuai ST No: B.897/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 30 Juni 2025
79	59991330133353	12-08-2025	795.000	NON GAI	01010/622145/2025	08-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Mahatma Alvinia Putri dkk sesuai ST No: B.710/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 16 Juni 2025
80	59991330133352	12-08-2025	478.500	NON GAI	01009/622145/2025	08-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Anandinka Permatachani sesuai ST No: B.575/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 28 Mei 2025
81	59991330133354	12-08-2025	795.000	NON GAI	01008/622145/2025	08-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 3 orang a.n Tedy Dasuluti dkk sesuai ST No: B.710/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 16 Juni 2025
82	59991330135266	12-08-2025	7.849.780	NON GAI	01031/622145/2025	08-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Mastennia Rahmadya sesuai ST No: B.1520/DIPK/KP.440/MI/2025 tanggal 7 Agustus 2025
83	59991330135273	12-08-2025	23.543.340	NON GAI	01030/622145/2025	08-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Heni Rasdiana dkk sesuai ST No: B.1520/DIPK/KP.440/MI/2025 tanggal 7 Agustus 2025
84	59991330141171	14-08-2025	61.922.520	NON GAI	01061/622145/2025	12-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas luar negeri - Uang Harian a.n Ahmad Anis sesuai ST No: B.635/DIPK/KP.440/MI/2025 tanggal 28 Juli 2025, Surat Setneg No: B-00001512/SHN/S/PO/LN/DQ/D/2025 tanggal 16 Juli 2025
85	59991330147525	19-08-2025	499.000	NON GAI	01100/622145/2025	14-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 1 orang a.n Anandinka Permatachani sesuai ST No: B.1228/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 21 Juli 2025
86	59991330147527	19-08-2025	2.806.000	NON GAI	01083/622145/2025	14-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas 3 orang a.n Tedy Dasuluti dkk sesuai ST No: B.1102/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 11 Juli 2025
87	59991330147526	19-08-2025	1.060.000	NON GAI	01087/622145/2025	14-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam kota 2 orang a.n Tedy Dasuluti dkk sesuai ST No: B.1181/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 16 Juli 2025
88	59991330155705	22-08-2025	1.060.000	NON GAI	01120/622145/2025	20-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 3 orang a.n Partini dkk sesuai ST No: B.1315/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 25 Juli 2025
89	59991330155695	22-08-2025	795.000	NON GAI	01121/622145/2025	20-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas paket meeting dalam kota 2 orang a.n Yoga Dwi Priyatomo dkk sesuai ST No: B.1302/DIPK.4/KP.440/MI/2025 tanggal 24 Juli 2025
90	59991330160528	22-08-2025	129.766.606	GUP	01129/622145/2025	21-08-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (PNBP)
91	59991330170105	27-08-2025	19.998.848	GUP	01171/622145/2025	26-08-2025	NON GAI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang (Dit. P3K)
92	59991330170372	28-08-2025	51.430.000	NON GAI	01168/622145/2025	26-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas pihak eksternal 72 orang a.n Yeanes Riwu, S.Pi dkk sesuai ST No: 523/236/Dit 4.1 tanggal 30 Juli 2025
93	59991330171817	28-08-2025	13.825.000	NON GAI	01120/622145/2025	26-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang honor narasumber pihak eksternal 8 orang a.n Jusup B. Messakh, S.Pd dkk sesuai ST no. 000.1.23/256/Dip/2025 tanggal 30 Juli 2025
94	59991531010009	01-09-2025	188.883.948	PENGHASILAN PPNPN INDUK	01130/622145/2025	21-08-2025	GAI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Agustus Tahun 2025 untuk 35 Pegawai.
95	59991330177480	01-09-2025	19.776.200	NON GAI	01183/622145/2025	28-08-2025	NON GAI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas Non ASN 2 orang a.n Prita Wibawa Utama dkk sesuai ST No: B.1732/DIPK.4/KP.440/MI/2026 tanggal 26 Agustus 2025

Gambar 72. Daftar SPM/SP2D Dit. P3K Periode September 2025

3.6. Penghargaan

1. Sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Pada tanggal 24 November 2025, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterbitkan oleh QAI Indonesia.

ISO 9001:2015 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang menetapkan persyaratan bagaimana organisasi mengelola prosesnya agar produk atau layanan yang dihasilkan konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Sistem Manajemen Mutu berfokus pada pendekatan proses, manajemen risiko, dan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan dan kinerja organisasi yang lebih efektif.

ISO 37001:2016 adalah standar internasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang memberikan persyaratan dan panduan bagi organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons praktik penyuapan secara sistematis. Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan kumpulan elemen yang saling terkait dalam organisasi (kebijakan, prosedur, pengendalian, dan tanggung jawab) yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi sebagai tindakan untuk mencegah penyuapan.³⁵



ISO 9001:2015



ISO 37001:2016

Gambar 73. Kepemilikan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kepemilikan ISO 9001:2015 menunjukkan bahwa organisasi telah membangun budaya mutu, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta berkomitmen terhadap peningkatan berkelanjutan demi kepuasan pemangku kepentingan. Sertifikasi ini juga mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan layanan, dan peningkatan efisiensi operasional. Kepemilikan ISO 37001:2016 menunjukkan bahwa organisasi memiliki komitmen kuat terhadap integritas, tata kelola yang bersih, dan kepatuhan pada peraturan anti-penyuapan. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa organisasi telah menetapkan kebijakan anti penyuapan, mekanisme pelaporan, serta pengendalian internal untuk mencegah dan menangani potensi praktik suap, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025

Direktorat P3K menempatkan perolehan NKO tertinggi nomor 3, setelah BPSPL Padang (Nomor 1) & LPSPL Sorong (Nomor 2) di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan tahun 2025. Nilai NKO Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar 112.52.

³⁵ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta1/id/pojok-zona-integritas/2910-sistem-manajemen-mutu-iso-9001-2015-dan-iso-smap-37001-2016.html>

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kinerjaku Home Jumat, 16 Januari 2026							
Verifikasi Capaian Unit Kerja Tahun 2025 Level-1 DIREKTORAT JENDERAL Level-2 Belum di pilih... Level-3 Belum di pilih Panduan							
TW-1		TW-2		TW-3		TW-4	
Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
+		100.00% /	100.00% ✓	100.00% /	100.00% ✓	105.45% /	105.45% ✓
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
+		110.27% /	110.27% ✓	105.97% /	105.97% ✓	109.88% /	109.88% ✓
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM							
+		109.51% /	109.51% ✓	100.00% /	100.00% ✓	108.28% /	108.28% ✓
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK							
+		109.29% /	109.29% ✓	112.00% /	112.00% ✓	109.97% /	109.97% ✓
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
+		109.59% /	109.59% ✓	100.00% /	100.00% ✓	112.52% /	112.52% ✓
DIREKTORAT JASA BAHARI							
+		110.41% /	110.41% ✓	112.00% /	112.00% ✓	102.66% /	102.66% ✓
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN							
+		110.94% /	110.94% ✓	112.00% /	112.00% ✓	106.44% /	106.44% ✓
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG							
		109.47% /	109.47% ✓	111.61% /	111.61% ✓	109.47% /	109.47% ✓
		109.47% /	109.47% ✓	111.61% /	111.61% ✓	114.62% /	114.62% ✓
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK							
		109.47% /	109.47% ✓	110.92% /	110.92% ✓	109.47% /	109.47% ✓
		109.47% /	109.47% ✓	110.92% /	110.92% ✓	106.90% /	106.90% ✓
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR							
		109.47% /	109.47% ✓	110.66% /	110.66% ✓	109.47% /	109.47% ✓
		109.47% /	109.47% ✓	110.66% /	110.66% ✓	110.23% /	110.23% ✓
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR							
		109.47% /	109.47% ✓	109.85% /	109.85% ✓	109.47% /	109.47% ✓
		109.47% /	109.47% ✓	109.85% /	109.85% ✓	106.07% /	106.07% ✓
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG							
		109.47% /	109.47% ✓	114.59% /	114.59% ✓	109.47% /	109.47% ✓
		109.47% /	109.47% ✓	114.59% /	114.59% ✓	107.20% /	107.20% ✓
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG							
		109.47% /	109.47% ✓	106.96% /	106.96% ✓	109.47% /	109.47% ✓
		109.47% /	109.47% ✓	106.96% /	106.96% ✓	112.65% /	112.65% ✓
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU							
		109.47% /	109.47% ✓	112.72% /	112.72% ✓	114.74% /	114.74% ✓
		109.47% /	109.47% ✓	112.72% /	112.72% ✓	114.74% /	114.74% ✓
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG							
		109.47% /	109.47% ✓	110.99% /	110.99% ✓	109.47% /	109.47% ✓
		109.47% /	109.47% ✓	110.99% /	110.99% ✓	112.20% /	112.20% ✓

Gambar 74. NKO Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025
 Sumber: Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025 (Diunduh pada tanggal 16 Januari 2026 Pukul 10.00 WIB)



BAB IV. PENUTUP

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K yang mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku. Keberhasilan atas pencapaian target IKU maupun IKM dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian target IKU maupun IKM tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2025, salah satu tantangan yang cukup signifikan berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada melambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Pencapaian target IKU maupun IKM pada tahun 2025 juga diselesaikan bersama oleh semua pihak baik internal maupun eksternal.
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari 7 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang mencakup 9 IKU dan 6 IKM.
- c. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K sebagai Barang Milik Negara (BMN), metode, dan sumberdaya lainnya.
- d. Jumlah pegawai Direktorat P3K sampai dengan tahun 2025 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yang terdiri dari : 44 (Empat Puluh Empat) orang PNS , 3 (tiga) orang P3K, 7 (tujuh) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 20 (dua puluh) orang PJLP.
- e. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2025 dilakukan oleh 7 Tim Kerja sebagai berikut: Tim Kerja Pengelolaan Lahan (PL), Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian (PP), Tim Kerja Sarana dan Prasarana, Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal (MHAML), dan Subbagian Tata Usaha.
- f. Jumlah pagu anggaran berdasarkan PK 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 54.321.352.000, pagu efektif sebesar Rp 43.745.913.000, dan realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar Rp 40.661.493.708 atau 92,95% dari pagu efektif, dengan sisa anggaran sebesar Rp 3.084.419.292.
- g. Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) dalam PK Direktorat P3K Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 83. Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Capaian 2025	% Capaian Kinerja 2025
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	93.09	120 (Capaian Kinerja Maksimum)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Capaian 2025	% Capaian Kinerja 2025
						dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	63,20	114,91
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	2	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	74,06	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	6	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	4	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	47	100
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	2	100
6.	Meningkatnya Penertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	164	107,89

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Capaian 2025	% Capaian Kinerja 2025
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	87	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Kinerjaku KKP)
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	3	100
		12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	83.36	104,20
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	94.30	117,88
		14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	100	100
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	98.40	120 (Capaian Kinerja Maksimum dalam Aplikasi Knerjaku KKP)

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2025

- h. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K pada periode tahun 2025 sebesar 112.52%, yang didapatkan dari 7 Sasaran Kegiatan, 9 Indikator Kinerja Utama dan 6 Indikator Kinerja Manajerial.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) tahun 2025 yang secara garis besar disusun dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja Direktorat P3K di periode berikutnya.

4.2. Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh Tim Kerja lingkup Direktorat P3K. Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan kelautan dan ruang laut terutama dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Rekomendasi periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) guna mencapai target.
2. Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya dengan tetap fokus kepada capaian target atau output dan kualitas hasil pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan UPT Teknis lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan maupun UPT lingkup yang terdekat dari lokasi kegiatan.

4.3. Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut di triwulan I tahun 2025 dari rekomendasi di triwulan IV pada tahun 2024 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 84. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2024 dan Tindak Lanjut di Triwulan I tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan I tahun 2025	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1AxyloByT08_r-11CNm7H5NtBeli5I6qf?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1AxyloByT08_r-11CNm7H5NtBeli5I6qf?usp=sharing

2. Tindak lanjut di Triwulan II tahun 2025 dari rekomendasi pada triwulan I tahun 2025 dan bukti dukung dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 85. Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan I Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan II tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan Ii Tahun 2025	Tindak Lanjut Pada LKj Periode tahun 2025	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJOr7yNGaa9NTxtloLL9B8r-GepTWe?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJOr7yNGaa9NTxtloLL9B8r-GepTWe?usp=sharing

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (30 Juni 2025)

3. Tindak lanjut di Triwulan III tahun 2025 dari rekomendasi pada triwulan II tahun 2025 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 86. Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan II Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan III tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan III tahun 2025	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJO7yNGaa9NTxtloLL9B8r-GepTWe?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJO7yNGaa9NTxtloLL9B8r-GepTWe?usp=sharing

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (31 Desember 2025)

4. Tindak lanjut di triwulan IV tahun 2025 dari rekomendasi di triwulan III pada tahun 2025 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 87. Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan III Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan IV tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan IV tahun 2025	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PK Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain- lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJO7yNGaa9NTxtloLL9B8r-GepTWe?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPK yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain- lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJO7yNGaa9NTxtloLL9B8r-GepTWe?usp=sharing

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (31 Desember 2025)



LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P4K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 24 Januari 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Yusuf**

Jabatan : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Muhammad Yusuf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume pengendalian sampah laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)	3
	2. Volume sampah plastik dan non plastik yang dikelola dari aktivitas masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ton)	15
2. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana	3. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55
	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim (Nilai)	55
	5. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai)	55
3. Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar	6. Pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya (kumulatif) (Pulau)	19
	7. Pulau-pulau kecil terluar yang meningkat aksesibilitasnya (Pulau)	1
	8. Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang diberikan bantuan sarana ekonomi produktif (Kelompok)	55
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat	9. Nilai Kemandirian Masyarakat Hukum Adat (Nilai)	50
5. Tumbuhnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	88

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11. Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	95
	12. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	4
	13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	87
	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	85
	15. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100
	16. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000
Total Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Tahun 2025		61.117.553.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Muhammad Yusuf

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 30 Juni 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL kesprdirjenpri@kkp.go.id

DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Aris**
 Jabatan : Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



A. Koswara

Pihak Pertama
 Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Ahmad Aris

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55
	3. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55
	5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3
	7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)	47
5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2
6. Meningkatnya Penerbitan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	152
7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70
	11. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3
	12. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80
	13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80
	14. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	15. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000
Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		27.617.553.000

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



A. Koswara

Pihak Pertama
 Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Ahmad Aris

Lampiran 3. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 Yang Ditandatangani Pada Tanggal 31 Desember 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 10
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN <http://p3k.go.id> SUREL slipw@p3k.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Aris**
 Jabatan : Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Ahmad Aris

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	3. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1
	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55
	5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3
	7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)	47
5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2
6. Meningkatnya Penerbitan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	152
7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70
	11. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3
	12. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80
	13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	14. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100
	15. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80

Data Anggaran		
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	23.140.397.000
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26.133.883.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.261.242.000
Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		54.321.352.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Ahmad Aris

Lampiran 4. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 [\(link\)](#).

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 [\(link\)](#).

4 of 4



Lampiran II

Surat Menteri Keuangan
tentang Efisiensi Belanja
Kementerian/Lembaga dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapat
Belanja Negara Tahun Anggaran :

IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Lampiran 5. Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
1	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	Ton	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	18	18
2	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
3	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
4	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
5	Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
6	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (Kumulatif) (Lokasi)	Lokasi	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	3	3
7	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)	Lokasi	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	47	47

8	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)	Komunitas	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	2	2
9	Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditetapkan (Kumulatif) (Dokumen)	Dokumen	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	152	152
10	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	70	70
11	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Dokumen	Triwulanan	Posisi Akhir (PA)	-	1	1	2	2	3	3
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Semesteran	Posisi Akhir (PA)	-	78	78	-	-	80	80
13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Triwulanan	Rata-Rata	-	80	80	80	80	80	80
14	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	100	100
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	80	80

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025

Lampiran 6. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Tahun 2025

No.	Nama	NIP	Golongan	Nama Jabatan	Tim Kerja	Status Pegawai	Keterangan
1	Dr. Ahmad Aris	197208012006041003	Pembina Utama Muda/IV/c	Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DIREKTUR	PNS	
2	Reni Indrawati, S.T., M.M.	197810182003122002	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
3	Ir. Balok Budiyo, M.M.	196212281990021001	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Utama	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
4	Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si.	196711221994031003	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
5	Ir. R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M.	196705041994031009	Pembina Utama Muda / IV c	APJK Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
6	Syofyan Hasan, S.Pi., M.Sc.	197009051998031002	Pembina Utama Muda / IV c	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
7	Ganjar Raharja, S.Pi., M.I.L.	197906052005021003	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
8	Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.	198005142005021002	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana
9	Dr. Simon Boyke Sinaga, S.St.Pi., M.Si.	197812092003121003	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
10	Barnard Caisaro Purba, S.St.Pi., M.Si.	198101032005021001	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	Anggota Tim Kerja	PNS	

					Pengelolaan Lahan		
11	Weka Mahardi, S.T., M.Si.	198004252007011001	Pembina / IV a	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
12	Sarifah, S.T., M.T.	197606202010122001	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
13	Vivi Yovita Indriasari, M.T.	197504152008012018	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS	
14	Dharmawan Irsha Pratama, S.I.K.	198709112024211002	IX	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	P3K	
15	Masterina Rahmadya, S.Si.	106964	-	-	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP	
16	Partini, S.Pi., M.Si.	197402042002122002	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
17	Giri Wilisandy, S.T., M.T.	198205022009011009	Penata Tk. I / III d	PELP Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
18	Aria Jati Kusuma, S.Kom.	198511132009121001	Penata Tk. I / III d	Surveyor Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
19	Marines Febriani, S.T.	199002112018012003	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
20	Anggia Rivani, S.Si.	199609182019022003	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Perizinan	PNS	

					dan Pengendalian		
21	Hery Gunawan Daulay, S.P., M.M.	197811102003121001	Pembina Tk. I / IV b	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	Ketua Tim Kerja Restorasi
22	Arif Miftahul Aziz, S.Pi., M.Si.	197906082002121004	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS	
23	Estika Ayu Citra Utami, S.Kom.	19841011 202521 2 036	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	P3K	
24	Amanda Tri Persada, S.Kom.	107329	-	-	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Ahli GIS	
25	Fikri Ananda Pasha	110967	-	-	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Ahli GIS	
26	Yoga Dwi Priyatmoko, S.Kom.	107326	-	-	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP	
27	Tely Dasaluti, S.Si., M.P.	197202082001122003	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS	Ketua Tim Kerja MHAML
28	Roki Asriwianto, S.T., M.M.	197610182003121004	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS	
29	Saynuddin, S.Pi.	198612282007011001	Penata / III c	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS	Kasubag TU
30	Muhammad Nurkholis Fauzi, S.I.K.	199405072024211009	IX	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K	

31	Mei Fresti Fadila Dianty, S.Tr.Pi.	199505102025212085	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K	
32	Irfan Darmawan, S.E.	106966	-	-	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan	
33	Akhmat Wiyanto	-	-	-	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Keamanan Pulau Lusi	
34	Muhammad Sifaul Fanani	200007232025211031	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K Paruh waktu (Pulau Lusi)	
35	Muhammad Soim Supriyadi	197807122025211051	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K Paruh Waktu (Pulau Lusi)	
36	Suprpto	-	-	-	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Keamanan Pulau Lusi	
37	Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.	197902222002122001	Pembina Tk. I / IV b	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
38	Fina Ardarini, S.Pi., M.Si.	197701122002122002	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
39	Suryo Prasojo, S.T., M.Si., M.Sc.	197802072005021003	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
40	Fahrizal Ari Iwari, S.St.Pi., M.Si.	197701152005021002	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
41	Ifan Setiawan, S.St.Pi.	198306212010121002	Penata Tk. I / III d	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
42	Dhian Widiyani, S.Si.	198809292014032001	Peanata / III c	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
43	Indah Setya Murtihari, S.T., M.T.	196802212005022001	Pembina / IV a	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
44	Tia Maulida Nurbaiti, S.T.	199009222018012001	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	CLTN
45	Pria Wibawa Utama, S.I.K., M.Si.	104723	-	-	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Operator GIS	

46	Della Arimurti, S.Si.	107328	-	-	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP	
47	Cukup Pinem	198602022025211113	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota Tim Kerja Restorasi	P3K Paruh Waktu	
48	Eko Wibisono, S.T.	198203102015031001	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
49	Bagus Afrianto, S.T.	1988040820015031001	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
50	Marselius Fransiskus Talahatu, S.Pi., M.Si.	198611162008011002	Penata Muda Tk. I / III b	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS	
51	Oktanul Dinata, S.Pd.	199210272025211043	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Restorasi	P3K	
52	Aryo Styo Wibowo, S.T.	107330	-	-	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan	
53	Alvidita Beatrix Ondayani, S.I.K., M.Sc.	106963	-	-	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP	
54	Denny Bijaksana, S.E.	197712012009121001	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	
55	Anindya Arma Risanti, S.Si.	199512212020122003	Penata Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	
56	Amelia Setya Nur Kumala, S.Si.	199407262019022011	Penata Muda Tk. I / III b	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	CLTN
57	Astrid Marietadewi, S.Pi.	198503102010122001	Penata Tk. I / III d	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS	
58	Anandinta Permatasani, M.Si.	199307062025212061	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja MHAML	P3K	
59	Muhammad Arkan Prasidya, S.Kel.	101744	-	-	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Tenaga Ahli GIS	
60	Mahatma Alvinia Putri, S.Pi.	107331	-	-	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan	

61	Tiodor Sitinjak, M.Si.	196802241995032002	Pembina / IV a	penelaah teknis kebijakan	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
62	Gusrizal, S.E., M.A., M.Ec.Dev.	197508222006041002	Pembina / IV a	penelaah teknis kebijakan	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
63	Dwi Ismi Wulandari, A.Md.	198005102009122001	Penata Muda Tk. I / III b	Penata keuangan APBN Mahir	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
64	Mochammad Rizki Rohmatullah, S.Kom.	199307242020121003	Penata Muda Tk. I / III b	Pranata komputer Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
65	Didi Suhaendi	197904092007101003	Penata Muda / III a	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
66	Yono Haryono	197801282012121001	Pengatur Tk. I / II d	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS	
67	Apriani Nurlaela, S.E.	199804042024212006	IX	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K	
68	Angle Agata nender, S.Pi.	198606092025212047	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K	
69	Sumiarsih, S.E.	198109252025212021	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K	
70	Achmad Sulaiman, S.Kom.	199104222025211050	IX	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K	
71	Agung Aji Nugraha	199604252025211054	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K Paruh Waktu	
72	Agus Suparman	199008222025211081	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K Paruh Waktu	
73	Enday Maulana	197802202025211040	-	Pengelola Umum Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K Paruh Waktu	
74	Syarif Hidayat	198409252025211063	-	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K Paruh Waktu	

Keterangan: Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 14 Mei 2025 ([link](#)), ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K

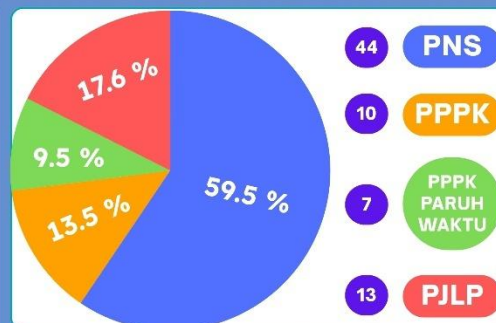
KONDISI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



JABATAN

PELP Ahli Utama	1
PELP Ahli Madya	8
PELP Ahli Muda	3
PELP Ahli Pertama	4
APJK Ahli Madya	4
APJK Ahli Muda	5
APJK Ahli Pertama	5
Surveyor Ahli Muda	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	1
Arsiparis Ahli Pertama	1
Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Pengadministrasi Perkantoran	2
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	8
Penata Layanan Operasional	7
Operator Layanan Operasional	4
Pengelola Umum Operasional	3

PEMBAGIAN KEPEGAWAIAN DIT.P3K



JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT P3K

LAKI-LAKI

66.2%

49 Orang

PEREMPUAN

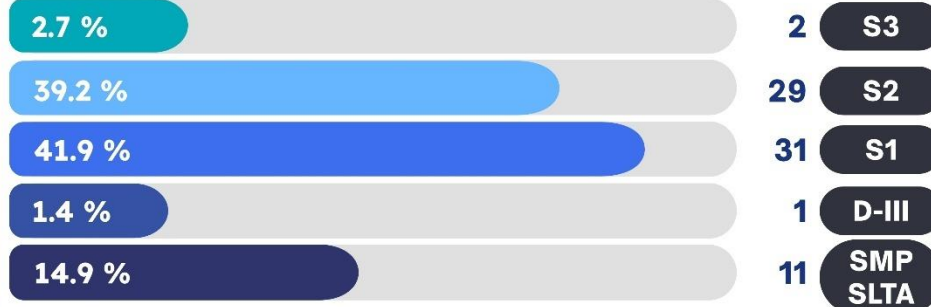
33.8 %

25 Orang

TOTAL PEGAWAI

74 ORANG

PENDIDIKAN



Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025

Pada kondisi per Desember 2025 jumlah pegawai yang terdaftar di direktorat pesisir dan pulau-pulau kecil berjumlah 74 Orang.



74 PEGAWAI

Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025

Pegawai Laki-laki masih mendominasi bila dibandingkan dengan pegawai Perempuan. Jumlah Laki-Laki sebanyak 49 Orang (49.66%) dan jumlah pegawai Perempuan sebanyak 25 orang (25.34%)



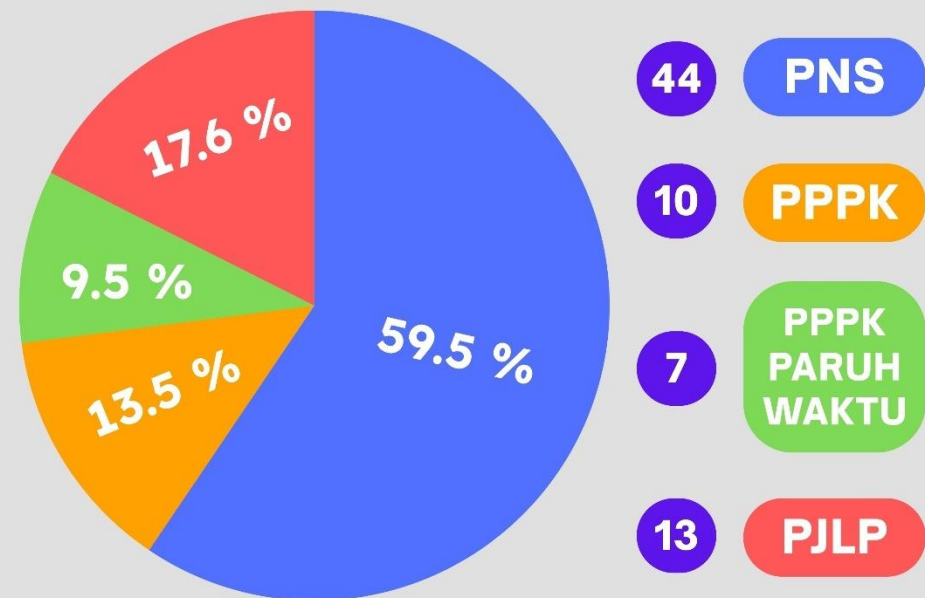
Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025



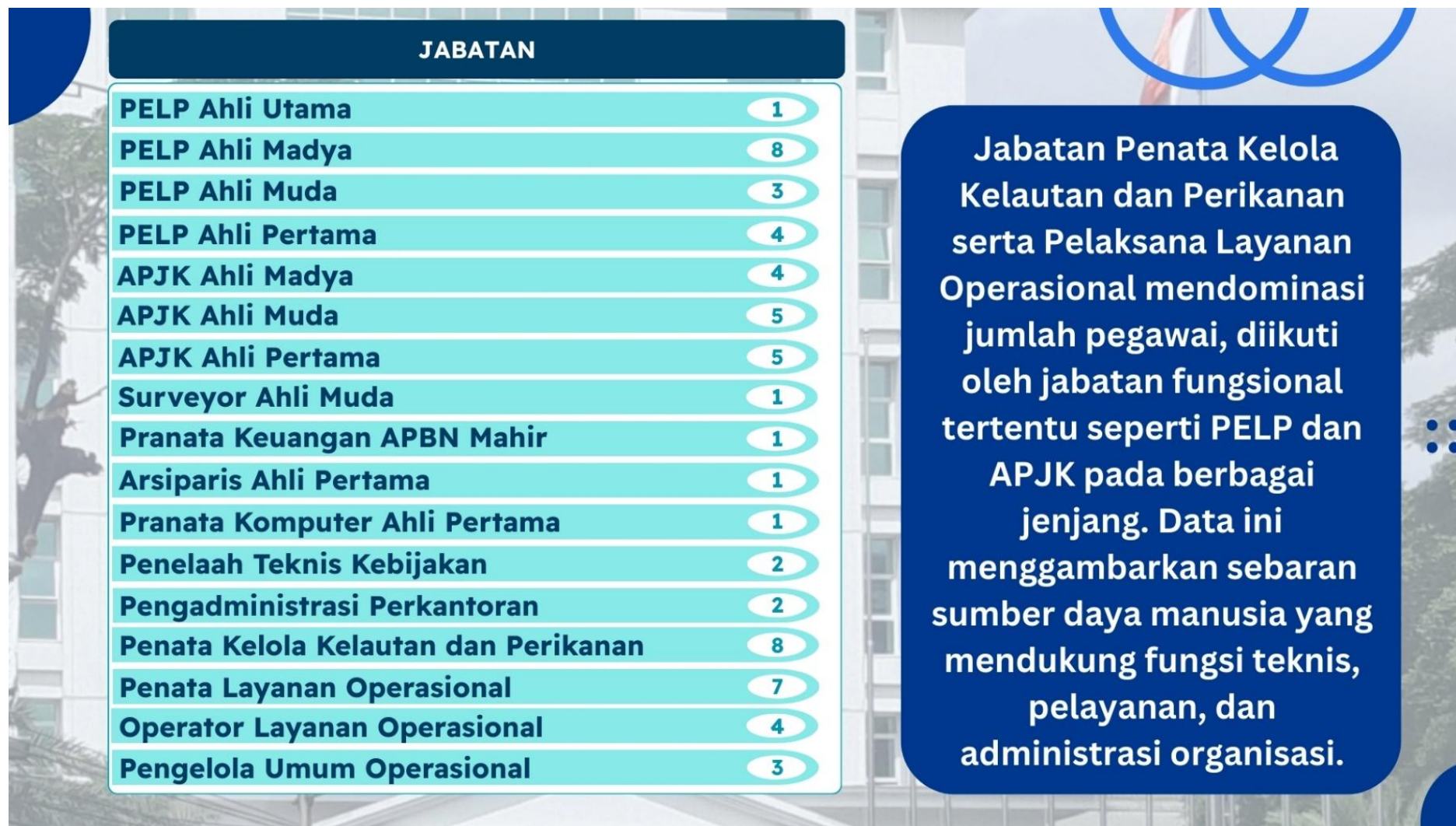
Mayoritas pegawai di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berpendidikan dengan 41,9% lulusan S1 dan 39,2% lulusan S2 serta 2,7% berpendidikan S3 yang menunjukkan kapasitas SDM yang kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan. Sementara itu, SMP/SLTA (14,9%) dan D-III (1,4%) berperan dalam mendukung fungsi operasional dan administratif.

Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025

Pada kondisi per Desember 2025 jumlah pegawai yang tergabung Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 44 Orang (59.5%) kemudian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu sebanyak 10 Orang (13.5%) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 7 Orang (9.5%) serta untuk PJLP sebanyak 13 Orang (17.6%)



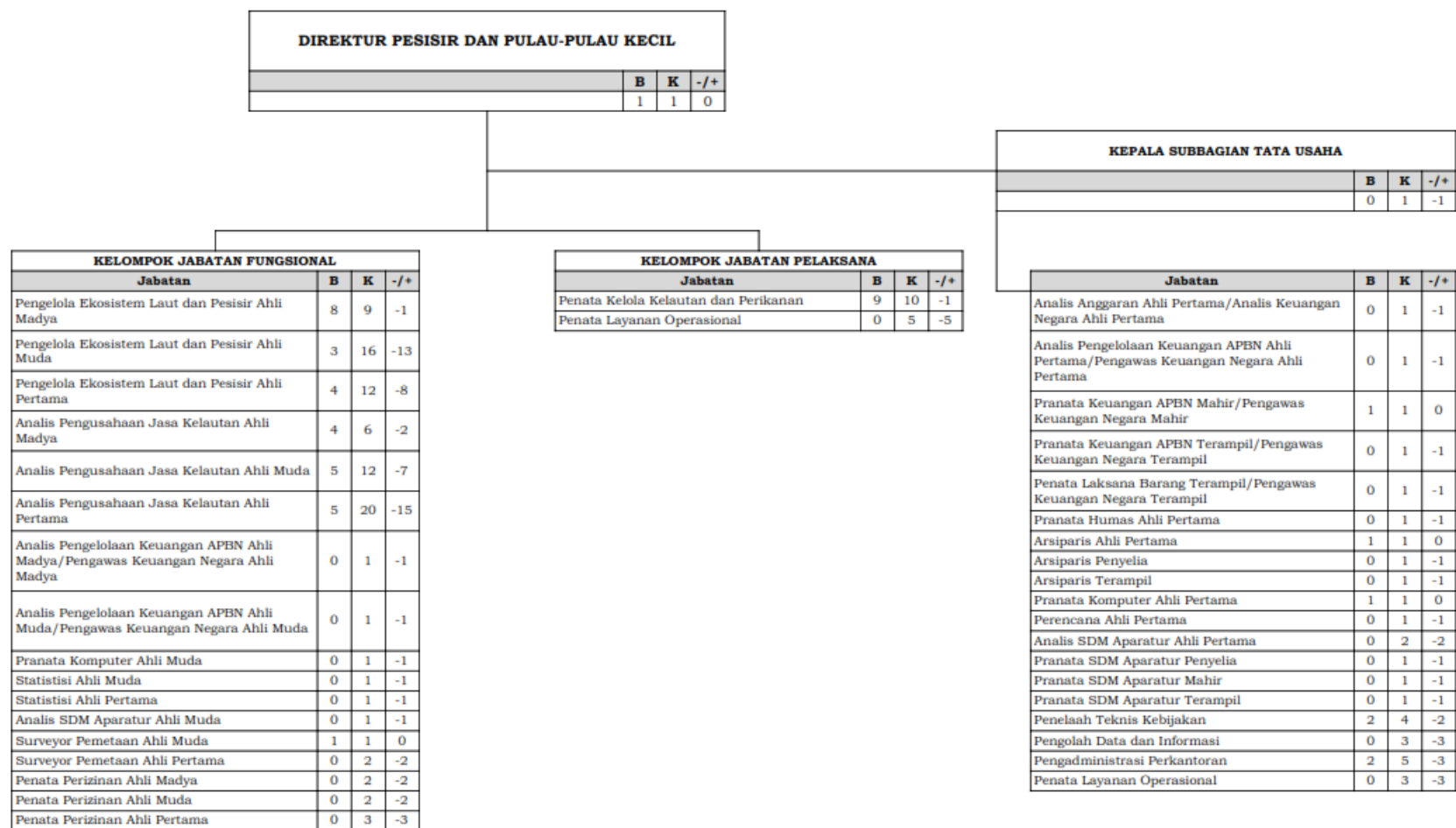
Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025



Sumber: Infografis Kondisi Kepegawaian Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025

Lampiran 7. Peta Jabatan Pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Lampiran 8. Penghargaan Yang Diterima Direktorat P3K Sampai Dengan 2025



Penghargaan 1.

Sertifikat ISO 9001:2015 tentang Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang Diterbitkan pada Tanggal 24 November 2025

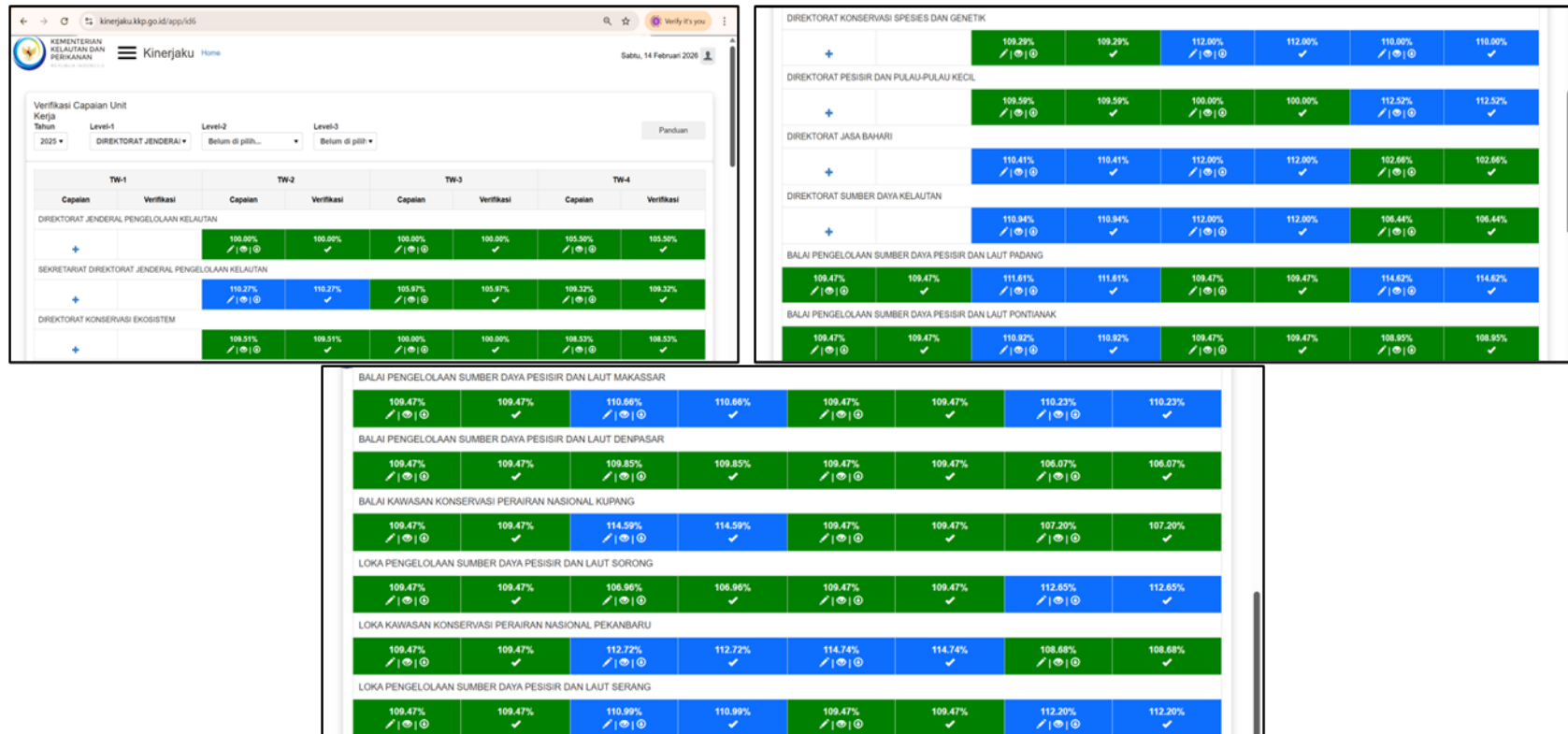


Penghargaan 2.

Sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang Diterbitkan pada Tanggal 24 November 2025

Penghargaan 3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025

Direktorat P3K menempatkan perolehan NKO tertinggi nomor 3, setelah BPSPL Padang (Nomor 1) & LPSPL Sorong (Nomor 2) di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan tahun 2025.



Unit	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	100.00%	✓	100.00%	✓	100.00%	✓	100.00%	✓
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	110.27%	✓	110.27%	✓	105.97%	✓	109.32%	✓
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM	108.51%	✓	108.51%	✓	100.00%	✓	108.53%	✓
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	109.29%	✓	109.29%	✓	112.00%	✓	112.00%	✓
DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	109.59%	✓	109.59%	✓	100.00%	✓	112.52%	✓
DIREKTORAT JASA BAHARI	110.41%	✓	110.41%	✓	112.00%	✓	102.60%	✓
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN	110.94%	✓	110.94%	✓	112.00%	✓	106.44%	✓
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG	109.47%	✓	109.47%	✓	111.61%	✓	114.62%	✓
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	109.47%	✓	109.47%	✓	110.92%	✓	108.95%	✓
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	109.47%	✓	109.47%	✓	110.66%	✓	110.23%	✓
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	109.47%	✓	109.47%	✓	109.85%	✓	106.07%	✓
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	109.47%	✓	109.47%	✓	114.59%	✓	107.20%	✓
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	109.47%	✓	109.47%	✓	106.96%	✓	112.65%	✓
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	109.47%	✓	109.47%	✓	112.72%	✓	108.68%	✓
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	109.47%	✓	109.47%	✓	110.99%	✓	112.20%	✓

Sumber: Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025 beralamat <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6>

Penghargaan 4. Piagam Penghargaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Lingkup DJPKRL

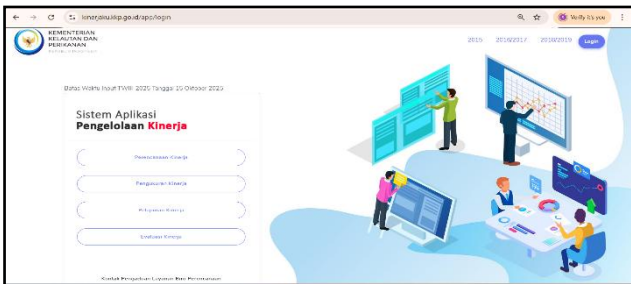
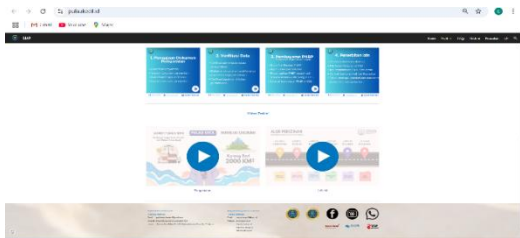


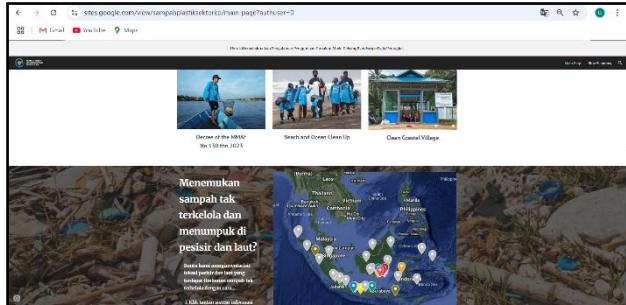
Sumber: Surat Nomor B.170/DJPK/RC.610/V/2025 Tanggal 7 Mei 2025 Hal Piagam Penghargaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Lingkup DJPKRL

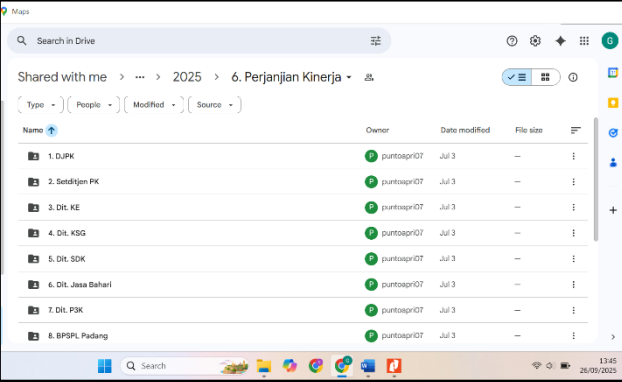
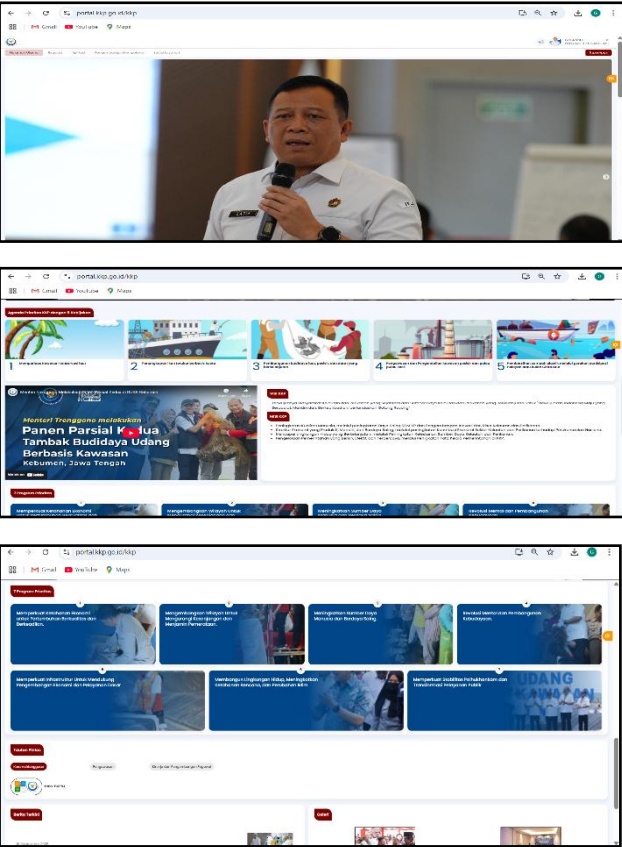


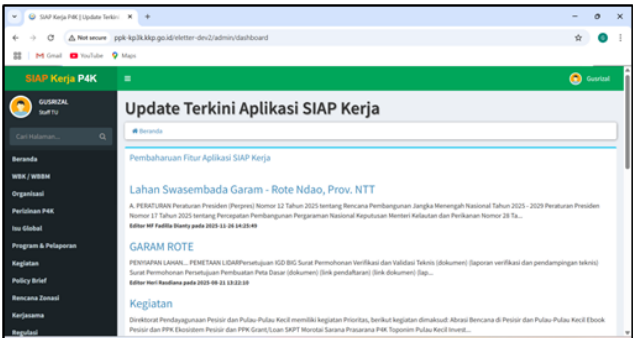
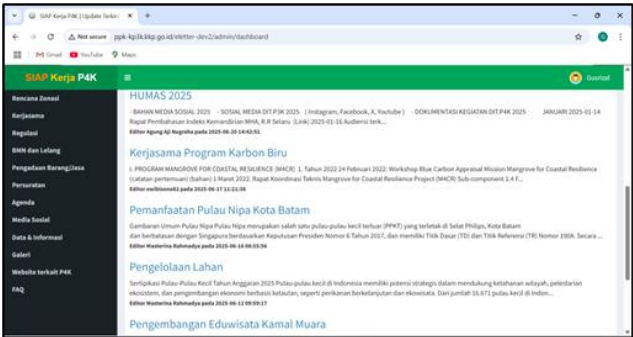
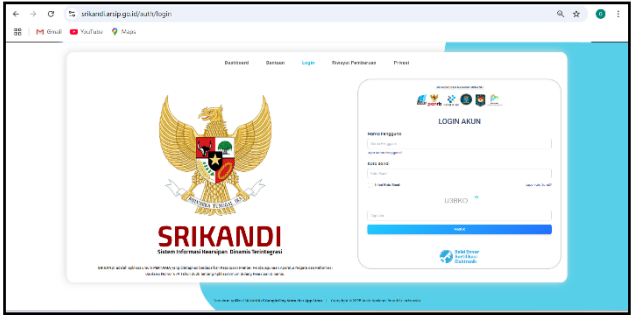
Lampiran 9. *Platform Digital* atau Aplikasi Pendukung Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Salah satu bentuk inovasi yang mendukung peningkatan kinerja organisasi di lingkungan KKP maupun Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah hadirnya *platform digital* maupun aplikasi yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
1.	Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (Aplikasi Kinerjaku) 	Aplikasi "Kinerjaku" adalah Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengukur dan melaporkan kinerja, yang dapat diakses melalui situs <i>website</i> sebagai berikut: http://kinerjaku.kkp.go.id/app/. Aplikasi ini digunakan untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan mengukur kinerja secara triwulanan. Fungsi Aplikasi Kinerjaku di KKP, antara lain: - Pengukuran Kinerja: Mengukur kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). - Pelaporan: Membantu dalam pelaporan kinerja triwulanan kepada atasan. - Monitoring Kinerja: Memantau capaian kinerja secara berkala, yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09), dan Desember (B12). Penggunaan aplikasi ini memerlukan data dukung capaian dari penanggung jawab kegiatan untuk dimasukkan ke dalam sistem.
2.	Small Islands Investment Application (SIAP) 	<i>Small Islands Investment Application</i> (SIAP) adalah <i>platform digital</i> inovatif yang berfungsi sebagai wadah informasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia dan dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Alamat <i>platform</i> SIAP sebagai berikut: https://www.pulaukecil.id/. <i>Platform digital</i> SIAP hadir memberikan Layanan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang diterbitkan oleh Menteri

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		Kelautan dan Perikanan yang terbagi 2 jenis perizinan yaitu : 1. Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (luas pulau <2000 km²) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) 2. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (luas pulau <100 km²). Pada laman <i>platform digital</i> SIAP terdapat menu Profil (berisi Tentang Kami, Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, Berita, dan Galeri), FAQ, Hotline, Pelacakan, dan Equivalent Node (EN). Selain itu, pada laman <i>platform digital</i> SIAP, terdapat Layanan Kami (berisi Regulasi, Sistem Informasi Geospasial, Persyaratan, Pengajuan, dan Simulasi PNBK), Alur Proses (Pengajuan Dokumen Persyaratan, Verifikasi Data, Pembayaran PNBK, dan Penerbitan Izin), dan Video Terkini (berisi Pengenalan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Alur Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil).
3.	Platform Digital Coastal and Marine Debris Data and Information  	<i>Coastal and Marine Debris Data and Information</i> merupakan <i>platform digital</i> yang dicoba dibangun guna membantu menginventarisasi lokasi pesisir dan laut yang terdapat timbunan sampah tak terkelola dengan cara: 1. Klik tautan sistem informasi geografis (tertera di <i>platform digital</i> tersebut). 2. Input lokasi, dokumentasi dan keterangan yang diperlukan. 3. Data dan informasi secara otomatis tersimpan. Selain itu, <i>platform digital</i> ini terdapat <i>Dashboard</i> Pelaporan Kepmen KP Nomor 130 tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam laman <i>dashboard</i> pelaporan ini juga terdapat Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut dalam mewujudkan ekonomi biru. Alamat sementara <i>platform digital</i> ini sebagai berikut: https://intip.in/sampahlaut. Namun demikian, nama <i>platform digital</i> ini mengalami perubahan nama menjadi “Sistem Informasi Sampah Laut” dan rencananya alamat <i>platform digital</i> ini akan diganti menjadi : https://sampahpesisirlaut.id

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		Keterangan : <i>Platform digital</i> ini akan terus di <i>upgrad</i> untuk penyempurnaan
4.	Platform SAKIP Berbasis Google Site 	<i>Platform SAKIP</i> berbasis <i>google site</i> ini meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. <i>Platform</i> ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) namun setiap satuan kerja (satker) lingkup DJPK baik satker pusat maupun satker UPT disediakan <i>folder</i> per masing-masing tema dalam SAKIP lalu mengunggah (<i>upload</i>) dokumen-dokumen terkait pengelolaan SAKIP (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja) ke dalam <i>folder</i> masing-masing satker per tema dalam <i>google site</i> tersebut.
5.	Portal Collaboration Office KKP 	<i>Portal collaboration office</i> KKP ada sejak tahun 2023 yang memuat berbagai modul seperti korespondensi, email, agenda, dan lainnya. Dokumen ini juga memberikan petunjuk penggunaan portal serta daftar nama pejabat terkait. Portal dapat diakses melalui laman https://portal.kkp.go.id/. Modul yang khusus tersedia untuk level Menteri, Eselon I, dan Eselon II lingkup pusat adalah <i>Dashboard</i>, <i>Preparing</i> dan <i>Sharing</i>, serta Kalender. Modul yang tersedia untuk seluruh pegawai adalah Korespondensi, <i>E-mail</i>, Kebijakan, Pengetahuan, <i>Digital Sign</i>, <i>Employee Self Service</i>, Agenda Rapat/<i>Event</i>, <i>Task Management</i>, Repositori, <i>Real Time Collaboration</i>, dan <i>Helpdesk</i>.

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
6.	Aplikasi SIAP KERJA  	Aplikasi SIAP KERJA mulai berlaku tahun 2019 hingga saat ini yang disediakan oleh Dit P4K atau Dit P3K dalam rangka memudahkan kebutuhan dokumen data dukung di lingkungan Dit P4K atau Dit P3K dimana dokumen data dukung ini berisi dokumen yang kegiatan atau aktivitas setiap Tim Kerja lingkup Dit P4K atau Dit P3K mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai kepada penyelesaian dan monitoring dan evaluasi. Alamat tautan (link) Aplikasi SIAP KERJA sebagai berikut: http://ppk-kp3k.kkp.go.id/eletter-dev2/admin/dashboard. Untuk mengakses aplikasi SIAP KERJA dibutuhkan <i>username</i> dan <i>password</i>. Bagi yang ingin mengakses aplikasi ini dapat menghubungi petugas pegawai yang di tunjuk oleh Direktur P4K atau Dit P3K. Penerima Manfaat: Internal Dit P4K atau Dit P3K (Pimpinan serta Para Ketua Tim Kerja dan pegawai Lingkup Dit P4K atau Dit P3K)
7.	Aplikasi Umum "SRIKANDI" 	Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Aplikasi Srikandi adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang merupakan aplikasi umum bidang kearsipan untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah mendukung pengelolaan arsip elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat menciptakan memori kolektif bangsa. Aplikasi ini dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara ANRI, KemenPAN-RB, Kemenkominfo, dan BSSN. Tujuan Utama Aplikasi SRIKANDI sebagai berikut: Mewujudkan SPBE:

No.	Platform / Aplikasi Pendukung Kegiatan	Keterangan
		Mendukung pengelolaan arsip berbasis digital sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. b. Meningkatkan Kualitas Kearsipan: Memberikan peningkatan kualitas dan keandalan dalam pengelolaan arsip dinamis di seluruh instansi pemerintah. c. Menciptakan Efisiensi: Mempermudah proses administrasi pemerintahan, termasuk pembuatan surat menyurat, verifikasi, klasifikasi, hingga pemusnahan arsip secara elektronik. d. Integrasi Antar Instansi: Memfasilitasi akses dan komunikasi terpadu antar lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. e. Program Nasional: Ditetapkan sebagai aplikasi umum wajib yang harus diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah. Fungsi dan Manfaat Aplikasi SRIKANDI sebagai berikut: a. Pengelolaan Arsip Elektronik: Mengelola arsip elektronik secara digital, menggantikan kebutuhan akan kertas dan lemari arsip fisik. b. Akses Mudah: Dapat diakses melalui browser dengan mengunjungi laman resminya di srikandi.arsip.go.id. c. Standarisasi Format: Membantu standarisasi format surat elektronik untuk menjaga konsistensi dan profesionalisme. d. Keamanan Data: Menjamin kerahasiaan surat-surat dinas yang masuk melalui aplikasi. e. Efisiensi Anggaran: Mengurangi penggunaan kertas dan biaya pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor). Keterangan : Aplikasi SRIKANDI di KKP khususnya di Ditjen PK hanya untuk pejabat eselon 1 dan 2 saja, sedangkan di pegawai belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2024). *Kementerian PPN sebut pemanfaatan teknologi solusi atasi sampah*. <https://www.antaranews.com/berita/3939579/kementerian-ppn-sebut-pemanfaatan-teknologi-solusi-atasi-sampah>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Indonesia-AS dukung reformasi pengelolaan sampah nasional tingkatkan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/indonesia-as-dukung-reformasi-pengelolaan-sampah-nasional-tingkatkan-kesehatan-masyarakat-dan-keberlanjutan-lingkungan-Vf6Uo>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta1/id/pojok-zona-integritas/2910-sistem-manajemen-mutu-iso-9001-2015-dan-iso-smap-37001-2016.html>
- Deutsche Welle. (2019, Oktober 25). *Parlemen Eropa larang plastik sekali pakai mulai 2021*. <https://www.dw.com/id/parlemen-eropa-larang-plastik-sekali-pakai-mulai-2021/a-48099233>
- European Commission. (2025, Mei 15). *Improving coastal and marine environment with a Zero Pollution Action Plan [OceanAction46832]*. United Nations Sustainable Development Goals Partnerships Platform. <https://sdgs.un.org/partnerships/improving-coastal-and-marine-environment-zero-pollution-action-plan>
- Gumilar, M. G. (2019). *Inovasi pemerintahan daerah Jogja Smart Service dalam menciptakan smart and liveable city di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Gama Societa*, 3(1), 19–27.
- Kementerian Kehutanan. *Article 6*. <https://www.kehutan.go.id/news/article-6>
- Kementerian Kehutanan. *Mangrove Festival 2025: Indonesia perkuat konsolidasi nasional rehabilitasi ekosistem mangrove*. <https://www.kehutan.go.id/news/mangrove-festival-2025-indonesia-perkuat-konsolidasi-nasional-rehabilitasi-ekosistem-mangrove>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. *Pengelolaan sampah yang efektif bergantung pada data yang akurat*. <https://kemenlh.go.id/news/detail/pengelolaan-sampah-yang-efektif-bergantung-pada-data-yang-akurat>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025). *KLH BPLH tegaskan arah baru menuju Indonesia bebas sampah 2029 dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2025* [Siaran pers]. <https://www.kemenlh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arah-baru-menusu-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025). *KLH/BPLH matangkan aturan pengelolaan sampah organik perkuat ketahanan pangan dan energi* [Siaran pers]. <https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-matangkan-aturan-pengelolaan-sampah-organik-perkuat-ketahanan-pangan-dan-energi>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025, Oktober 14). *Presiden tetapkan Perpres 109/2025: Langkah nyata atasi sampah perkotaan*. <https://kemenlh.go.id/news/detail/presiden-tetapkan-perpres-1092025-langkah-nyata-atasi-sampah-perkotaan>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025, Oktober 14). *Pulihkan 769 ribu hektare mangrove, Menteri LH konsolidasikan aksi nasional melalui Rakornas dan penanaman di Mempawah*. <https://kemenlh.go.id/news/detail/pulihkan-769-ribu-hektare->

[mangrove-menteri-lh-konsolidasikan-aksi-nasional-melalui-rakornas-dan-penanaman-di-mempawah](#)

Low Carbon Development Initiative Indonesia. (2024, 1 Februari). *Bappenas dan Pemerintah Jerman rekomendasikan reformasi pengelolaan sampah*. <https://lcdi-indonesia.id/2024/02/01/bappenas-dan-pemerintah-jerman-rekomendasikan-reformasi-pengelolaan-sampah>

Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan Bali-Nusa Tenggara. (2024). *Sosialisasi Permen LHK No. 1/2024 dan No. 9/2024*. <http://ppebalinusra.menlhk.go.id/sosialisasi-permen-lhk-no1-2024-dan-no-9-2024/>

The Conversation. (2025). *Mengapa target 70% pengurangan sampah plastik laut pada 2025 sulit tercapai*. <https://theconversation.com/mengapa-target-70-pengurangan-sampah-plastik-laut-pada-2025-sulit-tercapai-261479>

Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. *Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut*. <https://sampahlaut.id/>

Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Kelautan dan Perikanan. (2025). *Krisis sampah plastik dan arah kebijakan lingkungan 2025: Dari daratan hingga lautan Nusantara*. <https://agridigi.fkp.unesa.ac.id/post/krisis-sampah-plastik-dan-arrah-kebijakan-lingkungan-2025-dari-daratan-hingga-lautan-nusantara>

Waste4change [@waste4change]. (2025, Oktober). *Langkah menuju ekonomi sirkular kini makin jelas lewat terbitnya SK Nomor 2569 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Organik* [Instagram post]. https://www.instagram.com/p/DQtpzoKk0gk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTlwNjQ2YQ==